

## **Kearifan lokal dalam menghadapi Covid-19: Studi kampung tangguh di Jawa Timur**

### *Local wisdom in facing Covid-19: Study of resilient kampong in East Java*

**<sup>1</sup>Yusrin Rahmawati, <sup>2</sup>Farah Fadillah Anugrah S., <sup>3</sup>Erva Mutiara Hati, <sup>4</sup>Ali Roziqin**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: <sup>1</sup>yusrinrahma99@gmail.com, <sup>2</sup>farahfadillah1999@gmail.com, <sup>3</sup>ervamutiara01@gmail.com, <sup>4</sup>ali\_roziqin@ymail.com.

#### **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has hit the world for a year, and in early-mid 2021 the positive number of Covid-19 in Indonesia is still high. As a country that has a rich culture, Indonesia needs to make efforts to overcome Covid-19 by maximizing local wisdom in each region. The government itself has also issued policies related to the tough village program, in which villages are required to be able to create innovations or make maximum use of local wisdom to reduce the number of people who are confirmed positive for Covid-19. The handling of Covid-19 through a tough village based on local wisdom is a new variation and is considered effective because it is more accepted by rural communities and can help the government in efforts to break the chain of the spread of the Covid-19 Virus. In writing this article, this type of research uses narrative analysis with a literature study approach and a systematic review. While the purpose of writing the article is to provide a new variation that is more accepted by the community in the effort to overcome Covid-19 through the resilient kampong program and local wisdom.*

*Keywords: Covid-19, Resilient Kampong, Local Wisdom.*

#### **ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 telah satu tahun melanda dunia. Pada awal-pertengahan 2021 angka positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Sebagai negara yang mempunyai kekayaan budaya, Indonesia perlu melakukan upaya penanggulangan Covid-19 dengan memaksimalkan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan terkait program kampung tangguh, di mana dalam program tersebut Desa dituntut agar mampu menciptakan inovasi atau memanfaatkan kearifan lokal secara maksimal untuk dapat mengurangi penduduk yang terkonfirmasi positif Covid-19. Penanggulangan Covid-19 melalui kampung tangguh yang berbasis kearifan lokal ini menjadi variasi baru dan dinilai efektif karena lebih diterima oleh masyarakat desa dan dapat membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian analisis naratif dengan pendekatan studi literatur dan tinjauan sistematis. Sementara itu, tujuan dari penulisan artikel yaitu untuk memberikan variasi baru yang lebih diterima oleh masyarakat dalam upaya penanggulangan Covid-19 melalui program kampung tangguh dan kearifan lokal.

**Kata Kunci:** Covid-19, Kampung Tangguh, Kearifan Lokal.

#### **PENDAHULUAN**

Krisis kesehatan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sudah hampir satu tahun melanda dunia. Beberapa negara di kawasan Asia tenggara memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam merespons pandemi Covid-19 (Yazid & Lie, 2020). Meskipun demikian, pada awal-pertengahan 2021 angka positif Covid-19 di Indonesia khususnya

di Jawa Timur masih terus meningkat (Yanuarita & Haryati, 2021). Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang heterogen, sehingga penanganan Covid-19 yang dilakukan di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masing-masing daerah sesuai status bahayanya

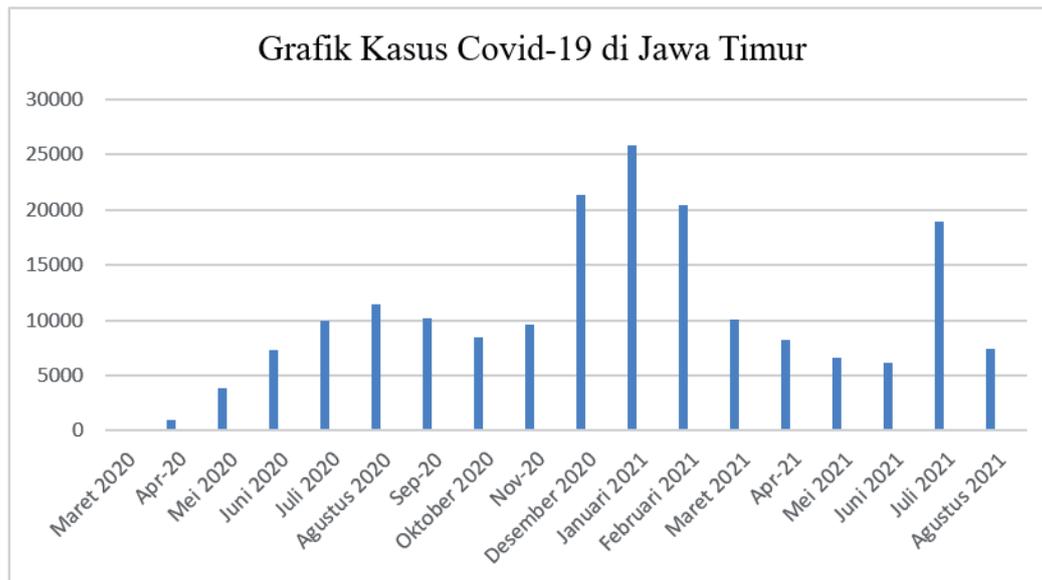
DOI:

Naskah Masuk:

Revisi akhir:

Diterima:





Sumber: Data Pemprov Jatim

**Gambar 1.** Grafik Kasus Positif Covid-19 di Jawa Timur (dari Maret 2020–September 2021)

(Dzakwan, 2020). Seperti contoh di Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah tertinggi dengan total kasus positif Covid-19 sebanyak 394.355 kasus, total sembuh sebesar 362.610 pasien, dan total meninggal sebesar 29.345 pasien (Kurniati, 2021). Dapat dilihat peningkatan kasus positif Covid-19 pada Gambar 1.

Tingginya kasus positif Covid-19 di Jawa Timur sendiri disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan lemahnya kebijakan kesehatan terkait penanganan wabah Covid-19 di Jawa Timur (Isfandiari, 2020). Pada dasarnya pemerintah memang tidak bisa menghindari dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 di segala sektor (Anderson et al., 2020). Sebenarnya pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan Covid-19 mulai dari edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan, mengeluarkan kebijakan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta mengeluarkan kebijakan penanggulangan Covid-19 dari lingkup terkecil yaitu desa melalui program kampung tangguh yang dikampanyekan oleh Kapolda Jawa Timur (Imran, 2020).

Dalam penanggulangan Covid-19 memang diperlukan adanya kolaborasi antar *stakeholders* yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu Desa. Karena Desa merupakan benteng pertahanan

terakhir. Dengan jumlah Desa/Kelurahan di Jawa Timur sebanyak 8.501 (BPS, 2019) dan jumlah penduduk 40,67 jiwa (BPS, 2020) tentunya memiliki keunikan atau kearifan lokal yang berbeda-beda di setiap daerah. Upaya penanggulangan Covid-19 melalui Program kampung tangguh dapat membentuk *Community Policing* di tengah masyarakat yang berbasis *Problem Solving* dan melibatkan semua warga tanpa terkecuali dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal (Habibullah, 2013). Karena dalam penanggulangan virus Covid-19 memerlukan penerapan konsep partisipasi dan kepedulian pada elemen masyarakat sehingga dari berbagai perbedaan yang ada mampu dijadikan sebagai suatu kesatuan dalam membangun ketahanan nasional secara substantif. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk dapat memulai pola hidup baru dengan menerapkan kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan yang berbasis kearifan lokal (Rumilah et al., 2020).

Sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, banyak masyarakat Indonesia menggunakan kearifan lokal untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi (Nugraha, 2020). Seperti yang terjadi di Jawa, adanya pandemi Covid-19 sering di sebut dengan istilah *pageblug*. *Pageblug* akan membawa dampak yang dan membuat masyarakat Jawa mulai mencari pertanda atau *tetenger* untuk dapat mengantisipasi terjadinya *pageblug*. Masyarakat Jawa membaca

pertanda melalui *ilmu titen* yaitu ilmu tradisional Jawa berupa kepekaan terhadap tanda-tanda atau ciri-ciri alam, dan jika terdapat suatu kejadian di luar kebiasaan akan dianggap sebagai pertanda akan terjadinya sesuatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu seperti *pageblug* atau wabah penyakit. Setelah menemukan pertanda atau *tetenger* masyarakat mulai melakukan ritual-ritual adat yang disebut sebagai *tolak balak* guna mengurangi risiko yang diakibatkan dari adanya *pageblug*. Ritual-ritual yang dilakukan di antaranya doa bersama, jamasan pusaka atau pembersihan pusaka daerah, mengonsumsi sayur lodeh tujuh warna yang dipercaya oleh masyarakat dapat terhindar dari wabah. Sayur lodeh tujuh warna tersebut terdiri dari kluwih, kacang panjang, terong, kulit melinjo, labu, daun melinjo muda, dan tempe. Serta membuat dan menyemprotkan disinfektan dari bahan-bahan alami (Rumilah et al., 2020).

Penerapan program kampung tangguh dinilai cukup relevan dengan kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Karena program kampung tangguh ini berbasis komunitas warga sekitar di mana seluruh masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Habibullah, 2013). Dalam penerapan program kampung tangguh sendiri diperlukan adanya kerja sama antar masyarakat seperti budaya *jogo tonggo* yaitu suatu kebijakan percepatan penanganan Covid-19 yang berbasis masyarakat di tingkat RW, karena warga merupakan garda terdepan dalam melawan Covid-19 (Sulistiani & Kaslam, 2020). Sehingga peran antara pemerintah dengan warga sangatlah penting. Dengan diberlakukannya kebijakan *Jogo Tonggo* ini, nantinya setiap anggota memiliki tugas dan perannya masing-masing. Tugas yang dijalankan seperti Mendata setiap orang yang keluar/masuk desa; Membawa orang yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ke rumah sakit rujukan di daerah tersebut; Memastikan serta meng-*update* perkembangan data warga yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP); Mengupayakan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) melakukan karantina

mandiri selama 14 hari; Melakukan pengawasan dan mengecek lokasi-lokasi strategis tersedia tempat cuci tangan; Melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin; Hingga memastikan warga yang keluar rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, memberikan pelayanan kesehatan, mendorong praktik untuk selalu hidup bersih dan sehat, dan berkoordinasi dengan satgas atau yang bertugas pada bidang kesehatan tingkat desa untuk pemeriksaan lanjut apabila ada kondisi yang darurat. Oleh karena itu, program kampung tangguh ini perlu digalakkan di berbagai daerah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari lingkup terkecil yaitu desa dan warga sekitar. Karena penanggulangan Covid-19 dengan kearifan lokal akan membawa variasi baru dan lebih di terima oleh masyarakat.

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian analisis naratif (Creswell et al., 2007) dengan pendekatan studi literatur dan tinjauan sistematis. Tinjauan sistematis merupakan sebuah jenis tinjauan literatur yang dilakukan dengan cara menggunakan metode-metode sistematis untuk mengumpulkan data sekunder, melakukan kajian-kajian riset, dan mengumpulkan temuan-temuan secara kualitatif dan kuantitatif (Liberati et al., 2009). Sementara itu, data sekunder sendiri merupakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis dan diperoleh dari artikel jurnal nasional maupun internasional yang telah terakreditasi, dokumen atau laporan resmi dari instansi pemerintah, serta media *online* yang relevan dengan Kearifan lokal dalam menghadapi Covid-19. Data tersebut diperoleh melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Kearifan Lokal”, “Covid-19”, “Pandemi”, “Local Indigenous”, “Java Culture” dan “Local Wisdom”. Fokus kajian peneliti dilakukan di beberapa wilayah desa terutama di Jawa Timur, karena Jawa Timur merupakan daerah yang dinilai memiliki angka persebaran Covid-19 yang tinggi. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki beberapa nilai-nilai luhur atau kearifan lokal yang unik dan masih banyak dipercaya dan diterapkan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut. Hal

tersebut dikarenakan dengan adanya keunikan terkait budaya dan nilai-nilai luhur atau kearifan lokal yang dimiliki oleh beberapa daerah dinilai dapat membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk memberikan variasi baru yang lebih diterima oleh masyarakat dalam upaya penanggulangan Covid-19 melalui program kampung tangguh dan kearifan lokal.

## PEMBAHASAN

### Kearifan Lokal dan Covid-19

Tingginya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia diakibatkan karena krisis komunikasi di masyarakat dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hidup sehat (Supriyanto, 2020). Sebenarnya berbagai bentuk kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Melalui penerapan pola hidup yang baru pada kalangan masyarakat serta mengubah pola pikir masyarakat agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan (Supriyanto, 2020). Namun, mendisiplinkan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut masih sulit dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Padahal sebenarnya kunci keberhasilan lepas dari pandemi Covid-19 adalah kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 (Vellingiri et al., 2020).

Indonesia sendiri merupakan negara dengan berbagai keragaman budaya, baik suku, bahasa, ataupun kearifan lokal yang berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya sesuai dengan kondisi pada tiap daerah. Berbicara tentang budaya dan masyarakat sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dapat dimaksimalkan dengan menggunakan basis kearifan lokal pada masing-masing daerah (Supriyanto, 2020). Pada umumnya kearifan lokal menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi, karena

mengandung norma dan nilai dalam mengatur, mengembangkan, dan memelihara keseimbangan antara alam, kebutuhan manusia, dan gaya hidup (Lestari & Sularso, 2020). Nilai yang tertanam dalam kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur untuk membentuk kegiatan masyarakat dan dapat digunakan sebagai sistem pengendalian permasalahan dalam kehidupan (Lestari & Sularso, 2020).

Kearifan lokal bukan hanya tradisi atau ciri lokalitas semata, akan tetapi nilai tradisi yang memiliki daya guna tersendiri dalam mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal didambakan oleh masyarakat terlebih saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 (Supriyanto, 2020). Kearifan lokal sangat penting diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 karena dalam prinsip kearifan lokal yang tertanam salah satunya yaitu kebersamaan yang mana merupakan jantung utama sebuah budaya dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik (Saleh Al-Omouh et al., 2020). Kearifan lokal dapat berjalan dengan tiga cara yaitu *togetherness* yang menyediakan prinsip "*in care of community*" sebagai landasan ideologi, spiritualitas yang merupakan wujud dari semangat untuk melawan ancaman dari peradaban dengan mengubah kearifan lokal menjadi kearifan kolektif. *Moral Code* yang menempatkan budaya dan agama sebagai landasan "*code of conduct*" yang menjamin kehidupan bersifat adil, gotong royong, dan berorientasi pada kemajuan munculnya protokol-protokol atau SOP pada kalangan masyarakat. Contoh kearifan lokal yang terjadi pada masa lalu yaitu budaya menyiapkan bejana berisi air bersih di depan rumah, serta mewajibkan seluruh anggota keluarga untuk mencuci tangan dan kaki setelah bepergian agar terhindar dari penyakit "sawan" yang ternyata juga menjadikan sebuah budaya di saat Pandemi Covid-19 terjadi dan terus digalakkan sebagai upaya untuk menanggulangi Covid-19 dengan mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir (Supriyanto, 2020).

Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal mampu melatih masyarakat dalam mengenal lingkungan sekitar, mengenal keanekaragaman budaya lokal, sehingga masyarakat lebih menghargai satu sama lain, menerima berbagai keragaman suku budaya,

serta menumbuhkan rasa toleransi, *tepo seliro*, jujur, dan lebih peduli terhadap keadaan yang saat ini terjadi yaitu pandemi Covid-19 (Saleh Al-Omouh et al., 2020). Kearifan lokal menjadi solusi yang tepat untuk penanggulangan Covid-19 dengan memunculkan ide atau gagasan secara bersama, mampu dipraktikkan oleh masyarakat dan lebih diterima. Karena kearifan lokal mengajarkan untuk selalu peka dengan kondisi lingkungan sekitar (Supriyanto, 2020).

Sehingga dalam penerapan adaptasi baru, masyarakat perlu diedukasi secara persuasif dengan pendekatan kearifan lokal (Lestari et al., 2020). Melalui pendekatan inilah masyarakat akan diajak untuk berpikir terhadap kondisi yang tengah dihadapi saat ini. Misalnya, peduli terhadap lingkungan, menerapkan kedisiplinan pada diri sendiri, berempati serta bersama-sama mencari solusi dari akar permasalahan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ada dengan menerapkan protokol kesehatan yang merupakan *moral code* dan menjadi aturan dalam masyarakat serta pemerintah sebagai landasan “code of conduct” yang menjamin kehidupan bersama bersifat adil, gotong royong, dan berorientasi terhadap kemajuan dalam proses penyelesaian suatu masalah yaitu pandemi Covid-19 (Supriyanto, 2020).

Selain itu, dengan penerapan kebiasaan baru pada pola hidup masyarakat, tentunya masyarakat harus dapat hidup berdampingan dengan wabah Covid-19. Masyarakat harus mampu mendisiplinkan diri dalam penerapan kebiasaan baru yang tengah dijalankan seluruh kalangan serta dituntut untuk lebih hidup bersih dan sehat yaitu kebiasaan mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak, menjahui kerumunan, mengurangi mobilitas sosial, melakukan etika batuk dan bersin, berjemur di bawah terik matahari saat pagi hari, mandi setelah beraktivitas di luar rumah, serta mengonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti buah dan sayur (Supriyanto, 2020). Kedisiplinan dalam menerapkan hidup sehat sesuai dengan protokol harus dilakukan secara konsisten (Vellingiri et al., 2020). Karena dengan adanya konsistensi dari masyarakatlah yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan menjadi

budaya dan perilaku hidup yang lebih sehat agar pandemi Covid-19 segera berlalu (Vellingiri et al., 2020). Bahkan, pemerintah membuat tag line yaitu “berubah usir wabah” dimana tag line tersebut memiliki sebuah makna penting bahwa perubahan adalah suatu kepastian, dan menjadikan kesempatan dari adanya pandemi Covid-19 menjadi kesempatan untuk berpikir global dalam melakukan aksi perubahan pola hidup yang lebih sehat dan bersih dimulai dari lingkup terkecil dan mengedepankan kearifan lokal dalam penanggulangan atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya Jawa Timur (Supriyanto, 2020).

### **Kearifan Lokal dalam Kampung Tangguh**

Melihat kondisi Indonesia dengan angka penyebaran Covid-19 yang masih tinggi, pemerintah daerah mulai melakukan pergerakan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 melalui Program Kampung Tangguh (Solichah, 2020). Dalam penerapan Program Kampung Tangguh memerlukan komitmen dari masyarakat untuk mematuhi segala aturan serta kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penanggulangan Covid-19 melalui Program Kampung Tangguh dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Kearifan lokal atau disebut dengan *local wisdom* merupakan suatu gagasan lokal yang memiliki sifat bijaksana, penuh kearifan serta memiliki nilai yang tertanam bagi masyarakat setempat yang menganutnya (Saleh Al-Omouh et al., 2020). Kearifan lokal bisa disebut juga sebagai suatu identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa, yang mana bangsa tersebut mampu menyerap hingga mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain (Rumilah et al., 2020). Identitas dan kepribadian yang tertanam pada masyarakat tentu menyesuaikan dari sudut pandang hidup masyarakat supaya tidak timbul pergeseran nilai-nilai radikal. Kebudayaan Jawa sebagai subkultur suatu kebudayaan nasional Indonesia, telah tertanam hingga mengakar selama bertahun-tahun serta menjadi pandangan hidup dan sikap hidup orang Jawa.



Sumber: (KampoengNgawi, 2020)

**Gambar 2.** Ritual Jamasan Pusaka

Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang tersebar di berbagai pulau, sehingga menimbulkan banyak kearifan lokal yang tertanam. Bahkan dalam satu suku yang sama terdapat kearifan lokal yang berbeda. Hal ini dikarenakan dari perbedaan wilayah dan kondisi dari daerah tersebut. Termasuk dalam cara menangani wabah atau biasa disebut dengan *pageblug*, masyarakat Jawa melakukan kegiatan tradisi yang dipercayai mampu menghilangkan wabah covid 19 ini (Nugraha, 2020). Kearifan lokal yang dijadikan sebagai suatu pandangan hidup masyarakat Jawa dengan sebutan mitologi, yaitu kearifan lokal yang muncul dari masyarakat Jawa. Mitologi pada masyarakat memiliki fungsi yang sakral, yaitu sebagai pengendalian moral, menjamin keberlangsungan ritual, hingga mengatur perilaku serta pikiran banyak khalayak pendukungnya dalam menanggapi dan memahami alam semesta. Fungsi dari kearifan lokal mitologi ini yaitu memberikan pengetahuan tentang dunia kepada masyarakat Jawa. Pengetahuan tradisional terkait alam sekitar merupakan suatu pengetahuan yang tumbuh sebagai wujud respons terhadap gejala-gejala alam yang dialami sebagai bentuk pengalaman dalam hidup (Hasim, 2012).

Hal ini dibuktikan bahwa dengan keberadaan kearifan lokal di tengah masyarakat tradisional di Indonesia merupakan suatu bentuk alternatif dalam mencegah bencana ataupun dalam penanganan pascabencana, sehingga keberadaan kearifan lokal sendiri memiliki peran yang

penting dalam memitigasi bencana yang tengah terjadi di Indonesia (Prasetyo, 2019). Manfaat dari adanya kearifan lokal dalam memitigasi bencana disebut dengan “pendekatan kultural” (Triana et al., 2017). Pandemi Covid-19 dalam istilah Jawa disebut dengan *pageblug*, masyarakat Jawa mendefinisikan *pageblug* sebagai peristiwa adanya penyakit massal yang menjangkit orang dengan jumlah yang tinggi. Masyarakat Jawa yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal sering melakukan ritual-ritual kebudayaan lokal agar terhindar dari bahaya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, masyarakatnya melakukan ritual adat Jawa yaitu “*Jamasan Pusaka*”. *Jamasan* memiliki arti mencuci atau membersihkan sesuatu yang biasanya dilakukan tiap satu tahun sekali pada saat bulan Sura, sedangkan *pusaka* yang artinya harta benda peninggalan nenek moyang atau leluhur. Tradisi *Jamasan Pusaka* menjadi sebuah ritual yang bersifat spiritual guna mengendalikan efek dari adanya pandemi Covid-19. Karena ritual *Jamasan Pusaka* ini merupakan suatu wujud harapan serta doa agar daerahnya dijauhkan dari segala mara bahaya yang mengancam. Banyak bentuk senjata pusaka yang dianggap sakral, menjadi suatu ciri khas dari setiap daerah, bukan hanya keris, namun juga ada tombak, pedang dan lain sebagainya (Priambadi & Nurcahyo, 2018).

*Jamasan Pusaka* ini juga memerlukan banyak bahan yang merupakan menjadi syarat berjalannya ritual. Bahan-bahan yang digunakan

dalam proses berjalannya ritual jamasan pusaka ini antara lain:

1. Bunga setaman yang mana terdiri dari lima jenis bunga, seperti bunga mawar merah, melati, mawar putih atau *kanthil*.
2. Minyak wangi yang berbahan dasar dari kayu cendana atau bisa juga dengan bunga melati.
3. Jeruk nipis atau belimbing wuluh.
4. Baki atau nampan sebagai wadah.
5. Kemenyan atau dupa ratus.
6. Kain kafan atau bisa dengan kain mori.
7. Tikar dan sikat gigi yang baru

Pada umumnya pelaksanaan upacara ritual Jamasan Pusaka ini juga memiliki tahapan yang harus dijalankan, yaitu:

1. Tahap pengambilan pusaka yang disimpan pada tempat tertentu
2. Tahap tirakat (bersemedi)
3. Tahap arak-arakan
4. Tahap pemandaian atau jamasan pusaka

Proses mencuci pusaka ini tidak tertutup, yang artinya boleh diperlihatkan pada publik, bahkan banyak yang ikut serta menghadiri ritual ini. Banyak juga masyarakat yang memperebutkan air yang menetes pada suatu pusaka yang telah dijamasi. Dalam ritual ini terlihat nilai kebersamaan yang tecermin dari berkumpulnya sebagian besar masyarakat dalam suatu tempat. Sedangkan nilai ketelitian tecermin dari proses berjalannya upacara itu sendiri. Sebagai suatu proses, ritual upacara jamasan pusaka ini memerlukan persiapan, baik sebelum ritual, pada saat prosesi, hingga sesudahnya (Kumpran, 2018).

Ritual jamasan pusaka yang dilakukan di Kabupaten Ngawi, merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan tolak balak. Dari sinilah menjadi suatu bukti bahwa kepercayaan masyarakat pada kearifan lokal yang dianut masih sangat kental. Selain itu juga terdapat nilai luhur kearifan lokal yang ada di Jawa dalam penanganan Covid-19 dengan menjaga keseimbangan alam yang dilakukan secara turun temurun. Munculnya pandemi Covid-19 menjadi sebuah peringatan dari alam agar manusia kembali dalam fitrah, yang mana sebuah kesadaran untuk kembali bersinergi

dengan alam. Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak dampak di berbagai aspek dan bersifat *multiplayer* (Vellingiri et al., 2020). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak perubahan yang sulit bagi banyak kalangan masyarakat. Pertahanan fisik dianggap lebih maksimal apabila mental dan budaya terus dipertahankan (Rumilah et al., 2020). Namun sebenarnya, nilai budaya dari ritual jamasan pusaka menjadi suatu hal yang abstrak untuk dijadikan sebagai pedoman serta prinsip hidup dalam bertindak atau bertingkah laku. Padahal, tradisi jamasan pusaka memiliki makna di antaranya Kesan moral yang telah diwariskan dan tertanam pada masyarakat dalam tradisi jamasan pusaka warisan turun temurun dari leluhur, Nilai konsep hidup pada masyarakat yang dianggap mulia, kedudukan terkait hubungan manusia dengan alam dan tentang hal-hal yang diinginkan bertali dengan manusia dan lingkungan sekitar serta sesama manusia, serta Nilai budaya yang terdapat dalam ritual Jamasan Pusaka ini dianggap penting dan berharga bagi masyarakat.

Sama halnya yang dilakukan dengan masyarakat Kabupaten Malang, dengan melakukan kebijakan dalam upaya menangani pandemi Covid-19, yaitu *Jogo Tonggo*. Penerapan *Jogo Tonggo* merupakan suatu kebijakan percepatan penanganan Covid-19 yang berbasis masyarakat di tingkat RW, karena warga merupakan garda terdepan dalam melawan Covid-19 (Sulistiani & Kaslam, 2020). Dalam hal ini peran antara pemerintah dan warga sangatlah penting. Kebijakan *Jogo Tonggo* ini memiliki struktur keanggotaan yang berperan di dalamnya, antara lain: Karang Taruna, Dasa Wisma, Posyandu, Pendamping PKH, PPL (Pertanian), Pendamping Desa, Organisasi Lainnya, Warga, Bidan Desa, dan Linmas.

Dengan diberlakukannya kebijakan *Jogo Tonggo* ini, nantinya keanggotaan yang telah ditugaskan serta berperan dalam pelaksanaan kebijakan ini, memiliki tugas masing-masing. Tugas yang dijalankan seperti mendata setiap orang yang keluar/masuk desa; mendata serta membawa masyarakat apabila ada yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ke rumah sakit rujukan di daerah tersebut; memastikan serta meng-*update* perkembangan data warga

yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP); mengupayakan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) melakukan karantina mandiri selama 14 hari; memastikan lokasi yang strategis tersedia tempat cuci tangan; penyemprot disinfektan secara rutin; hingga memastikan warga yang keluar rumah tetap mematuhi protocol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak; memberikan pelayanan kesehatan; mendorong praktek untuk selalu hidup bersih dan sehat; serta berkoordinasi dengan satgas atau yang bertugas pada bidang kesehatan tingkat desa untuk pemeriksaan lebih lanjut apabila terdapat kondisi yang darurat. Walaupun dinilai efektif namun dalam penerapan kebijakan *Jogo Tonggo* ini masih belum menuai hasil yang optimal seperti yang diinginkan. Karena angka peningkatan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Malang yang masih tinggi.

Selain itu kearifan lokal yang terjadi di wilayah puncak Kabupaten Mojokerto, yaitu Kecamatan Trawas dalam penanganan pandemi Covid-19. Masyarakat dusun Trawas sudah mengantisipasi dengan membentuk sebuah komunitas guna menghadapi dampak dari pandemi Covid-19, komunitas yang diprakarsai oleh para pemuda ini fokus dalam kegiatan menciptakan suatu produk yang terkait dengan kesehatan. Kita ketahui bahwa Trawas memiliki potensi alam yang begitu melimpah dengan adanya tanaman yang tumbuh subur mulai dari padi, palawija, buah-buahan hingga toga. Untuk itu, Masyarakat Trawas memanfaatkan segala aset alam yang dimiliki untuk pembuatan cairan disinfektan organik. Dengan pemanfaatan alam masyarakat mampu menciptakan produk unggulan dari hasil tanaman toga yang ada di dusun Trawas. Hal tersebut membuktikan bahwa kearifan lokal mampu mengubah masyarakat Trawas, baik perubahan secara fisik maupun nonfisik seperti mindset atau pola pikir.

Daerah Jawa Timur memang masih ada beberapa daerah yang sangat kental dengan kearifan lokal. Di tengah maraknya pandemi covid-19 yang membuat masyarakat terus berupaya agar terhindar dari virus ini. Warga

kampung Dukuh Desa Gladah Kecamatan Banyuwangi, yang juga melakukan upaya dengan basis kearifan lokal berupa ritual Tolak Balak Ngoyak Seblang dalam menghilangkan wabah Covid-19. Seblang merupakan akronim dari Sengkala Balak Ilang (Seblang). Munculnya pandemi Covid-19 ini membutuhkan ritual adat yang harus dilakukan. Ritual Ngoyak Seblang seperti yang dilakukan oleh warga Desa Gladah ini merupakan warisan turun temurun peninggalan nenek moyang dan tidak diketahui sejak kapan ritual ini dimulai (Joyo, 2020). Pelaksanaan ritual yang diawali dengan menyalakan api dengan menggunakan daun kelapa yang sudah kering yang memiliki makna sebagai suatu bukti serta menjadi simbolis adanya kehidupan dari suatu tempat. Kemudian diikuti seluruh warga kampung yang ikut menyalakan api di depan rumahnya masing-masing. Setelah api menyala, api dibawa oleh para sesepuh dan tokoh adat untuk dibawa keliling kampung, lalu dilanjutkan dengan penaburan garam yang dianggap sebagai suatu simbol (*nggusah* atau mengusir) sengkala balak dari Kampung Dukuh. Setelah melakukan keliling kampung dengan membawa api dan penaburan garam, dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh salah satu tokoh adat dan tumpengan. Tumpengan merupakan Tuntunan Muji Pangerah, yang memiliki arti memuji kebesaran Sang Mahakuasa untuk menghilangkan segala kotoran yang ada supaya semua bersih dan terang.

Selain itu, masyarakat Jawa juga masih menggunakan *Ilmu Titen* dalam membaca tanda alam, yang mana mampu mendikte orang Jawa dalam mengamati, merekam menganalisis, menguji hipotesis berdasarkan dengan pengetahuan dan pengalaman (Rumilah et al., 2020). Dalam *ilmu titen* ini masyarakat Jawa akan mengamati suatu kejadian diluar kebiasaan alam yang dianggap sebagai sebuah pertanda akan munculnya kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Salah satu yang *dititeni* atau ditandai oleh masyarakat Jawa yaitu kemunculan dari lintang (Hendro, 2020). Lintang kemukus masih dipercayai oleh masyarakat Jawa sebagai pertanda akan adanya wabah (*pageblug*) atau tanda akan datangnya suatu kejadian maupun peristiwa yang kurang baik. Bagi masyarakat Jawa, adanya lintang kemukus atau yang sering

disebut bintang berekor adalah wujud bintang yang bersinar di pagi hari (dini hari), bersinar dan melesat diikuti dengan ekornya yang memiliki warna merah api serta bersayap. Fenomena alam ini telah tertulis dalam *Babad Tanah Jawi*, yang mana pada zaman dahulu kemunculan lintang kemukus ini menjadi pertanda berakhirnya dinasti di Jawa, seperti runtuhnya Majapahit dan Mataram Kuno.

Pemikiran orang Jawa yang cenderung mengarah pada mistis, yang artinya peredaran alam ini diproyeksikan pada cara pandang manusia sebagai suatu hal yang konkret dan terjadi karena pengaruh dewa-dewa, dan dengan hal inilah yang menyebabkan sifat pemujaan. Pada kenyataannya ini juga menunjukkan agar manusia mampu memahami alam semesta sebagai suatu symbol keagungan dan kekuasaan Tuhan atau kekuatan Tuhan yang menjadi unsur-unsur kehidupan dalam diri manusia. Masyarakat Jawa juga cenderung lebih menghidupkan nasihat-nasihat dari nenek moyang (Rumilah et al., 2020).

### **Peran Masyarakat dalam Kampung Tangguh**

Merujuk pada kenyataan bahwa Pemerintah yang belum serius dalam menyelenggarakan pelatihan mitigasi berbasis kearifan lokal, maka dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara seluruh elemen masyarakat (Prasetyo, 2019). Upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tentu memerlukan kerjasama antar-*stakeholder* yang berperan di dalamnya. Peran antarmasyarakat dalam mewujudkan Kampung Tangguh dengan Kearifan Lokal yang memiliki nilai tinggi di mata masyarakat utamanya masyarakat Jawa (Priambadi & Nurcahyo, 2018). Kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat tentu membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang juga bertempat di daerah tersebut. Melihat dari segi kegiatan yang diselenggarakan dalam upaya memitigasi bencana dari adanya pandemi ini, tak sedikit yang masih memercayai akan keberhasilan kearifan lokal yang mereka lakukan. Seperti yang terjadi di daerah Ngawi, Jawa timur dalam pelaksanaan "*Jamasan Pusaka*" yang melibatkan seluruh elemen masyarakat daerah tersebut. Pelaksanaan *Jamasan Pusaka* yang

dihadiri oleh tamu undangan serta masyarakat yang menyaksikan tetap dengan aturan protokol kesehatan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Bukan hanya masyarakat sekitar yang menghadiri ritual ini melainkan ritual ini juga dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dengan menggunakan pakaian adat Jawa berwarna putih dalam prosesi *Jamasan Pusaka*. Kegiatan jamasan pusaka yang dilaksanakan dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, dengan harapan agar jalannya prosesi mencuci pusaka ini dapat berjalan lancar dan melakukan doa-doa agar masyarakat Ngawi terhindar dari wabah Covid-19. Jamasan pusaka yang dipimpin dan dibimbing oleh sesepuh adat dan diikuti dengan jajaran pemerintah yang menghadiri acara ritual Jamasan Pusaka ini. Terdapat 4 Pusaka yang disucikan oleh sesepuh adat Ngawi, yang dalam pelaksanaan penyucian pusaka sesepuh adat terlebih dahulu meminta izin kepada pemimpin setempat untuk melangsungkan kegiatan Jamasan Pusaka. Kepala adat memulai ritual Jamasan Pusaka di Kabupaten Ngawi Jawa Timur ini dilaksanakan di tempat yang telah dipersiapkan.

Pusaka yang pertama disucikan yaitu Tombak Kyai Singkir yang dibawa oleh bapak Yusuf Rosyadi (Priambadi & Nurcahyo, 2018). Dibersihkannya tombak ini memiliki makna dan arti atau lambang harapan masyarakat agar godaan dan wabah Covid-19 yang tengah menimpa Ngawi cepat tersingkir. Pusaka kedua yang disucikan yaitu Songsong Agung Tunggul Warono yang dibawa oleh bapak Sumarsono. Disucikannya pusaka ini memiliki arti sebagai wujud tameng agar terhindar dari mara bahaya. Pusaka yang ketiga yaitu Tombak Kyai Songgo Langit yang dibawa oleh bapak Soegeng. Tombak ini memiliki arti dan filosofi ketika disucikan mampu menolak bala atau bencana dari langit. Seperti yang diberitakan selama ini oleh beberapa pakar kesehatan terkait paparan virus corona ini penyebarannya juga melalui udara. Pusaka yang terakhir disucikan yaitu Songsong Agung Tunggul Wulung, yang dibawa oleh bapak Sunarno. Pusaka terakhir ini memiliki arti warna hitam atau

lambang dari lestari abadi, yang diharapkan agar Kabupaten Ngawi kedepannya jaya selamanya.

Analisis kebijakan yang dilakukan sebagai bentuk proses dalam memproduksi dan mentransformasi pengetahuan serta informasi yang relevan dengan kebijakan pemerintah yang telah ada. Dengan adanya kebijakan *Jogo Tonggo* yang diterapkan masyarakat Kabupaten Malang, dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk diberikan tugas masing-masing, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan *Jogo Tonggo*. Pemerintah juga harus mampu memberikan pemahaman terhadap kalangan yang berperan dalam kebijakan *Jogo Tonggo*. Pemahaman yang diberikan ini terkait bagaimana cara penanganan Covid-19, selain itu juga memberikan pemahaman terhadap hak, kewajiban, tugas, dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing *Jogo Tonggo*. Dari adanya pemahaman yang diberikan ini diharapkan agar anggota yang bersangkutan dalam kebijakan *Jogo Tonggo* mengetahui apa yang harus dilakukan dalam penanganan virus Covid-19 di Kabupaten Malang. Keberlangsungan *Jogo Tonggo* ini, memerlukan kerja sama yang baik antar anggota yang telah diberikan tugas. Pelaksanaan *Jogo Tonggo* ini juga dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu pada bidang kesehatan, bidang sosial dan ekonomi, hingga bidang keamanan dan bidang hiburan. Dari ke empat bidang ini memiliki tujuan masing-masing dalam upaya penanganan Covid-19.

Kebijakan *Jogo Tonggo* ini, juga rutin memberikan laporan kepada pemerintah setempat terkait perkembangan warga yang dalam penanganan, warga yang sudah negatif atau sembuh, warga yang sudah dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, warga yang melakukan karantina mandiri selama 14 hari, serta ketersediaan Sembilan pokok, jam kunjungan warga, laporan patrol ronda dan informasi penting yang lainnya.

## PENUTUP

Kondisi krisis yang dialami Indonesia saat ini akibat pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19

akan berhasil jika memperhatikan kearifan lokal. Karena kearifan lokal masih tetap dilestarikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat (Nugraha, 2020). Selain itu juga diperlukan adanya komitmen dan konsistensi yang dipegang oleh masyarakat dalam upaya memutus penyebaran Covid-19. Adanya Program Kampung Tangguh inilah apresiasi diberikan oleh pemerintah kepada desa yang mampu menciptakan inovasi maupun memanfaatkan kearifan lokal secara maksimal agar dapat memberikan dampak positif yaitu mengurangi angka pasien positif Covid-19 di wilayah desa (Megasari et al., 2020). Penanggulangan Covid-19 melalui kampung tangguh yang berbasis kearifan lokal ini menjadi variasi baru yang lebih diterima oleh masyarakat desa. Desa disebut sebagai benteng pertahanan terakhir yang harus memiliki kemampuan serta kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan potensi serta melestarikan tradisi yang dimiliki oleh nenek moyang dahulu. Oleh karenanya Program Kampung Tangguh dan kearifan lokal berkaitan erat dengan entitas sosial, yang mana komunitas di suatu desa dapat menciptakan solusi inovatif untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menanggulangi pandemi (Nugraha, 2020).

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai luhur atau kearifan lokal serta sumber daya alam ataupun potensi yang dimiliki suatu desa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terutama di tengah kondisi krisis akibat adanya pandemi saat ini. Jika potensi yang dimiliki oleh desa dapat digunakan secara maksimal maka hal tersebut akan dapat memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan global yaitu memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan pemanfaatan kearifan lokal yang ada sesuai dengan kebudayaan pada masing-masing daerah, bisa dikatakan bahwa upaya penanggulangan Covid-19 berbasis kearifan lokal cukup efektif. Karena melihat dari sisi kaca mata masyarakat yang sangat antusias dalam pelaksanaan serangkaian upaya yang dijalankan. Dengan adanya upaya melalui kearifan lokal tiap masing-masing daerah, masyarakat sudah membantu pemerintah. Dengan demikian hubungan antara pemerintah dan masyarakat mampu saling berkaitan dalam

penanganan Covid-19. Di sinilah ketangguhan sosial masyarakat desa sangat diperlukan agar mampu memanfaatkan keberagaman sosial guna saling menopang dan membangun pilar bersama sehingga tidak mengalami keterperosokan sosial. Dapat dilihat bahwa kearifan lokal memiliki peranan yang sangat penting dalam kesuksesan terkait kebijakan pemerintah terutama di tengah kondisi krisis kesehatan saat ini. Oleh karena itu, penelitian yang menarik untuk selanjutnya yaitu terkait penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal.

## PUSTAKA ACUAN

- Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. (2020). How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? *The Lancet*, 395(10228), 931–934. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30567-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30567-5)
- BPS. (2019). *Jumlah kecamatan dan desa/keurahan menurut klasifikasi perkotaan/perdesaan dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, 2015*. Badan Pusat Statistika Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2016/07/25/346/jumlah-kecamatan-dan-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2015.html>
- BPS. (2020). *Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2018-2020*. Badan Pusat Statistika Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Dzakwan, M. H. A. (2020). Memetakan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menangani COVID-19. *CSIS Commentaries*, 1–11.
- Habibullah. (2013). Kebijakan Penanggulangan bencana Berbasis Komunitas : Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 18(02), 133–150.
- Hasim, M. (2012). Falsafah hidup Jawa dalam naskah sanguloro. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 10(2), 301–320.
- Hendro, E. P. (2020). Tinjauan Aspek Antropologis untuk Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan dalam Menghadapi Covid-19 di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 4(1), 9.
- Imran, M. F. (2020). *Program Kampung Tangguh Ala Polda Jatim Dikampanyekan, Siasat Hambat Pernularan Covid-19 di Jatim*. Diunduh dari <https://suryamalang.tribunnews.com/2020/05/16/program-kampung-tangguh-ala-polda-jatim-dikampanyekan-siasat-hambat-pernularan-covid-19-di-jatim> tanggal 20 Februari 2021.
- Isfandiari, M. A. (2020). *Penyebab Utama Kasus Corona Jawa Timur Terparah di Indonesia*. Diunduh dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/13/133000723/2-penyebab-utama-kasus-corona-jawa-timur-terparah-di-indonesia?page=all> tanggal 25 Januari 2021.
- Joyo, N. (2020). *Usir Covid, Masyarakat Osing Kampung Dukuh Gelar Ritual Ngoyak Seblang*. Diunduh dari <https://jatimtimes.com/baca/214859/20200515/202600/usir-covid-masyarakat-osing-kampung-dukuh-gelar-ritual-ngoyak-seblang> tanggal 25 Januari 2021.
- KampoengNgawi. (2020). *Upacara Tradisi Jamasan Pusaka Kabupaten Ngawi di Tengah Situasi Pandemi*. Diunduh dari <https://kampoengngawi.com/upacara-tradisi-jamasan-pusaka-kabupaten-ngawi-di-tengah-situasi-pandemi/> tanggal 20 Februari 2021.
- Kumparan. (2018). *Jamasan Pusaka, Tradisi Jawa Merawat Pusaka Peninggalan Nenek Moyang*. Diunduh dari <https://kumparan.com/kumparantravel/jamasan-pusaka-tradisi-jawa-merawat-pusaka-peninggalan-nenek-moyang-1536748777604044759> tanggal 20 Februari 2021.
- Kurniati, P. (2021). *Update Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 31 Januari 2021*. Diunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2021/01/31/15515891/update-covid-19-di-jatim-diy-bali-ntt-ntb-kalbar-dan-kalsel-31-januari-2021> tanggal 20 Februari 2021.
- Lestari, P., Ritonga, R., Ruliana, P., & Barus, C. C. B. (2020). Disaster communication uses field training exercise simulation as an important aspect of disaster risk reduction. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(1), 166–186. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3601-10>
- Lestari, P., & Sularso, S. (2020). The COVID-19 impact crisis communication model using gending jawa local wisdom. *International*

- Journal of Communication and Society*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v2i1.150>
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 339. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2700>
- Megasari, R., Vidyastuti, A. N., Setya, E., Rahayu, P., & Pangestu, O. (2020). Upaya Memutus Penyebaran Virus Covid-19 Melalui Pembentukan Kampung Tangguh Semeru Di Desa Tegalsari Kabupaten Malang. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(3), 212–222.
- Nugraha, A. S. (2020). Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Sosietas*, 10(1), 745–753. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v10i1.26063>
- Prasetyo, B. (2019). Kearifan Lokal Sebagai Basis Mitigasi Bencana. *Peran Matematika, Sains & Teknologi Dalam Kebencanaan*.
- Priambadi, K., & Nurcahyo, A. (2018). Tradisi Jamsan Pusaka Di Desa Baosan Kidul Kabupaten Ponorogo (Kajian Nilai Budaya Dan Sumber Pembelajaran Sejarah). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(2), 211. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i2.2678>
- Rumilah, S., Nafisah, K. S., Arizamroni, M., Hikam, S. A., & Damayanti, S. A. (2020). Kearifan lokal masyarakat jawa dalam menghadapi pandemi. *Suluk Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 2(2), 119–129.
- Saleh Al-Omoush, K., Orero-Blat, M., & Ribeiro-Soriano, D. (2020). The role of sense of community in harnessing the wisdom of crowds and creating collaborative knowledge during the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.056>
- Solichah, Z. (2020). *Kota Probolinggo Memiliki 30 Kampung Tangguh Semeru*. Diunduh dari <https://www.antaranews.com/berita/1559880/kota-probolinggo-miliki-30-kampung-tangguh-semeru> tanggal 25 Januari 2021.
- Sulistiani, K., & Kaslam, K. (2020). Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Vox Populi*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.24252/vp.v3i1.14008>
- Supriyanto, H. (2020). *Kearifan Lokal dalam Mendukung Hidup Sehat di Masa Pandemi*. Diunduh dari <https://www.harianbhirawa.co.id/kearifan-lokal-dalam-mendukung-hidup-sehat-di-masa-pandemi/> tanggal 27 Januari 2021.
- Triana, D., Hadi, T. S., & Husain, M. K. (2017). Mitigasi Bencana Melalui Pendekatan Kultural dan Struktural. *Seminar Nasional XII “Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi 2017”*, 379–384.
- Vellingiri, B., Jayaramayya, K., Iyer, M., & Narayanasamy, A. (2020). COVID-19: A promising cure for the global panic. *Science of the Total Environment Journal*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720317903>
- Yanuarita, H. A., & Haryati, S. (2021). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Budaya Di Kota Malang Dan Konsep Strategis Dalam Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Widya Sosio-politika*, 2(2), 58. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2020.v02.i02.p01>
- Yazid, S., & Lie, L. D. J. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia Di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 75–83. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3862.75-83>

## **HAK-HAK DISABILITAS DI SIMPANG JALAN: MENYOAL PELINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

### **DISABILITY RIGHTS AT A CROSSROADS: EXAMINING PROTECTION MEASURES OF THE RIGHT TO HEALTH AMIDST COVID-19 PANDEMIC**

**Yeni Rosdianti<sup>1</sup>, Ronny Josua Limbong<sup>2</sup>**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI,  
<sup>1</sup>[rosdiantiyeni@gmail.com](mailto:rosdiantiyeni@gmail.com), <sup>2</sup>[ronnylimbong@gmail.com](mailto:ronnylimbong@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*The restrictions imposed by social isolation in response to the COVID-19 pandemic have greatly affected the health services particularly for persons with disabilities. Certain types of disability pose a range of vulnerabilities including health problems, mental disorders, and social disadvantage which are entitled to long-term care and health supports. In this isolation, there is eventually loss of essential health services against disability rights. Therefore, it is important to ensure the protection measures to persons with disabilities to care services considering their unique characteristics, in particular, to adapt to the new circumstances. This paper employs the methods of literature review exploring the impacts of the COVID-19 to the right to health for persons with disabilities. It spots on the detrimental effects of social isolation and scrutinizes the possible alternatives to mitigate the unprecedented effects of the pandemic. This paper concludes that the loss of essential services impacted by COVID-19 restrictions requires further adjustments in terms of inclusive policy framework, evaluation and monitoring, as well as wider creativity in delivering the right to health into practice.*

**Keywords:** *disability rights, social isolation, the right to health, COVID-19 pandemic.*

#### **ABSTRAK**

Pembatasan isolasi sosial akibat pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Ragam dan kondisi disabilitas tertentu memiliki kerentanan kesehatan, gangguan mental, dan hambatan sosial yang umumnya membutuhkan perawatan dan dukungan kesehatan jangka panjang. Isolasi sosial ini dalam beberapa hal berakibat pada berhentinya layanan kesehatan esensial bagi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan langkah-langkah perlindungan bagi penyandang disabilitas atas layanan perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan karakteristik unik individu dan kedisabilitasannya mereka, khususnya, dalam rangka beradaptasi dengan kebiasaan baru saat ini. Makalah ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengeksplorasi dampak COVID-19 terhadap hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas. Telaah ini menyoroti dampak kerugian dari isolasi sosial dan meneliti kemungkinan alternatif untuk mengurangi efek negatif pandemi ini. Makalah ini menyimpulkan bahwa hilangnya layanan esensial sebagai dampak dari pandemi COVID-19 memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam kerangka kebijakan inklusif, evaluasi dan pemantauan lebih lanjut, serta kreativitas yang lebih luas dalam pelaksanaan perlindungan hak atas kesehatan.

**Kata kunci:** *Hak-hak Disabilitas, Isolasi Sosial, Hak atas Kesehatan, Pandemi COVID-19.*

## PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang merupakan situasi kedaruratan kesehatan memberikan disrupsi besar bagi pembangunan sektor kesehatan di Indonesia. Virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 dapat menyebar antarmanusia melalui *droplet* dan transmisi kontak (*World Health Organization, 2020*). Penyebaran ini memaksa manusia harus membatasi mobilitas dan probabilitas kontak dengan orang lain. Berdasarkan situs covid19.go.id milik Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Indonesia per tanggal 19 Oktober 2021 wabah Covid-19 di Indonesia menyebabkan setidaknya 143.049 orang meninggal dunia dengan jumlah kasus positif sebesar 4.236.287 kasus (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021).

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, penyandang disabilitas telah mengalami kesulitan dalam mengakses hak atas kesehatannya. Kesulitan ini disebabkan oleh hambatan yang dialami, baik dari sisi aksesibilitas/keterjangkauan (*accessibility*), ketersediaan (*availability*), keberterimaan (*acceptability*), dan kualitas (*quality*). Catalina Devandas, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Penyandang Disabilitas, mengungkapkan bahwa banyak penyandang disabilitas merasa telah ditinggalkan. Tindakan penanganan seperti *social/physical distancing* dan isolasi mandiri adalah hal yang mustahil diwujudkan untuk mereka yang bergantung pada dukungan dan bantuan orang lain untuk makan, berpakaian, dan mandi (Devandas, 2020).

Mengamati kesenjangan tersebut, makalah ini akan menelaah situasi pandemi ini guna memetakan rekomendasi langkah-langkah yang kiranya patut dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, dengan menimbang kekhususan kedisabilitas sebagai kelompok rentan. Maka telaah ini diawali dengan mengajukan dua pertanyaan: 1. Bagaimana situasi pemenuhan hak atas kesehatan sebagai imbas pandemi Covid-19 ini?; 2. Bagaimana peran pemerintah dalam menjamin perlindungan hak atas kesehatan penyandang disabilitas pada masa dan pascapandemi Covid-19?

Meskipun telah banyak studi yang mengkaji dampak pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas, makalah ini memberikan perspektif khusus yakni tentang bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) menggariskan pedoman bagi pemenuhan hak atas kesehatan kepada penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*). Selain itu, makalah ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam kerangka kebijakan inklusif, evaluasi dan pemantauan lebih lanjut, serta kreativitas yang lebih luas dalam pelaksanaan perlindungan hak atas kesehatan, sebagai bagian tak terpisahkan dari perlindungan dan pemenuhan HAM.

## PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang dibutuhkan untuk pelaksanaan HAM lainnya (Komnas HAM RI, 2021). Lebih lanjut Ayat (1) dalam Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB) menyebutkan bahwa: “*Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.*” Hal ini menjadi dasar pengakuan kesehatan sebagai hal yang esensial bagi setiap orang dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam kondisi kedaruratan kesehatan.

Perkembangan pandangan kritis tentang disabilitas telah mengalami perubahan signifikan dari paradigma ‘pendekatan medis’ (*‘medicalised’ model of disability*) menuju model sosial disabilitas (*social model of disability*). Jika pendekatan ‘medis’ meletakkan masalah pada individunya, yakni disabilitas sebagai problem individu, maka model sosial menempatkan masalah pada lingkungan yang tidak dapat diakses, sehingga yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan hambatan-hambatan tersebut agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dan bermakna. Selain itu, pendekatan sosial ini juga berfokus pada penyandang disabilitas sebagai “subjek” dan bukan sebagai “objek” dalam mencapai tujuan partisipasi sosial yang didasari oleh martabat manusia (*dignity*) (Rosdianti, 2017, p. 70). Model sosial ini

kemudian menjadi basis penting bagi pendekatan HAM dalam konteks disabilitas (*human rights model of disability*), dengan fokus pada kewajiban negara (*State Obligation*) sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara selaku pemangku hak (*rights holder*), termasuk dalam konteks hak atas kesehatan. Oleh karena penting untuk memastikan keadilan pada distribusi hak dan kewajiban ini, guna menjamin partisipasi bermakna seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok penyandang disabilitas (Rosdianti, 2016, p. 294).

Basis konseptualnya adalah melindungi yang paling rentan di antara kita (*protecting the most vulnerable among us*). Semangat ini harus menjadi kesepakatan sosial yang adil, yakni pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan dapat terpenuhi (Gostin et al., 2020, p. 10). Situasi disabilitas yang beragam, memerlukan perlakuan khusus untuk mendukung mereka mendapatkan hak-haknya, khususnya pada hak atas kesehatan. Dukungan ini meliputi upaya-upaya kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam menikmati hak atas kesehatan, termasuk di dalamnya jaminan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Karena tanpa dukungan ini, sama halnya dengan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak atas kesehatan dalam konteks pandemi Covid-19 tidak lepas dari peran pemerintah untuk melaksanakan “*test, trace, dan treatment*” (3T). Sebagaimana rekomendasi *World Health Organization* (WHO), 3T sangat penting untuk menghentikan penyebaran Covid-19 (United Nations, 2020b). Namun pelaksanaan 3T di Indonesia masih menemui banyak permasalahan. Dalam laporan WHO, per tanggal 30 Januari 2021 hanya empat provinsi di Indonesia yang memenuhi syarat minimum tes Covid-19 (1/1000 dari jumlah penduduk per minggu) yaitu DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur (WHO Indonesia, 2021). Namun tidak ada satu pun daerah tersebut yang memiliki proporsi jumlah

pasien positif dari yang diperiksa/dites kurang dari 5 persen sebagaimana acuan WHO. Dalam laporan yang sama, per tanggal 1 Februari 2021 proporsi keterisian tempat tidur pada ruangan isolasi Covid-19 di Indonesia mencapai 58,7 persen sedangkan keterisian tempat tidur pada *Intensive Care Unit* (ICU) untuk Covid-19 sebesar 63,1 persen. Sekelumit data tersebut menggambarkan bahwa persoalan pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan dalam konteks Covid-19 masih belum mencapai realisasi yang progresif dan utuh.

Permasalahan di sektor kesehatan tidak hanya terbatas pada permasalahan Covid-19. Perawatan penyakit tidak menular, proses imunisasi rutin, dan pengobatan penyakit menular lainnya mengalami hambatan. Sumber daya kesehatan yang ada diprioritaskan pada penanggulangan wabah Covid-19 ditambah kebijakan pembatasan sosial memengaruhi aksesibilitas sebagian orang terhadap fasilitas kesehatan. Akibat Covid-19, frekuensi rawat jalan di rumah sakit mengalami penurunan sebesar 50-60 persen dan frekuensi rawat inap menurun sebesar 40–60% (Uli, 2020). Selain itu klaim pengobatan non- Covid-19 BPJS Kesehatan juga mengalami penurunan sebesar 40 persen (CNBC Indonesia, 2020). Berbagai permasalahan sektor kesehatan pada masa pandemi memengaruhi upaya pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak atas kesehatan bagi setiap orang, utamanya bagi kelompok rentan (*vulnerable group*).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapinya, penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan memerlukan tindakan afirmatif guna mencapai pemenuhan hak atas kesehatan di masa pandemi. Salah satu tindakan afirmatif yang dimaksud adalah dengan memberikan akomodasi yang layak yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan cara menyingkirkan hambatan-hambatan yang ada (*removing barriers*) (Rosdianti, 2016, p. 294). Meski demikian, pemenuhan layanan khusus tersebut membutuhkan anggaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk nondisabilitas, namun hal ini justru dinilai sebagai bentuk keadilan itu sendiri. John Rawls menggarisbawahi bahwa tujuan

utama keadilan adalah untuk mendistribusikan hak dan kewajiban serta kemanfaatan, yakni “*struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara institusi sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian kemanfaatan dari kerjasama sosial* (Rawls, 1971: 7)” (Rosdianti, 2016, p. 294).

Jackson et al. (2021) menegaskan pentingnya upaya menuju keadilan kesehatan dengan menerapkan model sosial disabilitas di semua kebijakan. Model sosial disabilitas memandang hambatan (*barriers*) sebagai batasan kebijakan publik, dan bukan manusianya. Misalnya, dalam perencanaan kesehatan dalam pembangunan kota, infrastruktur yang tidak akses dapat disebut sebagai kegagalan desain, kegagalan kebijakan dan perencanaan kota, karena tidak memberikan keadilan bagi kelompok disabilitas (Jackson et al., 2021).

## PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Penanggulangan wabah Covid-19 adalah salah satu tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan hak atas kesehatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Ayat (2) Pasal 12 KIHESB: “*Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, ....*” Lebih lanjut dalam Komentar Umum Nomor 14 KIHESB menyatakan bahwa langkah untuk pencegahan, pengobatan, dan pengendalian penyakit endemik dan epidemi merupakan kewajiban yang dapat dijadikan prioritas perbandingan (UN Economic and Social Council, 2000). Namun dalam tata kelola penanggulangan Covid-19 yang telah dilaksanakan, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dalam memastikan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap penanganan kesehatan terkait Covid-19.

Dalam panduan yang dibuat Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB atau yang sering dikenal OHCHR yang berjudul “*Protection of Economics, Social, and Cultral Rights in Conflict*” para. 35, dalam konteks penyelenggaraan pemenuhan hak atas kesehatan terdapat beberapa kewajiban utama yang bersifat minimum sebagaimana termaktub

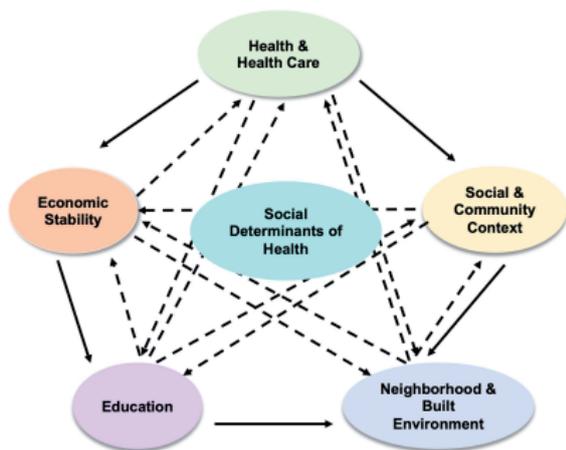
dalam Komentar Umum Nomor 14 KIHESB yang meliputi (OHCHR, 2015):

- i. menjamin akses pada fasilitas kesehatan barang dan jasa dengan dasar nondiskriminasi khususnya bagi kelompok rentan dan marginal;
- ii. menyediakan obat-obatan esensial; dan
- iii. memformulasikan sebuah rencana atau kebijakan kesehatan nasional yang transparan dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari kelompok rentan.

Kewajiban inti negara ini memperlihatkan tingkat kewajiban inti minimal dari hak atas kesehatan termasuk di masa darurat/konflik yang sifatnya tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) (OHCHR, 2015). Sehingga dalam masa darurat, termasuk masa pandemi Covid-19 ini, kewajiban inti hak atas kesehatan tersebut tetap harus terpenuhi bagi seluruh masyarakat, baik bagi perawatan dan pencegahan penyakit terkait Covid-19, maupun bagi perawatan dan pencegahan berbagai penyakit non- Covid-19.

Prinsip nondiskriminasi sebagaimana terkandung dalam kewajiban inti minimum hak atas kesehatan juga berperan penting dalam penanggulangan pandemi Covid-19. OHCHR dalam “*Covid-19 Guidance*” menyatakan bahwa perawatan (Covid-19) harus tersedia untuk semua orang tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan. Hal ini juga termasuk untuk memastikan tidak ada seorang pun yang ditolak karena masalah biaya atau stigma yang dimiliki kelompok rentan (OHCHR, 2020). Implikasi perlakuan diskriminatif bagi kelompok rentan justru membuat kelompok tersebut menghadapi risiko penularan yang lebih tinggi dan implikasi lainnya yang lebih luas (WHO, 2020a), yang tentunya akan berakibat meluas bagi kesehatan masyarakat (*public health*) secara umum.

Konsep faktor sosial penentu kesehatan (*social determinant of health /SDOH*) terdiri dari lima kategori sebagaimana dalam Gambar 1, yaitu kesehatan & perawatan kesehatan, konteks sosial & komunitas, lingkungan dan pembangunan lingkungan, pendidikan, dan stabilitas ekonomi (Singu, Acharya, Challagundla, & Siddappa, 2020).



Sumber: Singu, Acharya, Challagundla, & Siddappa (2020)

**Gambar 1.** Lima Bagian dalam *Social Determinants of Health*

Kelima kategori tersebut sering kali tercermin dalam hak asasi lainnya yang berkaitan dengan kesehatan sehingga faktor-faktor tersebut tidak boleh diabaikan di tengah masa kedaruratan kesehatan (Sekalala, Forman, Habibi, & Meier, 2020). Faktor sosial-ekonomi yang tergambar dalam SDOH tersebut memegang peran penting selama masa pandemi Covid-19 seperti perumahan, pengaman sosial, pekerjaan, makanan, air, dan sanitasi. Sebagai contoh di Brasil, Figueiredo et. al. (2020) menyatakan bahwa faktor sosial-ekonomi dan kesenjangan sosial berpengaruh pada penyebaran dan tingkat kematian akibat Covid-19 di Brasil (Figueiredo et al., 2020). Richard Clarke Cabot dalam Singu et al. (2020) berkesimpulan bahwa terdapat korelasi antara status sosial-ekonomi seorang pasien yang rendah dan kemungkinan mereka tertular penyakit. Lebih lanjut laporan periodik menunjukkan bahwa kemiskinan, kesenjangan, dan SDOH berperan dalam penyebaran penyakit menular (Singu et al., 2020).

**DAMPAK COVID-19 BAGI AKSESIBILITAS HAK KESEHATAN**

Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat telah berimbas secara meluas pada seluruh aspek kehidupan. Tak urung, terjadi pula perubahan pola perilaku sosial pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Saat pemerintah memutuskan isolasi sosial, sesungguhnya adalah

sebuah keputusan yang tidak mudah. Isolasi ini adalah salah satu cara yang dianggap paling efektif dalam menahan laju penyebaran virus dan ikutan-ikutannya. Walensky dan del Rio (2020) mengemukakan premis bahwa isolasi setidaknya akan membantu mencegah runtuhnya sistem kesehatan dan memastikan perawatan medis dan layanan rumah sakit untuk lebih banyak orang (Schuengel, Tummers, Embregts, & Leusink, 2020, p. 556). Isolasi sosial ini dibuat sebagai satu keputusan untuk menahan agar sistem kesehatan tidak kolaps.

Namun, meskipun dianggap paling efektif, ada banyak implikasi negatif yang diakibatkannya. Tak urung, isolasi sosial ini membawa imbas tersendiri, layanan pendidikan dan kesehatan secara signifikan dibatasi aksesnya, termasuk untuk penyandang disabilitas secara umum, dan disabilitas intelektual secara khusus (Jeste et al., 2020). Riset yang dilakukan Jeste et al. 2020 menemukan bahwa dari 818 responden (yang terdiri dari 669 dari AS dan 149 dari luar AS), dilaporkan bahwa keluarga-keluarga mengeluhkan adanya kehilangan beberapa layanan pendidikan atau layanan perawatan kesehatan. Sebanyak 36% responden menyatakan kehilangan akses penyedia layanan kesehatan. Sebagai saran, disampaikan oleh para responden mengenai pentingnya penyediaan layanan kesehatan jarak jauh (*telemedicine*) (Jeste et al., 2020).

Pandemi Covid-19 ini memengaruhi semua lini kehidupan (Luttik et al., 2020) yang membawa sejumlah konsekuensi kesehatan dan ekonomi. Terdapat risiko morbiditas dan mortalitas sangat bervariasi menurut ras, kelas sosial, jenis kelamin, usia, kemampuan, dan lokasi geografis (CDC, 2020; Price-Haywood, Burton, Fort, & Seoane, 2020 dalam Rolland, 2020, p. 922). Studi Rolland (2020) ini mengetengahkan konsep tingkat makro dan individu/keluarga terkait dengan: (1) adaptasi terhadap risiko pandemi sebagai bagian dari komunitas global, (2) mengatasi risiko tertular Covid-19 untuk individu dan keluarga, dan (3) mengatasi penyakit itu sendiri untuk individu yang terkena dampak, keluarga, dan handai taulan. Lensa multisistemik digambarkan untuk memahami dampak pandemi di seluruh

tingkatannya (Rolland, 2020, pp. 922–923). Secara makro, dampak ini mencakup berbagai hambatan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, lapangan kerja, dampak ekonomi, dan sistem perawatan kesehatan (Rolland, 2020, pp. 922–923). Terkait dengan sistem perawatan yang terganggu, pemerintah harus mengoordinasikan berfungsinya sistem perawatan primer dan rumah sakit dengan menerapkan hierarki perawatan medis yang efisien dan mengatasi pandemi Covid-19 (Tseng, Wu, Ku, & Tai, 2020, p. 2).

Terdapat pula ancaman pertambahan penyandang disabilitas pada saat dan pascapandemi nanti yakni akibat keterbatasan pasien dalam mengakses layanan perawatan kesehatan. Kondisi ini dapat menyebabkan buruknya gangguan kesehatan semisal ancaman penglihatan. Pasien yang dapat mengakses perawatan oftalmik (*ophthalmic care*) pada waktu yang tepat, akan diselamatkan dari tingkat kebutaan yang parah (Jackson et al., 2021, p. 136), sementara, akibat *lockdown*, banyak pasien yang tidak dapat mengakses perawatan mata oftalmik ini.

Sementara dalam kasus gangguan syaraf yang tidak tertangani dengan baik juga dapat berakibat fatal. Orang-orang dengan kondisi neurodegeneratif kronis seperti *multiple sclerosis*, gangguan pergerakan atau demensia, lebih berisiko terhadap infeksi (Jackson et al., 2021, p. 50). Kelompok ini juga mengalami keterbatasan akses selama pandemi berlangsung. Survei di Italia, misalnya, lebih dari 50% pasien *stroke* enggan ke rumah sakit, mungkin karena takut terinfeksi atau khawatir ditolak bertemu dengan keluarga mereka setelah dirawat di rumah sakit, padahal penundaan perawatan bagi pasien-pasien ini juga dapat berakibat fatal (Jackson et al., 2021, p. 50).

## DAMPAK ISOLASI SOSIAL PADA KESEHATAN MENTAL

Isolasi sosial didefinisikan sebagai kuantitas dan kualitas kontak yang rendah dengan orang lain; hal tersebut secara objektif dapat diukur dengan menggunakan pengamatan jaringan sosial individu. (Roy, Jain, Golamari, Vunnam, &

Sahu, 2020, p. 1438). Terdapat perbedaan yang mendasar antara isolasi sosial dan kesepian. Jika isolasi sosial adalah pemisahan secara objektif, kesepian adalah pemisahan subjektif; seseorang dapat dikelilingi oleh anggota keluarga yang suportif tetapi masih mengalami perasaan kesepian. Meski berbeda, literatur menunjukkan kedua hal tersebut saling terkait, namun tidak secara langsung tumpang tindih (Roy, Jain, Golamari, Vunnam, & Sahu, 2020, p. 1438).

Isolasi sosial dan kesepian dikaitkan dengan morbiditas dan mortalitas yang cukup besar pada populasi yang berusia lebih tua. Studi berdasarkan pandemi sebelumnya menemukan bahwa penyebab stres selama karantina meliputi ketakutan akan infeksi, frustrasi, persediaan yang tidak memadai, dan informasi yang tidak memadai (Roy et al., 2020, p. 1438). Karena isolasi berdampak buruk bagi kecenderungan penurunan kualitas kesehatan mental, yakni di antaranya membawa efek depresi, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan tertentu, maka para ahli bersepakat bahwa semakin lama pandemi ini berlangsung, semakin tinggi biaya psikologisnya (Roy et al., 2020, p. 1439).

Isolasi sosial diketahui berdampak pada kecenderungan depresi. Kecenderungan depresi ini akan menjadi lebih besar, semisal di kelompok rentan tertentu semisal kelompok lansia atau penyandang disabilitas. Sebuah studi terhadap 6.231 penduduk Korea Selatan yang ditempatkan di karantina selama 2 minggu selama pandemi Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) 2015 menemukan 19,3 persen mengalami depresi. Sebuah studi tambahan oleh Jeong et al termasuk 1.656 orang yang terisolasi selama dua minggu dan menemukan 16,6 persen memiliki perasaan marah, dan 7,6 persen memiliki gejala kecemasan. Setelah dikeluarkan dari isolasi, perasaan marah dan gejala kecemasan masih bertahan selama empat hingga enam bulan namun masing-masing meningkat menjadi 6,4 persen dan 3 persen (Roy et al., 2020, pp. 1437–1438).

Hal senada juga dikemukakan oleh studi-studi yang lain. Salah satu efek negatif karantina Covid-19 adalah gangguan kesehatan mental (Mazza et al. 2020). Terdapat efek psikologis karantina pada populasi umum termasuk gejala

stres pascatrauma, kebingungan, kemarahan, frustrasi, kebosanan, kerugian finansial dan stigma (Brooks et al. 2020). Demikian juga dampaknya pada anak-anak dan remaja. Studi yang dilakukan dengan sampel 1.143 orang tua Spanyol dan Italia yang memiliki anak berusia antara 3 dan 18 tahun menunjukkan efek negatif karantina pada remaja (Orgilés et al. 2020). Studi ini menyimpulkan bahwa hampir semua (85,7 persen) orang tua melaporkan perubahan emosi anak mereka selama penutupan sekolah dan *lockdown*, dengan gejala yang paling umum dilaporkan adalah kesulitan berkonsentrasi, kebosanan, mudah tersinggung, gelisah, dan gugup. Stres pengasuhan dikaitkan pula berkorelasi positif terhadap peningkatan gejala emosional anak (Orgilés et al. 2020). Temuan ini sejalan dengan penyesuaian orang tua dan anak pada saat bencana (misalnya bencana alam, Juth et al. 2015) (dalam Neece et al., 2020, p. 740). Untuk itu Rolland (2020) menegaskan perlu dilakukan pula strategi mitigasi pada tingkat individu dan keluarga, khususnya pada mereka yang telah memiliki penyakit atau kondisi disabilitas yang telah ada sebelumnya. Studi ini menggarisbawahi pentingnya konsultasi dan psikoedukasi yang berorientasi pada keluarga, serta pada perawatan kesehatan individu (Rolland, 2020, p. 922).

### **RISIKO COVID-19 BAGI TENAGA KESEHATAN**

Pandemi COVID-19 ini tak urung membawa jumlah korban yang sangat besar pada petugas perawatan kesehatan garis depan. Hal ini diakibatkan oleh kelelahan, kecemasan, depresi, insomnia, trauma, dan bunuh diri (Schechter et al., 2020; Wong et al., 2020). Selain itu diketahui juga adanya rasa tidak berdaya demi menyaksikan gelombang kematian yang secara kumulatif dapat menyebabkan rasa gagal (Griffin et al., 2019) dalam (Rolland, 2020, pp. 934–935). Di sisi lain, tenaga kesehatan juga mengkhawatirkan keselamatan diri akan terdampak oleh pandemi ini (Mukherjee, 2020, p. 11). Akibatnya, terdapat peningkatan risiko tekanan psikologis atas para tenaga kesehatan, penyalahgunaan alkohol/obat-obatan, insomnia dan gejala kecemasan, kemarahan, kelelahan, serta gangguan stres

(Embregts, van Oorsouw, et. al., 2020; Stuijzand et al., 2020, dalam Embregts, Tournier, & Frielink, 2020, p. 9). Namun dalam keadaan segenting apapun menjaga kesehatan publik tetap menjadi tujuan dari para tenaga kesehatan, dengan nilai-nilai etika, serta memastikan layanan yang efektif, etis, dan setara (Gostin, Friedman, & Wetter, 2020, pp. 11–12).

### **KERENTANAN DISABILITAS TERHADAP COVID-19**

COVID-19 menempatkan penyandang disabilitas pada risiko infeksi yang lebih tinggi, antara lain disebabkan oleh kondisi kesehatan, misalnya terdapat masalah pada sistem kekebalan dan pernapasan. Selain itu, ada pula kondisi-kondisi khusus yang menjadikan kerentanan itu bertambah yakni, karena kebutuhan yang besar terhadap perawatan kesehatan di rumah atau kebutuhan terhadap tenaga kesehatan. Pandemi ini kemudian membuat layanan perawatan kesehatan ini menjadi lebih sulit didapatkan (Pineda & Corburn, 2020), yang artinya berpotensi menurunkan kesehatan penyandang disabilitas yang bersangkutan, atau bahkan menyebabkan kompleksitas pada keadaan kesehatannya. Pasien penyandang disabilitas yang dalam perawatan rumah umumnya menderita penyakit kronis atau kondisi kritis, sehingga membuat mereka rentan terhadap COVID-19 (Tseng et al., 2020, p. 1).

### **KERENTANAN PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL**

Pandemi COVID-19 secara spesifik juga berimbas pada penyandang disabilitas intelektual. Kondisi isolasi mau tidak mau menyulitkan keberlanjutan program pendidikan dan terapi anak-anak penyandang disabilitas intelektual yang sangat membutuhkan dukungan profesional (Neece et al., 2020, p. 739). Terkait dengan risiko ini, WHO menyebutkan bahwa orang-orang dalam perawatan jangka panjang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas (termasuk disabilitas intelektual), dikategorikan rentan terhadap Covid-19 (WHO, 2020b). Meskipun tidak semua penyandang disabilitas intelektual lebih rentan, karena penyandang disabilitas intelektual

juga memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada pada mereka (Courtenay & Perera, 2020). Mengingat ketergantungan yang cukup tinggi pada dukungan fisik dari kerabat/keluarga atau profesional dan umumnya mereka hidup secara kelompok, beberapa individu diketahui berisiko lebih tinggi tertular virus corona (Tummers, Catal, Tobi, Tekinerdogan, & Leusink, 2020). Selain itu, Covid-19 juga dinilai berdampak pada masalah perilaku dan fungsi perilaku pada kelompok disabilitas intelektual (Schuengel et al., 2020, p. 817). Penyandang disabilitas intelektual diketahui memiliki berbagai kerentanan yang mencakup masalah kesehatan, gangguan mental dan hambatan sosial (Emerson & Hatton, 2008 dalam Courtenay & Perera, n.d., p. 1). Para penyandang disabilitas intelektual umumnya memiliki kerentanan lebih besar dan risiko terinfeksi (faktor komorbid) serta harapan hidup mereka lebih rendah daripada populasi umum.

Langkah-langkah isolasi sosial yang dilakukan pemerintah memiliki dampak yang besar pada para penyandang disabilitas intelektual, misalnya peningkatan kesulitan, agitasi dan kesepian (Embregts et al., 2020). Untuk itu, pandemi berdampak negatif meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas intelektual (ID) utamanya juga dikarenakan disparitas penyediaan layanan kesehatan dan multimorbiditas kesehatan fisik dan mental (Alexander et al., 2020, p. 256).

Pandemi ini mengajarkan kepada kita bagaimana melindungi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas intelektual dengan kekhususannya tersebut. Kerentanan mereka terhadap infeksi dan sulitnya penyandang disabilitas intelektual untuk beradaptasi dengan isolasi sosial menjadi perhatian tersendiri. Untuk itu perlu sosialisasi yang terus menerus kepada penyandang disabilitas intelektual dan keluarganya juga bagi para perawat-perawatnya, untuk dapat menggulirkan kesadaran bersama mengatasi pandemi melalui perubahan perilaku individu (Courtenay & Perera, n.d., p. 5).

Studi dari Neece et al. 2020 menyebutkan bahwa para orang tua melaporkan tantangan terbesar dalam pandemi yang memakasa mereka berada di rumah merawat anak-anak mereka adalah hilangnya banyak layanan penting.

Selain itu terdapat kekhawatiran dampak jangka panjang pandemi terhadap perkembangan anak-anak penyandang disabilitas intelektual tersebut, mengingat hilangnya layanan, pendidikan, dan kesempatan keterlibatan sosial (Neece et al., 2020, p. 739) yang tentu amat berimbas pada kehidupan sosial penyandang disabilitas intelektual dalam beradaptasi dengan keseluruhan dampak pandemi.

Tak hanya dampak bagi penyandang disabilitas intelektual saja, studi melaporkan adanya dampak stres bagi orang tua dalam merawat anak-anak penyandang disabilitas intelektual (Neece et al., 2020, p. 740). Literatur menunjukkan bahwa orang tua dari anak-anak dengan disabilitas intelektual mengalami stres pengasuhan yang meningkat (Woodman et al. 2015). Perilaku anak berdampak pada penyesuaian orang tua dan penyesuaian orang tua memengaruhi perilaku anak (Neece et al., 2020, p. 740). Artinya, terdapat hubungan resiprokal antara keduanya: anak dan orang tua penyandang disabilitas intelektual dalam merespons perubahan-perubahan yang cepat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini. Tak hanya sampai di sini, peran pekerja yang merawat penyandang disabilitas intelektual tak urung juga terkena dampaknya yakni mengalami peningkatan stres (Embregts et al., 2020, p. 9).

## **PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN PELINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN PENYANDANG DISABILITAS**

Dalam kondisi pandemi seperti ini, sayangnya Pemerintah kerap luput dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak atas kesehatan penyandang disabilitas. Sebagai contoh pada April 2020 tiga anak disabilitas ganda dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Ganda Rawinala yang positif Covid-19 harus diisolasi di asrama sekolah karena RS Darurat Wisma Atlet tidak dapat mengakomodasi pasien Covid-19 dengan disabilitas ganda (Abdi, 2020). Selain itu kondisi penyandang disabilitas yang berada di panti sosial juga rentan tertular Covid-19. Tiga puluh lima anak disabilitas di Panti Yayasan Tri Asih, Jakarta Barat positif Covid-19 (Anugrahadi, 2021) dan

dua panti sosial di Cipayung, Jakarta Timur sempat menjadi klaster penyebaran Covid-19 usai ditemukannya total 302 kasus (Simanjuntak, 2021). Lebih lanjut menurut survei atau hasil kajian cepat yang digarap Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) sebanyak 80,9 persen responden menyatakan mengalami dampak negatif akibat Covid-19 antara lain kesulitan mobilitas, kesulitan mendapatkan pendamping, dan kesulitan ekonomi (Jaringan DPO Respon COVID-19 Inklusif, 2020).

Hal yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penghambat layanan di antaranya adalah data yang tidak memadai. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki data penyandang disabilitas nasional secara keseluruhan namun berdasarkan pendekatan data yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos), sekitar 9-12 persen penduduk Indonesia mengalami disabilitas sedang atau berat (Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, 2020). Jumlah riil penyandang disabilitas di Indonesia berpotensi lebih besar karena data tersebut belum mencakup keseluruhan penyandang disabilitas baik yang berada di dalam panti sosial swasta/pemerintah, di kediaman pribadi, dan yang belum terdaftar ke dalam sistem administrasi kependudukan.

Kepatuhan terhadap protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh otoritas pemerintah, sangat penting untuk diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Karena perilaku individu ini akan menjadi perilaku kolektif yang tentu saja akan sangat memengaruhi keadaan kesehatan masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya bersama-sama menghadapi pandemi ini. Studi yang dilakukan oleh Asimakopoulou et al. 2020 menegaskan hal ini, yakni bahwa persepsi masyarakat tentang suatu situasi memengaruhi perilaku mereka, untuk itu memahami orang tentang risiko Covid-19 dalam pandemi ini demikian penting untuk dapat memprediksi perilaku umum terkait Covid-19 di masa mendatang (Asimakopoulou et al., 2020, p. 1503).

Tindakan individu, bagaimanapun kecilnya, dalam skala besar tentu akan berpengaruh pada perbaikan kondisi kesehatan masyarakat. Misalnya, pemerintah di Inggris berfokus pada

gagasan bahwa tinggal di rumah akan berdampak positif langsung dalam mengantisipasi penularan Covid-19. Slogan ‘Tetap di Rumah, Lindungi NHS, Selamatkan Kehidupan’, yang kemudian diganti dengan ‘Tetap Waspada, Kendalikan Virus, Selamatkan Kehidupan’, memiliki bahwa tindakan individu dapat berpengaruh besar bagi kesehatan dan keselamatan publik secara luas. (Asimakopoulou et al., 2020, p. 1503). Efek pandemi juga dirasakan bagi kelompok disabilitas lainnya, semisal penyandang autisme. Bagi penyandang autisme, mengisolasi diri dan menjaga jarak secara fisik dapat meningkatkan tingkat stres karena perubahan kebiasaan. Mereka dapat menjadi terlalu fokus dan kemudian kewalahan dengan banyaknya informasi terkait Covid-19 di media dan di media sosial. Perilaku tersebut dapat meningkatkan tingkat kecemasan dan pemikiran paranoid yang menyebabkan kesulitan dalam perilaku mereka sehingga semakin mengurangi kemampuan untuk mempraktikkan perilaku jarak sosial. (Courtenay & Perera, n.d., p. 2).

Maka dalam situasi genting seperti pandemi ini, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi individu dan kolektif dan agar penyandang disabilitas dapat mengakses layanan publik termasuk kesehatan, serta memastikan bahwa semua orang termasuk penyandang disabilitas diperlakukan dengan hormat dan bermartabat (Schiariti, 2020a, p. 661). Lebih lanjut studi lain yakni oleh Schuengel et al. 2020 juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan inklusif untuk mengambil tindakan berkelanjutan guna mengendalikan Covid-19 (Berger et al. 2020) atau pandemi lainnya yang mungkin saja akan terjadi di masa depan (Schuengel et al., 2020, p. 823). Lebih lanjut, jaminan inklusi ini akan berdampak positif pada kesejahteraan penyandang disabilitas, keluarga mereka, dan masyarakat secara umum (Schiariti, 2020a, p. 661).

Adapun beberapa fakta umum yang menjadi kendala pemenuhan dan perlindungan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas, di antaranya:

- a. Ketiadaan Data Terpilah Penyandang Disabilitas

Dalam konteks perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, terdapat tantangan khusus yakni berupa minimnya ketersediaan data sebagai basis pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan. Hingga saat ini belum ada data yang secara khusus menggambarkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia secara keseluruhan. Bahkan hanya sedikit pemerintah daerah yang memiliki data jumlah penyandang disabilitas di daerahnya masing-masing. Pada rapat koordinasi mengenai penyandang disabilitas mental pada masa pandemi Covid-19 yang dihadiri lembaga Komnas HAM, terdapat lima perwakilan pemerintah daerah yang hadir yaitu Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dari kelima dinas sosial yang hadir, hanya tiga yang memiliki atau mendata panti sosial penyandang disabilitas mental baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta (Hartono et al., 2020). Hal ini sedikit menggambarkan bahwa data penyandang disabilitas khususnya di tingkat daerah masih sangat terbatas pada data panti sosial yang ada. Ini mengakibatkan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas hanya terkonsentrasi pada penerapan protokol kesehatan di panti sosial yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Padahal tertera dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan sebagai suatu bagian dari Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) bahwa di setiap wilayah harus tersedia data kelompok rentan di mana salah satu hal yang perlu dicatat adalah faktor risiko penyandang disabilitas (Kementerian Kesehatan, 2020).

Untuk menganalisis jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, selama ini masyarakat dan pemerintah hanya menggunakan pendekatan data beberapa survei dan sensus nasional seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Sensus Penduduk. Selain itu pendataan disabilitas masih

menggunakan konsep/nomenklatur yang beragam antar instansi pemerintah (Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, 2020). Hal ini mengakibatkan perbedaan interpretasi dalam penggunaan data yang berbeda. Perbedaan interpretasi tersebut membuat proses perencanaan kebijakan pembangunan yang inklusif menjadi sulit (Pramana, 2018).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Irwanto et al. (2010) terdapat beberapa catatan mengenai pendataan penyandang disabilitas di Indonesia. *Pertama*, saat ini masih sulit untuk menentukan besaran yang sebenarnya dari penduduk yang mengalami disabilitas karena berubah-ubahnya definisi operasional yang digunakan. *Kedua*, data yang tersedia lebih mencerminkan sasaran pembangunan nasional untuk pengentasan kemiskinan bukan data kependudukan dengan disabilitas. *Ketiga*, survei yang ada tidak mampu merepresentasikan dengan baik prevalensi disabilitas di ranah mental emosional dan intelektual (Irwanto, Kasim, Fransiska, Lusli, & Siradj, 2010).

Terkait dengan data, terdapat pula hambatan implementasi berupa penghitungan cacah yang selama ini dilakukan pada unit rumah tangga, bukan pada unit individu di dalam rumah tangga. Misalnya, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 menghitung Garis Kemiskinan per rumah tangga dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin (Badan Pusat Statistik, 2020). Dalam konteks disabilitas, hal ini tentu tidak cukup mengadaptasi kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang beragam itu. Karena kebutuhan individu penyandang disabilitas amatlah bervariasi, berbeda satu sama lain, oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan anggota rumah tangga nondisabilitas.

Dengan tidak adanya data yang komprehensif, perlindungan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas sulit terwujud seperti ketiadaan kebijakan penanggulangan yang inklusif dan afirmatif bagi penyandang

disabilitas yang memiliki kebutuhan berbeda-beda berdasarkan ragam disabilitas yang dimilikinya.

b. Kebijakan Umum yang Kurang Mengadaptasi Kelompok Penyandang Disabilitas

Dalam tata kelola penanggulangan Covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pembatasan sosial dan mobilitas. Hal tersebut meliputi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal masa pandemi, PSBB Transisi/Adaptasi Kebiasaan Baru, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan PPKM Mikro. Sebagian besar kebijakan tersebut berisi ketentuan-ketentuan pembatasan aktivitas umum untuk mengurangi penyebaran virus *corona*. Sayangnya sebagian besar kebijakan pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat tidak diimbangi dengan perhatian untuk perlindungan hak kelompok rentan. Tidak ada satu pun peraturan pembatasan sosial yang melibatkan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas baik dalam proses penyusunannya maupun termuat dalam substansi peraturan untuk mencapai perlindungan haknya.

Selama masa pandemi pemerintah mengeluarkan beberapa pedoman perlindungan bagi penyandang disabilitas antara lain:

- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
- Protokol Perlindungan terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
- Pedoman Perlindungan Kesehatan dan Dukungan Psikososial terhadap Penyandang Disabilitas sehubungan dengan Terjadinya Wabah Covid-19 di Lingkungan Balai Besar/Balai/Loka Disabilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas, dan Lembaga Lainnya oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial; dan

- Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Seluruh pedoman yang dibuat secara garis besar menjadi panduan bagi pihak terkait baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian dalam rangka perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Namun pedoman tersebut tidak disertai dengan rencana aksi yang mengatur secara detail program perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk di dalamnya hak atas kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa paradigma pemerintah mengenai keberadaan kelompok rentan hanya terbatas pada pengelolaan risiko bukan mencakup upaya pemenuhan dan perlindungan hak kelompok rentan sebagaimana tugasnya sebagai *duty bearer*.

Penanggulangan Covid-19 yang inklusif dibutuhkan untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap hak atas kesehatannya. Penyandang disabilitas memiliki risiko yang tinggi tertular virus dan mengalami komplikasi berat sehingga meningkatkan potensi kematian (United Nations, 2020a). Richard Armitage dalam "*The Covid-19 Response Must be Disability Inclusive*" menyampaikan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam memastikan tata kelola penanggulangan Covid-19 yang inklusif. *Pertama*, berkaitan dengan kesenjangan informasi layanan kesehatan yang dialami penyandang disabilitas, maka segala komunikasi harus tersebar dengan bahasa yang mudah dipahami dan dalam format yang mudah diakses. *Kedua*, strategi mitigasi penyebaran Covid-19 harus mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas terhadap asistensi makanan dan obat dari perawat personal. *Ketiga*, petugas/perawat kesehatan penyandang disabilitas harus disediakan pelatihan cepat untuk dapat mengakomodasi ragam kebutuhan penyandang disabilitas karena kondisi kerentanan mereka terhadap penyebaran Covid-19 (Armitage & Nellums, 2020).

c. Sulitnya Aksesibilitas Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

Ragam disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam mengakses layanan kesehatan. Sebagai contoh, penyandang disabilitas psikososial dan mental memerlukan obat-obatan rutin untuk menjaga kondisi kesehatan mentalnya antara lain: antidepresan, obat anti kecemasan, atau antipsikotik. Sedangkan penyandang disabilitas fisik dan ragam lainnya membutuhkan barang/alat, transportasi, atau bantuan dari perawat untuk dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari guna mencapai kesehatan yang baik.

Sebelum masa pandemi Covid-19, penyandang disabilitas sering mengalami berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesehatan publik. Mulai dari aspek aksesibilitas fisik yaitu masih banyaknya ditemukan fasilitas kesehatan primer yang belum ramah disabilitas, dari aspek aksesibilitas ekonomi yaitu tidak adanya jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses legalitas, dan stigmatisasi yang dialami serta hak persetujuan (*informed consent*) yang sering tidak mereka dapatkan (Limbong et al., 2020). Pelindungan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas telah diatur dan dijamin Negara melalui beberapa instrumen HAM yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (KIHDP) yang telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*. Pasal 12 UU Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas meliputi aspek aksesibilitas informasi, aksesibilitas sumber daya kesehatan, prinsip nondiskriminasi/kesetaraan dan kesempatan, terjaminnya ketersediaan obat dan alat bantu, serta persoalan *informed consent* atau otonomi atas tubuh. Sedangkan Pasal 25 KIHDP

menegaskan kewajiban negara pihak – termasuk Indonesia – untuk menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas, sumber daya, dan tenaga kesehatan harus terjamin serta dijalankan dengan prinsip nondiskriminasi.

Dalam kekhususan disabilitas (misalnya dalam konteks disabilitas intelektual), Alexander et al. (2020) menekankan pentingnya rencana perawatan Covid-19 untuk individu yang berisiko sangat tinggi, membuat atau memperbarui paspor rumah sakit, serta meningkatkan dukungan psikologis dan komunikasi sesuai kebutuhan. Penting untuk menjamin perawatan dan pengobatan penyandang disabilitas dengan menempatkan tenaga kesehatan dengan baik guna memberikan dukungan dan perawatan berkualitas tinggi (Alexander et al., 2020, p. 267), mengingat layanan perawatan kesehatan disabilitas ini umumnya adalah perawatan yang dilakukan dalam jangka panjang (Alexander et al., 2020, p. 817).

Kondisi pandemi Covid-19 membuat kondisi pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas di Indonesia semakin sulit. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, tata kelola penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak memberikan pelindungan yang utuh bagi penyandang disabilitas secara khusus terhadap hak atas kesehatannya. Adanya fenomena penolakan penyandang disabilitas di RS Darurat Wisma Atlet karena tidak adanya tenaga medis yang mampu menangani disabilitas menjadi suatu gambaran bahwa mekanisme layanan kesehatan Covid-19 khusus penyandang disabilitas tidak tersedia.

Per Januari 2021 kondisi keterisian tempat tidur atau *Bed Occupancy Rate* rawat inap dan *Intensive Care Unit* (ICU) di sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 di kota/kabupaten di pulau Jawa lebih tinggi dibanding anjuran yang ditetapkan WHO sebesar 60 persen (CNN Indonesia, 2021). Keadaan tersebut menyebabkan banyak pasien Covid-19 terpaksa melakukan iso-

lasi mandiri (Harsono, 2021). Maraknya perawatan dengan isolasi mandiri menyulitkan pasien dengan disabilitas karena beberapa ragam disabilitas membutuhkan bantuan dari orang lain untuk beraktivitas. Dalam lingkup wilayah tingkat desa yang dinyatakan dalam studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, program perlindungan kesehatan belum sepenuhnya inklusif sebagaimana temuan menyatakan bahwa 86% desa belum memiliki ruang isolasi desa dan masih mengandalkan isolasi mandiri (Rivera & Karinawati, 2020).

Kebijakan pembatasan sosial di tempat umum termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan baik primer maupun sekunder mengakibatkan terhalangnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam hal perawatan/pengobatan penyakit non- Covid-19. Sebagaimana temuan dalam survei yang dilakukan Jaringan DPO bahwa persentase responden yang mengalami kesulitan mobilitas adalah yang tertinggi yaitu sebesar 30,25 persen. Lebih lanjut tingginya kesulitan mobilitas yang dihadapi saat masa pandemi erat kaitannya dengan persoalan perpindahan tempat dari rumah ke luar rumah (Jaringan DPO Respon COVID-19 Inklusif, 2020). Persoalan mobilitas mengakibatkan para penyandang disabilitas terpaksa mengurungkan niatnya datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini berisiko mengganggu kesehatan penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang disabilitas yang memiliki kerentanan tertular Covid-19 karena memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, jantung, TBC, dan lain-lain.

d. Kurangnya Inovasi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan

Dengan situasi pandemi ini, kebutuhan pelayanan *telemedicine* dan *telehealth* menjadi hal yang sangat penting. WHO dalam “*Disability Considerations during the Covid-19 Outbreak*” merekomendasikan

fasilitas kesehatan yang ada untuk menyediakan konsultasi lewat telepon, pesan teks, dan konferensi video untuk penyediaan layanan kesehatan dan dukungan psikososial bagi orang dengan disabilitas (WHO, 2020b). Implementasi *telehealth* di Indonesia sendiri sudah dilakukan oleh negara misal JKN *Mobile* dan BPJS *Digital Claim Verification*, sedangkan jasa *telemedicine* yang diprakarsai sektor swasta, contohnya adalah *AloDokter* dan *Halodoc*. Namun implementasi dan pengembangan layanan kesehatan digital masih menemui banyak tantangan karena Indonesia masih dalam masa pengembangan infrastruktur dan persoalan keberterimaan, kompetensi, dan interoperabilitas dari masyarakat (Deloitte Indonesia, Bahar Law Firm, & CHAPTERS, 2019).

Situasi pandemi ini mau tidak mau ‘memaksa’ penyedia layanan untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan kesehatan selama pandemi Covid-19 berlangsung (Zaagsma, Volkens, Swart, Schippers, & van Hove, 2020, p. 750). Salah satu bentuk respons penyedia layanan kesehatan adalah dengan menyediakan *telehealth* (layanan kesehatan jarak jauh dengan mengadaptasi metode daring). *Telehealth* kelak akan bermanfaat meskipun pandemi telah berakhir. Cara ini, misalnya, memungkinkan keluarga yang tinggal jauh dari rumah sakit dan pusat rehabilitasi untuk menerima perawatan yang memadai melalui jarak jauh (Provenzi et al., 2021, p. 195). Namun sayangnya program *telehealth* saat ini masih sangat terbatas, umumnya difasilitasi oleh penyedia jasa swasta.

Untuk itu Jeste et al.2020 berpendapat bahwa membangun sistem *telehealth* akan dapat menjamin layanan kesehatan secara berkelanjutan (Jeste et al., 2020, p. 825). Selain itu diperlukan *feed-back* dari keluarga dan masing-masing individu dalam rangka meningkatkan perawatan dan dukungan jangka panjang yang berkelanjutan (Jeste et al., 2020, p. 832).

## PENUTUP

Dari pembahasan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19, dapat disimpulkan bahwa: 1. Situasi pemenuhan hak atas kesehatan saat pandemi Covid-19 ini belum cukup memadai, hal ini ditandai dengan kurang dapat teraksesnya layanan kesehatan bagi para penyandang disabilitas; dan 2. Peran pemerintah dalam memenuhi kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan ini belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan kesadaran yang belum komprehensif dalam meletakkan pemenuhan kesehatan penyandang disabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM (*human rights based approach*). Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dapat ditawarkan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah selaku pemangku kewajiban, sebagai berikut:

### 1. Jaminan perawatan dan pengobatan

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus yang dimiliki karena ragam disabilitas yang ada dengan cara memberikan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), serta secara ketat mengikuti protokol kesehatan bagi nakes maupun pasien penyandang disabilitas untuk menghindari risiko infeksi virus pada kedua belah pihak

### 2. Sistem perawatan darurat yang komprehensif

Pandemi ini membutuhkan respons cepat berupa sistem perawatan darurat. Sistem ini harus memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, mendapat manfaat dari pendekatan berbasis hak yang inklusif.

### 3. Program Telehealth untuk mengatasi jarak sosial

Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah pengembangan layanan kesehatan lewat platform digital. Hal ini sesuai dengan kajian tekno-ekonomi yang menyatakan bahwa pengembangan *telehealth* dan *telemedicine* di Indonesia sangat mungkin untuk diterapkan (Ariyanti & Kautsarina, 2017). Layanan kesehatan

digital melalui *telemedicine* atau *telehealth* dapat memangkas hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas.

### 4. Kebijakan kesehatan yang inklusif

Menyitir Jackson et al. dibutuhkan perbaikan pembangunan kesehatan untuk kota-kota/daerah inklusif dalam menghadapi Covid-19 yakni dengan menekankan pada: (1) informasi yang dapat diakses; (2) pengambilan keputusan yang inklusif; (3) dukungan ekonomi; dan (4) nondiskriminasi (Jackson et al., 2021)2021.

### 5. Membangun basis data terpilah

Ketersediaan data penyandang disabilitas beserta persebarannya merupakan kebutuhan yang mendesak. Memahami jumlah penyandang disabilitas dan keadaan mereka dapat membantu upaya penghapusan hambatan yang berbeda-beda dan memudahkan pemerintah untuk menyediakan layanan yang tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. P. (2020, 24 April). Anak Difabel Ganda Positif COVID-19 Ditolak Dirawat di Wisma Atlet. *Tirto*. <https://tirto.id/anak-difabel-ganda-positif-covid-19-ditolak-dirawat-di-wisma-atlet-eUuf>
- Akingbola, K. (2020). COVID-19: The Prospects for Nonprofit Human Resource Management. *Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research*, 11(1), 5.
- Alexander, R., Ravi, A., Barclay, H., Sawhney, I., Chester, V., Malcolm, V., ... Langdon, P. E. (2020). Guidance for the Treatment and Management of COVID-19 Among People with Intellectual Disabilities. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 17(3), 256–269.
- Alzyood, M., Jackson, D., Aveyard, H., & Brooke, J. (2020). COVID-19 reinforces the importance of handwashing. *Journal of Clinical Nursing*, 29, 2760–2761.
- Anugrahadi, A. (2021, 16 Januari). 35 Anak Disabilitas Penghuni Panti Tri Asih, Jakbar Positif Covid-19. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4458811/35-anak-disabilitas-penghuni-panti-tri-asih-jakbar-positif-covid-19>

- Ariyanti, S., & Kautsarina, K. (2017). Kajian Tekno-Ekonomi pada Telehealth di Indonesia. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 15(1), 43–54.
- Armitage, R., & Nellums, L. B. (2020). The COVID-19 Response Must be Disability Inclusive. *The Lancet Public Health*, 5, e257.
- Asimakopoulou, K., Hoorens, V., Speed, E., Coulson, N. S., Antoniszczak, D., Collyer, F., ... Scambler, S. (2020). Comparative optimism about infection and recovery from COVID-19; Implications for adherence with lockdown advice. *Health Expectations: An International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy*, 23, 1502–1511.
- Badan Pusat Statistik (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020
- Blundell, R., Costa Dias, M., Joyce, R., & Xu, X. (2020). COVID-19 and Inequalities. *Fiscal Studies*, 41, 291–319.
- Brüssow, H. (2020). COVID-19: Test, trace and isolate-new epidemiological data. *Environmental Microbiology*, 22, 2445–2456.
- Saat Pandemi, Klaim Pengobatan BPJS Kesehatan Turun 40% [Video]. (2020, 6 Mei). *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200505162530-8-156502/saat-pandemi-klaim-pengobatan-bpjs-kesehatan-turun-40>
- Keterisian RS Covid di Jawa Lebih Buruk dari Standar WHO. (2021, 2 Februari). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210202101052-20-601208/keterisian-rs-covid-di-jawa-lebih-buruk-dari-standar-who>
- Courtenay, K., & Perera, B. (n.d.). COVID-19 and people with intellectual disability: Impacts of a pandemic. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 1–6.
- Cuevas, A., & Barquera, S. (2020). COVID-19, Obesity, and Undernutrition: A Major Challenge for Latin American Countries. *Obesity (Silver Spring, Md.)*, 28, 1791–1792.
- Deloitte Indonesia, Bahar Law Firm, & CHAPTERS. (2019). *21st Century Health Care Challenges: A Connected Health Approach*. PT Deloitte Konsultan Indonesia.
- Devandas, C. (2020, 17 Maret). COVID-19: Who is protecting the people with disabilities? – UN rights expert. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725>
- Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos. (2020). Kebijakan Kementerian Sosial dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Kelompok Rentan. Dipaparkan pada Acara “FGD Penikmatan Hak atas Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai bagi Kelompok Rentan” Tanggal 15 September 2020. Jakarta.
- Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. (2020, 17 Juni). Sinkronisasi Data Nasional Penyandang Disabilitas. *Kemensos*. <https://kemensos.go.id/ar/sinkronisasi-data-nasional-penyandang-disabilitas>
- Embregts, P. J. C. M., Tournier, T., & Frielink, N. (2020). Experiences and needs of direct support staff working with people with intellectual disabilities during the COVID-19 pandemic: A thematic analysis. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* 34(2), 480–490. <https://doi.org/10.1111/jar.12812>
- Figueiredo, A. M. de, Figueiredo, D. C. M. M. de, Gomes, L. B., Massuda, A., Gil-García, E., Vianna, R. P. de T., & Daponte, A. (2020). Social determinants of health and COVID-19 infection in Brazil: An analysis of the pandemic. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73.
- Gostin, L. O., Friedman, E. A., & Wetter, S. A. (2020). Responding to Covid-19: How to Navigate a Public Health Emergency Legally and Ethically. *The Hastings Center Report*, 50, 8–12.
- Harsono, F. H. (2021, 3 Februari). RS Hampir Penuh, Jubir Wiku: Banyak Pasien COVID-19 Terpaksa Isolasi Mandiri. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/health/read/4473970/rs-hampir-penuh-jubir-wiku-banyak-pasien-covid-19-terpaksa-isolasi-mandiri>
- Hartono, M. D., Limbong, R. J., Marbun, A. A. Y., Azeri, B., Fitri, O. R., Nureda, K. R., ... Ayunda, Z. M. (2020). *Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Hope, J. (2020). COVID-19 response requires planning, flexibility. *The Successful Registrar*, 20, 8–9.
- Irwanto, Kasim, E. R., Fransiska, A., Lusli, M., & Siradj, O. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Jakarta.
- Jackson, J., Silvestri, G., Stevenson, M., Sinton, J., Witherow, J., McCann, R., ... Cushley, L. (2021). COVID-19: The regional impact of COVID-19 on the certification of vision impairment in Northern Ireland. *Ophthalmic & Physiological Optics*, 41, 136–143.
- Jaringan DPO Respon COVID-19 Inklusif. (2020). *Laporan Asesmen Cepat Dampak COVID-19 bagi Penyandang Disabilitas: Yang Bergerak dan Yang Terpapar di Masa Pandemi*.

- Jeste, S., Hyde, C., Distefano, C., Halladay, A., Ray, S., Porath, M., ... Thurm, A. (2020). Changes in access to educational and healthcare services for individuals with intellectual and developmental disabilities during COVID-19 restrictions. *Journal of Intellectual Disability Research, 64*, 825–833.
- Kementerian Kesehatan. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta.
- Knopf, A. (2020). COVID-19 and worsening parent-child well-being. *The Brown University Child and Adolescent Psychopharmacology Update, 22*, 5–6.
- Komnas HAM RI. (2021). *Standar Norma dan Peraturan tentang Hak Atas Kesehatan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.
- Limbong, R. J., Farikhati, N., Felani, M., Yuli, I., Ayunda, Z. M., Nike, D., ... Saputri, F. I. (2020). *Kajian Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia* (Y. Rosdianti, Ed.). Komnas HAM RI.
- Mukherjee, D. (2020). Experiencing Community in a Covid Surge. *The Hastings Center Report, 50*, 10–11.
- Neece, C., McIntyre, L. L., & Fenning, R. (2020). Examining the impact of COVID-19 in ethnically diverse families with young children with intellectual and developmental disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research, 64*, 739–749.
- Ng, S. M. (2020). COVID-19 and children with diabetes: Emerging knowledge. *Practical Diabetes (2011), 37*, 147–148a.
- OHCHR. (2015). *Protection of Economics, Social, and Cultral Rights in Conflict*. Jenewa: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
- OHCHR. (2020). *COVID-19 GUIDANCE*. Geneva.
- Pineda, V. S., & Corburn, J. (2020). Disability, Urban Health Equity, and the Coronavirus Pandemic: Promoting Cities for All. *Journal of Urban Health, 97*, 336–341.
- Pramana, R. P. (2018, 5 Desember). 6 Penghalang Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan. *The Conversation*. <https://theconversation.com/6-penghalang-keterlibatan-penyandang-disabilitas-dalam-proses-pembangunan-108176>
- Provenzi, L., Grumi, S., Gardani, A., Aramini, V., Dargenio, E., Naboni, C., ... Borgatti, R. (2021). Italian parents welcomed a telehealth family-centred rehabilitation programme for children with disability during COVID-19 lockdown. *Acta Paediatrica, 110*, 194–196.
- Rivera, M., & Karinawati, D. (2020). *Desa Tanggap COVID-19: Sudahkah Inklusif Disabilitas?*
- Rolland, J. S. (2020). COVID-19 Pandemic: Applying a Multisystemic Lens. *Family Process, 59*, 922–936.
- Rosdianti, Y. (2016). Understanding Positive Measures in an Equality Framework on the Ground of Disability. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 18*, 136–153.
- Rosdianti, Y. (2017). Meaningful Work and Disability: A Dignity Towards Social Inclusion. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), 4*, 69–86.
- Roy, J., Jain, R., Golamari, R., Vunnam, R., & Sahu, N. (2020). COVID-19 in the geriatric population. *International Journal of Geriatric Psychiatry, 35*, 1437–1441.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). Peta Sebaran Kasus COVID-19. Diambil 5 Maret 2021, dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Schiariti, V. (2020a). The human rights of children with disabilities during health emergencies: The challenge of COVID-19. *Developmental Medicine and Child Neurology, 62*, 661–661.
- Schiariti, V. (2020b). The human rights of children with disabilities during health emergencies: The challenge of COVID-19. *Developmental Medicine and Child Neurology, 62*, 661–661.
- Schuengel, C., Tummers, J., Embregts, P. J. C. M., & Leusink, G. (2020). Impact of the initial response to COVID-19 on long-term care for people with intellectual disability: An interrupted time series analysis of incident reports. *Journal of Intellectual Disability Research, 64*, 817–824.
- Sekalala, S., Forman, L., Habibi, R., & Meier, B. M. (2020). Health and human rights are inextricably linked in the COVID-19 response. *BMJ Global Health, 5*.
- Simanjuntak, T. R. (2021, 5 Januari). Penelusuran Klaster Panti Sosial di Cipayung, Temuan 302 Kasus Covid-19 di 2 Tempat. *Kompas*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/05/05350061/penelusuran-klaster-panti-sosial-di-cipayung-temuan-302-kasus-Covid-19-di?page=all>
- Singu, S., Acharya, A., Challagundla, K., & Siddappa, N. (2020). Impact of Social Determinants of Health on the Emerging COVID-19 Pandemic in the United States. *Frontier in Public Health, 8*.
- Solomon, M. Z., Wynia, M. K., & Gostin, L. O. (2020). Covid-19 Crisis Triage—Optimizing Health Outcomes and Disability Rights. *The New England Journal of Medicine, 383*, e27–.

- Tseng, T.-G., Wu, H.-L., Ku, H.-C., & Tai, C.-J. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Disabled and Hospice Home Care Patients. *The Journals of Gerontology: Series A*, 75, e128–e129.
- Uli, C. M. (2020). Berdamai dengan Covid dan Inovasi Layanan Rumah Sakit. *Detik*. <https://news.detik.com/kolom/d-5064639/berdamai-dengan-covid-dan-inovasi-layanan-rumah-sakit>
- UN Economic and Social Council. *CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12)*. (2000). UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 *Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities*. 10 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 *Penyandang Disabilitas*. 15 April 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Jakarta
- United Nations. (2020a). “Disability-Inclusive Response to COVID-19 – Towards A Better Future for All”: A Response to the Secretary-General’s Policy Brief. Diakses pada 16 Februari 2021, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2020/05/Joint-statement-Disability-inclusive-response-to-COVID-19.pdf>
- Testing, Tracing, and When to Lift Restrictions: WHO’s Latest Advice. (2020b). *United Nations News*. <https://news.un.org/en/story/2020/04/1061642>
- WHO. (2020a). *Addressing Human Rights as Key to the COVID-19 Response*.
- WHO. (2020b). *Disability Considerations during the COVID-19 Outbreak*. Jenewa.
- WHO Indonesia. (2021). *WHO Indonesia Situation Report—41*.
- WHO, & World Bank. (2011). *World Report on Disability*. Malta.
- Modes of Transmission of Virus Causing COVID-19: Implications for IPC Precaution Recommendations. (2020, 29 Maret). *World Health Organization*. <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-Covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>
- Yates, S., Dickinson, H., Smith, C., & Tani, M. (2020). Flexibility in individual funding schemes: How well did Australia’s National Disability Insurance Scheme support remote learning for students with disability during COVID-19? *Social Policy & Administration*. <https://doi.org/10.1111/spol.12670>
- Zaagsma, M., Volkers, K. M., Swart, E. A. K., Schippers, A. P., & van Hove, G. (2020). The use of online support by people with intellectual disabilities living independently during COVID-19. *Journal of Intellectual Disability Research*, 64, 750–756.

## **Dominasi maskulin saat wabah Covid-19 di Desa Sotang, Tuban: Perspektif Pierre Bourdieu**

### *Masculine domination during Covid-19 pandemic in the Sotang Village, Tuban: The perspective of Pierre Bourdieu*

**Faridlatu Sya'adah<sup>1</sup> dan Fitri Febriyanti<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang

E-mail: <sup>1</sup>faridlatussyaadah@staialanwar.ac.id dan <sup>2</sup>fitrifebriyanti@staialanwar.ac.id

#### **ABSTRACT**

*This article aims to discuss the form of masculinity domination in the role of women in dealing with the impact of the Covid-19, especially in the social, economic, and cultural in Sotang Village, Tambakboyo District, Tuban Regency. Women in the patriarchal culture are stereotyped as the second sex. Men are given the disposition as determinants of life, breadwinners, masculine social status. Women take on a role outside the domestic sphere as onion cutters during the Covid 19. Such practices result in the formulation of problems including: (1) How is the struggle of lower middle-class women in Sotang Village in overcoming the crisis of food security and family education during the Covid-19 Pandemic? 19?; (2) How do the female onion cutters interpret their dual role? (3) How is the practice that occurred in Sotang Village interpreted as a form of Masculine Domination in Pierre Bourdieu's perspective? This type of research is descriptive qualitative. The object of the research is housewives who have a new profession as onion cutters in the lower middle-class environment who come from families affected by Covid-19. Data were obtained through observation and semi-structured interviews. The framework used is Pierre Bourdieu's perspective on the dominance of masculinity. The dominance of masculinity found in the social practices of the Sotang Village community during the Covid-19 included: (1) New Roles as Onion Cutter during the Covid-19 Outbreak; (2) Women's Dual Role in Sotang Village during the Covid 19 Pandemic (3) Space Contest for Onion Slicing Women; (4) Poverty and Women. Forms of masculine domination followed by symbolic violence as a result of doxa lower middle-class women at the Sotang Village while Covid-19 become part of the inaugural androcentric culture.*

**Keywords:** *Masculine Domination, Women, Pierre Bourdieu, Sotang Village.*

#### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk membahas bentuk dominasi maskulinitas dalam peran wanita menghadapi dampak pandemi Covid-19 khususnya bidang sosial, ekonomi, budaya yang terdapat di Desa Sotang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Perempuan dalam budaya masyarakat Patriarki disterotipkan sebagai "the second sex". Laki-laki diberi disposisi sebagai penentu kehidupan, pencari nafkah, status sosial yang maskulin. Perempuan mengambil peran di luar ruang domestik sebagai pemotong bawang di masa pandemi Covid 19. Praktik demikian menghasilkan rumusan masalah di antaranya: (1) Bagaimanakah perjuangan perempuan kelas menengah ke bawah di Desa Sotang dalam mengatasi krisis ketahanan pangan dan pendidikan keluarga di masa Pandemi Covid-19?; (2) Bagaimanakah para perempuan pemotong bawang memaknai peran gandanya? (3) Bagaimanakah praktik yang terjadi di Desa Sotang ini dimaknai sebagai bentuk Dominasi Maskulin dalam perspektif Pierre Bourdieu? Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian yaitu ibu rumah tangga yang berprofesi baru sebagai pemotong bawang di lingkungan kelas menengah ke bawah yang berasal dari keluarga terdampak Covid-19. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-struktur. Kerangka berpikir yang digunakan adalah perspektif Pierre Bourdieu tentang dominasi maskulinitas. Dominasi maskulinitas yang ditemukan dalam praktik sosial masyarakat Desa Sotang di masa pandemi Covid-19 di antaranya adalah: (1) Peran Baru sebagai Pemotong Bawang saat Wabah Covid-19; (2) Peran Ganda Perempuan di Desa Sotang di masa Pandemi Covid-19 (3) Kemiskinan dan Perempuan. Bentuk dominasi maskulin yang diikuti dengan kekerasan simbolik sebagai hasil dari pen-*doxa-*

an perempuan kelas menengah ke bawah di Desa Sotang saat pandemi Covid-19 menjadi bagian dari pengukuhan budaya androsentris.

**Kata Kunci:** *Dominasi Maskulin, Perempuan, Pierre Bourdieu, Desa Sotang.*

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Dampak secara ekonomi di antaranya banyak pekerja pabrik, para sopir angkutan orang maupun barang yang dirumahkan dan usaha dagang yang ditutup. Begitu pun dalam bidang sosial dan kebudayaan, aturan baru berupa *social distancing* membuat individu makin berjarak antar satu dengan lainnya sehingga budaya komunal masyarakat Indonesia menjadi sedikit terinterupsi. Penanganan terhadap wabah yang diikuti peraturan-peraturan baru berakibat pada regulasi baru dalam dunia pendidikan. Para siswa dan guru diwajibkan meniadakan aktivitas fisik di ruang-ruang kelas. Sebagai gantinya mereka harus belajar melalui sistem daring di dalam ruang kelas virtual dan menyiapkan, mencerna, dan mengerjakan semua tugas di rumah.

Berkaitan dengan berbagai dampak pandemi Covid-19 di dunia yang sangat kapitalis ini cukup menyulitkan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah dengan profesi sebagai sopir, buruh pabrik yang terdampak Covid-19. Permasalahan krusial yang mereka hadapi adalah bagaimana tetap mencukupi kebutuhan hidup keluarga sementara mereka dirumahkan dalam beberapa saat sampai waktu yang tidak ditentukan. Kehidupan harus tetap berlangsung, keperluan dasar berupa makanan pokok, air bersih, terlebih untuk orang tua yang mempunyai anak usia sekolah kuota internet menjadi semacam kebutuhan pokok, harus terpenuhi, dan layaknya pengadaan semua kebutuhan tersebut memerlukan pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dari kalangan kelas menengah ke bawah.

Era kapitalisme secara pelan namun pasti telah menggiring pola pikir masyarakat perdesaan tentang penghormatan kelas sosial

berdasarkan kepemilikan modal. Sebuah keluarga dikatakan bermartabat jika suaminya mempunyai penghasilan yang baik atau keluarganya mempunyai ketahanan finansial yang baik, bermula dari sini mereka menampilkan atribut-atribut identitas kelas sosialnya. Seperti pada umumnya masyarakat Indonesia yang bercorak patriarki, pemberi martabat secara sosial dan pencari nafkah utama adalah pihak laki-laki, suami atau ayah, terutama di daerah perdesaan. Suami mempunyai peran untuk bertanggung jawab membiayai segala kebutuhan sosial ekonomi anak dan istri dengan pekerjaan di luar ranah domestik. Peran istri atau anak perempuan secara konstruktif diberi tanggung jawab mengurus segala kebutuhan rumah tangga, termasuk terpenuhinya ketersediaan kebutuhan dasar di wilayah domestik di antaranya makan, minum, kenyamanan, dan kebersihan rumah (Hadyan, 2020).

Persoalan muncul ketika ayah atau suami mengalami pemberhentian kerja selama batas waktu yang tidak ditentukan sehingga mereka tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan keluarga di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas pergerakan aktif para istri ke ruang publik demi memperjuangkan ketahanan ekonomi keluarga dengan mengambil profesi-profesi baru dan tanpa mengabaikan peran domestik mereka yang notabene juga bertambah. Secara khusus, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa jauh peran perempuan di era pandemi Covid-19. Peran keluarga yang hadir di tengah keluarga ada yang bersifat baru, ganda, maupun bagaimana pemerintah memberi peran perempuan di tengah masyarakat Indonesia.

Selain perannya yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis ekonomi, para perempuan juga menghadapi imbas dari bidang pendidikan. Kewajiban untuk tetap melaksanakan pembelajaran di rumah menyebabkan anak harus mendapatkan pendampingan dari orang

tua. Bertambahnya peran domestik perempuan terkait dengan model pembelajaran daring di masa pandemi yang menuntut orang tua untuk mendampingi dan mengontrol aktivitas belajar anak di rumah beserta tugas-tugasnya. Realitas yang terjadi di Desa Sotang seperti lazimnya sebuah masyarakat patriarki di mana perempuan mempunyai habitus mengasuh, merawat, maka seorang ibu “dipaksa” menerima peran sebagai pendamping pembelajaran daring anak-anaknya setelah semua aktivitas di ruang publik sebagai buruh tani pemotong bawang.

Menyeimbangkan peran publik dan domestik yang semakin kompleks bagi seorang perempuan kelas menengah ke bawah dengan kualifikasi kepemilikan modal ekonomi maupun intelektualitas yang minim, bukan sebuah perjuangan yang mudah. Dampak pandemi Covid-19 menuntut mereka sebagai seorang anggota keluarga untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya, memampukan mereka secara tidak sadar mengambil peran mereproduksi struktur baru dalam konstruksi sosial masyarakat Desa Sotang sebagai agen perubahan yang aktif melampaui habitusnya meskipun tidak terlegitimasi oleh sistem budaya patriarki yang mengakar di desa ini. Praktik-praktik tersebut terjadi hampir di semua keluarga menengah ke bawah terdampak Covid-19 di wilayah Desa Sotang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Realitas perempuan pemotong bawang yang terjadi di Desa Sotang, bentuk-bentuk aktualisasi kelas kedua dalam ranah patriarki ini memantik penulis untuk lebih jauh memberikan interpretasi terkait ketidaksadaran mereka atas tidak adanya legitimasi kesetaraan setelah perjuangan mereka dengan peran gandanya demi ketahanan ekonomi dan pendidikan keluarga yang merupakan bagian dari ketahanan masyarakat. Dialektika nilai-nilai obyektif dengan pengalaman subjektif para agen perempuan tersebut apakah mampu mengonstruksi skema persepsi baru ataupun perolehan perubahan posisi sosial dalam masyarakat desa. Menjawab hal tersebut penulis memilih teori Pierre Bourdieu sebagai sebuah pendekatan dalam menganalisis praktik-praktik dominasi maskulin yang berpotensi menihilkan

makna perjuangan perempuan bagi rekonstruksi posisi sosial.

Beberapa penelitian lain terkait dengan dominasi maskulin telah pernah dilakukan. Namun dari semua penelitian yang telah ditelaah, penulis belum menemukan penggunaan teori Pierre Bourdieu untuk menganalisis realitas sosial masyarakat perdesaan kelas menengah ke bawah dalam konteks masa pandemi. Pada akhirnya dalam kontestasi perjuangan demi modal dan identitas sosial, selalu ada potensi kekalahan ketika dialektika nilai obyektif dan pengalaman subjektif tidak mampu menghasilkan sintesis berupa eksternalisasi dekonstruktif.

## TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa wacana yang hadir dalam artikel tentang perempuan di masa pandemi telah ditulis dalam beberapa media daring. Keduanya mengusung aktualisasi diri perempuan di tengah pandemi Covid-19. Penulis dalam artikel ini ingin lebih jauh menginterpretasi makna realitas aktualisasi perempuan dikaitkan dengan dominasi maskulinitas saat pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu khususnya pada warga desa yang mata pencaharian kepala keluarganya mendapatkan imbas dari pembatasan sosial. Penelitian tentang dominasi maskulin sebelumnya pernah dilakukan oleh Yusriana (2017). Objek penelitian tersebut berupa buku teks populer yang berjudul *Act Like a Lady Think Like a Man*. Analisis data dilakukan dengan paradigma kritis dan menggunakan metode analisis framing yakni *Muted Group Theory*. Framing yang digunakan dalam menentukan dominasi maskulin pada buku tersebut terbagi menjadi framing utama, framing mayor, dan framing minor. Setiap framing terbagi pada bab di buku mempunyai instrumen pengukuran yang disebutkan oleh Entman yakni *define problems, diagnose causes, make moral judgement, treatment recommendation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya roh penulisan dari buku *Act Like a Lady Think Like a Man* adalah ideologi patriarki. Nilai-nilai patriarkis dimunculkan dalam buku merepresentasikan dominasi maskulin terhadap perempuan salah satunya melalui *romantic relationship* yang memberi kualifikasi

karakter-karakter tertentu yang melegitimasi disposisi pihak laki-laki sebagai aktor dominan dan aktor perempuan sebagai yang tersubordinasi.

Selain penelitian dengan objek buku, penelitian tentang dominasi maskulin juga pernah dilakukan dengan metode survei. Penelitian tersebut dilakukan oleh Wahid (2016) dengan pengamatan dominasi maskulin global pada perempuan dan anak di Banten. Dominasi maskulin masih dilakukan oleh masyarakat Banten terhadap perempuan dan anak karena dipengaruhi oleh budaya patriarki. Penelitian tersebut menyarankan adanya Islam transformatif sebagai upaya menyeimbangkan pandangan global terhadap dominasi maskulin. Islam transformatif sebagai tindakan partisipatif dan kolaboratif dengan melakukan tindakan secara periodik, sustainable, dan intensif.

Pemikiran Pierre Bourdieu tentang dominasi maskulin juga dapat dijadikan penguatan identitas gender yang ada di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pandangan (Musarrofa, 2019) yang menginterpretasikan simbol-simbol komunitas Qubail sebagai analisis gender di Indonesia. Gagasan Pierre Bourdieu yang disetujui oleh Musarrofa adalah akar permasalahan adanya dominasi maskulin terletak pada mekanisme kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik yang dilakukan secara kolektif kemudian dilakukan dalam waktu yang cukup lama telah membentuk skema-skema persepsi yang digunakan untuk memahami realitas pembagian kerja secara seksual di masyarakat. Pada akhirnya terjadi keniscayaan pemahaman terhadap pemaknaan masyarakat terhadap simbol-simbol yang merepresentasikan perbedaan laki-laki dan perempuan.

Berbicara tentang kekerasan simbolik, penelitian terdahulu (Taqwa & Sadewo, 2016) telah secara gamblang menjelaskan kekerasan simbolik yang terjadi pada perempuan janda di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi pada perempuan Jawa yang berumur 20-30 tahun, umur 30-40 tahun, dan umur 40 tahun ke atas. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan struktural generatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya

kekerasan simbolik yang terjadi mulai dari habitus, modal, ranah, dan praktik. Praktik dominasi terjadi disebabkan perempuan janda secara langsung maupun tidak langsung tetap berada di bawah kuasa dan dominasi kaum maskulin. Selain itu, dominasi dianggap sebagai kodrat yang disetujui secara langsung maupun tidak langsung telah mengakar pada sistem dan budaya masyarakat di sana. Kekerasan simbolik pada penelitian tersebut dapat berawal dari keluarga, sekolah, agama, dan negara. Perlawanan yang dilakukan oleh perempuan janda terhadap dominasi tersebut adalah dengan cara bercerai dan tidak menghiraukan dominasi maskulin. Walaupun demikian, pada akhirnya perempuan akan kembali kepada sebuah doxa yakni kodrat perempuan yang harus di bawah laki-laki baik itu perempuan yang berstatus perempuan menikah maupun belum menikah.

Pierre Bourdieu merupakan tokoh sosiokultural yang telah menyumbangkan pemikiran baru dalam ilmu sosial. Teori yang diusungnya merupakan sintesis dari teori struktural yang menekankan struktur dan objektivitas dengan teori eksistensialisme yang menghidupkan peran agen dan subjektivitas. Ketidaksetujuan terhadap teori struktural yang mengabaikan konstruksi sosial dan peran para aktor, juga teori eksistensial yang meniadakan peran struktur dalam mengonstruksi agen, menghasilkan sebuah teori baru yaitu teori struktural konstruktif atau sering dikenal dengan teori praktik sosial. Menurut Bourdieu (2010:214), struktur sosial atau sistem nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat mengatur individu untuk bertindak sesuai aturan yang telah ada dan membentuk pola tingkah laku manusia namun individu sebagai agen sosial tidak serta merta hanya melakukan proses internalisasi, melainkan juga proses eksternalisasi yang memantik perubahan dalam struktur sosial. Beberapa konsep yang diusung oleh Bourdieu di antaranya adalah habitus, ranah, dan modal.

Habitus menurut Bourdieu merupakan hasil internalisasi nilai-nilai sosial budaya yang membentuk pola tingkah laku seseorang (Richard, 2009:13). Individu bukan agen sosial yang sepenuhnya bebas juga bukan produk pasif

dari struktur sosial. Habitus terbentuk melalui interaksi agen dengan struktur sosial selama proses pendidikan, permainan, atau pengasuhan. Setelah proses internalisasi inilah berkembang proses subjektif yang mana individu akan melibatkan diri secara aktif dalam bertindak. Habitus merupakan hasil dialektika struktur objektif dengan realitas subjektif yang bisa bertahan lama sekaligus bisa berubah ubah (Bourdieu, 2010:110).

Konsep Bourdieu selanjutnya dalam rangkaian teori praktik sosial adalah modal. Pergerakan modal sangat berkaitan dengan habitus khususnya modal simbolik. Modal menurut Bourdieu (2010:58) meliputi modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Antara satu modal dengan lainnya terkait erat. Kepemilikan salah satu jenis modal memengaruhi dinamika modal yang lain. Mereka bisa dipertukarkan dan diakumulasi yang mana akumulasinya menjadi hal yang sangat penting di dalam ranah (Richard, 2009: 17).

Ranah atau area adalah ruang atau semesta sosial tertentu, tempat agen sosial bersaing dalam mendapatkan sumber modal, baik material maupun simbolik yang mana hal ini akan menentukan dan membedakan posisi mereka dalam struktur sosial (Bourdieu, 2010:16-17). Semakin tinggi sumber yang dimiliki maka semakin tinggi struktur sosialnya. Perbedaan antara satu dengan yang lain berdasarkan proses persaingan dengan habitus serta modal yang dimiliki di dalam ranah inilah yang menciptakan hierarki sosial yang diterima secara mentah sebagai sebuah proses natural (Bourdieu, 1998:38). Agen sosial dengan habitus dan modal dalam suatu arena dapat menciptakan habitus baru tergantung dari pertarungan modal yang dimenangkannya. Sementara itu konsep Bourdieu tentang maskulinitas sangat terkait dengan ranah. Setiap ranah mempunyai aturan permainan berupa nilai-nilai sosial yang diinternalisasi agen.

Ranah sosial masyarakat patriarki mempunyai konstruksi yang kuat akan bias gender, simbol-simbol penguasa, kelas-kelas sosial dengan sekat dan hierarkinya. Nilai-nilai objektif yang telah terstruktur secara generatif dan diinternalisasi hingga saat ini menempatkan agen sosial di antaranya laki-laki, orang kaya

yang notabene bermodal ekonomi kuat, para intelektual yang berbekal modal simbolik, atau kelompok tertentu yang terqualifikasi dalam budaya yang cukup besar dalam konteks wilayah tertentu sebagai pihak-pihak dominan atau superior. Ranah budaya dalam ruang patriarki mempunyai konstruksi yang kuat akan bias gender, simbol-simbol penguasa, kelas-kelas sosial dengan sekat dan hierarkinya. Pembagian wilayah kerja dikonstruksi oleh para pendahulu menjadi sistem nilai hingga diwariskan turun-temurun.

Bangunan sistem yang membentuk skema-skema pemikiran tersebut merupakan produk dari relasi-relasi kuasa dan dinyatakan dalam oposisi-oposisi yang membentuk tatanan simbolik. Sistem nilai tersebut membentuk skema dalam semua habitus yang diterima sebagai hal transedental historis yang dipaksakan kepada setiap agen sebagai yang trasedental. Sistem nilai inilah yang disebut Bourdieu sebagai doksa. Dalam konsep Bourdieu, doksa adalah seperangkat aturan, nilai konvensi dan wacana yang mengatur arena secara keseluruhan dan berpengaruh sejak lama atau disajikan sebagai akal sehat (Bourdieu, 1996:228). Pengaruh yang tidak disadari sepenuhnya dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar tersebut merupakan proses dalam pembentukan habitus yaitu asas yang melahirkan dan menyusun kebiasaan. Habitus dalam sebuah ranah patriarki telah terbentuk sebagai produk dari kondisi-kondisi secara objektif yang diterapkan perempuan dalam segala bentuk realitas (Bourdieu, 1998:48).

Titik pandang kaum dominan telah membuat kategori-kategori yang diaplikasikan oleh kaum terdominasi dalam usaha memahami relasi-relasi sosial sehingga kategori-kategori tersebut tampak natural sehingga menyebabkan orang melakukan depresiasi diri bahkan penjelek-jelekan diri yang sistematis (Bourdieu, 1998:40). Terkait dengan pertarungan dalam ruang sosial, di sini penulis menempatkan tubuh sebagai ruang yang dikonstruksikan dan dipertaruhkan. Tubuh yang telah dikonstruksi secara sosial melahirkan sistem pembagian kerja atau ruang-ruang sosial berdasarkan gender. Perempuan identik dengan dapur, cucian, anak, rumah dengan segala

pekerjaan yang bersifat renik-renik, sedangkan laki-laki identik dengan arena publik dan hal-hal yang membutuhkan usaha atau tenaga yang besar. Perempuan identik dengan kelemahan, sedang laki-laki adalah kekuatan dan kekuasaan.

Bourdieu melalui analisisnya dalam penelitian tentang suku Qubail, menyajikan oposisi biner beroperasi dalam sistem masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan pada wilayah kutub negatif, inferior dan subordinat. Namun sebagai kelompok yang tersubordinasi mereka tidak menyadari tentang dominasi yang sedang berlangsung dalam ranah sosial. Semua struktur yang telah tersusun dalam tatanan masyarakat telah menjadi seakan alamiah dan mereka taati secara sadar sebagai sebuah hal yang sakral tanpa pertanyaan terlebih pemberontakan meskipun di dalamnya mengandung beberapa hal yang diskriminatif dan mendeskreditkan mereka. Praktik-praktik diskriminatif dari sistem itulah yang disebut Bourdieu sebagai sebuah kekerasan simbolik terhadap perempuan. Pemikiran Bourdieu tentang konstruksi sosial tubuh, kekerasan simbolik, dan kekuatan-kekuatan sosial, mengarahkan pada kerangka pemaknaan simbol-simbol atau representasi-representasi yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat di ranah budaya androsentris.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang diperoleh setelah dilakukannya *grand tour observation* dan *grand tour question* adalah bentuk dominasi maskulin di balik aktualisasi perempuan saat pandemi dan kekerasan simbolik yang menyertainya. Objek penelitian yaitu ibu rumah tangga yang berprofesi baru sebagai pemotong bawang di lingkungan kelas menengah ke bawah. Ibu rumah tangga tersebut berasal dari keluarga terdampak Covid-19. Penelitian dilakukan mulai bulan Maret hingga Juli 2020, bertempat di Desa Sotang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kriteria informan penelitian adalah perempuan di Desa Sotang khususnya dari kelas menengah ke bawah dengan asset modal yang minim dan perempuan yang mengawali

aktualisasi diri dengan kegiatan di luar rumah khususnya saat pandemi Covid-19.

Teknik penentuan *sample* untuk peran informan dalam populasi perempuan pemotong bawang di Desa Sotang adalah teknik *random sampling* dengan pertimbangan bahwa anggota populasi cukup homogen. Survei dilakukan dengan terlebih dahulu mendatangi perangkat desa setempat untuk meminta informasi tentang situasi dan latar belakang sosial masyarakat Desa Sotang. Informasi yang diperoleh di antaranya adalah semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi terutama kelas menengah ke bawah dari keluarga terdampak Covid-19, dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Setelah didapatkan informasi tersebut, peneliti mulai melanjutkan survei menuju ke beberapa sasaran, dari informan satu ke yang lain sampai didapatkan data jenuh. Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti. Data diperoleh melalui observasi partisipatif pasif dan wawancara semi-struktur. Peneliti mendatangi tempat kerja dan rumah informan untuk melakukan pengamatan, mencatat hasil pengamatan, dan juga melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara serta mencatat hasil wawancara dari beberapa sumber, dilakukan reduksi data.

Data dari hasil observasi dan wawancara yang masih kasar dan tidak sistematis diseleksi sehingga menjadi data yang relevan, fokus, dan terarah sesuai tema penelitian yaitu bentuk dominasi maskulin yang kemudian dianalisis menggunakan metode strukturalisme generatif. Strukturalisme generatif adalah model berpikir dialektis antara struktur objektif dengan struktur subjektif yang melibatkan agen, habitus, dan pertarungan modal dalam sebuah ranah. Selanjutnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk teks naratif, ditampilkan dalam subbab menurut bentuk dominasi maskulin yang muncul dari hasil penggalan data dan analisis.

## PEMBAHASAN

Secara umum diketahui bahwa budaya masyarakat Jawa cenderung patriarki. Ranah patriarki mempunyai konstruksi yang kuat akan bias gender, simbol-simbol penguasa, kelas-kelas

sosial dengan sekat dan hierarkinya. Perempuan dalam ranah budaya patriarki dikonstruksikan sebagai pihak yang inferior bersama deretan agen-agen yang dianggap lemah baik secara modal ekonomi, sosial, budaya maupun simbolik (Bourdieu, 1996: 114). Perempuan berada pada habitus mematuhi, merawat, mengasuh, dan kebiasaan-kebiasaan yang melibatkan karakter lembut, lemah, pasif, atau inferior. Sementara laki-laki berada pada habitus menginisiasi, mencetus, melindungi, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang melibatkan karakter aktif dan kuat. Perempuan diletakkan pada titik subordinat sedangkan laki-laki sebagai pihak yang dominan. Dalam konteks gender, perempuan dengan atribut-atribut inferior feminin diposisikan di luar wilayah para simbol-simbol kuasa, sebagai pelengkap, perhiasan, pengurus dan bukan kepala, maka segala urusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan seluruh anggotanya harus terselesaikan dengan baik dan benar oleh pelaksana kegiatan. Sementara kaum laki-laki berperan sebagai pengendali, pemilik keputusan dan aktor publik.

Ranah sosial masyarakat Desa Sotang dihuni oleh agen-agen dengan legitimasi tertentu di antaranya volume kapital ekonomi yang kuat semisal tuan tanah, para pemilik lahan, pegawai, buruh. Sementara ranah budaya dikendalikan oleh aktor-aktor atau kelompok-kelompok dengan kualifikasi gender maskulin, dan mereka yang mempunyai kapital simbolik kuat. Habitus *gender* yang diperoleh dan kualifikasi kelas sosial berdasarkan kepemilikan jumlah modal tersebut terbentuk dalam perjalanan sejarah kolektif dan terinternalisasi sebagai struktur budaya oleh masyarakat setempat. Kontestasi perempuan sebagai aktor marginal di desa ini bukan hanya dalam ranah budaya terkait gender tetapi juga dalam ranah ekonomi terkait kepemilikan modal. Hal tersebut memerlukan perjuangan dan strategi dalam mereproduksi atau merestrukturisasi posisi-posisi dalam ruang masyarakat Desa Sotang. Hasil perjuangan terkait perolehan modal akan sangat berpengaruh untuk eksistensi mereka di seluruh ranah, baik sosial, ekonomi maupun budaya.

Masa pandemi Covid-19 menghadirkan realitas yang berbeda pada peran perempuan di

dalam keluarga. Sebagian besar anggota keluarga perempuan dari keluarga yang terdampak Covid-19 di wilayah Desa Sotang sebelum pandemi, berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang secara konstruktif mempunyai tugas untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah, mencuci, memasak, membersihkan rumah, melengkapi ketersediaan alat, bahan keperluan rumah tangga yang berarti tempat beserta para anggotanya, dan mengatur siklus keuangan dengan sejumlah uang yang diberikan oleh “kepala keluarga” atau suami. Ketika Covid-19 mewabah dan dilakukannya pembatasan sosial berdampak pada penghasilan kepala keluarga khususnya yang mata pencaharian “kepala keluarga” berhubungan dengan arena publik. Terbatasnya akses mobilitas umum, memengaruhi mata pencaharian para sopir dan para pelayan toko. Akibatnya suami mereka dirumahkan sementara.

Keadaan tersebut menyebabkan perempuan dari keluarga terdampak Covid-19 harus mengambil peran ganda. Selain para perempuan mengambil pekerjaan sebagai buruh pemotong bawang merah dengan tidak meninggalkan semua urusan domestik, mereka juga harus berperan sebagai guru pendamping belajar sekolah *daring* masa pandemi. Hal ini semakin menegaskan posisi mereka sebagai “penopang” dan para laki-laki atau suami tetap dilihat sebagai tiang, representasi utama keluarga tersebut. Hasil temuan dari penelitian ini tentang dominasi maskulin di Desa Sotang, Kabupaten Tuban di antaranya: (1) Peran Baru Pemertahanan Ketahanan Pangan Keluarga dan Pendidikan Anak Sebagai Pemotong Bawang saat Wabah Covid-19; (2) Peran Ganda Perempuan Pemotong Bawang Sebagai Ibu dan Guru; dan (3) Kemiskinan dan Perempuan.

### **Peran Baru Perempuan dalam Pemertahanan Ketahanan Pangan Keluarga**

Menjadi seorang pemotong bawang merupakan sebuah pekerjaan yang menurut konstruksi nilai ranah budaya setempat, identik sebagai pekerjaan feminin karena mudah, *remeh temeh*, tidak membutuhkan kekuatan otot yang besar, sehingga dianggap layak mendapatkan upah yang cukup rendah. Hal ini diterima dengan

tanpa protes atau penolakan frontal oleh agen pemotong bawang. Meskipun demikian diketahui dari hasil wawancara bahwa mereka merasakan ketidakadilan dalam hal pengupahan. Mereka mengatakan bahwa upah yang diterima tidak sepadan dengan lelah yang disebabkan. Hal tersebut menunjukkan adanya konflik internal dalam diri agen yang tidak terselesaikan dan akan menjadi sebetuk penerimaan atas kekuasaan borjuis.

*“Yo gak cucuk karo upahe sebenere mbak, sedina oleh 50 kilo gejer sampek njepluk, tangan sampe ngapal yo olehe 50 ewu. Tapi yo disyukuri ae timbang rejeki yo angel wayahe korona iki. Kanggo mbantu bojo, mergawe sepi!”*

“Ya sebenarnya tidak sesuai dengan upah mbak, dalam sehari mendapatkan 50 kilo sampai tangan kaku dan *ngapal* dapetnya hanya 50 ribu. Tapi disyukuri aja daripada cari rezeki susah di masa korona ini, buat bantu suami, kerja sepi!”

Kaum borjuis kecil yang berkuasa atas perempuan pemotong bawang dalam memberi upah kerja tidak terlepas dari pengaruh posisi marginal perempuan dalam ranah budaya. Kontestasi perempuan di arena ekonomi di ruang perburuhan tani perempuan di Desa Sotang dihadapkan pada konstruksi *gender*.

*“Yo gak ono lo nduk, wong lanang sing kethok brambang, yo wong wedok-wedok iki. Wong lanang iku yo bagian kerjo sing abot-abot, sing butuh tenaga opahe gede nek nang nggone brambangan ngene iki”*

“Ya tidak ada nak, orang laki-laki yang potong bawang, ya para perempuan ini. Orang laki-laki ya bagian kerja yang berat-berat yang membutuhkan tenaga juga upahnya besar kalau dalam bidang pertanian bawang ini”

Pekerjaan komunal di masa pandemi Covid-19 dengan risiko rentan hanya mendapatkan upah sangat rendah seribu rupiah per kilogram. Perempuan, dalam kontestasi perburuhan tani dianggap hanya layak mendapatkan upah kecil. Sesuai dengan *doxa* yang telah mengakar dalam ruang dialektika masyarakat Desa Sotang bahwa habitus perempuan adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, maka kehadirannya dalam ruang publik sebagai pekerja dengan tenaga yang sedikit, dianggap layak mendapatkan upah rendah.

Perempuan-perempuan itu, terjebak dalam tubuh yang telah diobjektifikasi oleh skema-skema pemikiran yang telah diafirmasi melalui tatanan simbolik masyarakat desa setempat.

Hasil wawancara menunjukkan satu-satunya aktor pemotong bawang adalah perempuan yang berarti bahwa pekerjaan ini dianggap feminin, sebuah pembagian kerja dalam sistem konstruksi sosial yang diskriminatif. Pekerjaan sebagai pemotong bawang di Desa Sotang tidak pernah dilakukan oleh laki-laki karena menurut mereka ini merupakan pekerjaan ringan yang tidak memerlukan tenaga, maka sudah selayaknya menjadi ranah perempuan. Hal tersebut menunjukkan adanya pembagian ruang kerja yang jelas berdasarkan gender.

Terdapat relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam oposisi biner yang beroperasi pada praktik sosial dalam ranah perburuhan tani di Desa Sotang. Laki-laki tidak pernah berada di ruang pemotong bawang karena tenaga yang diperlukan kecil dan upah yang diperoleh juga kecil. Skema seperti tersebut telah diafirmasi dan diterapkan dalam praktik hidup masyarakat sehingga ketika ditanyakan apakah jika yang memotong bawang adalah laki-laki maka upahnya dapat berbeda. Jawaban tersebut muncul ketika praktik baru dalam realitas ruang pemotong bawang berupa hadirnya laki-laki di sana.

Afirmasi atas hal-hal yang berkaitan dengan disposisi perempuan di ranah sosial masyarakat dengan tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin ditanggung di saat pandemi ini dapat mempertegas dominasi maskulin dan kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat menengah ke bawah di tengah usaha pertahanan dari krisis ekonomi. Objektivitas struktur sosial dalam masyarakat Desa Sotang khususnya terhadap perempuan pemotong bawang belum dapat diubah karena minimnya modal yang dimiliki oleh para agen dari kalangan ekonomi menengah ke bawah ini meskipun secara riil mereka menunjukkan eksistensi diri sebagai agen yang aktif dalam perjuangan mempertahankan modal dan pengakuan sosial. Habitus perempuan-perempuan tersebut yang telah mengalami perubahan dan memengaruhi pengalaman subjektif dalam kontestasi gender

di Desa Sotang tidak berpengaruh terhadap kekalnya nilai-nilai objektif dan pengalaman kumulatif yang mengonstruksi skema dominasi maskulin masyarakat di desa tersebut. Perjuangan agen pada masa pandemi, produktivitasnya dalam mempertahankan kepemilikan modal ekonomi sebagai kunci ketahanan keluarga tidak sanggup merekonstruksi kelas sosial mereka sebagai yang setara dengan posisi sosial laki-laki. Dominasi maskulin yang mekanismenya beroperasi dalam ketidaksadaran melalui proses internalisasi dikekalkan dengan praktik-praktik diskriminasi pengupahan tenaga buruh tani perempuan.

Sementara kaum dominan yaitu buruh laki-laki dalam ruang perburuhan tani di desa Sotang ini mendapatkan tiga kali lipat dari upah perempuan. Aktor dominan ini memberikan garis batas yang tegas pada wilayah gender dengan tidak pernah mengambil jenis pekerjaan pemotong bawang atau pekerjaan buruh tani lain yang memerlukan tenaga ringan. Bahkan bagi para agen dominan yang pada masa pandemi ini kehilangan mata pencahariannya, menurut survei penulis di beberapa tempat pemotongan bawang, tidak pernah ada satu pun yang bergabung untuk bekerja di tempat yang membuka lowongan dengan bebas ini. Demikian kokohnya strategi dalam pertarungan mempertahankan stereotip maskulin dan kelas sosial dalam ranah patriarki masyarakat Desa Sotang. Begitu pun para borjuis tani, mereka tidak pernah mempekerjakan pekerja laki-laki untuk diupah sebagai pemotong bawang. Kekuasaan simbolik yang membentuk skema persepsi menguntungkan para agen laki-laki dalam pertarungan di ranah sosial budaya masyarakat tani Desa Sotang.

### **Perempuan Pemotong Bawang Sebagai Ibu dan Guru**

Pembatasan sosial yang diberlakukan di berbagai lini termasuk ranah pendidikan berdampak terhadap peran perempuan kelas menengah ke bawah dari keluarga terdampak Covid-19 di Desa Sotang. Selain perempuan harus menjadi pemotong bawang, juga secara tiba-tiba dituntut menjadi pendamping anak-anak yang mendapat banyak tugas rumah dari pembelajaran daring. Daring adalah singkatan dari dalam jaringan yang

juga dikenal dengan istilah lain yaitu *online*. Siswa SD, SMP, SMA sederajat tetap harus mengikuti pembelajaran jarak jauh saat pandemic Covid-19. Mereka diberi teori dan tugas secara daring yang mana cara ini menurut beberapa siswa lebih sukar dipahami daripada tatap muka. Banyak di antara mereka yang meminta orang tuanya untuk menemani, membantu menjelaskan, dan menyelesaikan tugas. Begitu pun dengan anak-anak usia sekolah di Desa Sotang, tidak terkecuali anak-anak dari pemotong bawang. Mereka menuntut orangtuanya untuk mendampingi dalam belajar.

Aktivitas pendampingan belajar tersebut meliputi kegiatan menjelaskan materi sekolah, mengerjakan tugas harian, dan membantu menjawab pertanyaan ujian. Permasalahan kesekian muncul bagi para ibu pemotong bawang yaitu keterbatasan waktu untuk peran ganda yang harus mereka mainkan, melakukan pekerjaan rumah sekaligus mencari nafkah di tambah dengan pendampingan belajar anak. Pandemi Covid-19 secara tidak langsung memaksa agen bernama perempuan pemotong bawang yang notabene berpendidikan rendah untuk bertarung kesekian kali dalam perjuangan memperoleh pengakuan kelas sosial dalam ranah pendidikan yang kemenangannya jelas tidak berpengaruh terhadap posisi di titik subordinat. Perjuangan yang terpaksa dilakukan oleh mereka tidak lain adalah bagian lain dari konstruksi disposisi gender mereka.

*“Sebenare yo pingin pinter iso marai anak, tapi pelajaran mbiyen gak koyo’ pelajaran saiki, pingin iso mundak pintere carane piye? kan yo wis gak mungkin soale terbatas umur karo pemahaman materi. Yo ben anake wae sing dadi wong pinter,luwih pinter adoh teko ibuk’e”*

“Sebenarnya ya ingin pintar bisa mengajari anak, tetapi pelajaran jaman dahulu tidak seperti pelajaran sekarang, ingin dapat tambah pintar caranya bagaimana? Kan ya sudah tidak mungkin karena terbatas pada umur dan pemahaman materi. Ya biarkan anaknya saja yang menjadi orang pintar, jauh lebih pintar dari ibunya.”

Beberapa dari perempuan di Desa Sotang menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebagian besar

lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan tahun lulus paling mutakhir pada tahun 2007, bahkan ada di antaranya lulusan tahun 1990. Sebagai pertarungan baru yang harus diselesaikan oleh perempuan di Desa Sotang, para agen perempuan ini menyerah dengan keterbatasannya dan menyuruh anaknya untuk belajar bersama teman. Sebagian lain menempuh perjuangan memperoleh pengakuan sosial atas dimilikinya modal ekonomi, membayar guru les dari modal ekonomi yang di peroleh melalui memotong bawang. Karena minimnya instrumen pengetahuan untuk bertarung dalam ranah pendidikan, mereka menukarkan modal ekonomi yang diperoleh dari memotong bawang dengan modal simbolik berupa ilmu pengetahuan dengan harapan untuk anaknya agar bisa menjadi lebih pandai dari ibunya. Bentuk tindakan tersebut dapat dilihat sebagai sebuah usaha perjuangan untuk mereproduksi posisi sosial atau merestrukturisasi disposisi dan habitus generasi selanjutnya dengan harapan memperoleh modal simbolik yang lebih kuat dalam rangka meningkatkan identitas sosial.

Para perempuan pemotong bawang dalam perannya sebagai ibu dengan adanya kegiatan sekolah daring, menjadi semakin tertindas dalam dominasi yang diafirmasi oleh doxa masyarakat setempat. Doxa atas ibu yang baik adalah yang bisa bertanggung jawab atas pengasuhan anak termasuk proses pendidikannya. Meskipun kaum laki-laki atau para suami juga sama lemahnya dalam bidang pendidikan namun kelemahan mereka tidak muncul di permukaan dan yang tergelar jelas dalam hal ini adalah inferioritas istri. Pihak yang terperangkap dalam tubuh perempuan di ruang lingkup masyarakat setempat secara konvensional mendapatkan pembagian peran sebagai penanggung jawab pengasuhan anak. Bukan semakin meningkatkan modal simboliknya, melainkan munculnya kekerasan simbolik ditandai dengan depresiasi diri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para agen perempuan pemotong bawang tersebut mengakui ketidakmampuannya dalam bidang keilmuan. Tindakan depresiasi diri ini dapat dilihat sebagai akibat konstruksi sosial dalam ranah pendidikan yang mengelompokkan manusia dalam kelas-kelas berdasarkan derajat intelektualitasnya. Namun agen terdominasi tidak melihat peran

baru yang harus dimainkan ini sebagai sebuah pemaksaan atau keadaan yang memberatkan. Mereka menerima hal tersebut sebagai sebuah kelaziman. Demikianlah menurut Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik beroperasi dalam objektivitas sistem yang terkonstruksi, diinternalisasi, dan diterima sebagai kealamian (natural) (Bourdieu, 2010:152).

Pendidikan menurut Bourdieu merupakan salah satu bentuk kekuatan simbolik. Ranah ini memproduksi budaya dominan sehingga saat Covid-19 dengan adanya sekolah daring mempertegas keinferioran para pemotong bawang khususnya di Desa Sotang yang latar belakang pendidikan maksimal jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan banyak yang hanya pernah menempuh Sekolah Dasar (SD). Habitus transfer ilmu pengetahuan jelas tidak mereka miliki sehingga ketika mereka dipaksa terlibat dalam ranah ini, mereka mempertukarkan modal ekonomi yang didapatkan dari habitus barunya dengan modal simbolik yang dimiliki oleh kelompok habitus lain dari kelas yang lebih tinggi dalam ranah pendidikan. Sementara itu, para suami tidak terlibat dalam kepengurusan sekolah anak khususnya daring karena mereka merasa urusan pendidikan anak merupakan tanggung jawab istri.

Pengharapan akan kelas sosial yang lebih tinggi dan sikap melihat dirinya sendiri sebagai seorang ibu dari kelas rendah dalam istilah dominasi maskulin Pierre Bourdieu disebut sebagai tindakan depresiasi diri Hasil wawancara menunjukkan tindakan depresiasi diri dilakukan oleh agen perempuan pemotong bawang. Penerimaan akan klasifikasi tanggung jawab yang harus diemban sebagai pengasuh anak dan instrumen pengetahuan yang dipahaminya sebagai sebuah keterbatasan, pengakuan terhadap kelas yang lebih tinggi membangun sebuah relasi dominasi yang mengekalkan keinferioran agen. Depresiasi diri terjadi bukan saja dalam konteks relasi agen dengan pihak lain (baca: guru), tetapi juga dalam relasinya dengan suami yang secara intelektual berada pada tingkatan yang sama. Kuatnya nilai-nilai objektif melemahkan agen dalam proses eksternalisasi nilai. Demikian dominasi maskulin bekerja dalam sebuah relasi

yang dialamiahkan dan semakin kuat tertancap pada masa pandemi Covid-19 mereproduksi tindakan-tindakan depresiasi diri para agen perempuan pemotong bawang.

### **Peran Ganda Perempuan Pemotong Bawang Sebagai Ibu dan Guru**

Praktik-praktik diskriminasi dalam paradigma kekerasan simbolik tidaklah diperlihatkan secara tegas, melainkan secara halus (*subtle*) yang menunjukkan pihak terdiskriminasi tidak merasa terdiskriminasi dan melihat tindakan diskriminatif terhadapnya sebagai sebuah sikap wajar. Ruang perempuan diperkecil dalam ranah domestik yang mengikat. Rumah adalah wilayah domestik yang dalam merawat bangunan maupun penghuninya, perempuan diberi beban yang lebih berat dari pada laki-laki. Perempuan pemotong bawang dalam konstruksi masyarakat Desa Sotang bertugas menyiapkan segala keperluan dasar para anggota keluarga di antaranya memasak, ketersediaan bahan, kebersihan pakaian seluruh penghuni dan kenyamanan rumah.

Istri memberikan pemakluman terhadap suami yang tidak bisa melakukan satu pun pekerjaan rumah ketika istri sibuk mencari nafkah. Habitus sebagai perawat, pengolah, pelaksana harian rumah telah terinternalisasi sedemikian natural dalam pola pikir perempuan di Desa Sotang. Pernyataan yang mengandung makna bahwa keberadaan istri adalah penopang suami merupakan pendeskriditan yang secara tidak sadar telah dilakukan secara masif oleh para perempuan pemotong bawang di Desa Sotang.

*“Yo gak tau ngewangi mbak, yo ra iso wong lanang ewoh ngewangi prenggawean wong wedok. Yo kesel ra kesel dilakoni dhewe wong ancene wis bagiane”*

“Suami tidak pernah membantu mbak, ya tidak bisa laki-laki sanggup membantu pekerjaan perempuan (istri). Ya capek tidak capek dijalani saja, namanya juga sudah menjadi bagiannya.”

Dominasi maskulin tampak dari tindakan depresiasi diri yaitu dengan menganggap bahwa peran pencari nafkah tidak lain adalah usaha untuk mewakili eksistensi suami bukan identitas

mereka yang sesungguhnya. Para agen perempuan tidak menolak sama sekali domestifikasi yang beroperasi atas diri mereka dan menganggap peran ganda sebagai perwujudan kedirian seorang istri bukan kedirian seorang individu. Bangunan struktur dominasi maskulin dari nilai-nilai sosial, pengalaman kolektif telah dikonversi menjadi sistem sosial yang tidak mudah bagi para agen dengan hasrat-hasrat habitus terdominasi ini untuk menghasilkan sintesis, eksternalisasi berupa sistem atau struktur baru. Mereka dengan modal sosial, ekonomi, simbolik dan budaya yang terbatas tidak mampu melawan kekerasan simbolik yang mengungkungnya. Habitus baru para agen perempuan terbentuk dari tuntutan situasi Pandemi, namun hal ini tidak memengaruhi restrukturisasi ranah patriarki dalam ruang sosial kehidupan masyarakat Desa Sotang. Produktivitas agen di masa wabah Covid-19 yang tampak sangat penting kemudian dinegasikan oleh kekalahan dalam persaingan modal antar agen karena kuatnya konstruksi dominasi maskulin.

Tuntutan situasi pandemi untuk keluar ke ruang publik sebagai buruh tani tidak mengurangi beban domestik mereka. Merunut sejarah terbentuknya habitus dan sesuai konstruksi gender masyarakat setempat peran istri sebagai pengurus wilayah domestik sedangkan suami mencari nafkah. Ketika perempuan mengambil peran ganda yaitu domestik dan publik, tidak terbentuk habitus baru para suami untuk membantu menggantikan atau sekadar meringankan beban istri. Hal ini dapat dilihat dari perspektif Pierre Bourdieu sebagai sebuah usaha mempertahankan habitus maskulinitas dan posisi sosial dengan tidak berada dalam satu lini perjuangan yang sama dengan agen feminin.

### **Kemiskinan dan Perempuan**

Pandemi Covid-19 memunculkan kelompok miskin baru sebagai dampak dari peraturan pembatasan sosial. Banyak sopir dan karyawan yang dirumahkan sementara, bahkan tidak sedikit yang diberhentikan (PHK). Terbatasnya mobilitas umum sangat berpengaruh terhadap sirkulasi kegiatan ekonomi dan keuangan. Mereka yang mempunyai tabungan jumlah besar atau aset dapat digunakan sementara untuk mencukupi

kebutuhan tetapi bagi yang mengandalkan hidupnya dari gaji harian, mingguan, bulanan atau bahkan keuntungan kecil setiap hari dari usaha dagang kecil-kecilan, mereka akan terjebak dalam kemiskinan baru. Sebagai konsekuensinya, pemerintah membuat kebijakan jejaring pengaman sosial untuk membantu keluarga miskin baru ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial baik berupa uang maupun sembako ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Desa Sotang.

Akan tetapi, jaring pengaman sosial yang dipersiapkan pemerintah hanya bersifat membantu, bantuan tersebut tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak. Pada peristiwa tersebut, perempuanlah yang paling terdampak karena urusan logistik keluarga selalu dikaitkan dengan tanggung jawab perempuan. Bantuan sosial terhadap keluarga miskin baru diberikan atas nama perempuan sehingga dalam perspektif dominasi hal ini merupakan disposisi perempuan sebagai pihak yang miskin.

Pendataan keluarga terdampak Covid-19 di Desa Sotang dilakukan oleh pemerintah desa atas nama istri. Pada praktiknya, saat proses pengambilan bantuan sembako maupun uang tunai, 90 persen dari yang hadir adalah anggota keluarga perempuan; istri, ibu, atau anak remajanya. Kenyataan tersebut tidak pernah menjadi masalah bagi mereka. Bahkan dari hasil penelitian ditemukan beberapa pernyataan dari para perempuan pemotong bawang di Desa Sotang bahwa pengambilan bantuan di desa tersebut sudah selazimnya dilakukan oleh para perempuan.

*“Yo biasane wis ngene mbak, nek njupuk bantuan sembako pantese wong wedok wedok. Sampeyan delok lho sing lanang mok siji loro, Gak masalah lo mbak, njupuk ngene ae kok. Gak abot. Entuk bantuan kon jupuk ngene yo malah podo seneng. alhamdulillah mbak, dadi yo ra sungkan wong ra njaluk tapi di kei kok.”*

“Ya biasanya sudah seperti ini mbak, kalau ngambil bantuan sembako yang pantas para perempuan. Silahkan anda lihat orang laki-laki yang ngambil cuma satu atau dua orang. Tidak menjadi masalah mbak kalau hanya mengambil begini saja. Tidak berat. Mendapatkan bantuan begini malah

senang. Alhamdulillah mbak, jadi ya tidak segan karena ini kan diberi, tidak meminta minta.”.

Bantuan adalah simbol kekuatan dan kelemahan. Simbol kekuatan bagi agen dominan dan kelemahan bagi yang inferior. Perempuan di Desa Sotang didisposisikan dalam habitus penerima bantuan yang berarti mereka dilemahkan. Para laki-laki yang diakui sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap ketahanan ekonomi keluarga, dalam pengamatan yang penulis lakukan di balai desa setempat, justru hanya dapat ditemukan kurang dari 10 persen dari semua yang hadir di deretan penerima sumbangan. Para agen perempuan menerima hal-hal yang demikian sebagai sebuah realitas yang biasa. Melalui penelitian ini penulis dengan perspektif Pierre Bourdieu, melihat disposisi semacam ini dan sikap pasif agen perempuan dalam menerima disposisi tersebut menjadi sebuah representasi dominasi maskulin yang tampak jelas di masa Pandemi.

Sebuah konstruksi atas perempuan yang diidentikkan dengan kemiskinan tidak pernah terbaca secara sadar oleh para agen terdominasi maka inilah salah satu praktik kekerasan simbolik yang beroperasi dan teridentifikasi pada saat pandemi Covid-19. Pernyataan bahwa perempuan lazim mengambil bantuan dan dianggap pantas adalah *doxa* terhadap perempuan yang telah terbangun secara alami sebagai bagian dari struktur sosial di Desa Sotang. Proses dialektika antara objektivitas struktur dan subjektivitas agen di sini tidak menghasilkan sebuah dinamika perubahan. Nilai patriarki yang terinternalisasi lebih mengakar kuat di masa pandemi Covid-19. Untuk kesekian kalinya, dalam proses pertarungan posisi sosial, tidak ada struktur baru yang dihasilkan karena tidak berjalannya proses eksternalisasi para agen, sebaliknya keadaan yang berlangsung menegaskan kekerasan simbolik yang beroperasi terhadap mereka akibat *doxa* terhadap perempuan kelas menengah ke bawah di Desa Sotang.

Disposisi permanen dituliskan di atas tubuh dan status sosial yang mana dalam hal ini mereka tidak mempunyai cukup modal baik simbolik, budaya, sosial maupun ekonomi untuk bertarung

melawan *doxa* yang ada. Mereka bertubuh perempuan, dari kalangan sosial menengah ke bawah, tidak bergelar pendidikan, dan jaringan sosialnya pun terbatas, semakin diperlemah dengan disposisi mereka dalam ranah sosial ekonomi di ruang bantuan sosial.

Sebuah praktik sosial terjadi di Desa Sotang diterima dengan sangat alami khususnya di masa pandemi, menegaskan representasi kedudukan perempuan pemotong bawang dari kelas ekonomi menengah ke bawah sebagai pihak terdominasi yang lekat dengan kemiskinan. Perjuangannya mendapat perolehan modal ekonomi yang kecil sehingga pertukaran dengan modal simbolik tidak mengubah praktik diskriminasi dalam masyarakat.

Perjuangan agen bernama perempuan yang sesungguhnya dapat dimaknai sebagai alat untuk mendapatkan modal maupun pengakuan simbolik dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sotang, tidak mampu disadari oleh para agen karena kuatnya struktur dominasi maskulin dan lemahnya modal simbolik berupa pengetahuan tentang kesetaraan dan strategi serta perjuangan demi kesetaraan kedudukan sosial.

## PENUTUP

Penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menjadi pemicu bagi aktualisasi diri para perempuan dari kalangan menengah ke bawah di Desa Sotang. Sudut pandang feminitas melihat ini sebagai bentuk dari sebuah eksistensi. Namun jika dikaitkan dengan makna secara simbolik yang muncul dalam praktik sosial, aktualisasi diri para perempuan kelas menengah ke bawah di Desa Sotang ini cenderung dilemahkan oleh kekalahan agen dalam pertarungan modal di ranah budaya androsentris. Perempuan di Desa Sotang di-*doxa*-kan sebagai hal domestik, *the second sex*, dan inferior. Usaha menaikkan modal ekonomi tidak serta merta memperkuat modal simbolik agen justru memunculkan tindakan depresiasi diri. Praktik Sosial yang terjadi saat pandemi Covid-19 ini adalah upah perempuan dalam pekerjaan ranah komunal tidak sebanding dengan risiko; domestifikasi yang terus berlangsung meski mereka keluar dari ranah domestik; digelarnya keinferioran mereka dalam sebuah ranah baru,

sebagai hasil dari domestifikasi menggiring kepada kekalahan dalam pertarungan modal dan perjuangan kelas sosial.

Konsep Pierre Bourdieu terkait praktik sosial dan dominasi maskulin cukup tepat untuk menganalisis praktik sosial yang terjadi di ruang sosial kehidupan masyarakat Desa Sotang dengan perempuan pemotong bawang sebagai objeknya. Melalui konsep Pierre Bourdieu dapat dipahami skema dominasi yang bekerja disertai kekerasan simbolik di ruang kelas menengah ke bawah di Desa Sotang. Dominasi maskulin semakin terstruktur kokoh saat pandemi Covid-19. Rumus Pierre Bourdieu bahwa (*Habitus+Modal*) + *Ranah* = *Praktik* dapat diaplikasikan dalam memahami bentuk dominasi maskulin di Desa Sotang. Habitus baru sebagai pemotong bawang dan keterbatasan modal budaya dalam konstruksi patriarki telah menghasilkan sebuah praktik diskriminasi terhadap perempuan pemotong bawang di Desa Sotang yang mempertegas dominasi maskulin.

Melalui tulisan ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait isu gender baik NGO maupun lembaga pemerintahan agar mengadvokasi atau mengadakan program pelatihan kepada kelompok gender laki-laki berkaitan dengan tema-tema urusan domestik, seperti memasak, merawat rumah, atau lainnya, sebagai langkah antisipasi meringankan perempuan dalam peran gandanya, agar dominasi dan kekerasan simbolik terhadap perempuan dapat diminimalisasi. Pihak-pihak terkait pemberdayaan perempuan sebaiknya mengambil langkah edukatif agar para perempuan, ibu-ibu, terutama kelas menengah ke bawah agar tidak jauh tertinggal dengan loncatan perkembangan teknologi, setidaknya mereka bisa mengoperasikan *handphone* agar lebih mudah mendampingi anak-anaknya dalam belajar daring maka pelatihan pengenalan teknologi harus diadakan sehingga bertambah modal simbolik yang mereka dapatkan yang bisa dipertukarkan dengan modal lain dalam usaha mereproduksi dan merekonstruksi identitas kelas.

Terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara nilai objektif suatu ranah dengan ranah yang lain terhadap perolehan modal yang diperjuangkan oleh agen. Perjuangan agen

dalam konteks penelitian ini, di ranah ekonomi menghasilkan perolehan yang minim karena pengaruh nilai objektif ranah budaya atas kelompok gender. Begitu pun ketika mereka dituntut untuk bermain di ranah pendidikan, minimnya pengetahuan mengharuskan mereka menukarkan modal ekonomi dengan modal simbolik demi sebuah kuasa simbolik. Namun karena kecilnya modal ekonomi yang bisa dipertukarkan dan lemahnya habitus mereka dalam ranah pendidikan, kekuasaan simbolik belum dapat diperoleh. Ranah pendidikan tidak memberi ruang kuasa sedikit pun kepada mereka karena di ranah ini syarat legitimasi adalah derajat intelektualitas. Pada akhirnya terbentuknya habitus baru sang agen di masa pandemi Covid-19, tidak memengaruhi praktik-subordinasi ataupun mengubah skema dominasi maskulin dalam ranah sosial budaya di Desa Sotang.

Satu hal yang menjadi kritik penulis terhadap teori Pierre Bourdieu terletak pada pandangan tentang perjuangan demi mendapatkan modal dan pengakuan sosial sering kali disembunyikan oleh masyarakat. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa perjuangan demi modal dan pengakuan sosial tidak pernah disembunyikan oleh masyarakat, hanya disamarkan dalam bentuk yang lain, misalnya para agen perempuan pemotong bawang memperjuangkan kelas sosial dengan cara menafsirkan praktik sebagai pemotong bawang sebagai pekerjaan sampingan untuk mengatasi kejenuhan domestik bukan karena kalkulasi ekonomis.

## PUSTAKA ACUAN

- Berger, Peter. L, Thomas Luckmann. (1966). *Tafsir sosial atas kenyataan*: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Terjemahan dari Hasan Basari, Pengantar dari Frans. M.Parera. Jakarta: LP3ES.
- Bourdieu, P. (2001). *Masculine Domination*. California: Stanford University Press.
- Bourdieu, Pierre. (1998). *Dominasi Maskulin*. Terjemahan dari Stephanus Aswar Herwinarko. 2010. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, Pierre. (1996). *The Rule Of Art, Genesis, and Structure of The Literary Field*. Trans. By Susan Imanuel. Cambridge: Polity Press.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Dominasi Maskulin*. Diterjemahkan dari judul asli *La domination masculine*. Yogyakarta: Jalasutra.
- \_\_\_\_\_. (1986). *The Form of Capital: Hand book Theory and Research in Sociologi of Education*, J.G. Ricardhson (Ed.). West Port: Greenwood Press.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadyan, Rheza. (2020, 21 April). Peran Perempuan Sangat Dibutuhkan di Tengah Pandemi Covid-19. *Kabar24*. Diunduh dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200421/79/1230195/peran-perempuan-sangat-dibutuhkan-di-tengah-pandemi-Covid-19> tanggal 23 Juli 2020.
- Karsadi. (2018). *Metode Penelitian Sosial Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahar, Cheelen dan Harker, Richard. (2010). *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik*. Jogjakarta: Jalasutra.
- Mills, Sara. (1997). *Diskursus Sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Ilmu Sosial*. Terjemahan dari Ali Noer Zaman. Jakarta: Penerbit Qalam.
- Moleong, Lexy J. (2020) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Musarrofa, I. (2019). Pemikiran Pierre Bourdieu tentang Dominasi Maskulin dan Sumbangannya Bagi Agenda Pengarusutamaan Gender di Indonesia. *Kafa'ah*, 34-49.
- Rachmawati. (2020, 21 April). Perempuan di Pusaran Pandemi Corona, Bertahan Saat Finansial Keluarga "Lumpuh". *Kompas*. Diunduh dari <https://regional.kompas.com/read/2020/04/21/09010081/perempuan-di-pusaran-pandemi-corona-bertahan-saat-finansial-keluarga-lumpuh-tanggal> 23 Juli 2020.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taqwa, G. K., & Sadewo, F. S. (2016). Kekerasan Simbolik pada Perempuan Janda di Kabupaten Sidoarjo. *Paradigma*, 1-8.
- Wahid, M. (2016). Islam dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman Bagi Perempuan dan Anak di Banten. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 61-80.
- Yusriana, A. (2017). Dekonstruksi Bingkai Dominasi Maskulin dalam Buku *Act Like a Lady Think Like a Man*. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 21-35.

---

# KOMPARASI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DAN TAIWAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 PADA POSTER TIRTO.ID

## *COMPARISON BETWEEN INDONESIAN GOVERNMENT POLICIES AND TAIWAN IN FACING THE COVID-19 PANDEMIC AT TIRTO.ID POSTER*

Nisa Adzkiya<sup>1</sup>, Hafidz Ridha Try Sjahputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Gadjah Mada, <sup>2</sup> Monash University

E-mail: <sup>1</sup>[nisaadzkiya@mail.ugm.ac.id](mailto:nisaadzkiya@mail.ugm.ac.id), <sup>2</sup>[Hsja0001@student.monash.edu](mailto:Hsja0001@student.monash.edu)

### ABSTRACT

*The COVID-19 pandemic captured the attention of all media, not least Tirto.id who uploaded a poster on his Instagram feed exactly the first 30 days of COVID-19 in Indonesia. The poster discusses Taiwan's handling of the situation in his country. So it raises the question Tirto.id chose Taiwan to fill its posters? Using van Dijk's critical discourse analysis to see the power at play behind the Tirto.id posters, as well as to dialogue the rational actor model I put forward by Graham to compensate for the policies and regulations imposed by the Governments of Indonesia and Taiwan in the handling of pandemics in their respective countries. Produce findings namely; First, Tirto.id praised Taiwan's successful handling of the pandemic as well as a relaxed form of sarcasm to the Government of Indonesia during the first 30 days. Second, historically, Taiwan's past failures with the SARS epidemic have made them learn to be better prepared from many sides. Meanwhile, Indonesia's success in handling Bird Flu makes Indonesia more relaxed and optimistic in the face of this pandemic.*

**Keywords:** COVID-19, Online Media, Pandemic.

---

### ABSTRAK

Pandemi COVID-19 menyita perhatian seluruh media, tak terkecuali Tirto.id yang mengunggah sebuah poster pada *feeds* Instagramnya tepat 30 hari pertama COVID-19 di Indonesia. Poster tersebut membahas penanganan negara Taiwan yang berhasil melewati situasi pandemi di negaranya. Hal itu menimbulkan pertanyaan alasan di balik pemilihan negara Taiwan dalam mengisi poster Tirto.id. Dengan menggunakan analisis wacana kritis van Dijk, tulisan ini bertujuan untuk melihat kekuasaan yang bermain di balik poster Tirto.id dan mendialogkan *rational actor model I* yang dikemukakan oleh Graham untuk membandingkan kebijakan dan regulasi yang diberlakukan pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam penanganan pandemi di negara masing-masing. Analisis ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, Tirto.id memuji keberhasilan penanganan Taiwan dalam pandemi sekaligus bentuk sarkasme kepada pemerintah Indonesia yang santai pada saat 30 hari pertama. *Kedua*, secara historis, kegagalan Taiwan pada masa lalu dalam menghadapi epidemi SARS membuat mereka belajar untuk lebih siap dari berbagai sisi. Sementara itu, keberhasilan Indonesia pada saat penanganan Flu Burung menjadikan Indonesia lebih santai dan optimistis dalam menghadapi pandemi ini.

**Kata kunci:** COVID-19, Media Daring, Pandemi.

## PENDAHULUAN

Pada 17 November 2019, dunia digemparkan dengan penyakit yang disebabkan oleh virus jenis baru (Jeanna Bryner, 2020), yaitu *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau virus Corona. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini disebut COVID-19, yang dapat menyebabkan gangguan ringan hingga berat, yang dapat menyebabkan kematian.

*Corona Virus Disease 2019* yang disingkat menjadi COVID-19 ini mulai ditemukan pada akhir bulan Desember 2019. Berawal dari wabah di Wuhan, Cina, kemudian berlanjut ke epidemi hingga menjadi pandemi ketika memasuki awal tahun 2020. Virus ini menular begitu cepat dari manusia ke manusia dan dalam waktu beberapa bulan saja sudah menjadi pandemi. Karena telah menyebar hampir ke semua negara, banyak negara menerapkan kebijakan *lockdown* sebagai upaya menekan tingkat penyebaran di negara tersebut. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena pandemi ini (Pane, 2020). Tidak dapat dimungkiri bahwa posisi Indonesia berdekatan dengan Cina yang menjadi pusat dan awal mula virus Corona ini menyebar dan menginfeksi banyak orang.

Penyakit COVID-19 tidak luput dari sorotan media di dunia, termasuk media di Indonesia sejak awal penyakit COVID-19 mulai ditemukan di kota Wuhan, Cina hingga menjadi pandemi. Pada 2 Maret 2020 lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo dengan resmi mengumumkan bahwa terdeteksi dua orang terjangkit virus Corona di daerah Bekasi. Dalam waktu singkat, pengumuman tersebut menjadi *headline* di seluruh media, baik itu di televisi maupun di media daring. Sejak saat itu, semakin hari, pasien yang terjangkit virus Corona terus bertambah sehingga pemberitaan di media semakin massif. Media yang seharusnya bisa menyebarkan informasi yang edukatif agar masyarakat tetap tenang, tetapi kenyataannya media di Indonesia sebagian besar cenderung membuat pemberitaan negatif.

Masifnya pemberitaan di media yang mengarah ke pemberitaan negatif menimbulkan

kepanikan moral masyarakat Indonesia. Cohen dalam Eriyanto (2013: 224) membicarakan kepanikan moral dengan mengambil kasus *mods*, yaitu perkelahian antaranak muda geng motor di Inggris. Gaya dan kebiasaan anak muda ini dianggap meresahkan, mengganggu, dan menyimpang. Kepanikan hadir dari beberapa insiden perkelahian geng motor yang menyebabkan puluhan orang luka-luka. Hal ini menarik media untuk memberitakan citra negatif dari aktivitas geng motor tersebut. Berdasar hal itu, diketahui bahwa bagaimana moral terjadi, bagaimana suatu perilaku atau tindakan yang dipandang tidak sesuai dengan norma dan moral yang berlaku di masyarakat, kemudian dikonstruksi secara buruk oleh media dengan menyajikan gambaran perilaku secara sensasional dan negatif. Akibatnya, muncul pembenaran untuk melakukan restriksi, pembatasan, dan peraturan terhadap perilaku tersebut.

Masuknya virus Corona ke Indonesia dan penyajian informasi oleh media terkait awal mula kemunculan virus baru ini di kota Wuhan, Cina hingga masuk ke Indonesia menyebabkan semakin tingginya pemberitaan negatif dan sensasional yang disebarluaskan melalui portal-portal berita. Akibatnya, terjadi kepanikan moral yang berdampak pada *panic buying* dengan dampak kelangkaan dan lonjakan harga obat-obatan, seperti vitamin untuk menjaga imunitas tubuh, masker medis, serta alat-alat kesehatan bagi tenaga kesehatan.

Berbeda dengan portal pemberitaan lain yang hanya cenderung membuat kepanikan moral di masyarakat, Tirto.id muncul dengan sudut pandang yang berbeda dalam memberitakan virus Corona, yaitu pada sisi pemerintahan di Indonesia. Tirto.id merupakan situs berita, artikel, dan infografik yang cukup terkenal. Selain itu, Tirto.id menyajikan tulisannya cukup dalam karena menggunakan analisis yang berdasarkan fakta dan data. Dalam media sosialnya pun seperti Instagram, mereka membuat poster – poster yang berkonsepkan jenaka, tetapi tetap pada fakta dan data. Bahkan, pada saat pandemi COVID-19 pun, Tirto.id tidak luput mengkaji dan menganalisis bagaimana negara-negara lain menghadapi pandemi COVID-19.

Ada hal yang menarik untuk dibahas dalam poster yang dibuat oleh Tirto.id, yaitu alasan memilih Taiwan untuk disandingkan dengan cara Pemerintah Indonesia dalam menangani Pandemi COVID-19. Tirto.id tidak memilih negara lain yang dijadikan poster untuk postingan Instagram Tirto.id terkait isu kesehatan seperti COVID-19 di dunia internasional.

Tirto.id sendiri memiliki visi mencerahkan itu sebagai keharusan dengan cara menyajikan tulisan-tulisan yang jernih, mencerahkan, berwawasan, memiliki konteks, mendalam, investigatif, faktual, yang kemudian didukung dengan banyak data kuantitatif dan kualitatif, baik sekunder maupun primer, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bersama dengan orang-orang yang berpengalaman dan terampil pada bidang ilmu-ilmu sosial, penulisan jurnalistik, riset, dan olah statistik, Tirto.id memilih melaju di rel jurnalisme presisi (*precision journalism*). Selain memanfaatkan data berwujud foto, kutipan, rekaman peristiwa, serta data statistik yang

ditampilkan, baik secara langsung maupun lewat infografis dan video infografis, produk-produk Tirto.id dilengkapi pula dengan hasil analisis raturan media massa dari seluruh Indonesia yang disarikan ke dalam bentuk tiMeter (pengukuran sentimen) atas tokoh, lembaga, serta kasus yang dibicarakan dalam tiap-tiap laporan secara mendalam. Tirto.id tidak bekerja untuk kepentingan politik mana pun (Tirto, 2016).

Tulisan ini menganalisis bagaimana Tirto.id sebagai salah satu portal online yang juga memiliki platform online, salah satunya Instagram, mengunggah sebuah poster pada feeds Instagramnya, yang berjudul “CARA TAIWAN MENANGANI COVID-19” pada tanggal 1 April 2020 lalu, bertepatan dengan 30 hari dari kasus pertama COVID-19 yang diumumkan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Tirto.id memilih negara Taiwan yang menangani pandemi COVID-19 di negaranya sendiri pada posternya yang mereka unggah tepat pada 30 hari pertama pandemi di Indonesia?



Sumber: Instagram Tirto.id

Gambar 1: Poster Tirto.id

Penulis menggunakan teknik analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk yang kemudian didialogkan dengan teori *Rational Actor Model I*, dikemukakan oleh Graham Allison yang menyatakan bahwa Pemerintah adalah aktor utama dalam pengambil keputusan terhadap kebijakan negara terlebih apabila disaat genting, negara akan menjadi faktor sentral dalam pengambilan keputusan. Sedangkan analisis wacana kritis merupakan teori untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan antara wacana dengan perkembangan sosial budaya.

Analisis wacana kritis bagi van Dijk dalam Wahyono (2018: 37) berfokus pada cara struktur wacana memainkan, mengonfirmasi, melegitimasi sekaligus mereproduksi kekuasaan. Selain itu, analisis wacana kritis juga menantang terhadap hubungan penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dominan. Darma (2009: 88) dalam analisis wacana kritis van Dijk, terdapat tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Ketiga dari dimensi ini digabungkan menjadi satu kesatuan analisis.

Pada dimensi pertama teks, merupakan hasil dari suatu praktik produksi yang harus diamati, selain itu juga teks harus dilihat dari bagaimana teks itu diproduksi. Dimensi kedua, kognisi sosial berkaitan dengan kondisi mental seorang wartawan, ideologi, nilai yang dianut, latar belakang pendidikan dan lainnya, bagi van Dijk dalam Eriyanto (2009: 260) melihat bahwa analisis wacana tidak sebatas hanya pada struktur teks dari wacana saja, melainkan adanya sejumlah makna, opini, serta ideologi di balik wacana. Dimensi ketiga analisis sosial menurut Mayr dalam Wahyono (2018: 40) menyebut analisis sosial dengan istilah kontrol, di mana kelompok yang memiliki banyak kekuasaan, mereka mampu mengontrol tindakan dan pikiran anggota kelompok lain atau yang dikuasai. Kecakapan berbasis kekuasaan, mempunyai *privilege* dalam mengakses sumber sosial langka seperti kekuatan, uang, status, popularitas, informasi, atau dengan memiliki akses terhadap berbagai bentuk komunikasi dan wacana publik.

Dalam teori ini disampaikan oleh Graham Allison yang menyatakan bahwa Pemerintah

adalah aktor utama dalam pengambil keputusan terhadap kebijakan negara terlebih apabila disaat genting, negara akan menjadi faktor sentral dalam pengambilan keputusan. Teori ini lahir ketika Krisis Misil Kuba pada bulan Oktober 1962 yang menjelaskan keputusan bagaimana proses keputusan Pemerintah Amerika Serikat dalam merespons datangnya misil Uni Soviet ke Kuba yang mampu daya tempuhnya dapat mencapai Amerika Serikat. (Wongsatjachock, 2016). Allison menjelaskan bahwa kebijakan sebagai pilihan nasional dan pemerintah sebagai aktor tunggal yang memiliki kuasa untuk mengatur dan memberikan rasa aman kepada warga negaranya. Selain itu, keamanan dan kepentingan nasional sebagai prinsip dasarnya, serta pentingnya pencegahan terhadap situasi-situasi darurat negara (Allison, 1968). Sehingga di sini penulis menggunakan teori sebagai penjelasan terhadap pentingnya peran negara dalam kondisi darurat untuk menjaga situasi negara tetap terjalin kondusif (Allison, 1969).

Analisis wacana kritis digunakan dalam tulisan ini dengan tujuan melihat bagaimana kekuasaan bermain melalui poster yang diunggah Tirto.id pada *feeds* Instagramnya. Ketika menganalisis wacana, dapat dilihat pada area linguistik dengan cara memperhatikan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks. Sementara itu, teori *Rational Actor Model I* juga digunakan dalam analisis ini untuk membahas regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Taiwan pada 30 hari pertama sejak kasus pertama terkonfirmasi di negara masing-masing.

## **DIFERENSIASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI**

Pada bagian ini akan masuk ke dalam menganalisis unggahan *feeds* Tirto.id di platform Instagram yang berjudul “*CARA TAIWAN MENANGANI COVID-19*” yang berupa poster yang diteliti dalam tulisan ini dibagi menjadi dua fokus bagian, yaitu tulisan dan gambar yang menjadi pelengkap dari teks tersebut yang akan terbagi menjadi tiga bagian.

## ANALISIS TEKS

Dalam judul hingga isi teks di poster tersebut, pembuat pesan menyebutnya dengan Taiwan. Hal ini dianggap sebagai sebuah dukungan Tirto.id kepada Taiwan untuk menyebutnya sebagai bagian yang terpisah dari Cina daratan. Taiwan hingga saat ini masih belum mendapat pengakuan dari seluruh negara untuk bisa disebut sebagai sebuah negara merdeka. Hanya sekitar 25 negara yang mengakui bahwa Taiwan merupakan negara merdeka (Matamata Politik, 2019).

Penggunaan kata-kata bersifat metaforis yang mengandung perbandingan secara tersirat sekaligus sebagai bumbu dari suatu berita seperti pada kata “*tumbuh subur*” yang mengartikan bahwa seharusnya kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Taiwan bisa lebih banyak jumlahnya layaknya negara-negara yang letaknya berdekatan dengan Cina seperti Korea, Bangladesh, Thailand, Kazakhstan dan sebagainya. Padahal, letak Taiwan sangat berdekatan dengan Cina. Bahkan, diteruskan dengan kalimat penjelas, seperti “*jarak yang dekat dengan Cina daratan*”. Namun, pada nyatanya jumlah kasus yang positif terjangkit COVID-19 lebih sedikit di Taiwan.

Dalam penggunaan kata – kata dan kalimat huruf tebal tersebut bertujuan mempertegas dan penekanan teks – teks yang menjelaskan secara sarkas keunggulan Taiwan yang sampai pada 30 hari pertama kasus di Indonesia, pemerintah tidak banyak mengeluarkan regulasi dan memasang status darurat ataupun mencoba mencontoh upaya yang dilakukan oleh Taiwan dalam menangani pandemi, hal tersebut sebenarnya salah satu upaya untuk mengkritik Pemerintah Indonesia dalam menanggapi pandemi ini ketika masuk ke Indonesia sekaligus menjadikan upaya yang dilakukan Pemerintah Taiwan sebagai contoh dalam menanggapi pandemi ini. Selain itu, penggunaan huruf tebal yang akan dibahas setelah ini merupakan bentuk blaming Tirto.id kepada Pemerintah Indonesia yang dianggap tidak sigap dan penanganan yang lamban dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung hingga terbitnya poster pada 1 April 2020 tersebut.

Pemakaian huruf tebal pertama ialah seperti; “*Jumlah kasus positif di Taiwan jauh*

*lebih sedikit dibanding Cina & Korea Selatan*” penegasan dalam kalimat tersebut menganggap bahwa negara tetangga seperti Taiwan yang letaknya sangat dekat dengan Cina daripada jarak antara Indonesia dan Cina bisa menekan angka kasus COVID-19 di negaranya. Sedangkan di Indonesia jumlah kasus positif terus meningkat setiap harinya dan begitu cepat penyebarannya, dan disaat angka yang terus bertambah itu pula, Pemerintah Indonesia dianggap tidak serius dan cenderung santai ketika pandemi ini masuk ke Indonesia.

Penggunaan huruf tebal kedua ialah pada kalimat “*jauh lebih tinggi*” yang diletakkan di tengah sebagai pembatas antara teks di atas yang membahas perbandingan jumlah kasus diantara Taiwan dan negara lainnya, dan teks di bawah yang membahas upaya yang dilakukan Pemerintah Taiwan dalam menanggapi dan menanggulangi penyebaran Virus Corona yang penularannya dari manusia ke manusia ketika masuk ke Taiwan. Memberikan penekanan bahwa Pemerintah Taiwan dengan segala kesiapannya untuk menghadapi pandemi menyebabkan jumlah angka kesembuhannya dari penyakit COVID-19 bisa lebih tinggi daripada jumlah angka kematian. Sebaliknya, di Indonesia angka kesembuhan lebih rendah dibanding angka kematian. Oleh karena itu, Tirto.id menganggap Pemerintah Indonesia tidak mampu menekan angka kasus positif dan jumlah angka kematian pada 30 hari pertama.

Pada bagian teks di bawah yang membahas upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Taiwan dalam menghadapi pandemi ini ketika kasus COVID-19 menimpa warganya. Penggunaan huruf tebal lainnya terdapat pada kalimat “*pengecekan suhu tubuh, pengelolaan distribusi masker & membuat anggaran khusus untuk warganya yang dikarantina*” dan “*pemanfaatan big data & teknologi secara maksimal*”. Pemerintah Taiwan yang bergerak cepat dalam menangani kasus positif COVID-19. Dalam penekanan tersebut, layaknya sebuah sarkasme yang mengungkapkan kekesalan dari pembuat poster tentang ketidakmampuan Pemerintah Indonesia dalam melakukan distribusi masker dan alat – alat kesehatan dengan baik sehingga mengalami kelangkaan masker

dan alat-alat kesehatan lainnya, hal ini dapat dijumpai dengan harga masker dan alat – alat kesehatan lainnya yang melonjak tinggi secara menyeluruh baik penjualan secara *online* maupun *offline*. Selain itu, Pemerintah Indonesia hanya melakukan pengimbuhan kepada masyarakatnya untuk mengarangtina mandiri di rumah masing-masing. Padahal imbuhan itu sendiri sebenarnya merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu tindakan, namun imbuhan ini sifatnya tidak wajib sehingga bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan, di mana bukan hal yang diwajibkan untuk mengarangtina mandiri dan Pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan jaminan khusus bagi warganya yang bisa dan mau berdiam diri di rumah. Tirto.id menganggap bahwa Pemerintah Indonesia tidak mampu mengimplementasikan strategi dengan cara memanfaatkan teknologi terbaru dengan maksimal.

Selain itu, pada bagian visual yang merupakan pelengkap dari teks – teks pada poster tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu visual yang terletak di atas dan di bawah. Tirto.id dalam unggahan poster-poster di Instagramnya memang terkenal dengan konsep poster yang jenaka dan menghibur para pembacanya namun tetap bisa menyampaikan informasi kepada para pengikutnya dengan baik.

Pada bagian visual poster, Tirto.id menggunakan visual tiga buah meteor yang berjubah merah ala Superman yang terkenal menggunakan jubah merahnya ditambahkan dengan balon tulisan berisikan “*Gorden powwaa!!*”. Meteor ini digambarkan seolah melawan Virus Corona yang digambarkan berbentuk bulat dan berwarna hijau yang di sekelilingnya terdapat duri. Visual bagian atas ini didukung dengan kalimat yang ada di sebelah kirinya yaitu “*COVID-19 harusnya bisa tumbuh subur di Taiwan karena jaraknya yang dekat dengan Cina daratan.*” Namun, yang terjadi sebaliknya: Jumlah kasus positif di Taiwan jauh lebih sedikit dibanding Cina & Korea Selatan Tirto.id menggambarkan Taiwan dalam bentuk meteor berjubah merah layaknya Superman yang sedang menghantam Virus Corona secara masif. Jubah merah cukup menarik perhatian serta

memberikan inspirasi *power & energy*, sehingga memicu tingkat emosional seseorang dan sebagai bentuk ‘warna berani’ (Lebond, 2017).

Pada visual bagian bawah poster seolah terbagi dua kanan dan kiri namun tetap satu. Namun, yang sangat terlihat ialah gambaran tiga orang yang menjadi bagian tim medis atau garda terdepan yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berwarna kuning. Terlihat dari visual mata yang dibuat dengan mata yang kecil dan cenderung membentuk mata sipit yang menggambarkan tim medis Taiwan sambil mengucapkan “*#DiRumahAja yuk!*” yang merupakan ajakan dari Tirto.id untuk berdiam diri di rumah saja untuk para pembaca poster tersebut.

Di belakang tim medis Taiwan yang menggunakan APD ini pada sebelah kiri menggambarkan susunan kotak-kotak seperti kardus sebagai pendukung dari kalimat yang ada di sebelah kirinya yaitu “Pemerintah Taiwan sigap melakukan pengecekan suhu tubuh, pengelolaan distribusi masker, dan membuat anggaran khusus untuk warganya yang dikarantina.” Jika dihubungkan kalimat dan visualnya, visual itu menggambarkan kardus-kardus itu berisi alat-alat kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Taiwan sebagai bentuk pengorganisasian dan pendistribusian yang sangat baik untuk masyarakatnya dalam menghadapi pandemi ini ketika masuk ke Taiwan.

Taiwan sudah mulai mengontrol perbatasan ketika negara-negara lain masih memperdebatkan tindakan apa yang harus dilakukan. Taiwan bukan negara yang termasuk dalam keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Taiwan cenderung dianaktirikan dari WHO karena Taiwan dianggap menjadi bagian dari Cina. Selain itu, otoritas Cina menghalangi Taiwan untuk dapat berpartisipasi dalam banyak organisasi internasional. Jika ingin berpartisipasi, maka Taiwan melakukannya harus dengan atas nama Cina. Maka dari itu, terbatasnya akses informasi secara tidak langsung memaksa Taiwan untuk melakukan keputusannya sendiri dan sedini mungkin secara independen dari panduan WHO dan konsensus internasional yang lebih luas. Otoritas Taiwan berulang kali mengeluh bahwa pengucilan mereka dari WHO mencegah Taiwan

memainkan peran penuh dalam respons global (Islam dan Indrawan, 2020). Namun, keputusan Taiwan dalam menghadapi pandemi sedini mungkin secara independen ditambah dengan kesiapan yang matang inilah yang membuktikan kesuksesan Taiwan dalam menekan jumlah kasus dan jumlah angka kematian di Taiwan. Berbeda dengan Indonesia yang sudah menjadi bagian dari keanggotaan WHO yang mendapat banyak akses informasi serta pengetahuan tentang COVID-19 ini justru sangat lambat dalam merespon dan usaha mengurangi penyebaran yang akan berdampak pada warga Indonesia.

## KOGNISI SOSIAL

Pada bagian ini, pembuat poster menginterpretasikan apa yang sudah ia temukan melalui riset agar poster yang dihasilkan sesuai dengan isu terkini salah satunya pandemi dunia COVID-19. Adanya penekanan huruf tebal pada poster yang secara sarkas guna untuk menyindir penanganan Pemerintah Indonesia yang dianggap santai dalam penanganan pandemi pada 30 hari pertama. Sedangkan bagian visualnya menggambarkan yang kemudian menjadi diinterpretasikan oleh pembaca dengan simbol-simbol dan warna. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada laman Tirto.id menyatakan diri bahwa hadirnya Tirto.id tidak melibatkan penguasa-penguasa pemerintah maupun tidak bekerja untuk kepentingan politik mana pun. Hal inilah yang membuat Tirto.id juga mampu melakukan sarkasme melalui poster yang telah ia unggah melalui *feeds* Instagramnya.

Dalam poster Tirto.id tersebut, pembuat poster membubuhkan opininya berdasarkan hasil riset dan fakta yang ditemukan sebelum mengolah dan kemudian merangkumnya menjadi kesatuan informasi berupa poster yang siap publikasi melalui laman Instagram *feeds* Tirto.id. hal ini terlihat pada kalimat awal poster yang menyebutkan bahwa “COVID-19 harusnya bisa tumbuh subur di Taiwan karena jaraknya yang dengan Cina daratan.” Pembuat poster meyakini jika epidemi yang bermula Cina ini seharusnya dengan mudah menyebar ke negara tetangga yang secara letak geografis berdekatan. Namun, pada kenyataannya Taiwan merupakan salah satu

tetangga Cina yang sudah siap dalam menghadapi pandemi. Ketika potensi ancaman epidemi sudah tersiar di Taiwan, mereka bersiap dan cepat tanggap. Segala regulasi sudah disiapkan dari sisi penanganan kesehatan, kebijakan pemerintah, moda transportasi, komunikasi hingga menggunakan teknologi secara penuh agar sebisa mungkin memutus rantai penyebaran dan tidak banyak memakan korban. Alasannya, memang seharusnya dalam bernegara, pemerintah yang memiliki kuasa dalam menjamin dan bertanggung jawab dalam melindungi masyarakatnya agar tetap merasa aman terlebih dalam isu kesehatan.

Tepat di samping tulisan tersebut terdapat unsur visual yang menggambarkan seolah meteor yang memiliki mata dan mulut disertai dengan menggunakan jubah merah ala Superman yang kemudian didukung pula dengan visual virus yang sebagai bentuk visual dari kalimat “*tumbuh subur*”. Namun, meteor diibaratkan sebagai Negara Taiwan yang sudah siap melawan virus-virus yang datang.

Selain itu, pembuat poster kembali membubuhkan opininya dalam kalimat terakhir yang berada di ujung kanan bawah yaitu “*Kunci sukses Taiwan dalam mengimplementasikan semua strategi tersebut adalah pemanfaatan big data & teknologi secara maksimal*” pembuat poster menilai bahwa Negara Taiwan berhasil menangani pandemi yang sudah meluas ke negara lain, sedangkan Taiwan yang letaknya bersebelahan dengan Cina mampu menekan angka kasus COVID-19 di negaranya, dan meningkatkan persentase kesembuhan dan angka kematian yang sangat kecil. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang pada saat 30 hari pertama, justru angka kematian yang diakibatkan COVID-19 lebih tinggi daripada angka kesembuhan. Padahal secara letak geografis, jarak antara Taiwan dengan Cina jauh lebih dekat daripada jarak antara Indonesia dengan Cina. Tetapi, kasus di Indonesia terus naik per harinya.

Garis kuning yang berperan sebagai bingkai sekaligus pemisah antara visual atas dan visual bawah. Tentunya harus kita sadari kenapa sebagai pembatas antara visual bawah dan visual atas menggunakan warna kuning? Secara psikologi, warna kuning merupakan warna yang cerah yang

dapat merangsang aktivitas otak dan mental untuk membuat manusia bisa lebih tegas dan waspada. Warna kuning sangat baik digunakan untuk membantu penalaran secara logis dan analitis. Warna kuning ini dapat lebih menarik perhatian karena jumlah cahaya yang terpantul dari warna kuning ini lebih banyak dibandingkan dengan warna-warna lain di sekitarnya (Lebond, 2017). Hal ini bisa saja berhubungan dengan kognisi sosial dari pembuat poster memilih warna kuning sebagai hal yang lebih ingin menarik perhatian atau bisa saja ingin merangsang aktivitas otak dan mental yang dibuat guna untuk merangsang aktivitas otak dan mental.

Kalimat dalam poster tersebut juga didukung dengan visual kunci berwarna biru yang merupakan warna ideal untuk penyembuhan (Dini, 2014). Dalam terapi, warna biru biasanya akan memberikan efek perubahan fisiologis maupun stimulasi psikologis yang memiliki efek menenangkan. Pada visual kunci tersebut bukan hanya sekedar warna biru saja melainkan ditambahkan sedikit *blink-blink* yang seolah benda yang memantulkan cahaya yang lebih terang. Dalam konteks ini, secara tidak langsung Tirto.id menyebut bahwa Negara Taiwan digambarkan salah satu negara yang memiliki pantulan cahaya, unggul, dan berkilau jika dibandingkan dengan negara lain saat penanganan pandemi, dalam hal ini ialah Indonesia sebagai komparasinya.

## ANALISIS SOSIAL

Wacana yang beredar di masyarakat, baik di Taiwan maupun Indonesia, baik itu secara historis yang berdampak pada bagaimana pemerintah suatu negara dalam menangani situasi darurat serta langkah-langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi warganya. Pada bagian ini akan mencoba mendialogkan dengan teori *rational actor model I* yang dikemukakan oleh Graham Allison berusaha menjelaskan bagaimana suatu pemerintahan bersikap dalam mengambil keputusan pada saat krisis yang mana di sini Pemerintah Taiwan dan Indonesia berperan sebagai aktor tunggal dalam pengambilan keputusan. Tulisan ini akan membahas kebijakan dan regulasi apa saja yang

dikeluarkan pemerintah, baik itu sebelum maupun saat COVID-19 menimpa warganya.

Secara historis, Indonesia dalam penanganan saat wabah virus flu burung (H5N1) tahun 2003-2010. Pada saat virus flu burung (H5N1) merupakan salah satu isu kesehatan yang cukup mengancam dunia sekitar tahun 2005. Penyebaran virus bukan dari manusia ke manusia melainkan, manusia kontak langsung unggas yang mati di lingkungan yang tercemar. Menurut WHO dalam BBC (2012) Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia, karena dari 349 kematian di dunia yang diakibatkan flu burung, 155 kematian terjadi di Indonesia. Isu kesehatan seperti flu burung ini tentu menjadi tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan warganya untuk menangani wabah flu burung saat itu, Pemerintah Indonesia membentuk komite nasional penanggulangan sebagai pusat pengendalian penyakit. Selain itu, pemerintah pusat juga melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan, komunikasi publik serta karantina di wilayahnya (Lidwina, 2020).

Sementara itu, sejarah Taiwan pernah mengalami pengalaman buruk yang membuat mereka banyak belajar. Epidem SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) di Taiwan terjadi pada bulan November 2002 hingga tahun 2003. Hal ini, cukup mengundang atensi publik terhadap isu kesehatan. Pada saat itu, setidaknya ada sekitar 150.000 lebih kasus yang terkonfirmasi positif SARS di Taiwan (Hsieh, 2005). Taiwan telah menjadi salah satu negara yang terdampak sangat parah akibat dari Virus SARS pada tahun 2003 mereka meresponsnya langsung dengan mendirikan *National Health Command Center* (NHCC) yang berfokus untuk merespons pandemi dengan skala besar dan menjadi pusat pengontrol untuk mengatasi Pandemi (Duff-Brown, 2020). Berkaca dari pengalaman pahit itulah yang membuat Taiwan tidak ingin mengulang sejarah dalam menghadapi isu kesehatan yang akan datang, sehingga Taiwan berusaha mempersiapkan diri dari berbagai aspek salah satunya ialah menyusun sistem perawatan kesehatan kelas dunia yang mencakup universal. Ketika berita terkait COVID-19 tersiar, negara Taiwan meresponsnya dengan cepat

untuk menanggapi potensi ancaman di negaranya (Nugroho, 2020).

Kegagalan Taiwan pada saat menangani SARS pada 2003 yang mengakibatkan Taiwan mendapatkan pelajaran yang begitu besar (Tempo, 2020) mereka berinisiatif untuk mendirikan pusat komando, yaitu *Centers for Disease Control* (CDC) (Emeline Han, 2020). Taiwan melakukan sebuah terobosan dengan menggunakan analisis big data dan pucuk komando yang tersentralisasi dalam mengarah dan melindungi masyarakat dari dampak COVID-19. Walaupun Taiwan hanya berjarak 130Km dari Cina. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas Taiwan berhasil melakukan tindakan preventif yang efektif dan tidak terlepas dari kerjasama multidimensi antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan sesuai yang dengan teori *Rational Actor Model* I yang dikemukakan oleh Graham T Allison, menempatkan pemerintah sebagai pengampu kebijakan. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan penggunaan teknologi terbaru dari Pemerintah Taiwan yang menyebabkan Taiwan mampu melindungi sekitar 23 juta jiwa dari ancaman pandemi dunia COVID-19.

Kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Indonesia pada 2 Maret 2020 sebanyak dua orang positif. Pada 1 April 2020, seperti yang telah dilansir melalui website BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (2020), bertepatan dengan 30 hari setelah kasus pertama dikonfirmasi, jumlah kasus sudah mencapai 1.677 pasien positif COVID-19 yang sudah tersebar di 32 provinsi Indonesia. Selain itu, jumlah kesembuhan pasien mencapai 103 orang dan jumlah kematian sebanyak 157 orang. Pada 30 hari pertama ini, Indonesia menjadi negara dengan Case Fatality Rate (CFR) yang lebih tinggi yaitu 9,36 persen, dibandingkan dengan tingkat pemulihan yaitu 6,14 persen. CFR di Indonesia yang tinggi mendekati Italia dengan jumlah kasus terbanyak kedua di dunia dengan CFR 11,39 persen (Idhom, 2020). Padahal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020) merilis pernyataan media bahwa COVID-19 sekitar 80 persen pasien positif akan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus, terutama anak-anak hingga dewasa muda yang pada

umumnya akan memiliki gejala yang ringan. Sedangkan orang tua yang berusia di atas 60 tahun dan memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, jantung, pernapasan hingga hipertensi mempunyai risiko lebih besar jika terinfeksi oleh virus. Hal ini dibuktikan dengan akumulasi yang kasus pandemi seluruh dunia saat tulisan ini dibuat per tanggal 24 Agustus 2020 dengan tingkat kematian 3,45 persen dan tingkat kesembuhan 64,67 persen.

Sementara negara Taiwan yang digunakan Tirto.id sebagai fokusnya dalam memproduksi posternya. Pengendalian yang sudah disiapkan jauh sebelum pandemi ada dan kesiapan tersebut mampu menekan angka penularan COVID-19 di Taiwan. Taiwan mengumumkan kasus COVID-19 terkonfirmasi di negaranya tertanggal 21 Januari 2020. Kemudian, terbukti pada 30 hari pertama atau pada tanggal 20 Februari 2020, jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 21 orang. Selain karena kesiapan negara Taiwan dalam menghadapi pandemi, mereka juga mampu bersikap tegas melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan guna menjamin kesehatan dan melindungi warganya dari pandemi.

Hal ini bisa terjadi akibat kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Taiwan untuk membatasi perjalanan dari luar negeri khususnya RRC, menjadi sebuah kebijakan yang berpengaruh untuk menekan sekaligus memutus rantai penyebaran pandemi ini sejak 6 Februari 2020 atau tepat 16 hari setelah pertama kalinya warga negara Taiwan terkonfirmasi kasus COVID-19. Warga negara Taiwan yang pergi ke Cina, wajib melakukan karantina mandiri dan akan diberikan perhatian khusus kepada warga negara Taiwan yang pergi ke Hubei sebagai tempat penyebaran COVID-19 yang tertinggi di Cina pada saat itu (Panda, 2020). Kemudian, langkah berani serta efektif dilakukan pada tanggal 7 Februari kepada Warga Negara Asing (WNA) yang datang dari RRC untuk masuk ke Negara Taiwan. Segera setelah diberlakukannya karantina mandiri kepada masyarakat Taiwan.

Keberhasilan Taiwan dalam 30 hari pertama sejak terkonfirmasi kasus COVID-19 di negaranya adalah bagaimana Pemerintah Taiwan bisa dengan baik menunjukkan kapasitas mereka dalam memimpin dalam kondisi krisis dan hal

ini telah dibuktikan dengan baik oleh Tsai Ing Wen selaku Presiden Taiwan yang berhasil dengan sangat baik mengkonsolidasikan antarlini pemerintahan dan memaksimalkan segala fasilitas dan kuasanya untuk memberikan yang terbaik dari sumber daya manusia maupun teknologi untuk penanganan COVID-19 ini.

Dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya dalam mengurangi sekaligus memotong rantai penyebaran yang hanya berlaku pada beberapa daerah tertentu dikeluarkan pada 31 Maret 2020 (Peraturan Menkes). Tepat hari ke 29 sejak terkonfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia dan penyebaran COVID-19 sudah merebak ke 32 Provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus 1528 pasien (Idhom, 2020). Sebelumnya, pada 30 hari pertama, Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan peraturan apa pun selain mengimbau masyarakatnya agar segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah untuk dikurangi, menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lebih disarankan untuk beraktivitas di rumah sekaligus masyarakat ikut berkontribusi dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 (Wiryawan, 2020).

Peraturan PSBB pun pada awalnya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Di dalamnya terbagi dua kriteria bagi daerah yang ingin memberlakukan PSBB. Pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Setelah Pemenkes keluar, bukannya langsung mengimplementasikannya di beberapa daerah ataupun secara nasional. Namun beberapa hari setelah Permenkes itu secara resmi keluar tetapi, masih belum ada satu daerah pun yang memberlakukan PSBB (Tuwu dkk, 2021: 99).

Selain Permenkes yang baru dikeluarkan setelah kasus ini merebak ke 32 provinsi di Indonesia, implementasinya di daerah-daerah pun memerlukan waktu yang cukup lama agar

dapat diberlakukan PSBB dan tidak secara merata. Masyarakat terus menunggu keputusan PSBB dan kasus COVID-19 pun setiap hari terus bertambah dan semakin tinggi. Hingga pada akhirnya, Jakarta sebagai Ibu kota Indonesia yang pertama kali menerapkan sistem PSBB tersebut yang mulai berlaku pada 10 April 2020 (Umah, 2020).

Dari kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai bentuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia namun, kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Masyarakat juga merasa bahwa kebijakan dari pemerintah tidak memberikan jaminan kesehatan, sosial, maupun bantuan secara ekonomi yang layak bagi masyarakat yang melakukan karantina mandiri. Selain itu, banyaknya pekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaannya dari rumah seperti pedagang dan buruh yang memungkinkan mereka tidak mendapatkan pemasukan harian apabila bekerja dari rumah serta berisiko terpapar COVID-19 (Wibowo dan Putri, 2021: 15).

Sementara itu, Indonesia nampak belum siap dalam menghadapi potensi pandemi. Hal ini terlihat bagaimana respons Pemerintah Indonesia dalam 30 hari pertama sejak terkonfirmasi kasus pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020. Jika di Taiwan jelas terlihat sangat jelas bagaimana mitigasi bencana pandemi dengan berbagai kesiapannya. Di Indonesia terlihat ketar-ketir dalam pengambilan kebijakan birokrasi, ditambah dengan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang masih ke sana kemari. Sedangkan kasus COVID-19 terus bertambah dan sudah menyebar ke 32 Provinsi di Indonesia hanya dalam kurun waktu 30 hari. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentu akan membawa ketidakpastian dan membuat masyarakat semakin panik dengan kasus yang semakin hari terus bertambah (Lusianawati, 2020: 30).

Taiwan kini dipimpin oleh Tsai Ing Wen, seorang yang berkredibilitas sebagai pemimpin dan presiden perempuan pertama di Taiwan. Dia

adalah salah satu orang yang memiliki kuasa sekaligus terlibat dalam keberhasilan model klasikal ini, yang memang bertumpu pada kebijakan pemerintah dan kemampuan pemimpin negara untuk membuat kebijakan yang bisa berdampak baik terhadap negara tersebut (Myers and Horton, 2020).

Padahal, Taiwan tidak tergabung di World Health Organization (WHO) karena mereka tidak memiliki hubungan diplomatik dengan PBB akibat kebijakan *One China Policy* sehingga hanya Republik Rakyat Cina yang bisa mendapatkan pengakuan secara diplomatik. Maka dari itu, Pemerintah Taiwan yang sudah banyak belajar dari masa lalunya terkait epidemi SARS pada tahun 2003, berhasil menunjukkan keberhasilannya. Taiwan sekaligus diakui oleh dunia tentang cara menanggulangi keadaan genting, seperti krisis kesehatan dengan cara memberikan yang terbaik kepada rakyat mereka dengan meredakan segala ego sektoral antarpemangku kepentingan yang menjadi hal mendasar untuk dimiliki oleh negara di dunia dalam menghadapi situasi krisis, seperti pandemi yang kasusnya telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia. Taiwan menjadi negara yang menjadi percontohan bagi penanganan situasi darurat COVID-19.

Taiwan menyadari bahwa penting memiliki cadangan masker untuk digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh masyarakat yang menggunakan asuransi kesehatan mereka untuk membeli masker. Pihak Pemerintah Taiwan membuat aplikasi yang bisa memberi tahu penggunanya lokasi yang menyediakan masker untuk dibeli dan Taiwan memiliki asuransi kesehatan dengan data yang jelas dengan riwayat kesehatan masyarakatnya, sehingga para dokter dan perawat bisa mengakses data tersebut secara online guna memudahkan dalam menganalisis apakah pasien memiliki penyakit bawaan atau tidak.

Kesiapan Pemerintah Taiwan dalam menghadapi pandemi dapat dilihat dari kebijakan yang membatasi masuknya orang-orang dari negara yang telah terpapar COVID-19 seperti Cina, Korea Selatan, Jepang dan beberapa negara lainnya. Selain itu, kebijakan yang tersentralisasi dari *Central Epidemics Command Center* telah

melakukan pencegahan sejak akhir tahun 2019 ketika mulai tersiarnya kabar Virus Corona yang penularannya dari manusia ke manusia disertai dengan kesiapan dana pada Februari 2020. Hal ini menyebabkan Taiwan menjadi salah satu negara yang paling siap untuk menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 (Yeh, 2020: 430). Konsolidasi antara Pemerintah Taiwan dan masyarakat sipil terkait penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, efektif dalam menekan risiko penularan COVID-19 di negara tersebut. Didukung pula dengan adanya budaya saling mengingatkan satu sama lain yang membuat penanganan pandemi COVID-19 di Taiwan berhasil (Tan dkk, 2021: 6).

Fakta yang membuktikan bahwa Taiwan berhasil dengan sangat baik untuk merespons dari munculnya virus COVID-19. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Tirtto.id menjadikan negara Taiwan sebagai salah satu negara yang dinilai paling baik dalam pencegahan merebaknya epidemi di negaranya sendiri. Nugroho (2020) menjelaskan bahwa secara letak geografis, Taiwan sangat berdekatan dengan Negara Cina, asal mula merebaknya COVID-19. Karena itu, Taiwan menjadi negara percontohan dari dunia internasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mitigasi yang diambil oleh Pemerintah Taiwan dengan cara langsung membatasi moda transportasi dari laut maupun dari udara yang datang dari Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai bentuk pencegahan dilakukannya tanpa ragu-ragu.

## PENUTUP

Pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Cina dengan mudah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dalam kurun waktu beberapa bulan. Indonesia dan Taiwan merupakan negara yang juga terdampak dari pandemi ini. Tirtto.id sebagai portal berita *online* yang berasal dari Indonesia mengunggah poster di *feeds* Instagramnya tepat 30 hari setelah kasus COVID-19 pertama diumumkan oleh Presiden Indonesia. Poster tersebut berisi usaha negara Taiwan dalam menekan penyebaran virus dari berbagai aspek seperti teknologi, distribusi alat kesehatan, dan kebijakan yang semuanya sudah

siap dalam menghadapi pandemi dan secara tidak langsung sebagai sindiran terhadap penanganan pandemi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di atas, walaupun secara letak geografis negara Taiwan berdekatan dengan Cina, namun Taiwan menjadikan epidemi SARS sebagai pelajaran berharga, karena Taiwan menjadi negara yang paling terdampak pada saat itu. Maka dari itu, ketika ke depannya ada isu kesehatan seperti pandemi COVID-19 datang, pemerintah Taiwan telah menyiapkan dana, tenaga kesehatan, serta kebijakan untuk menekan kasus di negaranya dan kesadaran masyarakat mereka untuk menaati peraturan pemerintah yang ada. Sedangkan Indonesia selama 30 hari pertama, nampak tidak siap dalam menghadapi pandemi, pemerintah hanya mengeluarkan imbauan untuk mengurangi mobilitas masyarakatnya, dan mengeluarkan kebijakan PSBB, di mana kebijakan ini tidak dapat diimplementasikan kesemua lapisan masyarakat, karena masih banyaknya pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga tidak memberikan jaminan kesehatan, sosial, dan bantuan ekonomi bagi yang masyarakat yang melakukan karantina mandiri di rumah dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN

- Allison, Graham T. (1968). *Conceptual Models and The Cuban Missile Crisis: Rational Policy, Organization Process, and Bureaucratic Politics*. California: The Rand Corporation.
- Indonesia Negara dengan Kasus Flu Burung Terbanyak di Dunia. (2012). *BBC*. Diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2012/03/120308\\_birdfluindonesia#:~:text=Kematian%20pasien%20flu%20burung%20di,155%20diantaranya%20terjadi%20di%20Indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120308_birdfluindonesia#:~:text=Kematian%20pasien%20flu%20burung%20di,155%20diantaranya%20terjadi%20di%20Indonesia) pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Sebanyak 103 Pasien Sembuh dan 1.677 Positif COVID-19 di Indonesia. (2020). *BNPB*. Diakses dari <https://bnpb.go.id/berita/sebanyak-103-pasien-sembruh-dan-1-677-positif-covid19-di-indonesia> pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Darma, Yoce Aliah. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Dini. (2014). Terapi Warna untuk Efek Penyembuhan. *National Geographic*. Diakses dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/13292275/terapi-warna-untuk-efek-penyembuhan?page=all> pada tanggal 27 Agustus 2020.
- Duff-Brown, Beth. (2020). How Taiwan Used Big Data, Transparency and a Central Command to Protect Its People from Coronavirus. *Stanford*. Diakses dari <https://fsi.stanford.edu/news/how-taiwan-used-big-data-transparency-central-command-protect-its-people-coronavirus> pada tanggal 3 Agustus 2020.
- Eriyanto, (2009). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto, (2013). *Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Jakarta: Kencana.
- Hsieh, Ying-Hen., King, Chwan-Chuan, Chen, Cathy W. S., Ho, Mei-Shang, Lee, Jen-Yu, Liu, Feng-Chi, Wu, Yi-Chun, & Julian Wu, Jiunn-Shyan. (2005). Quarantine for SARS, Taiwan. *Emerging Infectious Diseases*, 11(2), 278–282.
- Idhom, A. M. (2020). Update Corona 31 Maret: Data Kasus di 32 Provinsi Indonesia & Dunia. *Tirto*. Diakses dari <https://tirto.id/update-corona-31-maret-data-kasus-di-32-provinsi-indonesia-dunia-eJYs> pada tanggal 27 Agustus 2020.
- Idhom, A. M. (2020). Update Corona 1 April: Sebaran 1.677 Kasus di 32 Provinsi Indonesia. *Tirto*. Diakses dari <https://tirto.id/update-corona-1-april-sebaran-1677-kasus-di-32-provinsi-indonesia-eKdu> pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Islam, Putri Ainur dan Indrawan, Aditya Fajar. (2020). Berpengalaman Lawan SARS, Taiwan Kuat Menghadapi Pandemi COVID-19. *VOI*. Diakses dari <https://voi.id/artikel/baca/4438/berpengalaman-lawan-sars-taiwan-kuat-menghadapi-pandemi-covid-19> pada tanggal 26 April 2020.
- Jorgensen, M., & Phillips, L. 2007. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Diterjemahkan oleh Abdul Syukur Ibrahim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lebond, B. (2017). Arti dan Pengaruh Warna bagi Psikologi Manusia. Diakses dari <https://psyline.id/arti-dan-pengaruh-warna-bagi-psikologi-manusia/> pada tanggal 26 April 2020.
- Lidwina, A. (2020). Beda Penanganan Flu Burung dan Virus Corona. Diakses dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4214ca0a4/beda-penanganan-flu-burung-dan-virus-corona> pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Lukman, dkk. (2006). *Linguistik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Lusianawati, Hayu. (2020). Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi COVID-19. *The Source Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 21–39.
- Apakah Taiwan Sebuah Negara atau Bagian dari China? (2019). *Matamata Politik*. Diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/belajar-politik-listicle-apakah-taiwan-sebuah-negara-atau-bagian-dari-china-8-syarat-pemberian-status-negara/> pada tanggal 26 April 2020.
- Myers, Steven Lee., Horton, Chris. (2020). In Blow to Beijing, Taiwan Re-elects Tsai Ing-wen as President. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2020/01/11/world/asia/taiwan-election-china.html> pada tanggal 28 Agustus 2020.
- Nugroho, R. S. (2020). Ini Alasan Taiwan Jadi Negara Terbaik yang Merespon Wabah Virus Corona. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/08/071500965/ini-alasan-taiwan-jadi-negara-terbaik-yang-merespons-wabah-virus-corona?page=all> pada tanggal 5 Agustus 2020.
- Panda, A. (2020). Amid Coronavirus Concerns, Taiwan Takes Measures to Restrict Travel From China. Diakses dari <https://thediplomat.com/2020/03/amid-coronavirus-concerns-taiwan-takes-measures-to-restrict-travel-from-china/> pada tanggal 27 Agustus 2020.
- Pane, Merry Dame Cristy. (2020). Virus Corona (COVID-19). Diakses dari <https://www.alodokter.com/virus-corona> pada tanggal 24 April 2020.
- Schiffirin, D. (2007). *Ancangan Kajian Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sobur, Alex. (2009). *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Framing*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Surat Edaran. (2020). No HK.02.01/MENK-ES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus disease (COVID-19).
- Tan, Ting Wan., dkk. (2021). Effectiveness of Epidemic Preventive Policies and Hospital Strategies in Combating COVID-19 Outbreak in Taiwan. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 18, 1–19.
- Tim Redaksi Tirto.id. (2016). Tentang Kami Jernih, Mengalir, Mencerahkan bersama Tirto.id. *Tirto*. Diakses dari <https://Tirto.id/insider/tentang-kami> pada tanggal 24 April 2020.
- Tuwu, D., Laksmono, B. S., Huraerah, A., & Harjudin, L. (2021). Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Sosio Konsepsia*, 10(2), 97–110. .
- Umah, Anisatul. (2020). PSBB Jakarta Mulai Berlaku, Ini yang Boleh & tak Boleh di DKI. *CNBC Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200410064937-4-151040/psbb-jakarta-mulai-berlaku-ini-yang-boleh-tak-boleh-di-dki> pada tanggal 27 Agustus 2020.
- Wahyono, Sugeng Bayu. (2018). “Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk”, dalam Wening Udasmoro (ed.), *Hamparan Wacana: 27–53*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- WHO (2020). Media Statement: Knowing the risks for COVID-19. Diakses dari [https://www.who.int/indonesia/news/detail/08-03-2020-knowing-the-risk-for-COVID-19#:~:text=Most%20people%20\(about%2080%25\),it%20can%20cause%20serious%20illness.](https://www.who.int/indonesia/news/detail/08-03-2020-knowing-the-risk-for-COVID-19#:~:text=Most%20people%20(about%2080%25),it%20can%20cause%20serious%20illness.) pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Wibawa, Putu Ayu CCG., Putri, Ni Kadek CA. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Menangani COVID-19. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 10–18.
- Wiryanan, I Wayan. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional*. Denpasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Wongsatjachock, Weera. (2016). Graham T. Allison’s Three Dimensions of Decision-Making Revisited: A Case Study of Rice Price Policy in Thailand. *Proceedings of the Burapha University International Conference*. Thailand, Burapha University.
- Yeh, Ming-Jui., Cheng, Yawen. (2020). Policies Tackling the COVID-19 Pandemic: A Sociopolitical Perspective from Taiwan. *National Library of Medicine*, 18(6), 427–434.

# MEMAHAMI PEDAGANG, PASAR TRADISIONAL, DAN PAGEBLUK DI PEDESAAN: STUDI ETNOGRAFI DI PASAR NGABLAK, KECAMATAN CLUWAK, KABUPATEN PATI

## *UNDERSTANDING TRADERS, TRADITIONAL MARKET, AND PAGEBLUK IN THE VILLAGE: ETHNOGRAPHIC STUDIES IN NGABLAK MARKET, CLUWAK SUB-DISTRICT, PATI DISTRICT*

Rahman Latif Alfian<sup>1</sup>, Budiawati Supangkat Iskandar<sup>2</sup>, Johan Iskandar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

<sup>2</sup>Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Padjajaran

<sup>3</sup> Departemen Biologi Fmipa, dan Pasca Ilmu Lingkungan (PSMIL & DIL) Universitas Padjajaran.

E-mail: <sup>1</sup> [rahmanlatif927@gmail.com](mailto:rahmanlatif927@gmail.com), <sup>2</sup> [budiawati.supangkat@unpad.ac.id](mailto:budiawati.supangkat@unpad.ac.id), <sup>3</sup> [johan.iskandar@unpad.ac.id](mailto:johan.iskandar@unpad.ac.id)

### ABSTRACT

*Disease outbreaks have spread to attack the country of Indonesia. For the Javanese people an outbreak of disease is called pagebluk. Pagebluk slowly has an impact on people's lives, including the traditional market traders at Ngablak Market, which is a traditional market in the countryside. Through this understanding, this research focuses on exploring the impact of disease outbreaks on traditional markets in rural areas. Furthermore, this study is aimed at looking deeper into the dynamics that traders must do to adapt to the ongoing conditions. This study uses an ethnographic method for approximately three months from May to July 2020. The results of this study indicate that although in rural areas, Ngablak Market is also affected by the decrease in market visitors. On the other hand, traders also made adjustments such as following the habit of washing hands and wearing masks. Traders also apply an online buying and selling system to survive in the face of unpredictable conditions.*

**Keywords:** *Pagebluk, Pati District, Social Change, Traders, Traditional Markets.*

### ABSTRAK

Wabah penyakit merebak menyerang negara Indonesia. Bagi masyarakat Jawa merebaknya wabah penyakit disebut dengan *pagebluk*. *Pagebluk* secara perlahan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali para pedagang pasar tradisional di Pasar Ngablak yang merupakan pasar tradisional di Perdesaan. Melalui pemahaman tersebut, penelitian ini berfokus untuk menggali dampak merebaknya wabah penyakit terhadap pasar tradisional di Perdesaan. Lebih lanjut, penelitian ini ditujukan untuk melihat lebih dalam dinamika yang harus dilakukan oleh para pedagang untuk menyesuaikan diri menghadapi kondisi yang berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode etnografi sepanjang kurang lebih tiga bulan dari bulan Mei hingga Juli 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun di Perdesaan, Pasar Ngablak juga terdampak dengan berkurangnya pengunjung pasar. Pada sisi yang lain, para pedagang juga melakukan penyesuaian seperti mengikuti kebiasaan mencuci tangan, dan mengenakan masker. Para pedagang juga menerapkan sistem jual beli secara online agar tetap bertahan dalam menghadapi kondisi yang tidak bisa diprediksi.

**Kata Kunci:** *Kabupaten Pati, Pagebluk, Pasar Tradisional, Pedagang, Perubahan Sosial.*

### PENDAHULUAN

“*Pasare wis sepi, malah ketambahan pagebluk kaya ngene!*” satu kalimat yang terucap dari salah satu pedagang pasar tradisional di salah satu desa di Kabupaten Pati. Pagi itu hari Minggu, harusnya menjadi hari pasar yang ramai. Tapi

keadaan tidak seperti yang diharapkan oleh para pedagang di Pasar Ngablak. Salah satu pasar tradisional di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. *Pagebluk* melanda Indonesia, dampak yang dibawa wabah penyakit ini juga melanda hingga pelosok Perdesaan tak terkecuali di Desa Ngablak. Salah satu desa di bagian Barat

Laut dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati, dan berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Pada tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana dihimpun dari berbagai media (kompas.com, cnnindonesia.com, liputan6.com) Presiden Republik Indonesia secara resmi mengumumkan dua warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona baru. Kasus tersebut menjadi paparan pertama virus corona di Indonesia. Sebelumnya pada penghujung 2019 virus corona baru (novel coronavirus (2019-nCov)) ditemukan menjangkit warga Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus yang ditemukan, virus tersebut menjadi penyebab infeksi pada paru dan menimbulkan gejala infeksi saluran napas mulai dari ringan hingga berat dengan angka kematian 2,5 persen dari kasus infeksi berat (www.yankes.kemkes.go.id, 2020). Hingga tulisan ini dibuat, dikutip dari (www.covid19.go.id) sebanyak lebih dari 150.000 jiwa telah terkonfirmasi positif Covid-19.

Bagi masyarakat Jawa keadaan dilanda wabah penyakit disebut dengan *pagebluk*. *Pagebluk* secara harfiah dapat diartikan sebagai jatuh tersungkur. Konsep ini digunakan masyarakat untuk menggambarkan kondisi seseorang yang terkena penyakit lalu dalam waktu yang tidak lama meninggal. Dalam Babad Tanah Jawi (Olthof, 2014) *pagebluk* digambarkan dengan kondisi banyak orang sakit, sulit bahan pangan, kelaparan, dan banyak kematian, cepatnya serangan penyakit juga diungkapkan dengan ungkapan “*esuk lara, sore mati.*” (pagi sakit, sore meninggal). Wabah penyakit yang terjadi pada masa lampau membawa berbagai dampak sosial, ekonomi, dan politik bagi kehidupan sosial pada masa tersebut. Misalnya saja pada masyarakat pesisir Jawa abad ke-16, kota-kota di pesisir pantai mengalami kemunduran yang disebabkan salah satunya karena kesehatan masyarakat di kota-kota padat penduduk di pesisir pantai memburuk karena penyakit tropis seperti malaria yang disebarkan oleh lalu lintas internasional yang meningkat (Pigeaud dan De Graaf, 1976). Beberapa pandemi pernah tercatat dalam beberapa karya tulis misalnya saja pada masa sekitar tahun 1625–1626 di Jawa terjadi epidemi hebat, wabah penyakit tersebut adalah wabah pneumonia atau penyakit yang menyerang paru-paru dan mengganggu pernapasan, penyakit

ini juga disebut penyakit dada. Wabah penyakit tersebut menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat juga mengakibatkan dua per tiga penduduk di wilayah Jawa Tengah meninggal (Reid, 1988; Ricklefs, 2008). Di Batavia, tambak ikan yang dibuat di sepanjang garis pantai Batavia, menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi nyamuk anopheles. Hal tersebut mengakibatkan pada tahun 1733–1795 sekitar 85.000 pegawai VOC tewas di Batavia, wabah ini membuat sedikit banyak kondisi politik dan perekonomian mengalami keterpurukan (Ricklefs, 2008). Wabah penyakit atau pandemi yang berlangsung pada masa lampau memengaruhi cara masyarakat dalam memandang suatu penyakit yang melanda. Seperti yang terjadi pada pandemi Covid-19 yang terjadi hingga sekarang ini.

Membahas mengenai wabah penyakit yang terjadi pada suatu wilayah dan bahkan sampai meluas melintasi batas-batas negara memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi pada suatu wilayah atau bahkan negara (Condon dan Sinha, 2008). Ekonomi sendiri terdiri dari dua ranah yaitu komunitas dan pasar, kedua aspek membentuk ekonomi karena manusia dimotivasi oleh pemenuhan sosial, keingintahuan, dan kesenangan penguasaan, serta tujuan instrumental, persaingan, dan akumulasi keuntungan (Gudeman, 2001). Pada sisi lain, khususnya pasar tradisional bukanlah lokus mati yang timbul dan bergerak dengan sendirinya, kegiatan di pasar tradisional mempunyai kekhasan tersendiri yaitu interaksi yang berlangsung oleh pemangku pasar. Pasar tradisional tidak hanya sebagai tempat bertemunya penjual dengan pembeli, tetapi pasar juga menjadi tempat berlangsungnya hubungan yang personal dan sebagai sumber informasi, dengan kata lain pasar tradisional tidak hanya sekedar ruang ekonomi tetapi juga ruang sosial (Sadilah dkk., 2011). Pasar juga tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang statis karena pasar sebagai pranata ekonomi selalu mengalami perubahan mengikuti dinamika yang terjadi di eksternal maupun internalnya secara spontan (Supangkat, 2012).

Melalui hal tersebut dapat dipahami bahwa perubahan sosial pada suatu entitas masyarakat tidak bisa dihindarkan. Perubahan yang terjadi

pada masyarakat sendiri pada dasarnya tidak bisa hanya didasarkan pada satu faktor tunggal tetapi lebih ke multi faktor yang saling memengaruhi (Hatu, 2011). Begitu pun dengan para pedagang pasar tradisional yang selalu menghadapi arus perubahan. Salah satu yang menjadi faktor pendorong perubahan dalam hal ini adalah merebaknya wabah penyakit. Berkenaan dengan wabah penyakit yang melanda seperti sekarang ini, para pedagang di pasar tradisional tidak terhindar dari dampak yang timbul. Pada masa lalu di Jawa, wabah penyakit yang melanda dan bersifat global membuat laju perekonomian pasar porak-poranda, banyak pengusaha-pengusaha (bandar) mengalami kerugian, hal tersebut juga membuat pasokan pangan masyarakat terganggu (Reid, 1988). Pada penelitian yang lebih baru berkenaan dengan wabah Covid-19 yang melanda, di Pasar Tradisional Kartasura, dampak pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona yang diberlakukan oleh pemerintah membuat kondisi pasar sepi pembeli, daya beli masyarakat menurun, dan pasokan (distribusi) yang terhambat. Hal tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan para pedagang, sehingga untuk meminimalisasi kerugian para pedagang mengurangi jumlah komoditas yang dijual (Purbawati dkk, 2020). Sementara di Pasar Tondano Kabupaten Minahasa, kebijakan pembatasan waktu operasional pasar dalam rangka penanggulangan Covid-19 juga berdampak pada penurunan omset para pedagang serta meningkatnya kecemasan para pedagang juga pembeli akan penularan wabah penyakit saat melakukan transaksi (Sidik dkk., 2020).

Selanjutnya, artikel ini melihat lebih dalam bagaimana praktik dan perubahan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar tradisional khususnya Pasar Ngablak dalam merespons kondisi eksternal yang memengaruhi “kehidupan” pasar? Hal ini didasarkan karena aspek ekonomi merupakan kekuatan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Effendi, 1997). Selain itu, reaksi manusia terhadap kondisi yang terjadi di alam sekitarnya menciptakan pola tertentu tidak terkecuali terhadap penyakit (Trostle, 2005). Pada sisi yang lain, budaya juga memengaruhi kesehatan manusia dan pola penyakit. Keseluruhan cara hidup manusia (pekerjaan, makanan, aktivitas),

perilaku yang dipelajari, teknik manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, juga cara manusia merasa dan percaya begitu memengaruhi kerentanan manusia terhadap penyakit (Trostle, 2005).

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang praktik yang dilakukan oleh para pedagang khususnya para pedagang di Pasar Ngablak dalam merespons kondisi wabah penyakit yang melanda sekarang ini. Penelitian lebih lanjut ingin menggali tentang bagaimana praktik pedagang pasar tradisional di Pasar Ngablak dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam hal adaptasi menghadapi kondisi pandemi yang berlangsung. Apabila dibandingkan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya (Purbawati, 2020; Sidik dkk., 2020), penelitian ini tidak hanya membahas mengenai dampak yang dirasakan tetapi lebih focus ke praktik dalam merespons berbagai dampak yang timbul karena wabah penyakit yang berlangsung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai praktik pedagang dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini dilaksanakan di Pasar Ngablak. Pasar Ngablak dipilih menjadi lokus penelitian karena pasar tersebut merupakan pasar tradisional di wilayah Perdesaan. Hal ini menjadi penting karena pada bulan Mei kondisi Covid-19 di Kabupaten Pati mengalami masa transisi antara tidak percaya menjadi percaya. Pada sisi lain Desa Ngablak menjadi salah satu desa yang pernah diteliti oleh salah satu pemerintahan lokal pada masa colonial Belanda mengenai pemanfaatan dan pembagian pemanfaatan fungsi lahan. Pada penelitian tersebut juga sedikit disinggung mengenai pasar pada saat itu, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan kondisi yang lebih terbaru. Secara geografis Pasar Ngablak menjadi salah satu pasar tradisional di wilayah Utara Kabupaten Pati yang berada pada jalur utama antara Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara. Meskipun berada pada jalur utama antarkabupaten, pasar ini diapit dua pasar besar yaitu Pasar Tayu dan Pasar Kelet, hal ini semakin menimbulkan dilematis tersendiri bagi para pedagang.

Praktik para pedagang di Pasar Ngablak digali menggunakan metode etnografi. Penggunaan etnografi sebagai metode penelitian didasarkan karena etnografi adalah tentang menceritakan kisah yang berakar dari sudut pandang masyarakat lokal saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari di komunitasnya (Fatterman, 2010). Selain itu, penggunaan etnografi juga merupakan upaya untuk memperhatikan makna tindakan dari kejadian yang ada pada kelompok masyarakat yang diamati (Spradley, 2007).

Metode etnografi mengadopsi lensa budaya untuk menafsirkan perilaku yang diamati, memastikan bahwa perilaku ditempatkan dalam konteks yang relevan dan bermakna secara budaya (Fatterman, 2010). Dalam penelitian ini pembacaan konsep kebudayaan dipahami sebagai suatu yang fleksibel, dapat dinegosiasikan, diperjuangkan, relatif, dan tunduk pada perubahan (King dan Wilder, 2012). Kebudayaan yang dibentuk kemudian dilihat sebagai budaya diferensial yang tumbuh dari adanya interaksi yang terus menerus antar manusia, kelompok dan lingkungan yang terus menerus mengalami perubahan (Abdullah, 2015). Dalam penelitian ini pasar tradisional dilihat dalam empat wujud yaitu (1) eksistensi fisik tempat (bangunan pasar), seperti lahan dan tipe bangunan; (2) Seperangkat aktivitas (baik ekonomi maupun sosial) yang berlangsung terus menerus saat kegiatan pasar berlangsung; (3) Sistem gagasan yang melatarbelakangi berlangsungnya eksistensi fisik dan seperangkat aktivitas; (4) Nilai yang menjadi dasar bagi sistem penyelenggaraan budaya di pasar tradisional (Effendi, 2016).

Pada penelitian ini, posisi peneliti merupakan *native researcher* di mana lokus dan subjek penelitian adalah bagian dari diri peneliti. Posisi peneliti sebagai bagian dari masyarakat Desa Ngablak (native) menimbulkan kelemahan juga kelebihan tersendiri dalam melakukan penelitian dan mengkaji fenomena yang ada. Salah satu yang menjadi tantangan peneliti adalah mengenai ambiguitas, tidak bisa dipungkiri meneliti komunitas sendiri berisiko memunculkan titik buta dalam memandang budaya komunitas yang diteliti seperti beberapa perilaku sebenarnya sarat dengan makna dan menjadi ciri khas, justru terlewat karena menganggap praktik tersebut

adalah praktik umum (Clark dan Micailova, 2004). Memandang risiko tersebut, peneliti harus bisa membedakan posisi dirinya dalam melihat komunitas yang diteliti. Peneliti harus memosisikan dirinya sebagai orang ‘dalam’ dan orang ‘luar’, sebagai orang ‘dalam’ pekerjaan lapangan menitikberatkan untuk mempelajari makna, nilai, dari perilaku yang dilakukan oleh komunitas yang diteliti. Sedangkan sebagai orang ‘luar’ penelitian ditujukan untuk mengamati, mengalami, dan membuat perbandingan-perbandingan dari praktik perilaku yang tampak oleh komunitas yang diteliti (Sluka dan Antonius, 2007). Peneliti dalam hal ini juga seperti yang diutarakan oleh Appadurai (1988) yaitu ‘membebaskan diri’ dari unsur-unsur otentik yang melekat pada diri dan cenderung menitik beratkan untuk mengamati kompleksitas, juga keragaman pada komunitas yang diteliti. Hingga akhirnya posisi peneliti dalam penulisan hasil penelitian ini bisa disebut “*hybrid*” karena tulisan ini menggambarkan pengarang sebagai minimal bikultural dalam arti secara bersamaan memiliki dunia keilmuan dan dunia kehidupan sehari-hari di mana pengarang juga terlibat (Narayan, 1993).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, dan wawancara. Untuk metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dengan ikut berbaur dengan kegiatan yang terjadi di Pasar Ngablak. Teknik pengumpulan data ini dilakukan karena untuk memahami masyarakat yang *liyan* antropolog membenamkan dirinya di dalam komunitas yang diteliti, di dalamnya peneliti belajar, berpikir, melihat, merasakan, dan terkadang bertindak sebagai anggota pemangku kebudayaan, dan pada sisi yang lain peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan dirasakannya (Powdermaker, 1966). Dalam melakukan observasi terdapat beberapa hal yang diamati seperti kegiatan yang dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional, pola komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh para pedagang, dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini.

Selain melakukan pengamatan, pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara kepada pedagang dan aktor-aktor di Pasar Ngablak. Wawancara yang dilakukan antara

lain wawancara mendalam, wawancara ini ditujukan untuk menjaring data dari pedagang yang berkaitan dengan kondisi pasar dari waktu ke waktu (historis), lalu untuk melihat penjelasan mendalam ketika menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini. Wawancara mendalam ditujukan kepada informan yang dirasa mengetahui secara mendalam data yang diperlukan seperti pedagang yang sudah berjualan lama, pengelola pasar, maupun beberapa aktor yang berada di pasar. Selain wawancara mendalam, peneliti juga menggunakan model wawancara tak berencana dan wawancara sambil lalu (Koentjaraningrat, 1991). Kedua model wawancara ini ditujukan kepada pengunjung pasar maupun masyarakat umum yang dilakukan secara acak. Wawancara ini bertujuan untuk melengkapi dan pengecekan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Model wawancara ini sering digunakan peneliti ketika berada di warung makan, ketika bertemu dengan pengunjung pasar secara acak dan tanpa rencana. Model wawancara ini sering digunakan peneliti ketika mengamati kondisi pasar, maupun saat melakukan pengamatan dengan berkeliling Pasar Ngablak.

Analisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif (Miles dan Huberman, 1992). Analisis data tersebut terdiri dari empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga mendapatkan suatu pola tertentu pada masyarakat yang diteliti. Dalam melakukan analisis data alur tersebut tidak selalu berurutan karena langkah-langkah tersebut merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Sedangkan dalam proses verifikasi data, peneliti menggunakan triangulasi. Di mana peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data yang didapat pada saat wawancara. Peneliti juga membandingkan data wawancara dari satu informan ke informan yang lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Ngablak, pasar tradisional yang berada di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati (Gambar

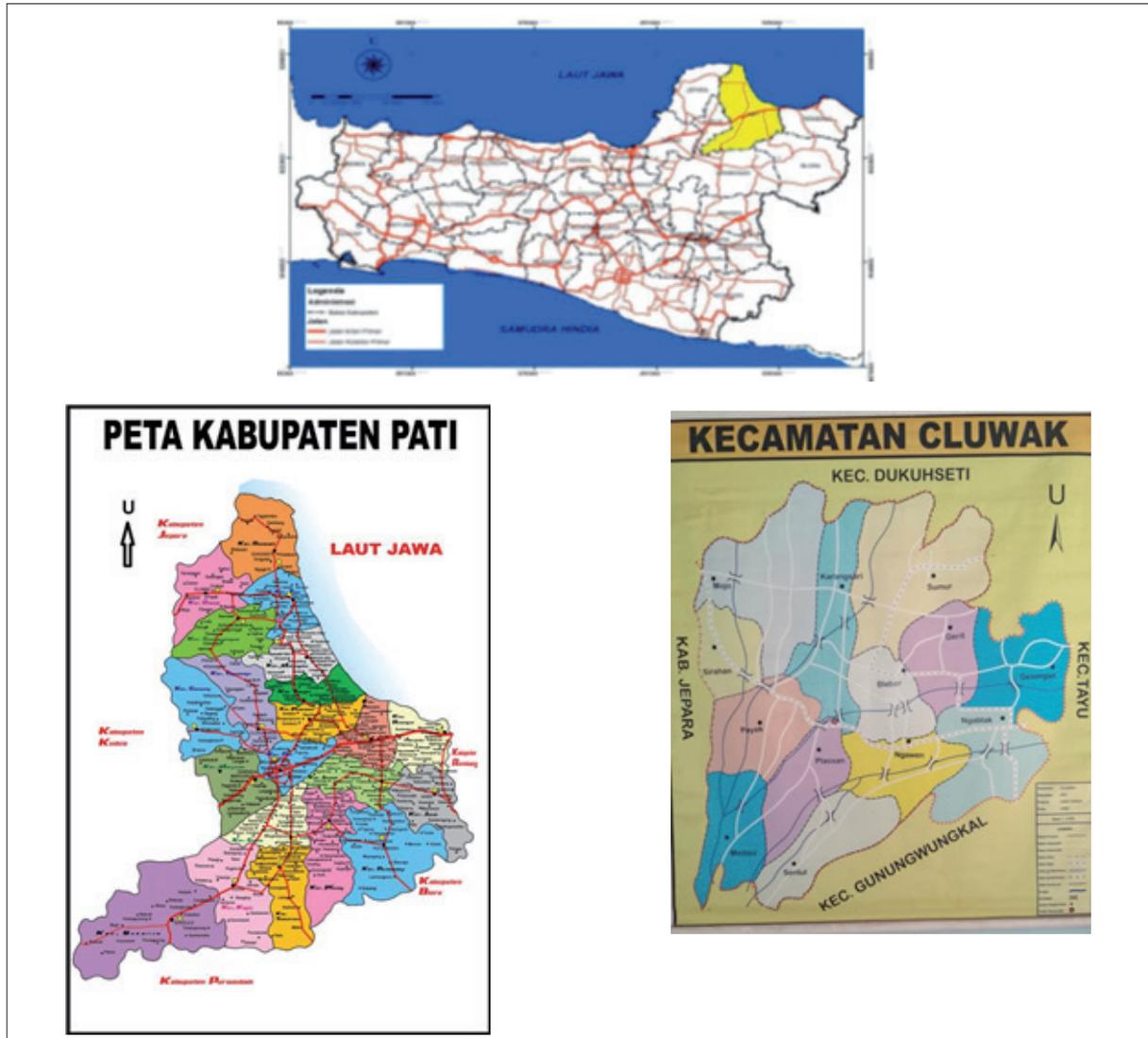
1). Pasar Ngablak dipilih sebagai lokus karena karakternya sebagai pasar tradisional yang berada di Perdesaan. Pasar Ngablak juga dipilih untuk melihat lebih dalam mengenai perubahan sosial yang terjadi di Perdesaan khususnya dalam penelitian ini adalah perubahan sosial di kalangan pedagang pasar tradisional dalam menghadapi kondisi pagebluk yang melanda Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Selayang Pandang Desa Ngablak

Pasar Ngablak merupakan pasar tradisional yang berada di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati. Desa Ngablak sendiri merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Desa ini berada 36 Km ke arah Utara dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati dan tidak jauh berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Desa Ngablak juga terletak di jalur utama jalan antara kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara. Luas wilayah Desa Ngablak adalah 563 Ha, dengan pembagian lahan sawah seluas 249 Ha, lahan bukan sawah (seperti tegalan) seluas 134 Ha, dan lahan bukan pertanian (seperti jalan, pemukiman, dan sungai) seluas 183 Ha. Desa Ngablak berada pada ketinggian 76 mdpl, tidak jauh dari kaki Gunung Muria juga tidak terlampaui jauh dari Laut Jawa yang berada di sebelah Timur. Secara administratif Desa Ngablak terdiri dari 10 Dukuh, 13 Rukun Warga, dan 55 Rukun Tetangga. Pada tahun 2017, penduduk Desa Ngablak berjumlah 6.479 jiwa yang terdiri dari 3.122 laki-laki dan 3.357 perempuan (BPS Kabupaten Pati, 2018). Jumlah penduduk tersebut menempatkan Desa Ngablak menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Cluwak apabila dibandingkan dengan desa lainnya yang memiliki jumlah penduduk 1.000–5.000 jiwa.

Melalui ingatan yang diturunkan secara lisan, cerita terbentuknya Desa Ngablak terjadi pada masa Kerajaan Majapahit. Cerita ini berawal dari seorang putra mahkota Kerajaan Majapahit (hingga sekarang belum diketahui pasti nama putra mahkota tersebut) yang hendak diangkat menjadi raja berikutnya. Sebelum diangkat menjadi raja,



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030 dan Dokumentasi Peneliti (2020)

**Gambar 1.** Lingkaran Hitam Menunjukkan Lokasi Pasar Ngablak

putra mahkota tersebut harus memimpin suatu daerah terlebih dahulu agar lebih terlatih dalam memimpin ketika sudah waktunya untuk diangkat menjadi raja. Ditetapkanlah pangeran tersebut untuk memerintah di Kadipaten Pati. Sesampainya di Kadipaten Pati sebelum diangkat menjadi pemimpin daerah tersebut, pangeran ini merasa belum siap untuk menjadi seorang pemimpin dan memutuskan untuk mencari ketenangan. Dalam perjalanannya, pangeran ini menanggukkan seluruh pangkat derajat dan memutuskan untuk menjadi rakyat biasa, hal ini dilakukan agar tidak ada kerabat kerajaan yang mengetahui beliau. Hingga pada suatu hari pangeran ini sampai di sebuah tempat yang sangat tandus. Karena

tandusnya daerah ini terlihat seperti gurun yang terbuka luas dan panas, warga setempat menyebutnya ngeblak-ngeblak (terbuka tanpa ada halangan). Mengetahui hal tersebut pangeran ini kemudian menamakan daerah tersebut dengan nama Ngablak yang berarti ngawiti blak-blakan (memulai keterbukaan). Hingga sekarang daerah tersebut dikenal masyarakat sebagai Desa Ngablak (Wawancara dengan Mbah Jono ± 75 Tahun, 18 Juni 2020).

Sekarang, Desa Ngablak berbeda dengan kondisi seperti yang diceritakan pada asal-muasal nama desa tersebut. Berada tidak jauh dengan kaki Gunung Muria, membuat tanah di Desa Ngablak subur sehingga cocok untuk

pertanian padi dan menanam berbagai jenis tumbuhan buah. Pada tahun 2014, 75 persen warga desa bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditas utama adalah padi. Selain padi, warga Desa Ngablak juga menanam ketela (singkong), jagung, kacang tanah, dan beberapa menanam tebu. Lahan pertanian tidak hanya difungsikan untuk menanam satu jenis tanaman, para petani biasanya akan menanam tanaman secara bergantian bergantung pada kondisi cuaca yang cocok terhadap suatu tanaman (menanam tanaman selingan). Misalnya saja setelah memanen padi, para petani biasanya tidak menanaminya lagi dengan padi. Apabila sedang musim kemarau petani akan menanam lahan mereka dengan tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca panas seperti ketela ataupun jagung. Pola menanam yang seperti ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas tanah. Sedangkan pemilihan jenis komoditas yang ditanam juga dipengaruhi dengan harga komoditas di pasaran. Setelah memanen tanaman selingan, lahan pertanian akan ditanam kembali dengan komoditas padi sebagai komoditas utama.

Pusat pemerintahan Desa Ngablak berada di Dukuh Krajan, selain sebagai pusat pemerintahan Dukuh Krajan juga menjadi pusat perekonomian desa dengan keberadaan pasar tradisional. Di Kecamatan Cluwak terdapat tiga desa yang mempunyai pasar tradisional yaitu Desa Plaosan, Desa Gerit, dan Desa Ngablak. Dari ketiganya Pasar Ngablak menjadi pasar yang terbilang besar dan berkembang, hal ini dikarenakan letaknya yang strategis dengan akses mudah.

### **Membayangkan Pasar Ngablak: Dinamika Pasar Tradisional di Perdesaan**

Pasar Ngablak, pasar yang berada di Desa Ngablak di pinggir jalan kabupaten penghubung Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara. Hingga sekarang tidak diketahui secara pasti sejak kapan pasar tersebut dibangun, misalnya saja Mbah Parmi ( $\pm 70$  tahun, bukan nama sebenarnya) mengutarakan bahwa ketika beliau kecil Pasar Ngablak sudah ada meskipun dengan bangunan sederhana seperti lapak-lapak yang dibuat dari kayu. Pada sisi yang lain salah satu laporan penelitian yang ditulis oleh peneliti

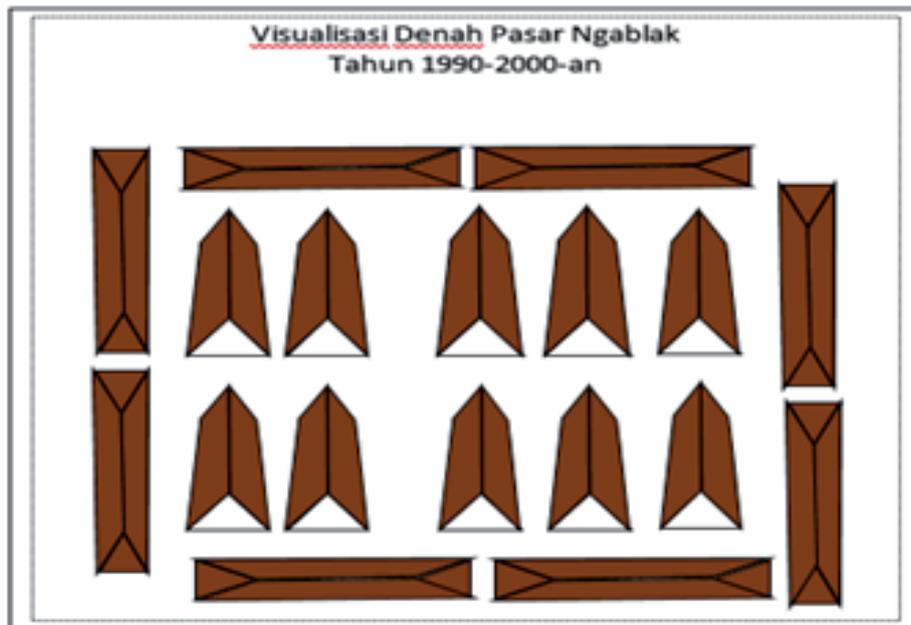
dari Belanda D.H. Burger (1933) menerangkan bahwa “pada tahun 1929 jumlah penduduk Desa Ngablak meningkat 186 persen (2608 jiwa) apabila dibandingkan dengan tahun 1869 yang hanya berjumlah 912 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut juga termasuk beberapa orang cina yang menetap di Desa Ngablak untuk berdagang.” Melalui pernyataan dari Burger (1933) tersebut, dapat diasumsikan bahwa pada tahun 1929 Pasar Ngablak sudah ada sebagai pusat perdagangan dan perekonomian di desa tersebut. Meskipun pendapat ini tentu saja memerlukan penelitian yang lebih lanjut.

Secara fisik, pada awalnya bangunan Pasar Ngablak, pasar terdiri dari lapak-lapak kayu yang digunakan para pedagang sayur, ikan, maupun daging dan kios-kios semi permanen dari kayu untuk penjual bahan pokok seperti sembako. “mbiyen wong dodol mung nganggo lincak saka kayu, pasare iseh cilik ora kaya saiki” (“dulu orang berjualan hanya menggunakan lapak/meja dari kayu, pasarnya masih kecil tidak seperti sekarang”), kata salah satu pedagang (Bu Rubiah,  $\pm 45$  tahun, bukan nama sebenarnya). Beberapa pedagang juga diceritakan berdagang dengan sistem lesehan menggunakan alas seperti karung goni atau hanya daun pisang. Dahulu sebagian besar pedagang di Pasar Ngablak menjual hasil bumi seperti palawija, beras, buah-buahan, dan sayuran. Para pedagang berasal dari desa terdekat seperti Desa Gerit, Desa Gesengan, Desa Purwokerto, Desa Bancak, Desa Ngawen, atau yang paling jauh Desa Tayu. Menurut salah satu pedagang, keterbatasan transportasi pada masa lampau membuat mobilitas para pedagang terbatas. Selain lapak dan kios dari kayu, pada masa lampau Pasar Ngablak dibatasi dengan pagar kayu untuk membatasi wilayah pasar dengan lingkungan di sekitarnya.

Pasar Ngablak sejatinya selalu bergerak mengalami perubahan. Misalnya saja yang terlihat secara fisik, pada tahun 1990-an para pedagang ikan mulai menggunakan plastik untuk melapisi lapak-lapak kayu yang digunakan sebagai tempat berjualan dengan tujuan lapak yang terbuat dari kayu tidak cepat rusak tergerus air dari ikan yang dijual. Sebelumnya para pedagang ikan menggunakan daun pisang untuk

melapisi permukaan lapak tempatnya berdagang. Beberapa pedagang mulai menggunakan seng untuk melapisi kayu di kios-kios agar tak mudah tergerus air hujan. Pada tahun 1990–2000-an Pasar Ngablak terdiri dari beberapa bagian, seperti bagian penjual ikan yang berada di sisi Barat, penjual sayur yang kebanyakan berada di sisi Utara, kios-kios pedagang bahan pokok yang seperti mengelilingi bangunan dalam pasar dan tampak seperti membentuk pagar bagi Pasar Ngablak. Pada waktu tersebut pasar, khususnya pada bagian dalam dibangun dengan bangunan seperti bangsal yang terdiri dari bangunan memanjang dengan atap genting dan tiang-tiang dari kayu, di mana setiap satu atap bangunan digunakan 10–15 pedagang. Bangunan ini tidak selalu mencakup pedagang dengan satu jenis. Peneliti masih ingat waktu kecil, salah satu bangunan beratap tersebut terdiri dari penjual nasi, penjual jajanan pasar, penjual sayur, dan penjual jajanan. Pada bangunan atap yang lain terdiri dari pedagang sembako, pedagang perabot, pedagang tempe, pedagang bumbu dapur. Akan tetapi satu yang pasti adalah mengelompoknya pedagang ikan dalam empat bangunan atap di sisi Barat. Alas di Pasar Ngablak berupa tanah merah, yang berubah menjadi becek ketika musim hujan.

Pada tahun 2014, Pengelola Pasar Ngablak melakukan renovasi melalui dana desa. Pembangunan tersebut dikarenakan beberapa bangunan bangsal mengalami pelapukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bangunan pasar sebelumnya dibangun dengan tiang-tiang kayu. Tahun 2014 pembangunan dilakukan pada bangunan pasar di sisi Selatan dan sebagian bangunan di dalam seperti bagian penjual ikan hingga bagian tengah. Pada pembangunan ini, bangunan pasar di sisi Selatan yang sebagian besar kios pedagang bahan pokok (sembako) dibangun secara permanen dengan fondasi dan dinding dari batu bata. Bangunan dibangun memanjang membentuk pertokoan, yang terdiri dari 11 petak kios. Kios-kios yang telah dibangun sebagian besar disewakan kembali ke para pedagang. Selain di bagian Selatan, pembangunan juga dilakukan pada bagian penjual ikan yang berada di dalam, di sisi Barat. Lapak-lapak ikan yang sebelumnya dibuat dari kayu dan hasil swadaya para pedagang sendiri, dibangun dengan sistem cor. Dibangun menyerupai meja panjang yang dilapisi keramik putih untuk mengesankan citra yang lebih bersih. Meja tersebut berbentuk memanjang tanpa sekat, setiap pedagang mendapat jatah  $\pm 1,5$  meter. Meskipun



Sumber: Olahan Peneliti (2020)

**Gambar 2.** Visualisasi Denah Pasar Ngablak Masa Lalu Tampak Atas Warna Cokelat Menunjukkan Atap Genting

demikian, setelah pembangunan ada pula pedagang yang menyewa lapak lebih dari satu bagian. Atap yang menaungi para pedagang ikan tak lagi berbahan genting, atap pada bangunan lama dibangun menggunakan bahan asbes. Hal tersebut menurut pengelola pasar karena keterbatasan dana sehingga atap genting tak lagi digunakan, selain itu genting yang sebelumnya melekat di bangunan lama tak lagi layak untuk dipakai kembali karena tergerus usia. Tiang-tiang penyangga masih menggunakan kayu, tetapi alas dan fondasi menggunakan cor. Sebagian besar pembangunan yang dilakukan pada tahun 2014, adalah mengganti unsur bangunan yang terbuat dari kayu dan dibangun dengan menggunakan material permanen. Meskipun tidak semuanya, seperti contohnya saja pada bagian penjual ikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pasar Ngablak kembali dibangun pada tahun 2018, pembangunan ini dilakukan pada bagian depan dan sisi Utara Pasar Ngablak. Pembangunan yang dilakukan hampir serupa dengan pembangunan yang dilakukan sebelumnya pada tahun 2014. Bagian yang dibangun terdiri dari beberapa jenis pedagang seperti pedagang bahan pokok, toko kelontong, penjual sepatu dan sandal, pedagang pakaian, pedagang perabot rumah tangga, dan pedagang

emas. Setelah dibangun, kegiatan bongkar muatan sayur yang dulunya dilakukan di depan pasar di dekat jalan raya, sekarang berpindah ke sisi Utara pasar. Setiap pagi di sisi Utara juga ramai untuk menjual sayur, buah, dan ayam kampung, yang sebelumnya kegiatan ini berada di pinggir jalan raya di depan pasar.

Pasar Ngablak buka empat kali dalam seminggu, yaitu hari Minggu, Selasa, Kamis, dan Jumat. Sebelum tahun 2014, pasar buka tiga kali dalam seminggu yaitu hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Meskipun sekarang hari Jumat pasaran Ngablak beroperasi, pedagang menyebutnya dengan hari pasar kecil karena biasanya tidak semua pedagang membuka tokonya seperti ketika hari pasar yang lainnya. Hari pasar beroperasi diyakini merupakan hasil kesepakatan dengan Pasar Mbamban, pasar tradisional di Desa Plaosan yang berjarak 5 Km dari Pasar Ngablak. Dengan penetapan hari pasar, generasi sebelumnya berharap dalam satu minggu pembeli dan pedagang bisa bergantian untuk melakukan aktivitas di dua pasar tersebut. Setiap hari pasar, Pasar Ngablak beroperasi mulai pukul 04.00 hingga pukul 11.00 WIB. selain hari pasar, yang membuka toko dan kiosnya hanya pedagang yang berada di bangunan luar pasar, sedangkan di dalam pasar tidak ada kegiatan perdagangan.



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

**Gambar 3.** Tempat dan Kegiatan Pedagang Ikan Di Pasar Ngablak

Waktu tersebut bisa saja berlangsung lebih singkat ketika kondisi pasar sepi. Dari dulu hari Minggu menjadi hari yang paling ramai untuk Pasar Ngablak. Kondisi yang demikian karena pada hari Minggu merupakan hari libur bagi warga yang bekerja sebagai pegawai juga anak-anak yang libur sekolah, sehingga biasanya menyempatkan waktu untuk berbelanja ke pasar dengan membawa sanak saudara. Sebelum hari Jumat disepakati menjadi hari pasar, hari Selasa menjadi waktu yang biasanya sepi untuk kegiatan di Pasar Ngablak.

Pasar Ngablak yang sekarang mengalami banyak perubahan apabila dibandingkan dengan tahun atau masa sebelumnya. Sebelumnya sudah disinggung mengenai bangunan fisik pasar. Selain bangunan fisik pasar, jenis pedagang di Pasar Ngablak sekarang lebih beragam. Semakin terbukanya akses keluar masuk desa membuat mobilitas warga semakin meningkat. Sekarang di Pasar Ngablak terdapat beberapa jenis pedagang seperti pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang bahan pokok (sembako), pedagang bumbu-bumbuan (bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, cabai, dan aneka bumbu kering, sachet.), pedagang buah, pedagang pakaian (sandang), penjual nasi, pedagang jajanan pasar (pedagang jajan basah, seperti gethuk, cethot, tiwul, blending, dan jagung), penjual sepatu dan sandal, dan pedagang perhiasan. Beberapa tahun belakangan juga muncul pedagang yang lebih khusus, misalnya saja pedagang snack kering

(orang setempat menyebutnya jajan sekolahan, karena merupakan snack sachet yang sering dijual di sekolah-sekolah). Penjual seperti ini pada masa sebelumnya tidak ditemukan, karena snack ringan biasanya hanya dijual di toko sembako. Penjual perhiasan (emas) juga bertambah pada beberapa tahun terakhir, hal tersebut juga membuat jasa patri emas bertambah. Awalnya jasa patri hanya terdapat satu orang saja yang berada di dalam pasar, setelah penyedia jasa patri tersebut tidak lagi membuka lapaknya karena faktor usia. Beberapa jasa patri kemudian muncul bertempat di bagian depan Pasar Ngablak tidak jauh dari toko perhiasan. Pada tahun-tahun terakhir juga mulai muncul jasa gadai dan beli emas. Semakin mudahnya memiliki kendaraan juga menambah jumlah tukang ojek di Pasar Ngablak, yang sebelumnya hanya beberapa orang saja.

Para pedagang yang berjualan di Pasar Ngablak sekarang ini berasal dari beberapa daerah. Sebelumnya pedagang di Pasar Ngablak berasal dari desa-desa terdekat dari pasar, alasan waktu itu adalah keterbatasan akses transportasi dan lain sebagainya. Sekarang akses menuju dan dari Pasar Ngablak begitu terbuka dan mudah, Pasar Ngablak dilalui jalan kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara. Selain itu, pasar juga dilalui transportasi umum seperti bus antarkabupaten. Di lain sisi, kemudahan mengakses alat transportasi seperti kredit motor, pembelian kendaraan secara cash membuat warga dengan mudah mempunyai



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

**Gambar 4.** Pedagang Tahu Yang Bersiap Pulang Ketika Hari Pasar

kendaraan untuk mengakomodasi mobilitas. Sekarang ini pedagang di Pasar Ngablak berasal dari beberapa daerah yang lebih jauh jaraknya. Misalnya saja pedagang bumbu dapur yang berasal dari Juwana, di mana pada masa sebelumnya tidak ditemui. Beberapa pedagang datang dari daerah dengan pasar yang lebih besar seperti Juwana dan Tayu, dan menjual komoditas dengan harga lebih terjangkau karena langsung dari pusatnya. Beberapa pedagang juga berasal dari lain kabupaten seperti dari kecamatan Keling, Kabupaten Jepara yang menjual jajanan pasar, seperti serabi. Jajanan pasar yang terbilang baru di Pasar Ngablak.

Beberapa komoditas yang dijual para pedagang seperti buah, bumbu dapur, maupun roti dipasok langsung dari luar daerah seperti Kota Pati, Pasar Juwana, dan Pasar Tayu. Sedangkan kebutuhan lain seperti sabun, minyak, gula, tepung terigu, rokok, soft drink maupun barang lain yang dijual toko kelontong biasanya dipasok langsung dari perusahaan ritel yang besar seperti Unilever, Coca Cola, Wings, Indomarco, dan beberapa sales dari perusahaan besar. Tidak hanya para pedagang, sekarang konsumen pasar juga berasal dari berbagai daerah seperti dari daerah Desa Giling, Desa Gunungwungkal, Desa Gulangpungge, Desa Jrahi, yang merupakan desa-desa di kaki Gunung Muria (pedagang setempat menyebut konsumen ini dengan sebutan wong gunung yang mengacu pada asal lokasi desa secara geografis). Pada masa sebelumnya, konsumen ini tidak sebanyak sekarang karena untuk sampai ke pasar, konsumen dari daerah tersebut harus berjalan kaki melewati medan yang naik turun khas daerah pegunungan. Sekarang ketika akses memiliki kendaraan semakin mudah, para konsumen yang lokasi tempat tinggalnya jauh bisa dengan mudah menuju Pasar Ngablak.

Para pedagang biasanya saling mengenal antara satu sama lain. Interaksi yang timbul bukan hanya sekadar komunikasi tetapi kadang kala mereka juga saling bermitra dalam berdagang. Misalnya saja ketika satu pedagang mengalami kehabisan barang dagang yang hendak dibeli oleh pembeli langganan, maka pedagang ini akan meminjam barang yang dibutuhkan ke

pedagang “terdekatnya” (terdekat yang dimaksud adalah paling dekat secara fisik maupun paling dekat secara relasi). Hal tersebut dilakukan bergantian, sehingga menciptakan sebuah support system antarpedagang. Barang yang dipinjam dari pedagang terdekatnya biasanya dikembalikan dalam bentuk barang juga, tetapi ketika pasokan sedang terhambat maka barang dagang tersebut akan diganti uang. Sistem meminjam ini biasanya hanya dilakukan untuk melayani pembeli langganan, apabila pembeli yang akan membeli bukan langganan dan barang yang dicari habis maka pedagang hanya menunjukkan untuk membeli ke pedagang lain yang memiliki barang dagang tersebut. Pedagang biasanya akan merekomendasikan pedagang yang juga “terdekat” baginya. Selain dengan sesama pedagang, pedagang di Pasar Ngablak biasanya juga membangun relasi dengan konsumennya. Tidak jarang konsumen sudah berlangganan dengan pedagang dalam waktu yang lama. Melalui relasi dengan waktu yang panjang tersebut, biasanya pedagang akan menghadiri acara-acara (hajatan pernikahan, khitan, maupun saat kematian) yang diselenggarakan oleh langganannya, pun sebaliknya. Melalui relasi yang intim tersebut, tidak jarang pedagang memberikan harga yang berbeda kepada langganannya dibandingkan dengan konsumen yang sambil lalu. Pengurangan harga lebih besar biasanya diberikan kepada langganan yang sudah lama dan langganan tersebut menjual kembali barang yang dibeli di rumah masing-masing.

Pasar Ngablak yang sekarang tidak lagi bisa diartikan sebagai pasar yang terisolasi dan berdiri sendiri. Pasar dalam ‘kehidupannya’ saling berelasi dengan unsur-unsur lain yang berada di luar pasar, hingga akhirnya membentuk sebuah sistem yang menjadi budaya pasar.

### **Idulfitri yang Sepi: Pasar Ngablak di Masa Pagebluk**

Pada tahun-tahun sebelumnya Pasar Ngablak akan ramai ketika mendekati hari-hari besar bagi warga masyarakat Desa Ngablak. Misalnya saja menjelang pelaksanaan ritual sedekah bumi yang dilaksanakan setahun sekali (setiap hari Rabu Legi pada Bulan Apit). Tradisi sedekah bumi adalah

tradisi bersih desa yang untuk memperingati hari berdirinya desa, saat tradisi ini warga membawa segala macam hasil bumi untuk diserahkan ke kepala desa sebagai wujud rasa terima kasih telah menjadi pemimpin warga. Selain itu, warga masyarakat juga membawa sebagian hasil bumi untuk didoakan bersama-sama di punden (semacam petilasan) tempat leluhur pendiri desa sebagai wujud terima kasih telah mendirikan desa. Pada tradisi tersebut, warga masyarakat biasanya akan memasak hidangan yang nantinya dibagikan kepada sanak saudara juga tetangga. Biasanya pagi sekali menjelang tradisi sedekah bumi dilaksanakan siang harinya, warga berbelanja kebutuhan barang yang nantinya akan dimasak. Pasar selalu ramai pada waktu tersebut, tidak jarang dagangan para pedagang habis sebelum jam operasional pasar selesai.

Hari lain yang juga selalu ramai adalah menjelang hari raya Idulfitri, hari besar bagi umat muslim. Sebagian besar warga masyarakat Desa Ngablak merupakan muslim, sehingga perayaan seperti Idulfitri menjadi perayaan yang penting bagi warga. Pada tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Ramadan minggu kedua para pedagang biasanya mulai menambah stok barang dagang untuk menyambut Idulfitri. Seperti misalnya saja penjual sembako dan toko kelontong mulai memperbanyak stok kue-kuean lebaran, maupun biskuit kaleng, maupun snack kiloan. Beberapa pedagang biasanya juga menjual kurma selama bulan Ramadan, buah yang jarang ada pada bulan-bulan biasa. Hari pasar menjelang perayaan Idulfitri merupakan hari yang paling ramai setiap tahunnya. Beberapa pedagang musiman ikut berdagang, seperti pedagang bunga rampai, maupun pedagang-pedagang ikan dari luar daerah yang hanya berdagang ketika menjelang hari raya. Konsumen-konsumen tumpah ruah, yang berasal dari desa pegunungan akan berbondong-bondong ke pasar untuk membeli aneka macam kebutuhan hari raya seperti bahan makanan, pakaian, dan lainnya. Pada hari menjelang hari raya tersebut para pedagang biasanya akan memaksimalkan komoditas yang dijual untuk mendapatkan penghasilan semaksimal mungkin. Setelah hari raya Idulfitri aktivitas pasar akan kembali seperti sebelumnya, oleh karena itu beberapa komoditas harus dijual habis agar tidak merugi. Beberapa

barang dagang seperti kue kering khas lebaran biasanya akan kurang laku setelah hari raya Idulfitri.

Tahun ini pagebluk melanda mulai dari bulan Maret, tidak berselang lama pada bulan April umat muslim memasuki bulan Ramadan. Ramadan tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, pagebluk membuat kondisi di Pasar Ngablak semakin sepi pembeli. Hingga sekarang belum diketahui pasti bagaimana virus Corona bisa sampai ke Desa Ngablak. Beberapa warga menduga pulangnya para perantau ke kampung menjadi salah satu penyebab Covid-19 sampai di desa (Wawancara dengan Tuminah (bukan nama sebenarnya), 20 April 2020). Hal ini ditunjukkan dengan salah satu desa tetangga yang dikabarkan hingga menutup jalan keluar masuk desa karena terdapat salah satu warganya yang diduga terkena Covid-19. Para pedagang juga menjadi satu yang paling rentan karena mobilitas pedagang tidak bisa dibatasi, rantai pasokan juga berasal dari luar daerah sehingga tidak bisa diprediksi penularannya. Kondisi seperti ini yang membuat rantai pasokan komoditas ke dan dari pasar terhambat. Para pedagang yang biasanya mulai menimbun barang dagang untuk dijual menjelang hari raya tahun ini para pedagang takut untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya kondisi pasar tidak bisa diprediksi, sehingga para pedagang tidak berani untuk mengambil risiko dan memilih untuk meminimalisasi kerugian. Pada tahun sebelumnya menjelang hari raya, pasar penuh sesak dengan pembeli juga kesibukan para pedagangnya. Para pedagang musiman seperti yang dijelaskan sebelumnya juga tidak sebanyak pada tahun sebelumnya. Hanya beberapa penjual bunga rampai dan pedagang ikan yang nampak menggelar alas media berdagang, padahal pada tahun-tahun sebelumnya para pedagang musiman ini berjejer ramai dan penuh memenuhi jalan desa yang berada di sisi Selatan Pasar Ngablak. Konsumen dari desa-desa pegunungan yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu memenuhi pasar, pada tahun ini berkurang drastis. Hal tersebut dikarenakan ketakutan warga karena sedang masa merebaknya wabah penyakit. Beberapa desa di pegunungan misalnya saja desa Gulangpunge sampai menutup akses keluar masuk desa

(pembatasan sosial berskala lokal) dengan tujuan memutus penyebaran wabah penyakit yang disebabkan virus corona. Warga Desa Ngablak yang merantau ke kota-kota besar juga tidak pulang kampung (mudik) menambah jumlah konsumen pada saat hari raya tahun ini berkurang drastis. Pada tahun ini kondisi pasar, seperti hari pasar pada hari-hari biasa dampak dari pagebluk begitu terasa untuk kegiatan di Pasar Ngablak, meskipun di Desa Ngablak sendiri belum ada satu pun warganya yang dinyatakan positif corona. “Bada tahun iki pasare sepi.” (“Lebaran tahun ini pasarnya sepi”) keluh salah satu pedagang ikan yang hendak pulang dengan masih membawa setengah ember ikan dagangannya yang tidak habis.

### **Tantangan dan Strategi Pedagang Pasar Ngablak Menghadapi Pagebluk**

Semenjak pemerintah mengumumkan kasus positif corona di Indonesia, kondisi di Pasar Ngablak tidak langsung berubah. Kegiatan masih dilakukan seperti biasa, hari pasar tetap berlangsung. Para pedagang dan pembeli berkegiatan seperti biasa tanpa menggunakan masker. Sebelum pagebluk melanda, kondisi pasar berangsur sepi, geliat ekonomi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa pedagang mengeluhkan “pasar saiki ora kaya mbiyen, saiki ora iso diprediksi.” (“pasar sekarang tidak seperti dulu, sekarang tidak bisa diprediksi.”). Salah satu penyebabnya adalah semakin mudahnya akses berbelanja, para pedagang di pegunungan yang biasanya berbelanja di pasar sekarang mereka tidak melulu ke pasar karena sales-sales dari perusahaan mulai masuk ke desa-desa. Selain itu akses berbelanja online juga semakin dimengerti oleh warga desa, hal tersebut membuat para konsumen kadang memilih untuk memesan melalui online (menggunakan WhatsApp, maupun aplikasi e-commerce).

Pagebluk yang melanda terutama negeri ini, semakin menambah tantangan yang harus dihadapi oleh para pedagang di Pasar Ngablak. Secara spiritual, masyarakat Desa Ngablak pada umumnya dan para pedagang Pasar Ngablak khususnya memaknai pagebluk disebabkan alam yang tak lagi seimbang. Warga Desa Ngablak baik

individu maupun kelompok menggelar upacara selamatan, tujuan dari upacara tersebut adalah untuk memohon perlindungan dan dijauhkan dari pagebluk yang melanda kepada Tuhan YME. Pada sisi yang lain, wabah penyakit yang merebak menuntut pedagang melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mendapatkan kepercayaan diri (mengusir rasa takut yang disebabkan oleh wabah penyakit) juga agar mendapat kepercayaan dari konsumen.

Selain secara spiritual, para pedagang secara bertahap mulai menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Selama masa pandemi, beberapa pedagang secara bertahap mulai ada yang mengenakan masker, juga menyediakan tempat cuci tangan di dekat tempatnya berjualan. Meskipun demikian beberapa pedagang juga terlihat sesekali mengambil nafas dengan membuka masker sebentar lalu menutupnya kembali ketika ada pembeli. Kebiasaan sehari-hari tanpa masker membuat penyesuaian bagi para pedagang tidak berjalan instan, mengingat beberapa pedagang yang membutuhkan kekuatan untuk mengangkat barang dagangan dan tentu hal tersebut terasa lebih berat untuk bernapas ketika mengenakan masker. Selain melakukan kebiasaan baru, beberapa pedagang juga mulai menyesuaikan diri dengan melayani pembelian menggunakan sistem daring menggunakan aplikasi WhatsApp. Baik para pedagang dan pembeli, saling bertukar nomor yang terhubung dengan aplikasi tersebut. Selama pandemi beberapa pedagang sesekali terlihat mempersiapkan barang pesanan konsumen langganannya. Tidak semua pedagang dengan fasih menggunakan smart phone, beberapa pedagang ditemui meminta tolong anggota keluarganya untuk melakukan transaksi dengan konsumen melalui WhatsApp. Misalnya saja Bu Naim (±47 tahun, bukan nama sebenarnya), salah satu pedagang sembako yang tidak menggunakan smartphone. Beliau hingga sekarang hanya menggunakan handphone yang hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan (SMS) dan melakukan panggilan saja. Meskipun demikian, beliau mengakalinya dengan meminta suaminya yang merupakan guru sekolah dasar dan mempunyai smartphone untuk menjadi perwakilannya melakukan transaksi kepada para konsumen, sehingga konsumen langganannya

akan memesan belanjaan cukup menghubungi nomor suami melalui aplikasi. Tidak jarang juga para pedagang memesan melalui panggilan telepon. Setelah mendapat pesanan, pedagang biasanya segera menyiapkan barang dagangan yang dipesan. Antara pedagang dan pembeli biasa sudah membuat janji belanjaan akan diambil kapan. Para konsumen yang sudah melakukan pemesanan, biasanya tinggal mengambil saja ke pedagang di pasar dan segera pulang. Sistem seperti ini sebelumnya sudah digunakan oleh para pedagang, tetapi selama wabah corona sistem jual beli seperti semakin umum digunakan para pedagang dan pembeli. Selain antara pedagang dan pembeli, sistem pemesanan melalui perangkat seluler juga dilakukan pedagang ketika memesan komoditas yang dijual kepada sales, ataupun penyuplai barang tersebut.

Meskipun proses jual beli sudah memanfaatkan teknologi informasi yang lebih modern tetapi nilai-nilai khas pasar tradisional tetap berjalan. Misalnya saja para pembeli dan pedagang lebih suka memesan barang belanjaan melalui komunikasi telepon. Hal ini dirasa pedagang dan pembeli lebih meyakinkan karena komunikasi dilakukan langsung dengan menggunakan suara. Tidak jarang pada saat

memesan komunikasi pun tercipta, hal ini merupakan modal sosial yang penting bagi pedagang maupun pembeli. Selain itu sistem pembayaran juga biasanya masih dilakukan secara langsung, belum menggunakan uang digital, seperti OVO dan Gopay ataupun transfer bank. Hal ini karena penggunaan telepon hanya digunakan untuk memesan saja, barang yang dipesan akan diantar oleh pedagang atau diambil oleh pembeli dan pembayaran dilakukan Ketika bertemu langsung. Menurut para pedagang sistem jual beli menggunakan perangkat komunikasi tersebut, sedikit banyak membantu mengatasi kondisi pasar yang tidak menentu seperti sekarang ini.

Selama masa merebaknya wabah penyakit, pihak pengelola pasar memberikan imbauan kepada para pedagang dan pengunjung ketika beraktivitas di pasar. Beberapa poster berisi penyesuaian kebiasaan baru seperti pemakaian masker, kebiasaan mencuci tangan, dan menjaga jarak, dipasang di tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat para pemangku Pasar Ngablak. Pihak pengelola pasar juga setiap selesai hari pasar, melakukan penyemprotan cairan desinfektan di seluruh bangunan pasar.



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

**Gambar 5.** Pedagang Menggunakan Masker Ketika Melayani Pembeli (Kiri), Tempat Cuci Tangan Sederhana yang Disediakan Salah Satu Toko (Kanan)



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2020)

**Gambar 6.** Poster Himbauan Memakai Masker yang Ditempel Di Atas Pintu Masuk Pasar (Kiri), Himbauan Melapor Bagi Pendetang Atas Nama Pengelola Pasar Di Halte Depan Pasar Ngablak (Kanan)

Hal tersebut dimaksudkan agar penyebaran virus corona dapat teratasi.

## PENUTUP

Konsep pagebluk secara umum digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang sedang dilanda wabah penyakit. Meskipun demikian bagi pedagang di Pasar Ngablak konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang mengalami “kejatuhan” sebagai dampak dari wabah penyakit yang menyerang masyarakat. Pasar Ngablak yang merupakan pasar tradisional di Perdesaan, pada masa wabah Covid-19 seperti sekarang ini juga menerima dampak yang cukup dirasakan oleh para pedagang. Pasar tak seramai tahun-tahun sebelumnya, waktu-waktu yang biasanya dinanti para pedagang karena ramai pengunjung seperti hari pasar menjelang Idulfitri, pada tahun ini tidak bisa diharapkan juga diprediksi. Pedagang secara perlahan melakukan perubahan-perubahan untuk tetap bertahan dan tidak mengalami kerugian yang besar. Misalnya saja pedagang mulai menerapkan sistem jual beli online menggunakan aplikasi WhatsApp. Secara perlahan para pedagang juga menggunakan masker dan menyediakan tempat mencuci tangan sebagai langkah untuk mendapatkan kepercayaan diri. Pada akhirnya,

pedagang selalu bergerak melakukan perubahan, menyesuaikan kondisi-kondisi internal dan eksternal dari pasar tradisional itu sendiri. Pun demikian dengan sistem pasar tradisional melakukan transformasi-transformasi, dengan tidak meninggalkan ciri khas (interaksi antaraktor yang menjadi pemangku budaya pasar) tetapi juga bergerak mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada SIMLITABMAS Kementerian Riset dan Teknologi atas pendanaan proyek penelitian Dr. Budiawati Supangkat Iskandar, Surat Keputusan Nomor 10/E1/KP.PTNBH/2019 dan Nomor Perjanjian/Kontrak 5097c/UN6.G/LT/2019. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan yaitu para pedagang di Pasar Ngablak, dan konsumen di Pasar Ngablak, Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati atas kerja samanya dengan penelitian ini.

**PUSTAKA ACUAN**

- Abdullah, Irwan. (2015). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Appadurai, Arjun. (1988). *Putting Hierarchy in Its Place*. *Cultural Anthropology*, 3(1): 36–49.
- Burger, D.H. (1933). *Desa Ngablak (Kabupaten Pati) Dalam Tahun 1869 dan 1929*. Dalam Abdullah, T. (2010). *Sejarah Lokal Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Clark, E. & Micalova, S. (2004). *Fieldwork in Transforming Societies: Understanding Methodology from Experience*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jokowi Umumkan Dua WNI Positif Corona di Indonesia. (2020). CNN Indonesia. Diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia> tanggal 25 Mei 2021.
- Condon, B & Sinha, T. (2008). *Global Lessons from the AIDS Pandemic: Economic, Financial, Legal and Political Implications*. Germany: Springer.
- Effendi, N. (1997). *Pasar Dan Fungsi Kebudayaan*. Dalam Masinambo, E.K.M (ed.), *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Studi Budaya Pasar Tradisional dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Perdesaan: Kasus Pasa Nagari dan Masyarakat Nagari di Propinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(2): 105–120.
- Fatterman, D.M. (2010). *Ethnography: Step-by-Step*, Third Edition. United State of America: Sage Publications.
- Gudeman, S. (2001). *The Anthropology of Economy: Community, Market, and Culture*. UK: Blackwell Publishers.
- Hatu, Rauf. (2011). *Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Perdesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)*. *Jurnal INOVASI*, 8(4): 1–11.
- Kemkes. (2020). *Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dalam Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19)*. Diunduh dari <http://www.yankes.kemkes.go.id/read-kesiapsiagaan-tenaga-kesehatan-di-puskesmas--dalam-menghadapi-infeksi-novel-corona-virus-covid19-8558.html> tanggal 25 Mei 2021.
- King, Victor T. & Wilder, William D. (2012). *Antropologi Modern Asia Tenggara Sebuah Pengantar*. Terjemahan Hatib Abdul Kadir. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ihsanuddin. (2020). *Ini Pengumuman Lengkap Jokowi soal 2 WNI Positif Corona*, Kuwado, F. J. (Ed.). Kompas. Diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12002701/ini-pengumuman-lengkap-jokowi-soal-2-wni-positif-corona?page=all> tanggal 10 Maret 2021
- Berty, T. T. S. (2020). *Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia Jadi Sorotan Dunia*. *Liputan 6*. Diunduh dari <https://www.liputan6.com/global/read/4191815/kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia-jadi-sorotan-dunia> tanggal 10 Meret 2021.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi R. Jakarta: UI Press.
- Narayan, K. (1993). *How Native Is a “Native” Anthropologist?*. *American Anthropologist*, 95: 671–686.
- Olthof, W.L. (2014). *Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647 (cet.4)*. Terjemahan H.R Sumarsono. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Pigeaud, T.G. & De Graaf, H. J. (1976). *Islamic States in Java 1500–1700*. KITLV: Springer-Science + Business Media.
- Powdermaker, H. (1966). *Stranger and Friend: The Way of an Anthropologist*. New York: W.W. Norton & Company.
- Purbawati, C. dkk. (2020). *Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Corona*. *Jurnal Ilmiah Muqaddimah*, 4 (2): 156 – 164.
- Ricklefs, M.C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* Fourth Edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Reid, Anthony. (1988). *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*. New Heaven: Yale University Press.
- Sadilah, E., Ariani, C., Herawati, I., Moertjipto, Sukari. (2011). *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengah*. Dalam Sumintarsih (Ed.). Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Sidik, S., Hasrin, A., & Fathimah, S. (2020). *Analisis Dampak Kebijakan Pembatasan Waktu Operasional Pasar Di Kabupaten Minahasa Akibat Penanggulangan Covid-19*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(3): 52–59.

- Sluka, J., & Antonius C.G.M. (2007). *Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader*. UK: Blackwell Publishing.
- Spradley, James. P. (2007). *Metode Etnografi*. Terjemahan Misbah Zaulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Supangkat, B. (2012). *Pasar dan Perempuan Pedagang Di Pasar Ujung Berung Bandung*. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia.
- Trostle, James. A. (2005). *Epidemiology and Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.

## **MENGEMBANGKAN TATANAN BARU PASCAPANDEMI: PENDEKATAN DERADIKALISASI DAN REPRODUKSI TAFSIR**

### ***DEVELOPING A NEW POST PANDEMIC ORDER: DERADICALIZATION AND REPRODUCTION APPROACH***

**Saifur Rohman**

Universitas Negeri Jakarta  
E-mail: [saifur\\_rohman2000yahoo.com](mailto:saifur_rohman2000yahoo.com)

#### **ABSTRACT**

*Since Covid-19 has been confirmed for the first time March 2, 2020 up to now (21 Oktober 2021), it is being 4.237.834 cases over Indonesia. Cases of the world are 242 billion. Based on the cases, it develops an important sketch of "how to face" and how to design a new norm for the future. Inversely, the sketch of new life is not often confirmed as relevant with "practice of belief". The paradox is seen closely in the sosial daily as long as March-June 2020. Material objects are cases of the people resistance in the government policy. The government that has implemented large-scale social restriction over people is called as a restriction of religious acting over people. The cases have been selected from social media. Dialogue that could be seen as a solution has a weakness because there were a domination. Hence, it recommends to design a construction of persuasive and negotiative interpretation in the program of deradicalization so that is being accepted by the intended party.*

**Keywords:** *New Order, Covid-19, Deradicalization, Reproduction Approach.*

#### **ABSTRAK**

Sejak kasus Covid-19 terkonfirmasi pertama kali pada 2 Maret 2020 hingga sekarang (21 Oktober 2021), kini mencapai 4.237.834 kasus di Indonesia. Akumulasi kasus di seluruh dunia telah mencapai 242 juta. Deretan angka dari 0 kasus hingga 31 ribu kasus di Indonesia telah memberikan sketsa penting tentang "bagaimana cara menghadapi" dan bagaimana merancang sebuah norma baru pada masa depan. Sebaliknya rancangan kehidupan yang baru tersebut tidak selalu dianggap selaras dengan "cara menjalankan keyakinan" selama ini. Paradoks ini akan diteliti di dalam praktik kehidupan sosial selama Maret-Juni 2020. Objek kajian adalah kasus-kasus penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena dianggap menghalangi praktik religius masyarakat. Kasus-kasus itu diperoleh dari unggahan media sosial dan dinilai sebagai representatif. Pemecahan dalam bentuk dialog hanya makin menunjukkan kekuasaan di satu pihak dan kelemahan di pihak lain. Dengan begitu, direkomendasikan untuk merancang sebuah konstruksi tafsir yang persuasif, negosiatif, dan praktik deradikalisasi sebagai upaya meyakinkan sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak yang dituju.

**Kata kunci:** *Tatanan Baru, Covid-19, Deradikalisasi, Reproduksi Tafsir.*

#### **PENDAHULUAN**

Artikel ini mengemukakan tentang persoalan ruang-ruang sosial yang dihubungkan dengan keimanan dalam agama di satu sisi dan stereotip tradisi religius terhadap kebijakan pemerintah di sisi lain. Persoalan itu penting diangkat karena membawa dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan nilai-nilai kebangsaan, ekonomi,

teologi, politik, dan pendidikan. Pembangunan masyarakat pascapandemi memerlukan pemikiran yang tepat untuk mengembangkan masyarakat yang lebih beradab dan sehat. Di akhir artikel didapati kenyataan bahwa penanganan yang didasarkan pada yuridis formal tidak selalu membawa hasil yang memadai. Demikian pula argumentasi rasional terbentur intuisi

religi sehingga menghasilkan konflik yang berkepanjangan.

Studi itu dimulai dengan identifikasi di dalam pola-pola perilaku yang didasari stereotip tradisi religius yang dialami oleh warga Muslim sendiri terhadap situasi, produk kebijakan, serta langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah. Kata kunci stereotip adalah persepsi, nilai, proses dan interaksi sosial. Sebuah stereotip secara normatif dipandang sebagai persepsi satu orang atau kelompok terhadap kelompok lain. Hasil persepsi tersebut berbentuk konstruksi penilaian. Dalam pemahaman umum, seseorang memiliki “nilai atas perilaku” terhadap kelompok lain. Dalam artikel ini, stereotip bisa terjadi di dalam kelompok Muslim terhadap “perilaku pemerintah” Contoh kasus stereotip dalam masa pandemi, seorang takmir masjid bermaksud melakukan pembongkaran bangunan masjid karena Pemerintah telah menutup tempat itu dan dianggap “tidak berguna”. Sejumlah massa merusak rumah warga karena diduga telah melaporkan salat berjamaah di masjid. Baik takmir masjid maupun massa sebagai representasi kelompok sosial sudah memiliki pandangan bahwa Pemerintah itu buruk sehingga mereka merasa “tidak dibela”.

Secara faktual, sejak kasus Covid-19 terkonfirmasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga sekarang (21 Oktober 2021), Pemerintah mengklaim telah menangani peningkatan yang sangat bermakna, yakni 4.237.834 kasus. Sementara itu, Kota Wuhan, Cina yang disebut-sebut sebagai episentrum perkembangan virus itu terjadi sekitar bulan Desember 2019. Berdasarkan Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, virus itu sudah masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020 (Detikcom, 2000).

Dalam semester pertama tahun 2020 telah terjadi perubahan dramatis dalam praktik kehidupan di Indonesia. Sejak muncul kasus 2 Maret 2020, dalam dua minggu pertama bulan Maret, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta menutup kegiatan belajar mengajar. Hal itu diikuti oleh sejumlah universitas lain di Indonesia. Setelah universitas, institusi pendidikan dasar dan menengah pun menyatakan “belajar di rumah”.

Dengan kata lain, sejak pertengahan Maret, institusi pendidikan tidak lagi menjalankan aktivitas seperti sedia kala.

Bulan berikutnya, tepatnya pada 3 April 2020, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COvid-19). Isinya tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Konsekuensinya, segala bentuk kegiatan beribadah yang mengumpulkan massa dilarang.

Kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah dianggap sebagai sebuah praktik diskriminasi terhadap kaum Muslim. Persoalan yang perlu dipecahkan, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap prasangka bahwa pemerintah menghalangi tradisi religius. Bagaimana rasionalitas itu dimunculkan untuk melegitimasi perlawanan tersebut?

Metode makalah ini memanfaatkan hermeneutika sosial untuk menafsirkan perilaku masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dianggap mengubah tradisi religius. Hasilnya adalah konstruksi penafsiran dan simulasi pola-pola tradisi religius yang terjadi dalam semester awal tahun 2020 di Indonesia. Dalam makalah ini diletakkan sebuah hipotesis tentang hubungan antara ruang publik dan keimanan dalam praktik sosial-keagamaan. Apakah perbedaan ruang membawa perbedaan pada kualitas keimanan? Dari persoalan akses terhadap ruang publik dan keimanan keagamaan, pembaca akan melihat bagaimana politik ruang dan politik keimanan menjadi bagian yang saling beririsan untuk menghasilkan tafsir baru tentang politik ruang sosial dan tafsir kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, hingga diskursus religiusitas.

Contoh yang telah dikemukakan di awal paragraf memberi pesan kepada pembaca bukan semata-mata sebuah “perlawanan” rakyat kepada pemerintah, melainkan politik individu untuk meraih ruang publik. Individu menggunakan panggung di media massa untuk mengungkapkan pendapatnya melalui identitas keislaman, seperti jabatan takmir masjid, bangunan masjid, serta praktik salat. Pembacaan ini bisa saja salah,

tetapi tindakan individu yang mengatasnamakan identitas keislaman merupakan bagian dari politik yang mengatasnamakan keimanan pada suatu agama. Mereka tidak merusak, menghancurkan, membakar rumah dan rumah ibadah, melainkan sedang membela Tuhan. Dalam perspektif permainan bahasa Wittgenstein, “Membakar atas nama Tuhan” adalah sebuah praktik politik bahasa untuk mencapai kepentingan-kepentingan penutur (Giddens, 1994).

Penelitian-penelitian yang dikembangkan selama ini hanya melihat sebagai politik bahasa untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Hasil penelitian Tanenbaum (Tanenbaum, 2016), kuantitas Muslim yang besar memberikan ruang untuk melakukan tindakan politik bahasa karena memiliki akar massa yang cukup. Demikian pula Noha Sadek cukuplah memberikan perhatian terhadap politik kemasyarakatan tanpa menyentuh konsep-konsep politik keimanan keagamaan (Sadek, 2017). Karena itu, nilai kebaruan artikel ini akan memperlihatkan bahwa “kekerasan atas nama Tuhan” bukan lagi sebagai politik bahasa sebagaimana hasil penelitian Tanenbaum (Sadek, 2017), Wittgenstein, Giddens (Giddens, 1994) maupun Sadek (Sadek, 2017), melainkan sebagai politik keimanan keagamaan. Keimanan terhadap Tuhan dan institusi juga mendapatkan tempat di dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam sastra. Misalnya, Imam Suhardjo HM (2017) pernah menghimpun karya seni puisi dalam satu buku berjudul *Tentang Masjid: Kumpulan Puisi*. Puisi-puisi tersebut memberikan gambaran tentang masjid bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi sebuah nilai spiritual. Hal itu menunjukkan bahwa masjid merupakan bagian dari nilai-nilai terdalem dalam masyarakat (Suhardjo, 2017). Kepentingan politik, sosial, bahkan kesenian adalah wilayah-wilayah yang inheren dengan politik keimanan dalam agama. Dengan kata lain, iman kepada Tuhan menjadi suatu media bagi individu atau kelompok untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu.

## METODE PENELITIAN

Dengan metode hermeneutik sosial (Giddens, 1994), hal itu digunakan untuk mengungkap data-data yang bersumber pada media massa.

Hermeneutika sosial merupakan sebuah metode yang melihat data-data sosial sebagai sebuah pesan kemanusiaan (Giddens, 1994). Metode ini merupakan pembaruan Giddens sebagai tanggapan terhadap keringnya metode-metode di dalam ilmu sosial. Dia memadukan penafsiran di dalam teks sebagaimana tradisi hermeneutik, dan gejala-gejala sosial. Perilaku sosial adalah sebuah teks yang bisa dimaknai sebagai data tekstual di dalam karya sastra dan humaniora lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan dikumpulkan secara representatif selama periode Maret-Juni 2020. Periode itu dipilih karena periode tersebut diasumsikan sebagai representasi perilaku sosial selama masa awal pandemi. Pemberlakuan jarak sosial di Indonesia pertama kali dilakukan pada pertengahan Maret ketika sejumlah institusi pendidikan memberlakukan pembelajaran secara daring (dalam jaringan). Sejumlah universitas mulai meliburkan perkuliahan tatap muka. Tata administrasi kependidikan dilakukan di rumah. Kebijakan universitas itu pun meluas pada pendidikan dasar dan menengah. Sejak saat itulah grafik penderita Covid-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Masa awal ini diasumsikan membawa ekses terhadap sikap sosial yang tertekan, kaget, serta kondisi psikologis lainnya.

## KERANGKA TEORI

Sebelum sampai pada rumusan masalah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, baik kiranya bagi pembaca memahami skema tafsir yang dikembangkan artikel ini. Hipotesis yang disusun tentu tak terlepas dari kerangka teoretis sebagai pengikat objek material dan objek formal. Suka atau tidak, ruang publik dan keimanan yang bersinggungan dalam praktik sehari-hari itu membawa ekses terhadap berbagai persoalan publik. Kajian tentang ruang tidak terbatas pada realitas ruang secara fisik, tetapi juga ruang secara psikis, virtual, serta realitas augmentatif lainnya. Ruang sebagai sebuah hasil intuisi tidak berdiri sebagai objek yang disebut oleh Immanuel Kant (2006) sebagai *Das Ding an sich* (sesuatu di dalam dirinya), tetapi menghasilkan fenomena bagi subjek. Dengan begitu keruangan tidak bisa dilepaskan dari intuisi subjektif dan subjek tidak

bisa berdiri sendiri di dalam perspektif tentang “segala sesuatu”, termasuk tentang Tuhan (Kant, 2004).

Selama ini dalam tradisi keilmuan, kajian keimanan akan jatuh pada teologi. Secara singkat, teologi mengacu pada filsafat agama. Istilah teologi adalah ilmu ketuhanan atau dikenal dengan istilah monoteisme, politeisme, dan paganisme. Menurut Simon Blackburn (2013), teologi merupakan upaya memahami konsep yang terlibat di dalam keyakinan religius, eksistensi, (Durkheim, 2011) keniscayaan, takdir, penciptaan, dosa, belas kasih, penebusan, dan Tuhan (Blackburn, 2014, p. 752). Dalam sejarah filsafat agama, terdapat upaya memahami paganisme, Yudaisme, dan Kristen. Sementara itu, agama lain seperti Buddha dan Tao lebih mendekati diri pada humanisme. Dengan kata lain, kajian tentang teologi yang mengurus tentang Tuhan juga akan mengurus tentang sifat-sifat Tuhan yang terdapat dalam diri manusia. Dalam bahasa Emile Durkheim (2011), sifat-sifat kebaikan Tuhan dibuktikan di dalam praktik hidup yang baik sehari-hari (Durkheim, 2011).

Sebagaimana diketahui bahwa artikel ini membatasi pada representasi politik keimanan keagamaan yang terjadi selama pandemi. Karena itu keimanan di dalam agama Islam merupakan wilayah penting dalam studi ini. Gejolak-gejolak sosial yang terjadi selama pandemi berada pada teritori keimanan dalam Islam sebagai sebuah fenomena terbesar di Indonesia. Keimanan di dalam Islam tidak selalu berjalan di dalam sebuah ruang yang kedap dengan konflik. Sejumlah reaksi dari dalam dan luar kelompok pun menjadi dinamika dalam pengembangan teologi Islam. Sebuah organisasi Tanenbaum di dalam siaran publiknya, <https://tanenbaum.org.org> membuat sebuah brosur tentang penanganan terhadap prasangka yang menyerang terhadap keyakinan Islam. Pernyataan itu penting sebagai sebuah langkah antisipasi terhadap perkembangan populasi Muslim dan identitas pada beberapa dekade mendatang (Tanenbaum, 2016).

Data Tanenbaum menunjukkan bahwasanya jumlah 1,6 miliar Muslim di dunia itu sama dengan sebesar 23 persen dari penduduk dunia. Hal itu tersebar di seluruh dunia dengan rincian,

satu persen di Amerika, 20 persen di Timur Tengah dan Afrika, dan 62 persen hidup di Asia Pasifik. Tanenbaum memproyeksikan pada 2059 akan terdapat komunitas Muslim terbesar di dunia. Sebesar 10 persen adalah populasi Muslim Eropa dan ada 2.1 dari populasi di Amerika. Hal itu akan melewati populasi bangsa Yahudi (Tanenbaum, 2016).

Proyeksi tersebut bermanfaat sebagai sumber daya politik, identitas, serta strategi pertahanan keamanan secara umum. Itu berarti, perlu sebuah rancangan strategis yang bermanfaat untuk mengelola keimanan, identitas, dan simbol yang bekerja dalam kesadaran dari Muslim yang berjumlah 1,6 miliar. Kajian ilmiah yang terkait dengan politik identitas pernah dilakukan oleh sejumlah ilmuwan. Noha Sadek (2017) menjabarkan dinamika politik identitas itu. Dia menguji pertanyaan identitas Muslim dan Islamofobia dalam penggunaan simbol dan wacana media di Barat dalam perspektif psikoanalisis (Sadek, 2017). Objek kajiannya adalah perempuan Libanon-Amerika yang disebut sebagai Muslim sekuler. Dia mengungkapkan bahwa Islamophobia merupakan ancaman bagi identitas Muslim di sana. Hal itu sekurangnya adanya rasa malu bagi Muslim menggunakan identitasnya. Kajian psikoanalisis yang dikembangkan menghasilkan tafsir tentang pentingnya mempertahankan identitas alterego untuk mempertahankan praktik-praktik keimanan. Relevansi terhadap kajian ini memperlihatkan bahwa Islam, keimanan, serta atribut di dalamnya menjadi media politis bagi masyarakat.

Kajian tentang politik, Islam, dan keimanan secara lebih luas dilakukan oleh Haja Mohideen dan Shamimah Mohideen (2008) menulis makalah berjudul “Language of Islamophobia in Internet Articles”. Dia beranjak dari asumsi bahwa Islamofobia didapati dalam berbagai bidang kehidupan (Mohideen, 2008). Dia membuktikan adanya terorisme, fanatisme Islam, ekstremis telah membawa pada citra yang negatif. Sialnya, hal itulah yang ditangkap oleh orang-orang Barat. Objek kajiannya merupakan hal aktual yang dihadapi oleh masyarakat di dunia. Fakta-fakta umum yang diungkapkan membawa arah yang jelas dalam penanganan Islamofobia,

tetapi tidak memberikan detail yang memadai sebuah inovasi berpikir bagi kemanusiaan. Memang, dia memberikan sumbangan terhadap pengertian-pengertian dasar. Menurutnya, *“Islamophobia may be defined as the practice of prejudice against Islam and the demonisation and dehumanisation of Muslims. This is generally manifested in negative attitude, discrimination, physical harassment and vilification in the media* (Mohideen, 2008: 218).”

Kajian yang dilakukan Mohideen (2008), Noha Sadek (2017), Tanenbaum (2016) memberikan refleksi eksternal tentang tradisi religius. Dengan kata lain, bagaimana orang di luar komunitas Muslim melakukan diskriminasi, membentuk stereotip, serta melakukan tindak kebencian terhadap Islam. Kendati demikian, refleksi tersebut belum mengembangkan refleksi internal, terutama menjawab pertanyaan tentang hubungan kajian tersebut dan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah kajian Islamofobia itu fakta atau fiktif? Bagaimana mengidentifikasi ilusi dalam Islamofobia untuk mencapai esensi kemanusiaan?

Pertanyaan-pertanyaan ideologis tersebut menjadi sangat mendesak karena pengembangan nilai-nilai religi tanpa dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan hanya akan membawa keimanan pada doktrin-doktrin gelap yang tidak bermanfaat bagi manusia secara universal. Di sinilah pentingnya humanisme. Humanisme dipandang sebagai bagian paling dasar dari filsafat. Sebab, menurut Blackburn, *“filsafat apa pun menekankan kesejahteraan dalam martabat manusia, entah yang optimistis terhadap kekuasaan rasio manusia, sampai yang minimal menekankan tidak adanya alternatif selain kita menggunakan hal terbaik yang kita mampu* (Blackburn, 2014: 413). Hal ini dianggap sebagai penemuan kembali setelah Renaissance karena selama ini humanisme telah dilupakan pada masa kegelapan. Dikatakan oleh Blackburn berikut ini:

Humanisme dalam pengertian Renaissance ini cukup konsisten dengan keyakinan religius, memandang Tuhan sudah menaruh kita di planet ini persisnya untuk mengembangkan lebih jauh sifat-sifat kemanusiaan kita. Namun demikian, dalam perkembangan sejarah berikutnya, istilah

ini cenderung menjadi gerakan sosial dan politik yang antiagama (Blackburn, 2014: 413).

Kutipan itu menunjukkan betapa kajian tentang kemanusiaan merupakan proyek awal untuk bangkitnya akal manusia. Pada akhir abad ke-20, menurut Blackburn, humanisme kadang digunakan sebagai istilah untuk mengejek kaum posmodernis dan khusus para penulis feminis. Hal itu diterapkan ke dalam filsafat-filsafat, seperti Sartre yang mengandalkan kesadaran diri tunggal, rasional, berkesadaran-diri dan otonom. Humanisme juga merupakan kepekaan terhadap hakikat kepribadian dan motivasi yang mau tidak mau terkondisikan secara fragmenter, terpelintir, historis, dan sosial (Blackburn, 2013: 414). Pandangan tersebut memberikan kesan tentang pentingnya isu kemanusiaan sebagai persoalan-persoalan mendasar dalam perjalanan kemanusiaan.

Diskusi teoretis tentang ruang dan keimanan itu sampai pada sebuah pokok persoalan yang berujung pada pentingnya peningkatan nilai-nilai kemanusiaan. Kasus-kasus keimanan haruslah dilihat dalam konteks kemanusiaan. Konteks ini dapat dipersingkat dengan moralitas. Moralitas dalam perspektif sosiologi tidak hanya dibentuk oleh norma-norma keilahian, tetapi juga dari hasil kebudayaan manusia. Hal itu sekurang-kurangnya dapat dipahami dari perspektif Anthony Giddens tentang bagaimana moralitas itu berasal dan bagaimana moralitas itu membentuk konstitusi (Giddens, 1994: 72). Anthony Giddens mengembangkan sebuah penafsiran masyarakat yang didasarkan pada fenomenologi dan hermeneutik. Di dalam fenomenologi, Giddens memanfaatkan gagasan tentang pentingnya kesadaran individu di dalam upaya mengembangkan sebuah pandangan hidup. Gagasan hermeneutik memberikan sebuah pesan tentang pentingnya *“struktur bahasa”* sebagai dasar untuk memahami *“struktur masyarakat”*. Jika makna adalah sebuah konstruksi moral, yang terdiri atas unsur-unsur norma, maka struktur bahasa adalah media yang mewadahi makna tersebut. Sementara itu, interaksi antara satu individu dengan individu lain, antara kelompok dengan kelompok lain merupakan medan

komunikasi yang terjadi secara langsung. Dalam konstruksi yang dikembangkan oleh Giddens sekurang-kurangnya dapat dipahami sebagaimana bagan di bawah ini:

**Moral → norma → legitimasi**

(Keterangan: *Dimodifikasi dari skema yang dikembangkan oleh Giddens, 1994: 129*).

Konteks moralitas merupakan sebuah pertukaran gagasan, diskusi, serta dialog yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, norma merupakan tatanan yang selama ini diyakini sebagai benar. Tatanan tersebut bersumber dari pranata sosial, norma-norma lokal, hingga keyakinan dalam tradisi keagamaan. Legitimasi dipahami sebagai sebuah struktur baru untuk membentuk sebuah tatanan. Pada akhir simpulan, pembaca akan melihat skema yang dikembangkan oleh Giddens ternyata tidak mampu menembus perilaku-perilaku yang didasarkan pada ritualitas. Hal itu mengingatkan kembali pada teori Emile Durkheim dalam *The Elementary Forms of The Religious Life* (2011) tentang asal-usul agama sebagai sebuah tindakan religius primordial dari manusia. Tindakan itu begitu kuat, tua, dan akan terus berlangsung sebagai sebuah rasa keberakaran (Durkheim, 2011).

Kebijakan pemerintah yang disebut-sebut banyak pihak sebagai “Islamofobia” dipahami sebagai sebuah pandangan dan diskriminasi terhadap Islam. Persoalan yang perlu dipecahkan, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap prasangka adanya pengubahan tradisi religius di tengah-tengah masyarakat. Secara kronologis, stereotip itu muncul dari berbagai kebijakan pemerintah. Ada tiga produk perundang-undangan yang menjadi faktor langsung. Pertama, kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Isinya tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Konsekuensinya, segala bentuk kegiatan beribadah yang mengumpulkan massa dilarang (Kesehatan, 2020). Kedua, Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Covid-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan penanggulangan (Presiden, 2020). Ketiga, UU No 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan memberikan amanat tentang langkah-langkah instruksional dalam penanganan penyakit di tengah masyarakat. Dengan kata lain, karantina merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab kesehatan masyarakat (Keppres, 2020).

Produk perundang-undangan itu merupakan sebab tak terelakkan munculnya stereotip tentang pelanggaran beribadah. Marilah dibaca secara teliti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COvid-19). Surat itu ditandatangani pada 3 April 2020 oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Dalam peraturan itu dijelaskan tentang definisi pembatasan sosial adalah sebagai berikut: Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Kriteria adanya PSBB adalah terpenuhinya lima prasyarat. Pertama, adanya peningkatan kasus. Kedua, kasus itu mengacu pada pasien dalam pengawasan dan kasus terkonfirmasi. Ketiga, peningkatan jumlah kasus dan atau kematian secara bermakna. Hal itu diketahui melalui pengamatan kurva epidemiologi. Keempat, kecepatan penyebaran penyakit di suatu area didasarkan pada pengamatan. Kelima, terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah sudah bukan lagi menjadi kasus, tetapi telah meluas dan bersirkulasi. Mekanisme PSBB adalah permohonan dari kepala daerah kepada Menteri sampai kemudian Menteri menyetujui. Sampai sejauh ini, Jakarta adalah model penerapan PSBB di Indonesia. Adapun Pelaksanaan PSBB meliputi kegiatan-kegiatan publik. Hal itu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di

tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan kainnya khusus terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Pengecualian dijelaskan dalam pasal 13 (ayat 7) meliputi sejumlah institusi ekonomi tertentu, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum tertentu. Pertama, supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan media, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Kedua, fasilitas kesehatan, atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan kesehatan. Ketiga, tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan peraturan tersebut, berbagai pengecualian itu tetap perlu memperhatikan kerumunan orang. Berdasarkan deskripsi di atas, tampak bahwa kebijakan itu dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang perilaku publik yang membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Rasionalitas pemerintah itu tidak begitu dapat diterima oleh sebagian kaum Muslim. Kebijakan Pemerintah dianggap sebuah langkah yang tidak menguntungkan umat Islam karena dianggap “menghalang-halangi” niat Muslim untuk menyembah Tuhannya di masjid.

Hal itu membawa pola pikir mereka untuk menghubungkan pandemi Covid-19 dengan sifat kemutlakan ketuhanan dan teknik penyembahan Tuhan. Pola pikir itu dapat diidentifikasi berdasarkan pada fakta-fakta. Pola pikir itu tampak bahwa Covid-19 berhubungan sifat-sifat, penciptaan, serta eksistensi Tuhan. Muncul dugaan bahwa pandemi ini merupakan kutukan Tuhan kepada manusia yang telah ingkar dengan kewajiban-kewajiban sebagai hamba. Hal itu karena kewajiban manusia adalah beribadah kepada Tuhan dan Tuhan akan menurunkan azab bagi siapa pun yang dikehendaknya. Pola pikir selanjutnya dapat dijelaskan, karena kutukan Tuhan, maka umat Muslim harus semakin rajin beribadah dan menyembah kepada Allah. Rajin beribadah akan menghilangkan segala wabah dan bencana yang terjadi di dunia. Ibadah dianggap sebagai cara manusia untuk meminta sesuatu yang diinginkan. Jika ada kutukan, yang

perlu dilakukan adalah rajin ibadah. Pola pikir di atas membawa hubungan logis pada politik. Kebijakan Pemerintah telah mengubah cara beribadah umat Islam. Mulai dari salat jemaah di Masjid, salat Idulfitri, hingga peribadahan lain yang mengumpulkan massa. Kebijakan ini dengan begitu akan menjauhkan Muslim dengan tempat ibadah dan kutukan akan makin besar.

Secara kronologis, korban pandemi Covid-19 di dunia hingga 6 Juni 2020 adalah 8.826.273 kasus. Jumlah itu terdiri atas 3.312.654 pasien yang telah sembuh dan 397.411 meninggal dunia. Berdasarkan laporan *Kompas* (6 Juni 2020), 3.116.208 adalah kasus aktif yang terdiri atas 3.062.709 pasien dengan kondisi ringan dan 53.499 dalam kondisi serius. Jumlah terbanyak terdapat di Amerika (1,9 Juta), Brasi (643 ribu). Rusia (449 ribu), Spanyol (288 ribu), Inggris (283 ribu), India (236 ribu), Italia (234 ribu), Peru (187 ribu), Jerman (185 ribu), dan Turki (168 ribu).

Di Indonesia sendiri terdapat 31.517 kasus (8 Juni 2020). Rinciannya, 18.806 dirawat (61% dari terkonfirmasi), 1.801 meninggal (5,9% dari terkonfirmasi), dan 9.907 sembuh (32,4% dari terkonfirmasi). Jumlah terbanyak ada di Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Data tersebut memperlihatkan peningkatan lebih cepat pada Oktober 2021 yang mencapai 4.237.834 kasus.

Pertambahan kasus tersebut membawa pada sebuah ancaman yang sangat serius terhadap kondisi kemanusiaan secara umum. Kondisi yang lebih umum ini berbeda dengan kondisi khusus keimanan seorang Muslim. Sebagai bukti, pola-pola perilaku masyarakat yang menghubungkan dengan keimanan berikut ini.

Pertama, warga Nusa Tenggara Barat, melakukan demonstrasi di depan masjid Jami Shaleh Hambali karena keberatan dengan kebijakan penutupan masjid, Jumat (1/5/2020). Mereka berkumpul di halaman masjid dan menyatakan keberatan. Apalagi selama Ramadan tidak bisa menjalankan salat tarawih dan Jumatan. Setelah melakukan dialog, warga tetap melakukan salat di masjid. Hanya saja waktunya lebih dipersingkat. Kedua, pemaksaan kehendak. Sejumlah warga memaksa salat tarawih di Parepare, Sulawesi,

tetapi pemaksaan itu mendapatkan perlawanan dari Pemerintah. Pihak PLN akhirnya memutuskan aliran listrik agar tidak bisa menggunakan masjid sebagai tempat beribadah. Ketiga, dalam akun YouTube, di bawah judul “Aneh Masjid kok di Tutup”, seorang warga menyatakan kekesalannya karena masjid ditutup. Peristiwa di YouTube itu merupakan rekaman tausiah di Bandung. Dalam rekaman itu tampak seorang penceramah yang memandang bahwa karantina bukanlah bagian penting dalam praktik beribadah kepada Tuhan. Tausiah itu juga menekankan tentang pentingnya beribadah. Seandainya meninggal dalam kondisi beribadah, maka dia berada dalam kondisi *husnul khotimah*. Keempat, rumah warga dirusak karena melaporkan ada kegiatan tarawih di masjid, 25 April 2020. Kronologinya, pemilik rumah H Aselih, warga RT 10/RW 003), Pulogadung, melaporkan adanya kegiatan berjamaah di sebuah masjid di kediamannya ke twitter Pemerintah. Kediamannya terletak di sebelah Masjid Al-Wastiyah. Karena melaporkan melalui Twitter, maka sejumlah pemuda melakukan tindak

perusakan, yakni membakar petasan, merusak pot tanaman dan mendorong-dorong pagar rumah.

Kelima, surat dari Takmir Masjid No 003/TMAIV/2020 perihal pemberitahuan Pembongkaran dan Perobohan Masjid Al-Mubarak. Surat ditulis pada 28 April 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris, Imam Rowatib dan Penasehat. Isinya memutuskan untuk membongkar dan merobohkan masjid Al-Mubarak karena sudah tidak dibutuhkan lagi adanya masjid di lingkungan kami. Menurutnya, adalah hal mubazir ketika ada masjid tetapi tidak digunakan untuk beribadah sebagaimana mestinya (Takmir, 2020). Hal itu dipicu oleh Keputusan Bupati Banyumas No 440/514/2020 terkait pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19 (Bupati, 2020). Hal itu disusul dengan surat dari Pemerintah Kecamatan Wangin No 400/259/2020 mengenai seruan agar umat Islam melakukan ibadah wajib dan sunnah di rumah (Kecamatan, 2020).

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan di atas, sekurang-kurangnya dapat diringkas dalam tabel berikut:

### Perilaku Penolakan Kebijakan tentang Salat Berjamaah

No	Perilaku	Lokasi	Tanggal
1	Demonstrasi di depan masjid jami Shaleh Hambali	Nusa Tenggara Barat	1 Mei 2020
2	Pernyataan Umar Bin Hafidh Tarim Hadramaut: “Ada yang lebih ditakutkan daripada Allah”	Youtube	4 April 2020
3	Memaksa salat tarawih	Parepare	April 2020
4	Mengunggah di akun YouTube berjudul “Aneh Masjid kok ditutup”	YouTube Pondon Pesantren Tahfidz Daarul Wur'an J Nagrog 85 Pasanggrahan Ujung Berung Kota Bandung	20 April 2020
5	Rumah Warga (H Aselih) dirusak karena melaporkan kegiatan tarawih	Pulogadung, Jakarta	25 April 2020
6	Surat dari Takmir Masjid No 003/TMAIV/2020 perihal pemberitahuan Pembongkaran dan Perobohan Masjid Al-Mubarak.	Banyumas	28 April 2020

**Sumber data:** Berdasarkan observasi di media virtual Januari-Juni 2020.

Berdasarkan data tersebut, sejumlah detail kiranya perlu diperhatikan. Sebagai contoh, di dalam akun YouTube, di bawah judul “Aneh Masjid ko Ditutup”, seorang warga menyatakan kekesalannya karena penutupan masjid. Di dalam sebuah peristiwa tausiah di Bandung, seorang penceramah memberikan pendapat sebagai berikut:

“Yang penting saya hadir di majelis ini, taat ibadah kepada Allah. Saya ikhlas, saya mati walaupun kena Korona dalam keadaan husnul khotimah”

Kutipan di atas memberikan informasi tentang skala prioritas dalam praktik beragama. Dalam hal ini, menghadiri majelis lebih penting daripada ketakutan terhadap virus Corona (Youtube, 2020). Dengan adanya kehadiran itu, penutur berpandangan bahwa itu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Sikap itu mengandung konsekuensi berupa risiko tertular penyakit. Risiko itu pun diterima oleh penutur dan dianggap sebagai bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah. Kematian di dalam ibadah menurutnya adalah kematian dengan akhir yang baik atau *husnul khatimah*.

Pernyataan tersebut memperlihatkan tentang pemahaman terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak memberikan ruang terhadap ketaatan terhadap Allah. Penceramah melihat wabah penyakit yang sedang menyerang masyarakat itu berasal dari Allah dan, oleh karena itu pula, hanya Allah yang akan mengambil wabah tersebut. Karena itu, berdoa kepada Allah agar wabah itu dihilangkan adalah langkah yang memang perlu dilakukan. Akan tetapi risiko kematian akibat wabah itu akan diterima dengan ikhlas oleh penafsir karena dianggap sebagai kematian yang baik (*husn al-khatimah*).

Selain didasarkan pada syariah, wabah penyakit Covid-19 juga dihubungkan dengan tauhid. Bila mengikuti gagasan Abu Ameenah Bilal Philips (2006) tentang tauhid, data di atas menunjukkan bahwa ketakutan terhadap segala sesuatu selain Tuhan adalah perbuatan *syirk*. Karena itu, manusia haruslah hanya takut

kepada Allah (Philips, 2016). Ketakutan terhadap virus Corona adalah menyekutukan Allah dengan barang ciptaannya. Pemahaman tersebut membawa pada konstruksi tafsir yang didasarkan pada pelaksanaan syariat agama secara formal-tekstual.

Praktik tafsir di atas membawa implikasi terhadap praktik ibadah sebagaimana dilakukan sebelum wabah, yakni berjamaah di masjid. Sementara itu, Pemerintah menganggap bahwa kegiatan yang mengumpulkan massa itu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat umum. Tindakan inilah yang dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah kesewenang-wenangan, kebencian, menyalahgunakan fasilitas dan kegiatan orang Islam. Langkah-langkah pemerintah sendiri didasarkan pada amanat undang-undang melalui penerbitan peraturan dari kementerian. Hal itu dapat direfleksikan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perlawanan masyarakat dilakukan terhadap isi peraturan tersebut. Telah dijelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ada lima prasyarat untuk pemberlakuan PSBB. Bila merujuk pada kasus di atas, maka lima prasyarat itu telah terpenuhi, yakni peningkatan kasus, pasien, jumlah kematian, penyebaran, dan transmisi lokal. Lima prasyarat itu sudah cukup bagi Pemerintah untuk melakukan langkah pemberlakuan PSBB. Dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah di tengah-tengah masyarakat harus mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Fakta penolakan masyarakat dan praktik kebijakan pemerintah adalah konflik dengan alasan yang berbeda. Alasan masyarakat adalah keimanan Islam harus dijaga berdasarkan syariat yang telah dilakukan selama ini. Alasan pemerintah adalah amanat perundang-undangan yang harus dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Amanah melakukan jaga jarak bertentangan dengan praktik salat yang tidak diperbolehkan jaga jarak. Demikian pula amanat untuk melarang segala bentuk perkumpulan bertentangan dengan ibadah yang dilakukan secara bersama-sama di masjid.

Konflik ini pernah diberikan pemecahan. Pemerintah membuat solusi melalui dialog antara dua belah pihak. Dialog ini memang tampak adalah upaya saling memaafkan, tetapi persoalan ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah terjadi dialog, kasus-kasus serupa juga terjadi di sejumlah tempat. Bukti: seorang pelanggar kebijakan pemerintah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 tidak mendapatkan hukuman.

Oleh karena pelaku dianggap sebagai seorang ulama terkemuka, maka seorang aparat keamanan datang dan meminta maaf atas peristiwa kekerasan yang terjadi di antara keduanya. Secara kronologis, hal itu bermula ketika seorang ulama yang menaiki kendaraan bersama dengan beberapa orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kendaraan itu pun dihentikan oleh aparat, tetapi pelaku tampak marah dan tidak terima. Hal itu membawa keributan sehingga terlibat perselisihan secara fisik. Berdasarkan rekaman video, tampak seorang yang berjubah putih mendorong aparat. Merasa telah menjadi korban kekerasan, aparat itu pun melakukan pembalasan dengan mencoba memukul dan mendorong. Pelaku telah siap sehingga terjadi baku hantam pun terjadi. Setelah dipisah oleh seorang polisi, maka perselisihan itu pun berhenti. Seorang yang menggunakan jubah dan surban putih itu pun masuk ke dalam kendaraan dan melanjutkan perjalanan. Kejadian selanjutnya, aparat keamanan meminta maaf kepada ulama tersebut.

Bila direfleksikan ke dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No

9 Tahun 2020, maka pemerintah memiliki kewajiban menegakkan peraturan. Demikian pula, di dalam prinsip penyusunan perundang-undangan terdapat klausul persamaan hak di depan hukum. Klausul itu memberikan pesan bahwa siapa pun haruslah tunduk di bawah hukum. Artinya, hukum tidak memandang jabatan seseorang atau kelompok yang dimiliki. Karena semua sama di hadapan hukum, maka aparat pun harus memperlakukan sama terhadap semua pelanggar. Bila pertimbangan ini diterima, maka aparat mestinya melakukan penindakan secara formal terhadap pelaku yang disebut dengan ulama itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020. Aparat seharusnya tetap melarang perjalanan itu. Faktanya, Pemerintah membiarkan pelaku melanjutkan perjalanan. Setelah video tentang konflik itu menjadi konsumsi publik, aparat pemerintah tidak berhenti di situ. Mereka mendatangi rumah pelaku pelanggaran dan memohon maaf. Di dalam rekaman video permohonan maaf tampak gerakan tubuh aparat yang membungkukkan seraya mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam penerapan kebijakan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020. Perlawanan yang dilakukan terhadap pemerintah melalui simbol-simbol keagamaan membuat aparat mengabaikan peraturan yang telah dibuat. Konflik dipecahkan dengan pelanggaran terhadap peraturan. Permohonan maaf terhadap pelaku tersebut menunjukkan lemahnya integritas pemerintah dalam memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020. Dialog yang terjadi justru memperkuat posisi pelaku sekaligus menjadi legitimasi untuk pelanggaran sebelumnya.

Bila direfleksikan terhadap teori Giddens (1994), dialog merupakan langkah yang digunakan sebagai bagian dari interaksi antara dua individu atau kelompok. Dialog itu didasarkan pada norma-norma, struktur, serta keyakinan tertentu. Hasil dialog adalah sebuah legitimasi dalam bentuk kesepakatan yang bisa dijalankan bersama. Dalam kenyataannya,

dialog yang diupayakan oleh Pemerintah itu terjadi setelah adanya perselisihan. Hasil dialog itu bukanlah jalan baru untuk legitimasi, tetapi sebuah permintaan maaf yang dilakukan oleh aparat kepada seorang ulama. Dalam hal ini, yang terjadi bukanlah legitimasi yang menghasilkan sebuah kesepakatan baru yang berlaku untuk kasus-kasus sejenis, tetapi sebuah kasus khusus yang memperlihatkan tarik-menarik kekuatan. Dalam hal ini, tarik-menarik itu dimenangi oleh pelaku pelanggaran. Di dalam bahasa John R Searle (1980) sebagaimana dijelaskan di dalam teori tindak-tutur (*Speech-act*) memperlihatkan adanya konteks berbicara *locutionary* yang turut menjadi faktor dalam komunikasi (Searle, 2012). Umumnya, pelaku yang melanggar kebijakan protokol kesehatan haruslah meminta maaf kepada aparat keamanan. Dalam hal ini, aparat keamanan justru yang meminta maaf. Permintaan maaf itu dilakukan di rumah pelanggar kebijakan protokol kesehatan.

Tampak bahwa dialog atau interaksi antara individu dalam kelompok tidak selalu berakhir dengan sebuah legitimasi, tetapi sebuah wacana baru di luar legitimasi yang sudah ada. Legitimasi itu tetap berjalan, tetapi wacana baru telah menjadi retakan-retakan yang dianggap sebagai “perkecualian” di dalam diskursus kemasyarakatan. Wacana “perkecualian” bukanlah data yang harus dihilangkan, tetapi perlu dilihat secara lebih dalam.

Di dalam perkecualian itu terdapat hukum, aturan, tata nilai, serta kekuatan yang baru sehingga tidak dapat ditembus oleh produk-produk perundang-undangan. Tindakan yang mengatasnamakan sebuah ibadah, ilahiah, serta praktik-praktik yang dianggap sebagai bagian dari ritual merupakan sebuah struktur lama yang tidak begitu saja dapat diubah melalui dialog dan produk-produk perundang-undangan yang baru. Hal itu membenarkan perspektif Emile Durkheim (2011) tentang esensi dari tindakan-tindakan ritual yang mengatasnamakan sebuah agama mampu menembus produk legitimasi terkini.

Lebih jauh Durkheim berpendapat bahwa tindakan ritual merupakan langkah pribadi maupun kelompok untuk merawat stabilitas norma-norma sosial. Berbagai jenis kepercayaan animisme

maupun dinamisme, contohnya, didapati di dalam masyarakat purba. Hal itu juga menjadi ilustrasi dalam masa sekarang ini melalui langkah-langkah individu maupun kelompok yang memanfaatkan keimanan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan di luar konsep keyakinan itu. Inilah politik keimanan dalam agama yang dimaksud dalam hipotesis awal. Langkah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku menjadi sah karena memanfaatkan keyakinan terhadap Tuhan. Bila direfleksikan dalam kasus di atas, konflik yang terjadi atas pelanggaran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 9 Tahun 2020 menghasilkan penyelesaian berupa dialog yang tak seimbang. Hasil dialog adalah permohonan maaf aparat sebagai pelaksana perundang-undangan kepada pelanggar. Hal itu bisa terjadi karena pelanggaran memiliki identitas keagamaan yang selama ini menjadi mayoritas di tengah masyarakat Indonesia.

Penjabaran enam kasus yang mengemuka dan refleksi teoretis atas Giddens, Searle, Emile Durkheim sebagai praktik hermeneutik sebagaimana termaktub di dalam desain pemikiran ini membawa pada pentingnya pemikiran baru untuk merekonstruksi masyarakat pascapandemi. Rekonstruksi sosial yang didasarkan pemikiran yuridis-formal terbukti tidak membawa hasil yang memuaskan. Demikian pula, sosialisasi yang didasarkan pada argumentasi-argumentasi rasional hanya akan membawa pada pemberontakan yang mengatasnamakan keyakinan religi. Dialog antara rasionalitas dan intuisi keimanan membawa bandul kemenangan pada wilayah-wilayah di luar konsep rasional.

## PENUTUP

Hasil analisis itu atas kehidupan sosial selama Maret-Juni 2020 memberikan simpulan tentang kuatnya hubungan antara masyarakat, keimanan, dan kebijakan pemerintah. terkait dengan politik ruang publik dan keimanan dalam agama. Berdasarkan pada analisis di atas, kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah dianggap sebagai sebuah praktik diskriminasi terhadap kaum Muslim. Mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah melalui kekerasan fisik dan nonfisik. Sebagai salah satu produk dari kebijakan, praktik

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap telah menyia-nyiaikan fasilitas ibadah umat Islam. Ruang-ruang sosial bagi umat Islam yang telah dibangun selama ini dianggap sebagai ruang yang tidak bermanfaat seiring dengan pelaksanaan kebijakan PSBB. Sikap itu didasarkan pada keyakinan bahwa pemahaman bahwa ketakutan selain kepada Allah adalah perbuatan sirik. Implikasi tauhid yang telah menjadi bagian dari dasar keislaman itu, ketaatan kepada Allah harus dilaksanakan dengan risiko apa pun, termasuk kematian. Pelarangan praktik tradisi religius dianggap sebagai perbuatan setan dan membawa Pemerintah sebagai penguasa zalim.

Simpulan itu menunjukkan bahwa dialog yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat tidak menjadi pemecahan dalam jangka panjang. Hal itu terjadi karena masyarakat telah memiliki penilaian bahwa pemerintah itu tidak baik. Hipotesis awal berbunyi bahwa masyarakat memiliki anggapan-anggapan awal yang negatif terkait dengan keimanan dalam agama. Ketika hipotesis itu direfleksikan dalam kehidupan sosial selama Maret-Juni 2020 tampak bahwa anggapan-anggapan awal itu terbukti dengan adanya tindakan-tindakan anarkis menentang kebijakan pemerintah. Pendek kata, kasus-kasus penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar itu terjadi karena Pemerintah dianggap menghalangi praktik religius masyarakat. Kebijakan dinilai tidak sejalan dengan praktik keimanan dalam agama Islam. Praktik tauhid terancam ketika muncul larangan salat berjamaah. Ketika konflik muncul, pemecahan dalam bentuk dialog hanya makin menunjukkan kekuasaan di satu pihak dan kelemahan di pihak lain.

Direkomendasikan untuk merancang sebuah konstruksi tafsir yang persuasif, negosiatif, dan meyakinkan sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak yang dituju. Pengembangan tatanan baru perlu diletakkan rekonstruksi tafsir untuk menghasilkan praktik baru yang berasal dari tradisi praktik religius selama ini.

Untuk penelitian lanjutan, perlu adanya desain penelitian untuk mengetahui efektivitas

politik tafsir deradikalisasi di tengah-tengah masyarakat. Tatanan baru dalam masyarakat pascapandemi menuntut refleksi lebih rinci terkait dengan hubungan antara agama, pemerintah, dan tafsir.

## PUSTAKA ACUAN

- Blackburn, S. (2014). *Kamus Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Keputusan Bupati Banyumas No 440/514/2020 terkait Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi COVID-19. (2020).
- Detikcom. (n.d.). Dialog-warga-polisi-soal-demo-masjid-ntb-ditutup-sepakat-salat-di-rumah. Diakses pada 20 Juni 2021 dari <https://m.detik.com/news/berita/d-499936-0/dialog-warga-polisi-soal-demo-masjid-ntb-ditutup-sepakat-salat-di-rumah>
- Durkheim, E. (2011). *The Elementary Forms of The Religious Life*. Yogyakarta: Ircisod.
- Giddens, A. (1994). *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. Cambridge: Polity Press.
- Kant, I. (2004). *Critique of Pure Reason*. London: Penguin.
- Surat Pemberitahuan Pemerintah Kecamatan Wangin No 400/259/2020 mengenai Seruan agar umat Islam melakukan ibadah wajib dan sunnah di rumah, seruan agar tidak melakukan shalat Jumat dan digantikan shalat Dzuhur di rumah, seruan untuk tidak melaksanakan shalat Idul Fitri di masjid dan bahwa jika masih ditemukan kegiatan keagamaan sebagaimana disebut di atas, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (2020).
- UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>
- Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135220/permenkes-no-9-tahun-2020>
- Mohideen, H. dan S. M. (2008). Language of Islamophobia in Internet Articles. *Jurnal Intellectual Discourse*, 16(1), 73–87.
- Philips, A. A. B. (2016). *The Fundamental of Tawheed (Islamic Monotheism)*. Cairo: International Islamic House.

- Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135058/keppres-no-11-tahun-2020>.
- Sadek, N. (2017). No Title. *Islamophobia, Shame, and the Collapse of Muslim Identities*, 14(3), 21 September 2017).
- Searle, J. R. (2012). *Speech-Act*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suhardjo. (2017). *Tentang Masjid: Kumpulan Puisi*.
- Takmir. (2020). Surat dari Takmir Masjid No 003/TMAIV/2020.
- Tanenbaum. (2016). Pew Research Center. <http://pewresearch.org/act-tank/2016/07/22>
- Youtube. (2020). Masjid kok Ditutup. <https://youtu.be./SPi1v2nTdXc>.

## TANTANGAN DAN PELUANG PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TAMANSARI DALAM ERA NORMAL BARU

### *OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR COMMUNITY-BASED TOURISM IN TAMANSARI VILLAGE IN THE NEW NORMAL ERA*

Ertien Rining Nawangsari<sup>1</sup>, Leily Suci Rahmatin<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: <sup>1</sup>ertien\_rining.adneg@upnjatim.ac.id, <sup>2</sup>leily.suci.par@upnjatim.ac.id

#### ABSTRACT

*This paper is compiled to analyze the opportunities and challenges of community-based tourism, in facing the adaptation of a new life in the midst of the Covid-19 pandemic, tourism potential which is the capital for tourism development and the participation of local communities as the stakeholders main tourism. The choice of research focuses on community participation in tourism, especially in the new normal era due to tourism activities where all activities are carried out by prioritizing the movement from the area of origin to the destination area, making tourism an activity that is vulnerable to the spread of Covid - 19. The main challenge in tourism today is more to the level of public awareness of health protocols, opportunities that greatly support Tamansari Tourism Village in the form of a variety of tourist attractions in one tourism destination. The research method approach used is descriptive qualitative research instruments with in-depth interviews, documentation study and involved observation. Tourism in the new normal era is expected to be able to adapt CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) in order to maintain tourists' confidence in tourist attraction in reducing Covid-19 transmission.*

**Keywords:** *Community Participation, Tourism Village, CHSE.*

#### ABSTRAK

Tulisan ini disusun untuk menganalisis mengenai peluang dan tantangan pariwisata berbasis masyarakat, dalam menghadapi adaptasi kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. Potensi wisata menjadi modal pengembangan pariwisata dan partisipasi masyarakat lokal sebagai *stakeholder* utama pariwisata. Pemilihan fokus penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat dalam pariwisata terutama pada era normal baru. Hal itu dikarenakan kegiatan pariwisata sebagai aktivitas yang rentan terhadap penyebaran Covid-19. Tantangan utama dalam pariwisata saat ini lebih kepada tingkat kepedulian masyarakat akan protokol kesehatan. Peluang yang sangat mendukung Desa Wisata Tamansari berupa keanekaragaman atraksi wisata dalam satu destinasi pariwisata. Metode penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian wawancara mendalam, dokumentasi lapangan, dan observasi langsung. Pariwisata di *era new normal* diharapkan dapat mengadaptasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*) demi menjaga kepercayaan wisatawan terhadap daya tarik wisata dalam mengurangi penularan Covid – 19. Akan tetapi masih sangat sulit terwujud terutama bagi pengusaha UMKM yang tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Desa Wisata, CHSE.

## PENDAHULUAN

Perkembangan dan pembangunan pariwisata memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi dan komunitas sebagai pemilik sumber daya (Mahayu dkk., 2020). Komunitas dalam pariwisata diartikan sebagai masyarakat lokal, atau *host* yang menjadi lanskap alami faktor penarik wisatawan untuk berkunjung. Keberadaan masyarakat lokal dengan keberagaman etnik budaya dan kegiatan sosial masyarakat menjadi daya tarik wisata yang unik dan berbeda di setiap daerahnya (Richards dan Derek, 2000).

Masyarakat lokal selama ini dianggap sebagai bagian pelengkap dalam pengembangan pariwisata. Padahal peran masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya menjadi kunci penting dalam pariwisata terutama keikutsertaan sebagai *stakeholders*. Pentingnya peran masyarakat dalam partisipasi pariwisata selain dalam peningkatan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan nilai budaya dan pelestarian adat istiadat (Ap dkk., 2020). *Stakeholders* adalah aktor yang memiliki kepentingan dalam sebuah hubungan sebagai pemecahan masalah yang mencakup semua individu, kelompok, atau organisasi “secara langsung dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan orang lain untuk memecahkan suatu masalah.” (Gray dalam Singh dkk., 2003). *Stakeholders* pariwisata diartikan sebagai pemangku kepentingan yang turut andil dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat dapat dilihat dengan mengadopsi pendekatan ekosistem,

di mana pengunjung berinteraksi dengan penduduk lokal (*host*, layanan) dan makhluk tak hidup (lanskap, suasana lingkungan sekitar) untuk menikmati produk wisata (Murphy dalam Butler, 2007). Keberadaan masyarakat lokal sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan destinasi pariwisata.

Produk dan usaha pariwisata berbasis masyarakat menjadi tren saat ini terutama dengan lanskap alam perdesaan. Salah satu destinasi wisata alam dan desa wisata yang juga diminati berada di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini, beberapa tahun terakhir menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang cukup diminati oleh wisatawan mancanegara di Provinsi Jawa Timur. Terbukti dengan tingginya persentase data statistik kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur dan utamanya Kabupaten Banyuwangi.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur sejak 2015 hingga 2019 sebagian besar menuju Kabupaten Banyuwangi dengan rata-rata persentase kunjungan 36 persen. Persentase kunjungan tertinggi terjadi pada tahun 2019. Berbagai faktor menjadi pendorong meningkatnya pariwisata Banyuwangi, selain peningkatan aspek akses sarana dan prasarana, peningkatan kualitas atraksi, *amenity*, *ancillary* juga menjadi prioritas pengembangan pariwisata Banyuwangi.

Sejumlah daya tarik wisata prioritas daerah Kabupaten Banyuwangi menjadi bukti keseriusan *stakeholders* terkait untuk terus

**Tabel 1.** Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jawa Timur	Kunjungan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Banyuwangi	Persentase Kunjungan Kab. Banyuwangi dari Jawa Timur
2015	200.851	45.569	23 %
2016	220.570	77.139	35 %
2017	247.166	98.970	40 %
2018	320.529	127.420	40 %
2019	243.899	101.622	42 %
Rata - rata			36 %

Sumber: Data Statistik Pariwisata Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi (Diolah, 2021)

memajukan pariwisata. Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), Kabupaten Banyuwangi menetapkan tiga wilayah pengembangan pariwisata andalan, yaitu wilayah Kawah Ijen dan sekitarnya, Sukamade dan wilayah sekitarnya serta wilayah Plengkung. Dalam tulisan ini lokasi penelitian berfokus pada salah satu wilayah pengembang pariwisata andalan yakni Desa Wisata Tamansari yang merupakan pintu masuk kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen.

Desa Tamansari merupakan daerah percontohan dalam pengembangan *Smart Kampung*. Program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknologi dan pariwisata. Melalui *Smart Kampung*, ruang lingkup program kerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan pada tujuh kriteria berikut, yaitu (1) pelayanan publik, (2) pemberdayaan ekonomi, (3) kesehatan, (4) pendidikan, seni, dan budaya, (5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (6) kemiskinan, dan (7) informasi hukum. Pengembangan *Smart Kampung* didasarkan pada program yang menyentuh langsung pada kepentingan publik dan berbasis pada penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi (Novandi dan Isbandi, 2019). Desa Tamansari juga menerima penghargaan Desa Wisata Award 2017 dalam kategori pemanfaat jejaring bisnis dalam pengembangan potensi wisata. Keterlibatan masyarakat lokal sebagai *stakeholders* terbentuk dalam usaha pariwisata yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa BUMDes Ijen Lestari (Kemendes dalam Ab, 2019). Keterlibatan masyarakat menjadi prioritas dalam pariwisata baik sebagai pemilik usaha penginapan, jasa makanan dan minuman, pengelola atraksi wisata maupun pemandu lokal.

Perkembangan pariwisata Desa Tamansari tidak terlepas dari dukungan partisipasi masyarakat. Pandemi Covid-19 yang telah terjadi satu tahun belakangan ini memaksa sektor pariwisata terhenti sementara. Pembatasan perjalanan yang juga berlaku bagi wisatawan domestik dan penutupan akses masuk wisatawan mancanegara menjadikan industri pariwisata

mati suri. Pariwisata dengan aktivitas mobilitas dan perpindahan sulit dilakukan terutama ketika Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global. Seluruh negara menetapkan berbagai aturan dalam upaya pencegahan penularan termasuk Pemerintah Indonesia. Berbagai upaya dilakukan dalam kurun waktu satu tahun terakhir demi kembali membangkitkan kondisi seperti sedia kala, baik berupa pencegahan hingga vaksinasi Covid-19. Dalam sektor pariwisata pemerintah menerapkan berbagai kebijakan demi bangkitnya pariwisata Indonesia, salah satu program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf yaitu *Indonesia Care* (Kemenparekraf, 2020).

Pariwisata menjadi peluang dan tantangan di era normal baru. Kerja sama antar-*stakeholders* menjadi penting dalam membangun kepercayaan wisatawan untuk berkunjung. Begitu pula yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Desa Tamansari sebagai pelaku langsung pariwisata. Potensi desa wisata yang unik dan penerapan aspek kenormalan baru dengan mematuhi protokol kesehatan menjadi penting dalam membangkitkan pariwisata. Analisis peluang dan tantangan menjadi penting baik dalam mengembalikan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung maupun peningkatan kesadaran masyarakat lokal sebagai sumber daya dalam penerapan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan standar CHSE.

## KAJIAN LITERATUR

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dkk (2021) menjelaskan mengenai pentingnya peran kolaborasi dan kerja sama antar-*stakeholders* dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Potensi Desa Wisata Tamansari yang beragam menjadikan peluang dalam menciptakan pariwisata yang dapat dibangun dengan kekhasan *local wisdom*. Karakteristik masyarakat dengan budaya yang cukup kental juga menjadi ciri khas desa wisata. Peran serta organisasi lokal seperti BUMDes menjadi penting dalam peningkatan eksistensi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan pembangunan pariwisata. Selain itu, poin penting dalam penelitian ini yakni pengembangan sarana pendukung dan akses

menjadi penting dalam peningkatan kemudahan menuju Desa Wisata Tamansari.

Penelitian Puspitaningrum dkk. (2018) memberikan penjelasan mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan desa wisata terutama dalam modal sosial masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan pariwisata. Hal ini dikarenakan masyarakat yang bersinggungan langsung dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan harus menjadi utama dalam pembangunan desa wisata. Terlepas dari percepatan pembangunan akses menuju desa wisata dalam peningkatan kemudahan menuju desa, peran serta dan keterlibatan masyarakat mutlak harus diutamakan. Sedangkan Hadi dkk. (2019) menjelaskan mengenai perubahan terencana yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata termasuk perangkat dan *stakeholders* yang terlibat. Pengembangan dan pembangunan pariwisata saat ini harus diiringi dengan pengembangan teknologi dalam mempersiapkan pengembangan Industri 4.0. Peran BUMDes menjadi penting terutama dalam mengorganisasi keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan potensi Desa Tamansari. Sistem informasi desa menjadi penting untuk dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat lokal Desa Tamansari. Tiga penelitian sebelumnya di lokasi Desa Tamansari memiliki kesamaan lokasi penelitian. Namun tiga tulisan sebelumnya hanya menganalisis mengenai potensi pariwisata. Belum ada potensi wisata baik dari segi atraksi, akses, *amenity* maupun *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Tamansari. Selain itu pembahasan terbatas pada aspek partisipasi masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini terkait kesiapan masyarakat dalam menghadapi pariwisata di era kenormalan baru dengan penerapan aspek CHSE di setiap aspek pariwisata.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kalsum dkk. (2021) menjelaskan tentang kebijakan mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru dalam perjalanan pariwisata. Kesiapan dalam adaptasi kebiasaan baru ini penting untuk membangkitkan sektor pariwisata. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Lim dkk. (2021) menjelaskan bahwa pengalaman wisatawan

dalam berkunjung ke desa wisata menjadi penting terutama untuk memberikan kesan dan rasa ingin berkunjung kembali di kemudian hari ke daya Tarik wisata tersebut. Selain itu dalam berwisata di era pandemi menjadikan pengalaman wisata menjadi lebih penting terutama terkait mengenai jaminan wisatawan dalam meminimalisasi penularan Covid-19. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penerapan CHSE di setiap daya tarik wisata penting dilakukan untuk meningkatkan rasa aman dan pengalaman wisata selama pandemi menjadi lebih menyenangkan tanpa harus khawatir terkait penularan penyakit dan virus. Kesamaan tulisan ini dengan dua penelitian sebelumnya yakni terkait penerapan CHSE pada daya tarik wisata khususnya Desa Wisata. Aspek masyarakat lokal dan kesiapan atraksi wisata dalam kenormalan baru menjadi penting demi memberikan kepercayaan dan pengalaman pariwisata selama pandemi Covid-19.

## KONSEP PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

Konsep pariwisata berbasis masyarakat yang memprioritaskan masyarakat lokal sebagai *stakeholder* kunci, menjadi peluang dalam percepatan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bersifat *bottom up*. Destinasi pariwisata bersifat masyarakat lokal merupakan fenomena multidimensi yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, kekuatan ekologi dan politik (Singh, 2003).

Aspek 4A yakni berupa *attraction* yang merupakan segala bentuk kegiatan yang dapat dilakukan wisatawan selama kegiatan pariwisata. *Amenities* merupakan layanan *hospitality* baik berupa penginapan maupun layanan makanan dan minuman yang ada di daya tarik wisata. *Accessibility* bisa disebut sebagai akses menuju daya tarik wisata meliputi sarana dan prasarana pendukung transportasi. Sedangkan *Ancillary* merupakan aspek pendukung lainnya dalam segi pengelolaan atau *stakeholder* pariwisata dan organisasi pariwisata terkait. Aspek 4A akan menjadi penarik wisatawan untuk berkunjung kembali terutama ketika penerapan CHSE diberlakukan. Konsep ini digunakan untuk

menganalisis peluang yang ada di daya tarik Wisata Tamansari.

*Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Menghadapi kenormalan baru di sektor pariwisata, Kemenparekraf berusaha menciptakan rasa peduli terhadap wisatawan selama melakukan kegiatan wisata dengan program sertifikasi CHSE di seluruh tempat wisata, penginapan, sarana prasarana pendukung pariwisata maupun *stakeholders* terkait. Pelaksanaan CHSE diharapkan dapat kembali menghidupkan pariwisata di Indonesia dalam menghadapi kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19 (Kemenparekraf, 2020). Penerapan CHSE dalam pelaksanaan pariwisata diharapkan dapat memberikan kepercayaan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Desa Wisata Tamansari dari penularan Covid-19 selama melakukan kegiatan pariwisata.

## METODOLOGI

Pendekatan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan mencari gambaran umum dari data hasil penelitian, membandingkan data yang didapat serta mencari hubungan setiap data yang diperoleh. Metode kualitatif yang digunakan yakni observasi, mengamati kegiatan dari setiap hal yang menjadi pokok penelitian di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian baik dari segi partisipasi masyarakat, potensi wisata, dan pelaksanaan serta penerapan CHSE di Desa Tamansari. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui secara langsung mengenai kontribusi masyarakat lokal maupun BUMDes dalam peningkatan dan persiapan pelaksanaan pariwisata di era *new normal*. Informan dalam penelitian ini yakni pelaku usaha pariwisata dan anggota BUMDes Ijen Lestari. Dokumentasi

data yang diambil berupa dokumen organisasi BUMDes sebagai naungan usaha pariwisata di Desa Tamansari, buku pendukung mengenai konsep pariwisata berbasis masyarakat dan mengenai tantangan peluang pariwisata, serta jurnal penelitian pendukung sebelumnya.

## PEMBAHASAN

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai bentuk kegiatan aktualisasi diri, pertukaran sosial, saling pengertian dan pembelajaran terhadap aktivitas masyarakat lokal. Destinasi pariwisata perdesaan menjadi fokus pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dengan meningkatnya aktivitas pariwisata yang bersinggungan langsung pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Hal tersebut menciptakan fenomena baru dalam pariwisata bahwa pariwisata mungkin tidak harus mewah dan mahal melainkan cukup dengan memberikan kesan dan pengalaman baru bagi wisatawan. Daerah tujuan pariwisata dengan berbagai daya tarik wisata akan memperkuat nilai pemasaran. Beberapa tahun terakhir wisata pedesaan dikembangkan untuk meningkatkan identitas lokal dan sebagai bentuk pengentasan kemiskinan. Desa wisata yang terbentuk secara alami dari struktur masyarakat dan kekayaan sumber daya baik dalam aspek sosial budaya maupun dalam membuka peluang dan potensi pengembangan pariwisata.

Desa Wisata Tamansari dengan keindahan alam dan kearifan lokal berpotensi sebagai destinasi pariwisata berbasis masyarakat. Walaupun masalah paling kritis yang terkait dengan pariwisata berbasis masyarakat adalah siapa yang mengontrol produk dan citra pariwisata. Bahkan saat pariwisata mulai meningkat sering kali terdapat ketergantungan pada lembaga eksternal untuk mempromosikan atraksi dan untuk membawa wisatawan ke daerah yang terlibat sehingga sensitivitas dalam pemindahan kendali pengelolaan pariwisata dan pembagian hasil. Berbagai peluang dan tantangan saling berkaitan dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Tamansari, ada beberapa aspek yang menjadi analisis kritis dalam penelitian ini terutama saat pariwisata dihadapkan pada era *new normal*.

## PELUANG PARIWISATA DESA TAMANSARI

Aspek *attraction* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri pariwisata, bagian utama dari faktor penarik wisatawan untuk berkunjung dan dapat memberikan kesenangan dan relaksasi di tempat yang dituju untuk melakukan wisata (Cooper, 2012). Atraksi wisata dapat menciptakan industrinya sendiri, menjadi motivator untuk membuat kunjungan yang biasa saja menjadi luar biasa setelah menyaksikan atraksi wisata yang ada. Atraksi wisata Desa Tamansari terbagi atas beberapa karakteristik yang dapat menjadi peluang dalam menciptakan pariwisata yang memberikan energi dalam sistem pariwisata.

Pertama, atraksi wisata budaya yang terdiri atas segala kegiatan yang dapat dilakukan dan dinikmati wisatawan selama berkunjung. Desa wisata Tamansari memiliki potensi atraksi wisata budaya karena mayoritas keturunan Suku Osing. Tradisi yang khas biasanya diadakan setiap tahun atau setiap bulan. Tradisi upacara memetik (padi, kopi) *ruwatan*, *tumplek punjen*, *endog-endogan* yang ditampilkan dalam waktu tertentu biasanya dikemas dalam *calendar of events*. Sebagian besar Suku Osing bermata pencaharian sebagai petani. Rumah tempat tinggal Suku Osing berorientasi ke utara-selatan dengan tata ruang rumah terdiri dari tiga bagian yaitu *emper*, kamar, dan dapur. Bentuk rumah terdiri atas berbagai bentuk yaitu *crocogan*, *tikel*, *tikel galung*, dan *serangan*. Di samping rumah perkampungan Suku Osing sering dijumpai pemasangan *killing* (baling-baling), sebagai hiasan atau sarana hiburan. Berdasarkan kajian data arkeologi dan etnohistori, unsur-unsur sosial budaya Osing, seperti *chtonis*, yaitu orientasi arah hadap rumah pemukiman Osing berupa kaja-kelod (gunung-laut atau utara-selatan). Kebudayaan Osing di tengah perkembangan zaman masih terus dilestarikan dan juga sebagai aset kebudayaan nasional, terutama dalam promosi kepariwisataan terkhusus di Desa Tamansari.

Atraksi wisata budaya lainnya yaitu Taman Terakota yang merupakan tujuan wisata yang memperkenalkan cerita penari gandrung digambarkan dengan patung penari gandrung. Patung itu ditempatkan secara apik di terasiring persawahan lembah ijen, lengkap dengan lanskap

kehidupan perdesaan yang dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lokasi Taman Gandrung Terakota berada di pertengahan sawah produktif lengkap dengan perkebunan khas daerah kaki gunung. Selain patung gandrung, Taman Terakota juga menawarkan atraksi wisata sendratari kolosal di amfiteater menceritakan Histori Meras Gandrung Blambangan, tari gandrung dipilih sebagai atraksi utama Taman Gandrung Terakota dikarenakan histori dan sejarah yang berasal dari rakyat suku Osing, sendratari ini ditampilkan setiap satu bulan sekali.

Kedua, atraksi wisata alam dan buatan yang ditampilkan dalam bentuk lanskap, relief alam, suasana alam, keadaan cuaca dan iklim. Desa Wisata Tamansari yang berada di daerah lembah dan kaki pegunungan Ijen beriklim tropis dengan udara sejuk pegunungan dan kondisi alam yang berkarakter lembah. Sebagian wilayah desa yang masih berupa perkebunan, persawahan terasiring dan hutan hujan tropis menjadi potensi wisata yang menarik bagi wisatawan. Area perkebunan kopi yang saat ini mulai dikembangkan menjadi budidaya dan pengolahan kopi memberikan peluang usaha pariwisata.

Ketiga, Sarine yang merupakan perkebunan kopi sekaligus dijadikan sebagai salah satu atraksi wisata budidaya pengolahan kopi. Wisatawan bisa menyaksikan aktivitas kerja keseharian sehingga dapat mengetahui proses panen dan pascapanen. Kegiatan pengolahan kopi mulai dari pemetikan kopi mulai dari pendataan pemetik, tahap pemetikan, tahap pemisahan biji kopi berwarna merah dan hijau, hingga penyerahan hasil petikan, pengolahan biji kopi hingga menjadi bubuk kopi, dan pengemasan serta penyajian kopi, Hal ini merupakan peluang wisata edukasi sekaligus berwisata di alam. Wisata edukasi lainnya yang juga dapat dinikmati wisatawan saat berkunjung yaitu budidaya sapi perah. Wisatawan disuguhkan dengan proses pemerahan susu secara semi *modern*. Lokasi ini dikenal dengan kampung susu. Wisatawan dapat ikut serta dalam proses pemerahan susu, pemberian makan sapi perah hingga penyimpanan susu perah sebelum diproses di pabrik pengolahan susu, karena sebagian hasil susu didistribusikan ke PT Nestle. Desa Tamansari juga terkenal dengan Kampung Madu

dan Kampung Penambang. Budidaya madu menjadi profesi andalan masyarakat lokal Desa Tamansari. Madu yang dihasilkan juga menjadi produk khas desa karena perbedaan cita rasa dengan madu pada umumnya. Hal ini dikarenakan lokasi pengambilan madu yang berada di sekitar perkebunan cengkeh dan kopi menghasilkan madu yang beraroma. Desa Tamansari juga dikenal dengan kampung penambang, karena sebagian besar masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan di segi pendidikan memilih sebagai penambang belerang sebagai profesi andalan. Selain lokasi yang berdekatan dengan Gunung Ijen yang merupakan salah satu wilayah penghasil belerang terbesar di Pulau Jawa. Belerang juga dijadikan sebagai peluang usaha bagi para penambang dengan menghasilkan produk olahan baik berupa cinderamata maupun proses pengolahan sebelum dijadikan produk sabun.

Keempat, potensi wisata edukasi dan hiburan yang biasa disebut *edutainment*. Desa Tamansari kaya atraksi wisata ditambah dengan kontur wilayah perbukitan yang melimpah dengan sumber mata air menjadi potensi Desa Tamansari sebagai desa wisata pilihan di kaki Gunung Ijen. Salah satu yang tujuan wisata air yang paling populer yaitu Sendang Seruni, yang merupakan wahana air dengan dikelilingi perbukitan, tanaman bunga, dan bambu. Sumber mata air di sendang ini juga menjadi aliran irigasi di wilayah sekitarnya juga sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat khususnya Desa Tamansari.

Kelima, atraksi wisata *event* yang banyak diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam membuat *event* menjadi spesial yaitu *uniqueness* dan mencakup dari elemen gaya seperti *hospitality*, *symbolism*, *festive spirit*, *theming*, dan *authenticity*. Getz mengatakan bahwa aspek penting dari penyelenggaraan *event* adalah upaya untuk mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara (Rahayu, 2018). Hal demikian yang kini juga terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan berbagai *event* dan festival tahunan pariwisata. Desa Tamansari menjadi salah satu

lokasi *event* Internasional unggulan seperti Tour de Ijen, Jazz Gunung Ijen, Lembah Ijen. Tour De Ijen pada mulanya hanya merupakan ajang olahraga sepeda. Seiring berjalannya waktu, kegiatan ini dijadikan sebagai *event* tahunan yang banyak menarik pecinta olahraga sepeda dengan lintas wilayah jalur yang menantang dan ekstrem. Jazz Ijen merupakan festival musik jazz dengan peminat tidak hanya dari wisatawan domestik melainkan juga mancanegara. Lembah Ijen merupakan festival yang diadakan untuk memperkenalkan karakteristik masyarakat lokal desa penyangga TWA Kawah Ijen, pasar kuliner tradisional, kegiatan kesenian dan budaya Osing serta sendratari kolosal Meras Gandrung Blambangan.

Aspek *amenities* merupakan fasilitas *hospitality* atau layanan keramahan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi pariwisata, menyangkut akomodasi, *food and beverage*, dan fasilitas dasar lainnya (Cooper, 2012). Fasilitas layanan keramah-tamahan dan pendukung lainnya dianggap sebagai sektor non prioritas, namun menjadi sangat penting ketika peningkatan jumlah kunjungan ke sebuah daya tarik wisata. Di satu sisi *amenities* merupakan sektor penghasil pendapatan tercepat dari kegiatan pariwisata, terutama dalam pengadaan fasilitas akomodasi, layanan makanan dan minuman yang biasanya pariwisata berbasis masyarakat mengutamakan UMKM. Sebagian besar pengeluaran wisatawan mengalir di akomodasi, makanan dan minuman dengan hal ini perekonomian lokal akan bergerak lebih cepat dengan adanya pariwisata. Desa Tamansari yang telah lama menerapkan sistem *smart kampung* menjadikan setiap aktivitas perekonomian dari bidang pariwisata terorganisasi dengan dibentuknya kelompok usaha *homestay*, UMKM penyedia layanan makanan, minuman, cinderamata dan Retribusi Daya Tarik Wisata Desa Tamansari. Akomodasi yang terdapat di Desa Tamansari terdiri atas berbagai jenis, baik hotel, *resort*, *cottage*, *villa* dan *homestay*. Sebagian besar usaha akomodasi dikelola oleh masyarakat lokal terutama *homestay* jenis penginapan yang berdampingan langsung dengan pemilik. Wisatawan diajak untuk merasakan kehidupan asli masyarakat lokal.

Aspek *ancillary* dapat diartikan sebagai organisasi yang mengelola pariwisata atau *Destination Management Organisation (DMO)*. Pengelolaan destinasi wisata menjadi penting dalam perencanaan pengembangan pariwisata demi menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, saat ini pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang menciptakan pariwisata yang *pro* rakyat, pariwisata diciptakan dan dikelola oleh masyarakat akan memberikan manfaat langsung dalam hal kesejahteraan masyarakat dan sebagai pengentas kemiskinan dengan dampak *multiplier effect* pariwisata. Dampak yang terjadi dapat dilihat dari jenis dampak secara langsung, tidak langsung dan dampak lanjutan yang memengaruhi, akibat dari tambahan pengeluaran pengunjung ke dalam ekonomi lokal atau ekonomi nasional.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari daya tarik wisata dapat menunjukkan produk atau jasa yang belum tersedia di lokasi tersebut. Besarnya permintaan terhadap barang tersebut dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar dapat dilihat. Secara umum manfaat ekonomi secara langsung dari kegiatan wisata berkaitan erat dengan pengeluaran pengunjung atau wisatawan. Sehingga sejumlah uang yang dikeluarkan wisatawan akan berdampak pada berbagai aspek, aliran dari uang selama aktivitas pariwisata baik terhadap biaya akomodasi, konsumsi, perjalanan, souvenir atau oleh – oleh serta biaya lainnya akan memengaruhi dampak lanjutan dan efek pengganda terhadap pendapatan dan peluang kerja dari aliran uang yang dikeluarkan wisatawan. Nilai efek pengganda pada kegiatan pariwisata akan tampak ketika pengeluaran yang dilakukan wisatawan selama kegiatan pariwisata, berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pendapatan masyarakat lokal dan berdampak pada peningkatan nilai ekonomi daerah.

Model pariwisata berbasis masyarakat tepat diterapkan dalam pengembangan Desa Wisata dengan atraksi wisata yang berasal dari kekayaan sumber daya sosial budaya masyarakat lokal, serta sumber daya alam sekitar tempat tinggal masyarakat lokal. Penetapan Desa Tamansari sebagai Desa Wisata dan *Smart Kampung* memberikan peluang bagi masyarakat lokal sebagai *stakeholder* pariwisata dengan

dibentuk BUMDes Ijen Lestari. Dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa Tamansari di bawah naungan BUMDes dibentuk kelompok usaha tidak hanya dalam bidang pariwisata melainkan juga UMKM di luar pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam organisasi Desa Tamansari sangat didukung dengan adanya BUMDes, serta beberapa peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan pendampingan di bidang pariwisata dan layanan *hospitality*. Seluruh anggota dalam organisasi dan kelompok usaha merupakan masyarakat asli Desa Tamansari. Kutipan hasil wawancara dengan informan yang merupakan ketua BUMDes Ijen Lestari menyatakan:

*“BUMDes berusaha memberikan wadah bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup terutama dari segi pendapatan dengan bantuan untuk berwirausaha baik di bidang pariwisata maupun UKM lainnya, dan seluruh pelaksana, pengelola usaha desa merupakan masyarakat asli Desa Tamansari BUMDes memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, selain itu mendorong masyarakat dalam usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian masyarakat”.*

## TANTANGAN PARIWISATA DESA TAMANSARI

Tantangan pariwisata Desa Tamansari yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan mengenai aksesibilitas. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan yang efisien menuju destinasi wisata saat ini menjadi aspek penting. Kemudahan dan kenyamanan transportasi menjadi salah satu faktor pembangkit keberhasilan sebuah daya tarik wisata (Cooper, 2012). Ketersediaan dan peningkatan kualitas sarana transportasi yang layak jalan dan prasarana terminal, akan memberikan kenyamanan dan cerita bagi wisatawan. Walaupun terkadang peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata berdampak pada daya dukung lingkungan, polusi, emisi, kebisingan hingga hilangnya fungsi lahan akibat perluasan prasarana jalan maupun terminal. Secara historis, layanan transportasi yang dimiliki umumnya berkembang

sebagai respons terhadap permintaan yang timbul dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan. Tetapi, dalam perjalanan liburan, tersedianya pasokan yang terjangkau akan memfasilitasi dan menghasilkan permintaan. Sebagian besar pariwisata modern yang bertujuan melakukan liburan dapat dipengaruhi dari bentuk pemasaran pada transportasi penumpang, terutama mengenai penetapan harga dan promosi yang efektif untuk mengalihkan pilihannya ke alternatif tujuan.

Akses menuju Desa Tamansari yang merupakan salah satu desa penyangga TWA Kawah Ijen menjadikan tantangan tersendiri untuk dapat berkunjung. Hal itu dimulai dari ketersediaan transportasi menuju daya tarik wisata, mobilitas menuju setiap atraksi wisata hingga transportasi yang digunakan saat kembali menuju daerah asal wisatawan. Sistem transportasi penumpang utama yang digunakan dalam perjalanan dan pariwisata menuju Desa Wisata Tamansari hanya dapat ditempuh melalui jalur darat dengan menggunakan transportasi khusus pariwisata, transportasi pribadi atau rombongan.

Desa Tamansari terletak 16 km dari pusat Kota Banyuwangi. Awal mulanya terdapat kelompok usaha transportasi *rooftop jeep* yang menunjang kondisi jalan menuju Desa Tamansari baik dari arah kota maupun parkir sentral Desa menuju beberapa atraksi wisata. Pada awal mula pengembangan pariwisata di kawasan Desa Tamansari jenis transportasi ini menjadi pilihan utama dan sekaligus memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat dari jasa sewa transportasi. Perkembangan kualitas prasarana jalan yang semakin baik menjadikan kelompok usaha ini mulai hilang dengan semakin berkurangnya peminat dengan transportasi *rooftop jeep*. Ketua BUMDes Ijen Lestari membenarkan bahwa transportasi dengan tipe *rooftop jeep* mulai ditinggalkan selain kondisi jalan yang sudah sangat baik, harga yang harus dikeluarkan wisatawan juga menjadi pertimbangan untuk menggunakan sarana transportasi tersebut.

“Bayangkan saja dengan harga yang lumayan mahal dan dalam satu kali angkut hanya beberapa orang saja yang bisa ikut, sekarang kita banding-

kan dengan kendaraan yang lebih nyaman dan jumlah kapasitas lebih banyak otomatis harga yang dikeluarkan untuk transportasi akan lebih murah. Sekarang juga ada jaringan transportasi pendukung pariwisata dari Damri, dari titik penjemputan yang memudahkan untuk wisatawan seperti dari Bandar Udara, stasiun dan terminal. Sayangnya selain berdampak pada transportasi yang disesuaikan masyarakat, jaringan transportasi tersebut belum ada titik kunjungan ke Desa Wisata Tamansari”

Belum adanya sarana transportasi yang mendukung perkembangan pariwisata Desa Tamansari juga menjadi tantangan ke depan untuk menarik wisatawan berkunjung. Walaupun dengan adanya keterbatasan transportasi secara langsung menjadikan wisatawan yang datang sebagai *quality tourist*. Wisatawan yang sengaja datang dengan maksud mengenal lebih mendalam suatu daerah dengan masa berkunjung lebih lama serta jumlah uang yang dikeluarkan jauh lebih besar, terutama dalam kegiatan wisata yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat lokal dan *landscape* pedesaan.

Kesiapan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kunci penting dalam pembentukan dan pengoperasian pariwisata yang tepat terutama ketika pembangunan dan pengembangan pariwisata dari dan oleh masyarakat lokal. Pendidikan dan pelatihan pariwisata menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pariwisata. Dukungan dan keterlibatan masyarakat pada pengembangan berbagai fasilitas dan peluang yang sesuai berdasarkan pada kekuatan masyarakat dan sumber daya lokal harus dipersiapkan dengan maksimal.

Tantangan dalam mempersiapkan sumber daya yang mendukung di daerah pedesaan berkaitan dengan tingkat pendidikan dan daya dukung lingkungan. Demografi Desa Tamansari yang merupakan masyarakat agraris menjadikan sektor perkebunan dan pertanian sebagai sektor utama dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan di Desa Tamansari hanya tersedia pada tingkat sekolah dasar. Sebagian besar masyarakat memilih berkebudun,

menambang sebagai usaha peningkatan kualitas hidup. Menghasilkan pendapatan menjadi dorongan utama dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan. Begitupun pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio jumlah siswa, berapa pun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Untuk tahun 2019 angka partisipasi sekolah untuk tingkat SD/MI adalah 57 persen (Kecamatan Licin dalam Angka 2020). Untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus keluar menuju pusat Kota Banyuwangi. Peningkatan kualitas sumber daya masih terus ditingkatkan terutama di kalangan muda, dengan program pemerintah wajib belajar. Tujuannya untuk mengurangi jumlah pernikahan dini hingga pelibatan kaum milenial dalam kegiatan desa. Salah satu yang dilakukan adalah dengan diikutsertakan dalam organisasi kepemudaan di desa, BUMDes maupun perencanaan pembentukan POKDARWIS sebagai langkah awal Desa Wisata Tamansari untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

Tantangan lainnya dalam pengembangan pariwisata Desa Tamansari saat ini yakni, dalam menghadapi kenormalan baru pada masa pandemi Covid-19 menjadikan semua aspek harus sadar mengenai protokol kesehatan. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Covid-19, diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat. Tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokasi masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran Covid-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020).

Penerapan protokol kesehatan di setiap aspek menjadi penting untuk memutus rantai penyebaran virus. Beberapa anjuran dan arahan dilakukan terutama terhadap perlindungan individu ketika berada pada ruang publik seperti:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/ hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.
3. Menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.

Keputusan Menteri Kesehatan menjadi acuan dalam menyiapkan kehidupan kenormalan baru, begitu pula dalam bidang pariwisata. Kebangkitan pariwisata diharapkan dapat mengembalikan keadaan perekonomian selama masa pandemi satu tahun terakhir. Prinsip pelaksanaan protokol kesehatan kini juga menjadi aspek utama bagi Desa Wisata Tamansari beberapa bulan terakhir. Penyaluran bantuan tunai dan pembagian masker menjadi salah satu kegiatan desa turut andil dalam pencegahan penyebaran virus. Penyampaian pemahaman dengan sosialisasi baik terhadap Covid – 19 maupun kesiapan masyarakat menutup sementara pariwisata menjadikan tantangan desa, baik terhadap kelompok usaha *homestay*, daya tarik wisata dan usaha makanan dan minuman.

Penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan pariwisata juga memberikan dampak bagi pelaku usaha seperti usaha penginapan yang harus memenuhi beberapa aspek. Melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu

toilet dan fasilitas umum lainnya. Bagi pengusaha menengah atas, hal demikian memungkinkan untuk dilakukan, tetapi cukup menantang bagi pengusaha penginapan *homestay*. Penginapan yang merupakan kamar tidak terpakai yang dimanfaatkan untuk disewakan sehingga perbauran antara *host* dan *guest* tidak dapat dipisahkan, dan tidak memungkinkan untuk melakukan disinfektan secara berkala karena keterbatasan biaya. Pengetahuan dasar mengenai cairan disinfektan juga masih hal yang baru bagi masyarakat lokal. Walaupun beberapa sosialisasi sudah dilakukan terutama dalam menjaga kebersihan dan mengurangi penularan terutama di ruangan kamar yang disewakan. Penerapan protokol kesehatan dalam usaha *homestay* juga dirasa sulit dikarenakan kebiasaan masyarakat lokal dalam keramah-tamahan dan berkumpul untuk menjalin keakraban. Sehingga jalan terbaik dalam hal pencegahan penularan Covid-19 menutup sementara *homestay* hingga ada kepastian pencegahan tanpa mengurangi dan menghilangkan kebiasaan masyarakat lokal dalam menyambut tamu. Aspek yang juga sulit diterapkan oleh pemilik *homestay* skala kecil adalah melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Hal demikian dimungkinkan dilakukan jika setiap sumber daya memahami penggunaan pengukur suhu tubuh, biaya tambahan lainnya untuk penyediaan alat pengukur suhu juga menjadi alasan pemilik usaha enggan dengan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan juga terjadi pada usaha makanan dan minuman di Desa Tamansari, yang sebagian besar merupakan usaha dengan modal kecil. Aspek sederhana dalam penerapan protokol kesehatan yang juga menjadi tantangan dalam penerapannya yakni melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Sebagian besar usaha makanan dan minuman masyarakat yang berada di lingkungan terbuka menjadi alasan mengapa pemilik usaha enggan melakukan ini. Selain keterbatasan alat ukur suhu tubuh keterbatasan sumber daya juga menjadi pertimbangan. Tidak hanya dalam hal pengukuran suhu tubuh ketentuan mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh

pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan juga menjadi hal yang sulit diterapkan. Padahal sanitasi *hygiene* sebelum pandemi dalam hal penyajian makanan dan minuman seharusnya sudah menjadi hal biasa.

Kesadaran dan rasa peduli dalam menjaga kepercayaan pengunjung terhadap usaha makanan dan minuman yang dikelola masyarakat masih kurang, walaupun tidak seluruh pemilik usaha makanan dan minuman tak acuh terhadap kebersihan dan kesehatan makanan yang disajikan. Hal yang tentunya juga sulit diterapkan pada masa *new normal* menyangkut penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Usaha masakan dan minuman masyarakat lokal yang hanya sebatas bangunan nonpermanen sederhana dengan modal kecil, tidak akan sesuai dengan dana tambahan yang harus dikeluarkan dalam penyediaan sarung tangan maupun penutup wajah untuk menghindari droplet pekerja ke makanan yang dijual. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian, pada sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini tentunya juga menjadi perhatian terutama ketika wisatawan yang datang dari berbagai daerah, namun sering kali pelaku usaha abai akan hal ini terutama jika jasa layanan makanan dan minuman bukan dari kelas berbintang.

## **PENERAPAN CHSE DAN DAYA TARIK WISATA**

Panduan Pelaksanaan CHSE ditujukan bagi pengusaha dan/atau pengelola, karyawan, dan pemandu wisata lokal dalam memenuhi kebutuhan pengunjung akan produk dan pelayanan pariwisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi Covid-19. Ketentuan yang termuat dalam panduan ini mengacu pada protokol dan ketentuan lain yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, *World Health Organization* (WHO), dan *World Travel & Tourism Council* (WTTC) dalam rangka

pencegahan dan penanganan Covid-19 (Kutipan Menteri Pariwisata, 2020).

*Cleanliness*, yang selanjutnya diartikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan terutama dalam melaksanakan kegiatan pariwisata pada era *new normal*, kebersihan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan daerah tujuan wisata atau daya tarik wisata. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat kegiatan pariwisata di kenormalan baru mulai dilaksanakan.

*Health* merupakan konsep dalam menjamin wisatawan dan *host* tetap sehat selama berwisata, dalam menghadapi kenormalan baru masa pandemi Covid-19. Kemenparekraf juga menerapkan kebijakan standarisasi demi menjaga kesehatan individu dan masyarakat dengan mengacu pada protokol kesehatan yakni, menghindari kontak fisik antara pelaku usaha pariwisata *guest* dan *stakeholders* terkait. Pengaturan jarak aman, pembatasan jumlah kunjungan hingga mencegah kerumunan terutama di daya tarik wisata massal. Aspek lain yang harus diperhatikan selama wisata menghindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, mulut selama di lokasi sebelum memastikan kebersihan tangan. Selanjutnya pemeriksaan suhu tubuh jika ditemukan karyawan, pemandu wisata lokal, dan/atau pengunjung dengan suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk ke lokasi daya tarik wisata, serta diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, memakai alat pelindung diri yang diperlukan, seperti masker, kaos tangan, *faceshield*. Penerapan etika batuk dan bersin juga harus selalu diperhatikan demi menghindari penyebaran dari droplet. Penerapan sanitasi dan *hygiene* pengelolaan makanan dan minuman peralatan dan perlengkapan kesehatan sederhana untuk memenuhi standar kesehatan penyajian makanan, ruang publik dan ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik, penanganan khusus bagi pengunjung dengan gangguan kesehatan ketika beraktivitas di lokasi mencegah penularan penyakit.

Pelaksanaan di daya tarik wisata dalam menjamin keamanan dan keselamatan selama berwisata dilakukan dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan keamanan. Setidaknya ada kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan, alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya. Informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam dan kebakaran, peta lokasi titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi di dan sekitar daya tarik wisata. Adanya informasi tertulis mengenai nomor telepon penting: pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, kantor kelurahan atau desa, alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.

Perkembangan pariwisata yang cukup cepat mengalami perubahan memberikan tekanan terhadap ekologi dan lingkungan sebuah daya tarik wisata. Lingkungan merupakan bagian yang perlu menjadi perhatian ketika mengembangkan sebuah kawasan pariwisata, keadaan lingkungan dan keragaman hayati menjadi potensi wisata dan juga sebagai faktor penarik wisatawan untuk berkunjung, ketahanan daya dukung lingkungan sangat diperlukan terutama untuk menjadi keberlanjutan daya tarik wisata. Meminimalisasi dampak lingkungan yang dapat terjadi seperti permasalahan akibat limbah buangan yang berkaitan dengan limbah rumah tangga, logam, plastik, cair dan beberapa limbah bungkus makanan yang sebagian besar tidak dapat terurai secara alami. Memastikan pengolahan sampah dan limbah cair daya tarik wisata dilakukan secara tuntas, sehat dan ramah lingkungan sehingga dapat tetap menjaga lingkungan serta tidak menyebabkan sumber penyebaran baru Covid-19 di era *new normal*.

Pariwisata berkelanjutan merupakan proses perubahan di mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan institusional semuanya selaras. Selain itu juga meningkatkan potensi saat ini dan masa depan untuk pemenuhan kebutuhan sehingga pariwisata berkelanjutan merupakan industri yang mencoba memberi dampak rendah pada lingkungan dan budaya lokal. Namun, hal

itu dapat meningkatkan pendapatan, peluang kerja, dan konservasi ekosistem lokal. Ini adalah wisata yang bertanggung jawab yang keduanya mengedepankan pelestarian lingkungan dan budaya. Keberadaan destinasi wisata perdesaan diharapkan dapat menciptakan produk utama *rural tourism* yaitu keberadaan “Komunitas Desa” yang merupakan bahan baku utama adanya destinasi wisata perdesaan. Selain itu, daya dukung lain dalam pengembangan destinasi wisata perdesaan yang memiliki daya saing adalah sikap *cooperative* dan saling kerja sama antara pemangku kepentingan. Beberapa *stakeholder* yang harus saling mendukung demi terciptanya sebuah tujuan wisata berbasis pedesaan yang berdaya saing di antaranya pemerintah sebagai fasilitator, komunitas desa sebagai wirausahawan yang diharapkan dapat membangun usaha dalam kegiatan desa wisata. Diharapkan pula ada organisasi lainnya yang juga menjadi pendukung dalam pengembangan *rural destination* berbasis alam sehingga tercipta pariwisata ramah lingkungan yang berkelanjutan dari segala aspek.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa peluang dan tantangan pariwisata berbasis masyarakat dalam menghadapi adaptasi kehidupan baru. Penerapan protokol kesehatan dan aturan pembatasan perpindahan, mobilitas serta jumlah kunjungan menjadi hal yang harus diterapkan.

Peluang pariwisata Desa Wisata Tamansari dari potensi pariwisata memiliki jenis atraksi yang beragam sehingga menjadi faktor penarik wisatawan yang berkunjung. Lanskap destinasi pariwisata yang berada di wilayah kaki gunung memberikan nilai tambah terutama dalam menghadapi pariwisata di era *new normal*. Pariwisata dengan atraksi utama pedesaan dengan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan alam menjadi nilai tambah untuk menghindari kualitas udara yang buruk terutama dalam pencegahan penyebaran penyakit. Atraksi *edutainment* di Desa Wisata Tamansari menjadi peluang besar dalam pengembangan pariwisata selanjutnya. Model pengelolaan yang terorganisasi dengan baik dengan partisipasi masyarakat

berdampak pada perkembangan atraksi wisata seperti munculnya atraksi wisata yang bersumber dari sumber daya sosial budaya masyarakat, hingga produk kreatif dan olahan UKM yang menarik dijadikan sebagai cinderamata.

Tantangan pengembangan pariwisata Desa Wisata Tamansari lebih kepada akses menuju dan dari destinasi pariwisata. Ketersediaan sarana transportasi yang memadai menjadi kunci dalam pengembangan pariwisata perdesaan, walaupun dalam segi pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah destinasi. Penerapan protokol kesehatan dan tingkat kepedulian kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penyebaran Covid-19 masih memerlukan peningkatan terutama dari segi pemahaman persebaran Covid-19 dan pentingnya menciptakan kepercayaan wisatawan untuk datang selama menghadapi kenormalan baru dalam pariwisata.

Penerapan CHSE di Desa Wisata Tamansari sebagian telah sesuai dengan prinsip penerapan *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* terutama dalam bidang keberlanjutan wilayah tujuan pariwisata. Partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder* pariwisata memperkuat usaha pemerintah untuk menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan, serta membantu meningkatkan kualitas lingkungan baik dari jenis atraksi wisata maupun sarana prasarana pariwisata.

## PUSTAKA ACUAN

- Ab, Putri (2019). Revolusi Industri 4.0 di Desa Tamansari Banyuwangi. *Desabisa*. Diunduh dari <https://www.desabisa.com/revolusi-industri-4-0-di-desa-tamansari-banyuwangi/> tanggal 20 Maret 2021.
- AP, A. Risdawati, Dian Karinawati Imron dan Cita Pertiwi. (2020). *Tourism Village: Challenges and Opportunities in New Normal*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 510: 540–544.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2009). *Statistik Pariwisata Provinsi Jawa Timur 2019*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2009). *Statistik Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2019*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2019). Kecamatan Licin Dalam angka 2019. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Butler, Richard and Tom Hinch. (2007). *Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications*. Oxford OX2 8DP, UK: Published by Elsevier.
- Cooper, Chris. (2016). *Essentials of Tourism Second Edition*. Edinburgh: Pearson Education Limited Oxford Brookes University.
- Hadi, Ghina Dhiya, and Farida Nurani. (2019) “*Pengembangan Potensi Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Tamansari, Banyuwangi)*.” Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Kalsum, E. U., Arifin, D., Raga, M., Noerdjamal, D., & Utomo, B. S. (2021). Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui 3A Dan Penerapan CHSE Di Desa Cihanjavar, Kabupaten Purwakarta Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata* 8(1): 47–55.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata. Jakarta: Kemenparekraf.
- Lim, Florin Limantoro, et al. (2021). Meningkatkan Kualitas Pengalaman Wisatawan dengan Pelayanan Kepemanduan dan Penerapan Protokol Kesehatan di Desa Wisata Nglanggeran—Studi Pendahuluan. UNCLLE (Undergraduate Conference on Language, Literature, and Culture). 1(01).
- Mahayu, A. G., Ari, I. R. D., & Prayitno, G. *POK-DARWIS Participation in The Creation of the Tourism Object of Coban Talun in Tulungrejo Village*. International Journal of Innovative Science and Research Technology 5(12): 272–276.
- Novandi, Harod Rahmad dan Isbandi Rukminto Adi. (2019). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ijen Lestari Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Community Based Tourism. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(1): 68–80.
- Pemerintah Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 *tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi* Richards, Greg and Derek Hall. (2000). *Tourism and Sustainable Community Development*. Routledge: London.
- Purnomo, A., Wardhani, G. S. A., Buddin, I. H. S., Rahmawati, M., Glenn, P., & Kurniawan, B. (2021). Carrying capacity of local communities to developing Tamansari Tourism Village, Banyuwangi. In *Community Empowerment through Research, Innovation and Open Access* (127–131). Routledge.
- Puspitaningrum, Eka, and Djuara P. Lubis. (2018). Modal Sosial dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* (JSKPM) 2(4): 465–484.
- Rahayu, Ida. (2018). Dampak Penyelenggaraan Event Pariwisata Dragon Boat Race di Kota Tanjungpinang. *JUMPA* 05(01): 211–226.
- Singh, S., Timothy, D. J., & Dowling, R. K. (2003). *Tourism in Destination Communities*. London: CABI Publishing
- Surat Keputusan Kepala Desa Tamansari Nomor:188/22/KEP/429.522.08/2020

## STRATEGI MITIGASI INDUSTRI ANIMASI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19

### *POST COVID-19 PANDEMIC MITIGATION STRATEGIES IN THE INDONESIAN ANIMATION INDUSTRY*

Andrian Wikayanto<sup>1</sup>, Bagus Fitriyan Yudoprakoso<sup>2</sup>, Ehwan Kurniawan<sup>3</sup>,  
Daryl Wilson<sup>4</sup>, dan Irvan S. Prana<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,  
<sup>2</sup>Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <sup>3</sup>Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta  
<sup>4</sup>Kumata Studio Bandung  
<sup>5</sup>Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia  
mail: <sup>1</sup>awikayanto@gmail.com, <sup>2</sup>bagusyudoprakoso@gmail.com, <sup>3</sup>ehwankurniawan@senirupaikj.ac.id, <sup>4</sup>daryl-kumata@gmail.com, <sup>5</sup>ipang83@gmail.com

#### ABSTRACT

*Indonesia's animation industry has a long history. In 2020, the animation industry should have grown rapidly and been the most productive year for this industry. Even so, various challenges prevent this industry from growing rapidly, especially when the Covid-19 pandemic began to hit in 2020. The main problem that then arises is related to the need for animation service ordering projects, funding assistance for animation IP production, and related policies and incentives in favor of the development of the local animation industry. This study used a descriptive qualitative approach with the model-building method. This method is used to construct policy strategies related to recovery and acceleration strategies based on findings in the field regarding the impact of the Covid-19 pandemic on the Indonesian animation industry sector. Based on previous research data and reconstruction of findings in the field on the current state of the animation industry, the strategy for recovery and accelerating the development of the Indonesian animation industry needs to prioritize the role of the government in providing work projects, help finance production and curiosity, and side with the local animation industry by limiting animation imports.*

**Keywords:** *animation industry, post pandemic, mitigation, strategy.*

#### ABSTRAK

Industri animasi Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Semestinya tahun 2020 lalu industri animasi dapat tumbuh pesat dan menjadi tahun paling produktif bagi industri ini. Meskipun demikian berbagai tantangan mencegah industri ini untuk tumbuh pesat, utamanya ketika pandemi Covid-19 mulai melanda sejak 2020 lalu. Permasalahan utama yang kemudian muncul yakni terkait kebutuhan akan proyek pemesanan jasa animasi, bantuan dana kerja produksi IP animasi, dan kebijakan serta insentif terkait yang berpihak pada penumbuhkembangan industri animasi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *model-building*. Metode ini digunakan untuk mengkonstruksikan strategi kebijakan terkait strategi pemulihan dan percepatan berdasarkan pada hasil temuan di lapangan tentang dampak pandemi Covid-19 pada sektor industri animasi Indonesia. Berdasarkan data penelitian terdahulu dan rekonstruksi dari temuan di lapangan terhadap kondisi industri animasi saat ini, strategi pemulihan dan percepatan pengembangan industri animasi Indonesia perlu mengedepankan peran pemerintah dalam menyediakan proyek kerja, membantu pendanaan produksi dan pemasaran, serta berpihak pada industri animasi lokal dengan membatasi impor animasi asing.

**Kata kunci:** *Industri Animasi, Pascapandemi, Mitigasi dan Percepatan, Strategi.*

## A. PENDAHULUAN

Pada 2017 industri animasi merupakan salah satu sektor yang paling tinggi pertumbuhannya bersama sektor *game* dan film (Bekraf, 2017). Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa sektor kreatif ini tumbuh secara positif dengan pertumbuhan studio baru rata-rata 10 studio setiap tahun selama 1 dekade terakhir. Ini diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan oleh asosiasi industri animasi Indonesia pada tahun 2020 yang memperlihatkan data bahwa selama tahun 2015 hingga 2019 sektor animasi Indonesia tumbuh rata-rata 26 persen setiap tahunnya (Wilson et al., 2020). Puncak dari pertumbuhan positif animasi di Indonesia ini adalah akan tayangnya enam judul animasi buatan studio animasi lokal di layar bioskop di tahun 2020 (Kurniawan, 2020a). Angka ini merupakan angka terbesar dalam jumlah film animasi lokal yang tayang dalam satu tahun berjalan di bioskop Indonesia selama 65 tahun. Namun dari enam judul tersebut hanya dua film animasi saja yang sempat tayang di awal tahun 2020 sebelum adanya pelarangan dan ditutupnya bioskop selama pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020 lalu sektor animasi Indonesia juga tidak luput dari ancaman akan dampak pandemi pada sektor ekonomi nasional. Dampak tersebut antara lain adanya pemutusan kontrak kerja dari pihak pemberi kerja, proses pemindahan *pipeline* kerja dari studio ke rumah masing-masing, tidak seimbang nya *cost & cashflow* perusahaan (Wilson et al., 2020). Hasil temuan penelitian sebelumnya tentang dampak pandemi Covid-19 pada industri animasi Indonesia menunjukkan terdapat lima aspek utama yang dibutuhkan para pelaku animasi Indonesia yang muncul sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19, yaitu (1) bantuan pada jasa produksi animasi berupa pemberian proyek animasi (*service*), (2) bantuan dana kerja yang diberikan pada kegiatan produksi konten animasi (*IP Development*), (3) kebijakan terkait kemudahan regulasi usaha dari pemerintah terhadap industri animasi, (4) kemudahan dalam insentif pajak selama pandemi, (5) bantuan untuk distribusi dan promosi karya animasi (Wilson et al., 2020).

Secara khusus dampak pandemi pada sektor animasi Indonesia juga berdampak pada mental para pekerja kreatif di industri animasi Indonesia. Studi terakhir bahkan menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 ini dapat mengakibatkan dampak negatif pada aspek psikologi seperti meningkatnya perasaan gelisah, depresi, kurang tidur dan gangguan stress pasca trauma (Kimhi et al., 2020). Dengan adanya PSBB juga membuat masyarakat umum atau pekerja kreatif secara khusus, tidak bisa beraktivitas secara normal dan cenderung takut jika harus bekerja di kantor seperti biasa atau berkumpul secara berkelompok (Agung, 2020; Suraya et al., 2020). Ketidakjelasan kapan berakhirnya pandemi membuat pekerja animasi turun produktivitasnya selama pandemi, merasakan stres dan takut untuk bekerja atau bertemu dengan orang lain, hingga bayang-bayang pemutusan kontrak kerja yang menghantui 5.771 karyawan tetap dan pekerja lepas yang ada pada sektor animasi Indonesia (Wilson et al., 2020).

Di sisi lain sektor animasi Indonesia juga mendapatkan durian runtuh akibat dari adanya pandemi yaitu adanya trend naiknya kebutuhan akan konten-konten hiburan pada masa pandemi seperti film, animasi dan game (Olsberg, 2020; Wilson et al., 2020). Fenomena ini muncul akibat dari kebutuhan masyarakat untuk melepaskan penat dan mengurangi stress selama masa pandemi khususnya pada saat PSBB dengan melihat berbagai konten-konten hiburan (Sunitha, 2020). Dalam *press release* AC Nielsen melaporkan bahwa tingkat kepemirsaaan TV saat pandemi naik secara drastis dan khusus pada penonton anak yang menonton tayangan animasi mencapai rating tertinggi sebesar 16,2 persen. Permintaan akan konten-konten hiburan animasi juga terasa pada kanal OTT (*Over The Top*) dan VOD (*Video on Demand*) di internet seperti di YouTube, Netflix, Viu, Goplay dan Disney Hotstar (Nielsen Global Media, 2020). Ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan terjadi pelonjakan drastis permintaan tayangan animasi baik pada media TV *free to air* atau pada media daring selama pandemi ..

Melihat fenomena yang terjadi selama pandemi di atas seharusnya ada kebijakan terkait

mitigasi risiko bencana sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi khususnya pada sektor industri animasi Indonesia. Kebijakan strategis ini sangat dibutuhkan karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya masih belum ada bentuk bantuan secara konkret yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku animasi di Indonesia selama pandemi berlangsung (Wilson et al., 2020). Hal ini dikarenakan untuk dapat meminimalisasi dampak dari sebuah bencana seperti pandemi ini tidak dapat sepenuhnya diserahkan sepenuhnya pada para pelaku industri secara mandiri, namun diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah yang tepat sasaran dengan mengoptimalkan potensi yang ada di Indonesia (Nasution et al., 2020; Susilawati et al., 2020; Yamali & Putri, 2020). Beberapa kebijakan mitigasi terkait pemulihan dampak pandemi pada di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan pada sektor pariwisata, kesehatan, industri otomotif dan manufaktur, serta insentif perpajakan pada UMKM terdampak pandemi Covid-19. Namun dari seluruh kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tersebut masih belum banyak yang menyentuh pada pemenuhan kebutuhan pada sektor industri animasi secara khusus. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang melihat pada dampak Covid-19 pada industri dan pekerja animasi di Indonesia, penelitian ini memiliki fokus pada pembahasan pada perumusan strategi pemulihan dan percepatan yang dibutuhkan oleh sektor industri animasi lokal sebagai bagian dari mitigasi bencana pandemi Covid-19 di Indonesia. Langkah ini dianggap penting agar pertumbuhan positif industri animasi lokal selama satu dekade terakhir tetap terjaga meskipun terdapat hambatan dengan adanya pandemi Covid-19. Sekaligus disaat yang sama dapat memanfaatkan munculnya tren peningkatan permintaan akan konten hiburan animasi pada masa pandemi sebagai momentum untuk mempercepat pertumbuhan dan daya saing animasi Indonesia pada kancah persaingan global di masa mendatang.

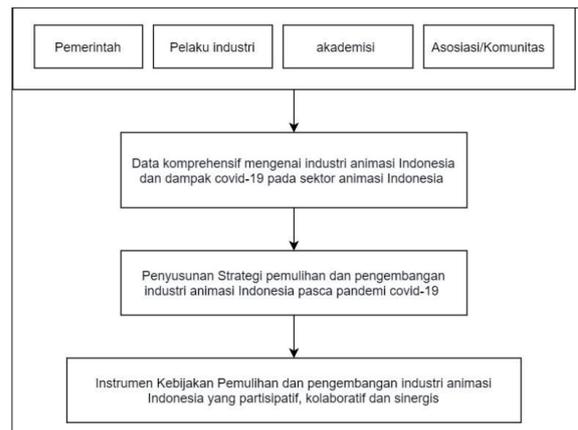
## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *model-building method*.

Metode ini digunakan untuk mengonstruksikan strategi kebijakan terkait strategi pemulihan dan percepatan berdasarkan pada hasil temuan di lapangan tentang dampak pandemi Covid-19 pada sektor industri animasi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari kegiatan penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 pada sektor animasi Indonesia yang sudah dilakukan sebelumnya yang merupakan bagian dari kegiatan *risk identification*. Kemudian data-data temuan di lapangan tersebut dipilah dan dipilih berdasarkan kebutuhan prioritas para pelaku animasi (*risk assessment*), yang hasilnya kemudian dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan model rekomendasi bagi pemerintah atau stakeholder terkait industri animasi (*risk mitigation*) yang berorientasi pada kebutuhan servis produksi, pengembangan IP dan kebijakan. Uraian deskripsi tentang permasalahan pada kegiatan penelitian kualitatif deskriptif ini akan menghasilkan penjabaran mengenai realitas masalah secara alamiah dalam bentuk deskriptif dan tidak dalam bentuk angka-angka statistik (Creswell & Poth, 2016). Sedangkan penggunaan *model-building method* dilakukan untuk dapat mengonstruksikan strategi kebijakan yang dibutuhkan oleh para pelaku animasi Indonesia berdasarkan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat bahwa temuan teoretis dapat dibangun berdasarkan dasar empiris yang ditemukan di lapangan (Shepherd & Suddaby, 2017). Proses pengumpulan data didapatkan dengan proses wawancara dengan 120 pemilik studio animasi di 23 kota di seluruh Indonesia. Data primer pada proses wawancara didapatkan secara daring dengan pertanyaan terbuka melalui aplikasi Zoom pada bulan Oktober 2020 atau delapan bulan setelah pengumuman kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sedangkan data sekunder di dapat dari studi literatur yang terkait dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Proses analisis data dilakukan dengan melakukan transkrip wawancara, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Creswell & Poth, 2016). Kemudian data tersebut akan diuji untuk dapat menghasilkan gambaran yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku animasi Indonesia melalui teknik triangulasi yang

meliputi tahapan *check*, *re-check*, dan *cross-check* (Sugiyono, 2008).

Keberhasilan strategi mitigasi pemulihan dampak pandemi perlu di dukung dengan strategi jangka pendek, menengah dan panjang yang dibangun berdasarkan urgensi sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Mitigasi sendiri adalah usaha dalam meminimalisasi dampak yang diakibatkan oleh sebuah kejadian force majeure seperti bencana alam atau pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini (Gunawan & Yupie, 2017; Nirupama, 2013). Dari sudut pandang ekonomi mitigasi Covid-19 dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat mengurangi kerugian ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 (Chen et al., 2020). Oleh karena itu instrumen kebijakan yang dihasilkan dalam upaya pemulihan industri animasi Indonesia seharusnya merupakan hasil kajian yang sudah dilakukan bersama oleh pihak pemerintah selaku pemegang otoritas dan pemegang kebijakan, pihak industri sebagai pelaku usaha animasi, dan dibantu oleh *stakeholder* terkait ekosistem animasi Indonesia seperti pihak akademisi, industri yang terkait dengan animasi dan asosiasi industri dan profesi. Pihak-pihak tersebut bersama-sama melakukan pemetaan terkait dampak Covid-19 pada sektor animasi Indonesia secara menyeluruh (*risk identification*), kemudian menilai, memilah dan memilih risiko yang kemungkinan dapat terjadi akibat dari munculnya bencana tersebut (*risk assessment*), merancang strategi pemulihan dan melaksanakan strategi tersebut (*risk mitigation*), menerima segala masukan, mengembangkan, dan mengurangi risiko yang terjadi pada saat pelaksanaan (*risk Respons*), serta memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan mitigasi secara berkala (*risk monitoring*) (Haas & Yorio, 2018; Khan et al., 2008). Berikut adalah bagan alur penyusunan strategi pemulihan dan pengembangan industri animasi Indonesia pascapandemi Covid-19 yang dilakukan pada penelitian ini.



**Gambar 1.** Rekomendasi alur penyusunan strategi pemulihan dan pengembangan industri animasi Indonesia pasca pandemi Covid-19.

## C. PEMBAHASAN

### Strategi Kebijakan Produksi Animasi

Kegiatan Produksi Konten Nasional (PKN) merupakan kegiatan yang dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan akan bantuan pada aspek jasa produksi animasi yang diusulkan oleh 90 pemilik studio animasi Indonesia. PKN adalah sebuah kegiatan memproduksi karya animasi bersama (*collaborative project*) yang melibatkan studio animasi di Indonesia dan pemerintah pusat/daerah bekerja sama dengan asosiasi industri animasi Indonesia, pihak akademisi, dan media massa. Dengan melakukan proyek secara kolaboratif juga memungkinkan terjadinya proses transfer dan penyamaan *skill* antarstudio dan pekerja animasi satu dengan lainnya, sehingga setelah dilaksanakan PKN kemampuan produksi antarstudio animasi menjadi merata yang akan mempermudah proses produksi kolaboratif di masa mendatang. Tujuan dari dilaksanakannya PKN adalah untuk menyuntikkan dana produksi kepada studio animasi hingga para pekerja kreatif yang diharapkan dapat menimbulkan *trickledown effect* kepada sektor lain di dalam ekosistem industri animasi Indonesia. Ini menjadi penting untuk segera diimplementasikan karena adanya dampak yang cukup besar pada berkurangnya penerimaan proyek animasi dan berimbas pada berkurangnya pendapatan studio selama tahun 2020 lalu (Wilson et al., 2020). Selain itu kontribusi pendapatan dari jasa *service* animasi masih mendominasi jumlah total pendapatan

**Tabel 1.** Perbandingan kontribusi pendapatan jasa animasi dengan pendapatan dari lisensi IP

Tahun	Kontribusi Service	Kontribusi IP
2015	86%	14%
2016	84%	16%
2017	79%	21%
2018	81%	19%
2019	76%	24%
2020	79%	21%

Sumber: Wilson et al. (2020)

nasional studio animasi Indonesia (79 persen) dibandingkan kontribusi pendapatan dari IP (21 persen) di tahun 2020. Sehingga dapat kita lihat bahwa tulang punggung pendapatan sektor animasi Indonesia masih bertumpu pada pendapatan sektor jasa animasi dibandingkan sektor lisensi IP (Tabel 1).

Tema yang diangkat pada program PKN akan fokus pada usaha melestarikan kearifan budaya daerah ke dalam konten yang dapat dinikmati secara nasional maupun internasional. Selain modal SDM kreatif yang melimpah Indonesia juga memiliki banyak sekali kekayaan tradisi dan budaya yang masih belum banyak diangkat ke dalam bentuk-bentuk media populer seperti *game*, animasi, komik, hingga film (Pasek & Adnyana, 2018). Mengangkat budaya lokal pada karya animasi sejatinya bukan hal yang baru karena setiap kreator animasi secara sadar atau tidak sadar akan berusaha untuk memasukkan identitas budaya yang ada di sekitar mereka ke dalam karyanya (Ahmad, 2008). Ini dapat dilihat secara jelas pada karya-karya animasi Jepang, India, atau Malaysia dengan Upin-Ipin yang sangat terlihat unsur-unsur lokalitasnya. Para kreator animasi di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Terbukti dari 83 judul animasi tahun 1955 hingga 2017 sebanyak 73,5 persen mengangkat tema dengan konten-konten budaya lokal Indonesia dan sisanya 26,5 persen mengambil tema lainnya (Wikayanto, 2018). Secara lebih rinci pada studi yang telah dilakukan sebelumnya animasi buatan studio lokal Indonesia memiliki 17 ciri khusus pada aspek kebudayaan yang terbagi ke dalam empat ciri utama yaitu berlandaskan pada gagasan, aktivitas, artefak, dan lokalitas yang ada di seluruh penjuru nusantara (Wikayanto, 2019).

Sehingga dengan mengangkat tema budaya lokal Indonesia pada program PKN ini dianggap bukan hal yang baru bagi para kreator animasi lokal di Indonesia yang diharapkan dapat memperbesar kemungkinan keberhasilan program ini jika benar-benar direalisasikan.

Studi kasus yang berhasil dan dapat dijadikan sebagai contoh untuk program PKN ini adalah pada program produksi kolaboratif serial animasi Petualangan Si Unyil di tahun 2016 (Wilson, 2020). Si Unyil sendiri merupakan IP milik Perusahaan Film Negara (PFN) yang bercerita tentang keseharian karakter Unyil bersama teman-temannya. Pada kegiatan produksi kolaboratif ini menghasilkan output 26 episode animasi dengan durasi masing-masing 11 menit yang dibuat dalam 10 bulan. Secara keseluruhan proyek ini dikerjakan oleh 18 studio animasi lokal dengan melibatkan lebih dari 150 pekerja kreatif. Serial animasi petualangan Si Unyil ini telah tayang di beberapa stasiun televisi nasional, TV berlangganan, dan di beberapa lokasi strategis seperti kereta api, bandara, dan komuter *line*. Keberhasilan dari studi kasus ini dapat diadopsi pola kerjanya pada program PKN dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Dengan dilaksanakannya program PKN ini diharapkan studio animasi yang mengalami pembatalan dan penundaan proyek animasi dapat terjaga *cashflow* pendapatannya sehingga tidak sampai harus melakukan PHK terhadap para pekerja kreatifnya atau yang terburuk adalah menutup usaha animasi mereka. Sisi lain dari manfaat program ini adalah sebagai wadah dalam merevitalisasi dan komodifikasi *local content* yang ada di Indonesia sekaligus menjawab kebutuhan akan konten-

konten hiburan di masa pandemi yang muncul pada saat pandemi.

Komponen teknis pelaksanaan program PKN dapat terbagi dalam lima aspek yaitu sumber pendanaan, data/*resource* pustaka budaya, tim konseptor konten nasional, tim produksi, luaran dan distribusi. Sumber pendanaan PKN dapat bersumber dari APBN kementerian baik dari satu kementerian atau *join* pendanaan dari berbagai kementerian yang terkait dengan animasi seperti Kemenparekraf, Kemdikbud, dan Kemenperin. Sumber pendanaan lainnya juga dapat berasal dari CSR BUMN dan perusahaan swasta yang memiliki kepentingan terkait dengan industri animasi seperti perusahaan media televisi dan *platform video on demand* seperti Netflix, Goplay dan Disney Hotstar. Data mengenai pustaka budaya didapatkan dari *database* yang ada di Kemdikbud, Kemenparekraf, Balai Pustaka dan Perusahaan Film Negara (PFN). Data ini diperlukan sebagai sumber yang dirujuk oleh tim konseptor yang bertugas memaksimalkan data-data terkait tradisi dan budaya Indonesia ke dalam konsep animasi. Tim konseptor konten nasional merupakan tim yang dibentuk untuk merancang konsep animasi yang akan dibuat seperti konsep naskah cerita, pra-produksi, produksi, pascaproduksi, hingga masalah *marketing* dan distribusi. Tim ini terdiri dari pihak akademisi (dosen dan peneliti), penulis naskah, pegawai negara yang terkait dengan animasi seperti dari Kemenparekraf dan Kemdikbud, asosiasi industri dan profesi, serta pihak swasta. Tim produksi adalah pihak yang menjalankan dan memproduksi animasi sesuai dengan konsep yang dibuat oleh tim konseptor yang terdiri dari berbagai studio animasi yang memiliki standar produksi yang telah ditentukan sebelumnya. Kebutuhan tenaga kerja di bidang animasi masih banyak di butuhkan di Indonesia (Bekraf-IKJ, 2016). Sehingga proyek PKN ini dapat melibatkan pihak akademi seperti SMK dan universitas untuk melakukan *training for trainer* dan *internship* siswa & mahasiswa magang dan juga dapat membantu dalam program *link & match* antara sekolah kejuruan dengan industri dan program kampus merdeka di perguruan tinggi.

Sedangkan komponen terakhir dari program PKN adalah proses distribusi hasil karya ke dalam

berbagai macam *platform* dan media massa, seperti usaha untuk mendistribusikan ke stasiun televisi secara berkala, platform media online *streaming & Over The Top* (OTT), dan bioskop. Pada tahap ini bisa juga melakukan diversifikasi media dan lisensi karakter IP pada komik cetak dan daring, novel, musik dan *jingle*, periklanan, mainan, aksesoris anak-anak, dan produk-produk komersial lainnya. Pada tahap akhir inilah wujud nyata dari kebermanfaatannya animasi sebagai media promosi intelektual properti berbasis karakter seperti yang telah bertahun-tahun Disney lakukan. Berbeda dengan produk *film feature* yang hanya mengandalkan tiket penonton, animasi justru bukanlah produk akhir dari sebuah kegiatan produksi media hiburan (Levy, 2010). Karena dengan adanya animasi secara tidak langsung akan mempromosikan karakter yang ada di dalam animasi tersebut kepada masyarakat sehingga dapat menarik perhatian dan pembelian dari masyarakat jika melihat karakter tersebut pada produk-produk komersial yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk memproduksi produk-produk selain animasi tersebut pasti akan melibatkan komikus atau ilustrator pada media komik, penulis pada novel, musisi dan penyanyi pada media musik, desainer komunikasi visual pada periklanan, perusahaan pembuat boneka atau *toys* pada produk mainan, dan perusahaan yang memproduksi berbagai macam aksesoris dan produk komersial lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya program PKN ini tidak hanya bermanfaat untuk mengangkat tradisi dan budaya lokal saja namun juga dapat menggerakkan roda ekonomi pada sektor ekonomi kreatif lainnya di luar sektor animasi.

Program PKN tidak hanya dapat mengangkat tema-tema berbasis tradisi dan budaya lokal saja, namun dengan adanya pandemi covid ini juga dapat fokus pada pembuatan animasi yang berbasis pariwisata. Seperti yang kita ketahui sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak munculnya pandemi covid (Škare et al., 2021). Selain karena larangan kegiatan pada masa PSBB para wisatawan juga merasakan ketakutan tertular virus jika harus berkunjung ke luar tempat tinggal mereka (Pambudi et al., 2020). Pelaku sektor pariwisata juga banyak yang terpaksa menutup usaha wisata

mereka merumahkan para pekerjanya (Herdiana, 2020). Pemerintah melalui Kemeparekraf sudah memberikan program insentif dan kebijakan kepada para pelaku bisnis pariwisata sekaligus mempromosikan kepada masyarakat untuk boleh dan aman dalam berwisata dengan tetap melakukan berbagai macam protokol kesehatan. Kemeparekraf sendiri sudah menetapkan lima destinasi super prioritas yang ingin dipercepat pengembangannya yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara (Bima et al., 2020). Kelima destinasi wisata ini juga dapat digunakan sebagai tema-tema yang diangkat dalam program PKN. Tim konseptor konten nasional dapat merancang sebuah desain karakter atau maskot berbasis tradisi dan budaya di beberapa lokasi pariwisata unggulan tersebut untuk kemudian diangkat dalam bentuk cerita dalam bentuk animasi. Jika program ini dilaksanakan maka akan lebih banyak lagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan manfaat dari program PKN berbasis daerah wisata seperti pengusaha hotel, kuliner, fesyen, dan UMKM yang menyediakan oleh-oleh untuk para wisatawan.

Studi kasus yang dapat dijadikan sebagai *benchmark* pada produksi animasi berbasis karakter pada sebuah daerah atau lokasi wisata terdapat pada keberhasilan karakter Kumamon di Prefektur Kumamoto, Jepang. Tujuan dari dibuatnya karakter ini adalah untuk media komunikasi pemerintah, membentuk citra positif daerah, menarik investor datang berinvestasi, hingga menarik perhatian pengunjung/wisatawan dengan mempromosikan budaya lokal, sejarah hingga sebuah produk tertentu di kota tersebut (Isomura et al., 2015). Pada aspek ekonomi penggunaan karakter Kumamon pada tahun 2019 lalu adalah mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 21,7 triliun dari berbagai produk yang menggunakan lisensi dari karakter Kumamon ini. Selain itu pada aspek pariwisata terdapat peningkatan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kota Kumamoto hanya untuk membeli produk-produk turunan dari Kumamon dan mengikuti berbagai macam festival yang diadakan di kota Kumamoto (Soltani et al.,

2019). Sehingga dari studi kasus ini tim konten PKN dapat merumuskan sebuah konsep pengembangan IP berbasis karakter sebagai media promosi pariwisata daerah yang sedari awal tidak ditujukan untuk kegiatan komersial. Karakter-karakter tersebut diciptakan sebagai jembatan untuk mengomunikasikan berbagai hal dari pemerintah/lembaga kepada publik secara umum. Jika terdapat dampak komersial yang dihasilkan dari adanya karakter-karakter tersebut itu adalah efek berantai dari dibukanya akses maskot tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara komersial dan nonkomersial dalam bentuk *public domain*. Artinya pemerintah/lembaga bisa saja tidak mendapatkan hak komersial dari maskot-maskot tersebut, namun ikut membantu masyarakat untuk mendapatkan hasil komersial dan perdagangan dengan menempelkan karakter/maskot daerah mereka di berbagai produk atau lokasi.

### **Strategi Kebijakan Pengembangan IP Animasi**

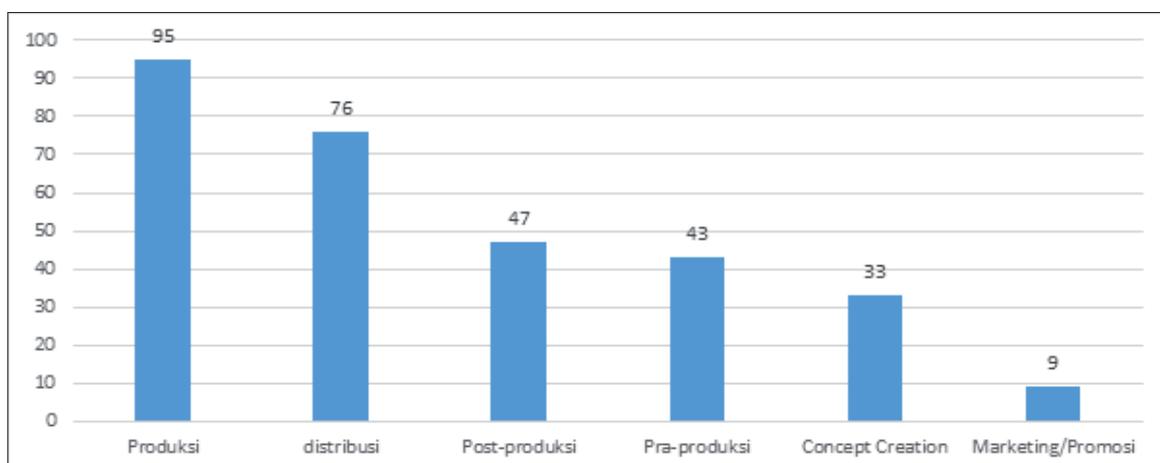
Salah satu contoh kasus terbaik bagaimana peran pemerintah memiliki imbas yang besar terhadap pertumbuhan sektor animasi di sebuah negara terdapat pada Malaysia. Pemerintah Malaysia sendiri sejak awal tahun 2000an sudah membuat fondasi untuk pertumbuhan sektor kreatif yang salah satunya adalah sektor animasi lokal mereka (Barker & Yuen Beng, 2017) *the creative industries have become a policy focus area for the Malaysian government in line with Wawasan 2020 (Vision 2020*. Mereka memberikan sebuah *grant* bagi berbagai produk-produk kreatif seperti game, aplikasi, film, dan animasi. Salah satu judul animasi yang mendapat bantuan dari pemerintah Malaysia adalah serial animasi Upin-Ipin. Hasil yang terjadi kemudian adalah pada 2007 Upin-Ipin mulai tayang reguler di Malaysia dan 2008 sudah mulai tayang dan *booming* di Indonesia dan di regional Asia Tenggara (Rahmi et al., 2018). Kesuksesan Upin-Ipin ini melecut pelaku animasi lain di Malaysia untuk membuat IP-IP baru, seperti Boboiboy, Ejen Ali, dan Bola Kampung. Dukungan tidak hanya berada pada aspek finansial saja namun pemerintah Malaysia memberikan dukungan lain pada proses distribusi

dan *marketing* produk-produk IP lokal tersebut ke luar negeri.

Di Indonesia sendiri masih belum banyak studio animasi yang berhasil secara utuh memproduksi IP mereka secara konsisten kecuali dengan kekuatan modal yang kuat di belakangnya. Memang terdapat studi kasus IP Si Juki yang sukses menjadi film animasi lokal terbanyak ditonton di Indonesia. Namun perlu dicatat IP Si Juki pada awalnya lahir dari komik bukan dari media animasi (Kurniawan, 2020). Padahal dari 120 studio yang sudah di survei sebelumnya kebanyakan masih didominasi oleh studio animasi di kelas UMKM dan UKM saja. Studio animasi yang masuk dalam kategori studio besar dengan lebih dari 100 karyawan itu hanya 10-15 persen saja, artinya 80 persen lebih studio animasi lokal Indonesia masih berada di kelas menengah ke bawah. Untungnya dalam membuat sebuah IP yang bagus tidak tergantung pada apakah studio itu besar atau tidak, namun lebih bergantung pada seberapa kreatif mereka membuat sebuah karakter dan cerita yang lucu (Rudawan, 2017) komponen teknis dan komponen kansei (emosi). Sehingga persaingan antarstudio menjadi relatif berimbang mengingat modal utama yang diperlukan hanya kreativitas saja (Li & Yi, 2019). Jika program PKN diprioritaskan untuk solusi jangka pendek pada aspek jasa service animasi, maka pada aspek pengembangan *intellectual property* (IP) berbasis karakter diperlukan sebuah skema bantuan dana kerja

yang diberikan pada kegiatan produksi konten animasi (*IP Development*). Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan sebelumnya yang menginginkan adanya intervensi dari pemerintah dalam bentuk memberikan bantuan dana kerja untuk meminimalisasi dampak pandemi di industri animasi Indonesia pada tahap pengembangan karya IP berbasis karakter pada animasi (Gambar 2).

Untuk itu pada kesempatan ini kami mengusulkan adanya skema bantuan pendanaan dari pemerintah untuk IP-IP berbasis karakter animasi yang memiliki potensi komersial dalam program *Indonesia Creative Content Grant* (ICCG). Program ICCG ini merupakan inisiatif pendanaan yang diberikan oleh pemerintah RI (*Government Development Fund*) yang bertujuan untuk membantu sektor animasi Indonesia dalam *developing, production, co-production, distributing* dan *marketing* produk IP animasi berbasis karakter. Program ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh komite/konsorsium yang terdiri dari gabungan elemen pentahelix yang mencakup kolaborasi antar kementerian yang terkait dengan sektor animasi (Kemenperin, Kemenparekraf, Kemenperindag, Kemdikbud, dll), industri swasta dan industri kreatif yang terkait dengan animasi (*game, komik, toys, merchandise, film, percetakan, penulis, dll*), pihak akademisi/pendidikan, pemilik media (TV, OTT, media massa lainnya), komunitas animasi, asosiasi animasi (AINAKI), serta pihak



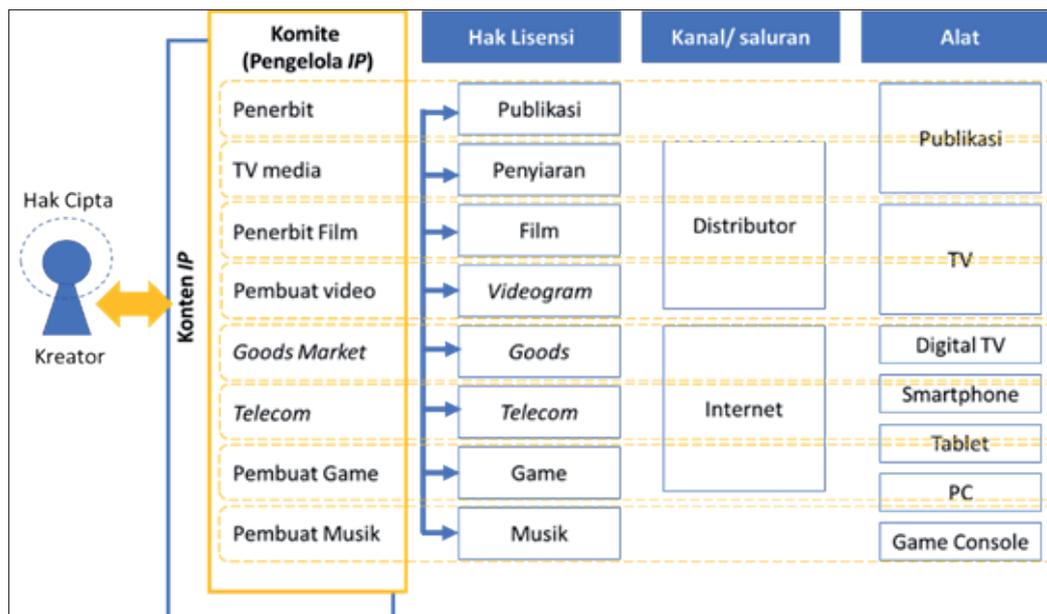
**Gambar 2.** Kebutuhan pendanaan IP yang dibutuhkan oleh 120 studio animasi Indonesia (Wilson et al., 2020)

perbankan (bank, investor). Tujuan dari adanya komite/konsorsium ini adalah pertama untuk memastikan agar proses produksi IP dari hulu ke hilir dapat dilakukan dengan maksimal; kedua untuk memastikan agar komunikasi ekosistem antarsektor yang terkait dengan animasi dapat berjalan secara optimal; ketiga dengan adanya kolaborasi ini memungkinkan untuk dapat menjaga kualitas hasil produksi IP lokal agar layak untuk dijual dalam skala global.

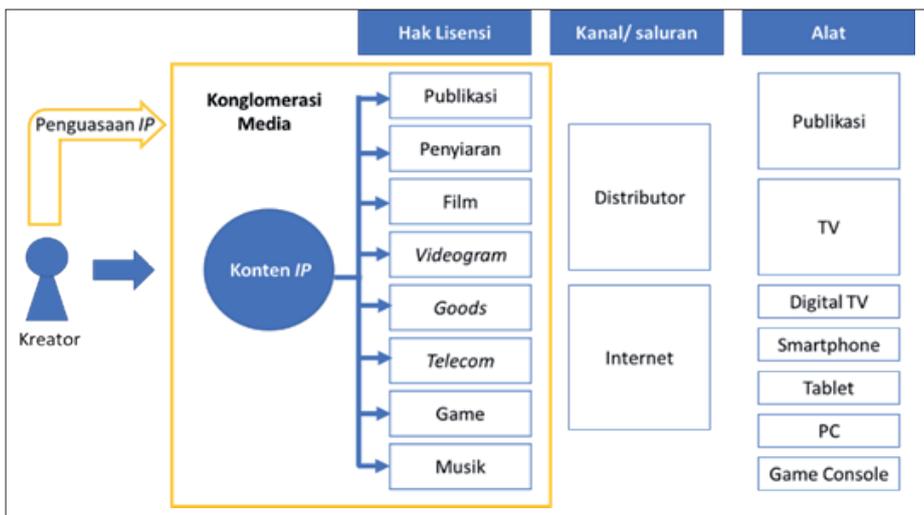
Konsep adanya konsorsium ini merujuk pada skema pendanaan animasi yang ada di Jepang. Di Jepang sendiri sebuah karya animasi tidak didanai oleh satu pihak saja, namun terdiri dari komite pemegang lisensi yang memiliki kepentingan terhadap IP animasi tersebut dari hulu hingga hilir (Yamamoto, 2007). Sehingga dengan adanya konsep ini investasi, pendanaan dan proses perencanaan pengembangan IP animasi dibebankan dan ditanggung bersama oleh para komite. Komite pemegang lisensi ini terdiri dari pelaku industri penerbitan, televisi, distributor film, industri *game*, industri musik, industri pembuat *merchandise*, dan industri terkait lainnya akan mengelola produksi IP secara bersama-sama dan akan mendistribusikan pengalaman terkait produk animasi yang dibuat melalui media-media yang mereka miliki termasuk dalam pendistribusian ke luar negeri.

Konsep inilah yang kemudian disebut dengan strategi *Mix-Media* di mana animasi menjadi produk promosi yang digunakan bersama untuk mendorong konsumsi atas produk-produk lisensi lainnya.

Apa yang terjadi di Jepang sangat bertolak belakang dengan konsep pengembangan IP animasi di Amerika yang cenderung didanai oleh korporasi besar yang memiliki jaringan tersendiri seperti Disney sejak lama (Forgacs, 1992). Konsep konglomerasi IP ini akan sangat cocok jika pemilik IP memiliki modal yang sangat besar dan juga jaringan distribusi global yang solid melalui berbagai kanal media seperti televisi maupun kanal internet dan OTT (Yudoprakoso, 2019). Sehingga sering kita lihat dalam produksi film atau serial animasi di Amerika Serikat suatu konglomerasi media, seperti Disney atau Dream Works menguasai IP dan berinvestasi dalam produksinya. Kemudian selain berinvestasi, konglomerasi media juga menggunakan kanal distribusi global yang dimilikinya untuk memastikan film atau serial animasi yang diproduksi dapat ditayangkan di berbagai negara. Jika film atau serial animasi ini sukses, konglomerasi media sebagai pemilik IP dapat menikmati pendapatan yang besar tidak hanya dari tayangan animasi tetapi juga dari lisensi penjualan produk-produk turunannya.



Gambar 3. Model strategi Mix-Media di Jepang.

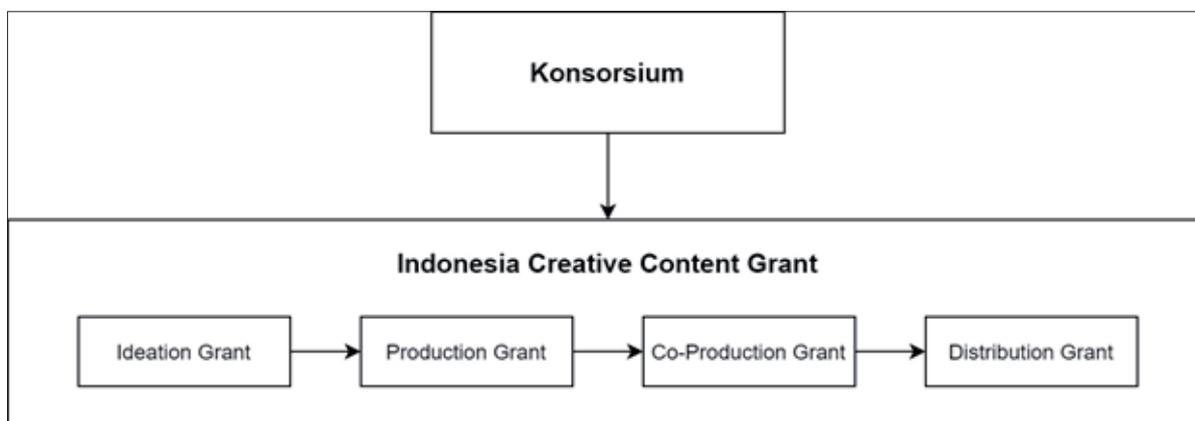


Gambar 4. Model Strategi Transmedia di Amerika

Model strategi *Transmedia* dan distribusi skala global inilah yang memastikan Amerika Serikat dapat mendominasi pasar animasi global.

Sehingga dari perbandingan di beberapa negara tersebut kami melihat dengan kondisi yang ada di lapangan saat ini strategi Mix-media di Jepang sangat cocok untuk diterapkan pada program ICCG. Hal ini dikarenakan pada proses pengembangan IP yang akan di backup oleh banyak pihak yang memiliki latar belakang dan peran masing-masing dalam perkembangan industri animasi Indonesia. Proses pendanaan IP juga bisa saja tidak hanya ditanggung oleh pemerintah saja namun juga dapat dilakukan sharing pendanaan oleh pihak-pihak lain yang memiliki ketertarikan dan ingin ikut berkontribusi pada pengembangan IP tersebut. Sehingga dengan konsep gotong-royong ini diharapkan secara perlahan-lahan terbentuk hubungan yang

saling menguatkan antar masing-masing klaster di dalam ekosistem industri animasi Indonesia. Terdapat 3 tujuan utama dalam program ini yaitu: (1) Menciptakan dan mengembangkan ekosistem yang berkelanjutan untuk menciptakan kestabilan dalam penciptaan lapangan kerja, perencanaan bisnis, dan perluasan pasar IP lokal Indonesia. (2) Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang kreatif, teknis animasi dengan memanfaatkan jaringan dengan mitra internasional. (3) Menciptakan dan meningkatkan IP berbasis budaya lokal Indonesia yang dimiliki oleh SDM kreatif dari Indonesia. Dengan adanya pendanaan ini diharapkan dapat berlangsung minimal 5 tahun dan dengan terus menerus melakukan perbaikan dalam berbagai hal seperti skema pendanaan, aturan main, dan peningkatan kolaborasi antarpihak lokal dengan stakeholder dari luar negeri.



Gambar 5. Skema pendanaan IP berbasis karakter Indonesia Creative Content Grant (ICCG).

Berdasarkan survei yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa tahap produksi dan distribusi merupakan tahap pendanaan yang paling dibutuhkan oleh studio animasi lokal. Jika kita merujuk pada pipeline kerja dari proses produksi animasi maka tahap produksi merupakan tahap inti dari proses pengembangan produk animasi, sedangkan tahap distribusi adalah tahap disaat hasil produksi tersebut butuh untuk disalurkan kepada pihak pembeli. Sehingga dalam skema pendanaan ini setiap studio tidak dapat menerima dana untuk seluruh kebutuhan penciptaan IP mereka. Mereka hanya mendapatkan pendanaan sesuai dengan tahap di mana pengembangan IP mereka saat itu berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak konsorsium. Contoh jika sebuah studio masih pada tahap ideation seperti pada gambar di atas maka studio tersebut hanya mendapatkan bantuan dana pada tahap itu juga. Untuk menuju ke proses pendanaan pada sebuah prototipe maka studio tersebut haruslah menunjukkan adanya bukti bahwa mereka memiliki pitch bible yang lengkap sesuai dengan yang sudah distandarkan pada tahapan ideation. Untuk studio yang ingin mendapatkan bantuan pada tahap distribusi dan marketing maka studio tersebut harus memiliki setidaknya beberapa episode serial animasi IP mereka. Artinya di setiap jenjang pendanaan memiliki kriteria tertentu yang menjamin kualitas yang terstandar dengan baik. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antarpihak di dalam konsorsium agar kualitas yang dibuat oleh studio penerima bantuan dana tersebut sesuai dengan standar yang ada di tingkat global.

Ideation Grant, adalah tahapan awal yang memiliki fokus pada tahapan pengembangan sebuah proyek IP, seperti tahap pengembangan ide awal, desain karakter & world building, riset pasar/audience/pesaing, dan analisis pemasaran, hingga pembuatan teaser awal (Musburger, 2018). Sehingga pada tahap ideation ini merupakan fondasi utama apakah proyek IP ini layak untuk didanai pada tahap selanjutnya atau tidak. Untuk tahap ini setidaknya minimal berdurasi antara 6–8 bulan dari proses perancangan awal hingga setidaknya menghasilkan teaser minimal berdurasi 45 detik. Lingkup dari tahap ideation ini dapat berupa R&D on concept, storyline,

pre-development; Script development; Concept development; Cost of production; Character and environment development; Business model Canvasses; marketing & distribution planning; teaser clip; dan kegiatan lain yang masih relevan dengan tahap pengembangan awal IP. Hasil akhir yang diharapkan dalam tahap ini adalah pitch bible yang siap untuk dipresentasikan kepada konsorsium atau investor.

Production Grant, adalah tahap kedua dari skema insentif yang memiliki fokus pada aspek produksi IP animasi. Pada tahap ini juga akan memberikan kesempatan bagi studio yang sudah mendapatkan insentif pada tahap ideation untuk melanjutkan ke tahap produksi. Bagi studio yang tidak mengikuti tahap ideation namun sudah memiliki output minimal yang ada tahap ideation dapat mengikuti tahap production grant ini setelah melalui proses kurasi yang dilakukan oleh konsorsium. Karena IP yang akan di produksi minimal sudah memiliki data yang jelas terkait seberapa besar target market audience mereka, ke mana proses distribusinya, hingga seberapa besar proses validasi pasarnya. Durasi pemberian dana pada tahap ini dapat dilakukan maksimal hingga dua tahun. Hasil akhir dari tahap ini adalah produk animasi dalam bentuk serial atau feature sekali tamat.

Co-Production Grant, berbeda dengan production grant di atas, co-production grant di khususkan untuk pendanaan IP animasi yang dikerjakan oleh minimal dua atau lebih. Kegiatan kolaborasi produksi ini bisa dilakukan oleh antarstudio lokal Indonesia atau studio lokal dengan studio dari luar negeri. Setiap kegiatan kolaborasi produksi dikerjakan dengan perjanjian yang sudah jelas sebelumnya seperti pembagian untung, image rights, tanggung jawab, daftar kebutuhan yang diperlukan, dan timeline pekerjaan. Durasi pemberian dana pada tahap ini dapat dilakukan maksimal hingga dua tahun. Distribution Grant, pada tahap akhir ini merupakan tahap pendanaan hasil produksi IP yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya siap untuk diekspor ke luar negeri, siap untuk ditayangkan di TV/OTT atau siap untuk dipasarkan ke pasar lisensi. Pada tahap ini mencakup pendaftaran merek IP di dalam dan luar negeri, pembuatan

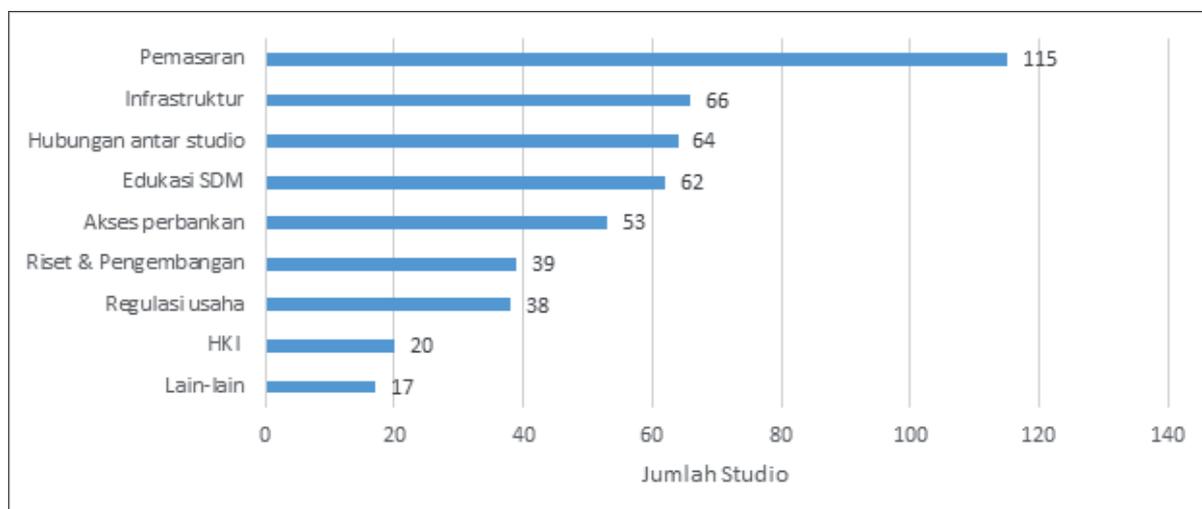
style guide untuk kebutuhan marketing, kunjungan dan keikutsertaan pada event licensing luar negeri, B2B meeting dengan investor/buyer, pengembangan IP ke produk turunan lainnya, TV airtime cost, acara launching IP, dan kegiatan promosi/marketing lainnya. Durasi dari tahap ini dapat dimungkinkan hingga waktu 12 bulan.

### Strategi Kebijakan Berjenjang dan Berkesinambungan

Di samping program-program yang berorientasi pada proses produksi strategi pengembangan industri animasi juga perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan lain untuk mengatasi berbagai macam kendala yang dirasakan oleh para pelaku industri animasi Indonesia. Hasil survei 120 studio animasi memperlihatkan terdapat sembilan variabel utama kendala utama yang dihadapi yaitu aspek pemasaran produk di dalam dan luar negeri, kebutuhan akan infrastruktur fisik dan TIK, hubungan antarstudio animasi dan sektor lain yang berada di dalam ekosistem industri animasi Indonesia, edukasi SDM, akses kredit pada lembaga perbankan, riset dan pengembangan, regulasi usaha, proses pengurusan dan pelanggaran terhadap HKI, dan lain-lain seperti edukasi market, investasi, kurangnya acara trade show atau licencing show bidang animasi di Indonesia. Oleh karena itu, dari kendala-kendala tersebut dapat direkomendasikan beberapa strategi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai berikut:

Indonesia Animation Pitching Forum, yang merupakan acara pemasaran intellectual property (IP) berbasis karakter (animasi, game, komik, ilustrasi) yang dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholder terkait. Acara ini dapat berupa pameran konten IP, pitching forum, licensing expo, festival, hingga B2B networking event. Dengan adanya peningkatan kebutuhan konsumsi hiburan pada pandemi (Sunitha, 2020), pihak industri bersama pemerintah dapat bertemu sama dengan pihak penyedia platform OTT seperti Viu, Goplay, Netflix, HBO Max dan Disney Hotstar untuk dapat mendistribusikan hasil produksi animasi lokal di platform tersebut.

Indonesia Animation Production Facilities, yang merupakan fasilitas produksi animasi berstandar internasional yang dibangun untuk dijadikan pusat produksi, inkubasi, dan fasilitasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri animasi Indonesia. Di dalamnya tidak hanya bangunan khusus yang dapat digunakan sebagai co-working space, pengembangan start-up animasi dan tempat produksi animasi namun juga memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK seperti hardware (komputer, render-farm, koneksi internet broadband) dan fasilitas penggunaan software animasi legal. Konsep pengembangan fasilitas infrastruktur produksi animasi ini dapat diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Singosari yang memiliki fokus pada ekonomi digital (KEK,



Gambar 6. Kendala dalam menjalankan usaha animasi di Indonesia (Sumber: Diolah)

2019) atau Technopark yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif daerah. Beberapa kota yang dapat dijadikan sebagai lokasi pengembangan kawasan khusus tersebut terdapat di kota Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Malang untuk daerah di Pulau Jawa, dan Kota Padang, Batam, Bali dan Makassar untuk di luar Pulau Jawa (Wikayanto, 2017).

Indonesia Animation & Content Research Facilities, adalah fasilitasi terhadap kebutuhan pendataan, pengembangan dan riset yang mendalam di bidang animasi dari hulu hingga hilir. Pada aspek ini pemerintah dan pihak industri dapat bekerja sama dengan para akademisi untuk bersama-sama melakukan kegiatan kajian dan penelitian yang dibutuhkan pada aspek kreasi konten, teknologi, dan psikologi market.

Tax Incentive, merupakan salah satu strategi jangka pendek yang dibutuhkan oleh para pelaku industri animasi selama pandemi khususnya bagi studio animasi yang banyak mendapatkan pembatalan dan penundaan pekerjaan. Berbeda dengan tax relief yang memberikan keringanan akan keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, tax incentive dapat berupa sebuah pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan pajak, kredit pajak, tarif pajak khusus, hingga kewajiban pajak yang ditanggihkan (Zolt, 2013). Pemerintah sudah mengatur kebijakan insentif pajak pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak wabah Virus Corona yang efektif berlaku mulai April 2020 dan diperpanjang untuk periode ke-dua pada PMK-44/PMK.03/2020 (Dewantari, 2021). Kebijakan pemberian insentif ini meliputi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh Pasal 22, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, dan Pengembalian Pendahuluan PPN. Ini merupakan salah satu langkah agar studio animasi tidak terlalu dibebani oleh pembayaran pajak akibat dari adanya pandemi yang pada saat sebelum pandemi pemilik studio animasi mendapatkan pajak berlapis sehingga sulit untuk bersaing dengan harga produksi animasi di luar negeri. Dengan adanya insentif pajak ini diharapkan juga

dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional dari masuknya investasi asing ke dalam negeri pada bidang animasi (Putri, 2017).

Metode ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mempromosikan investasi di negaranya melalui pengurangan tarif pajak, memberikan tax holiday. Contoh penerapan kebijakan ini adalah implementasi tax credit dan subsidi apabila ada judul animasi dari luar negeri yang diserap/diproduksi di dalam negeri Malaysia dan melibatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proporsi yang besar (Barker & Yuen Beng, 2017). Dengan adanya insentif tersebut produser animasi dari luar negeri mendapatkan harga yang produksi yang bersaing dan lebih murah jika melakukan kerja sama produksi animasi di Malaysia.

Sementara itu para pelaku animasi Malaysia mendapatkan pengalaman untuk mengerjakan proyek animasi global sekaligus mengumpulkan portofolio perusahaan. Dan bagi pemerintah Malaysia dengan adanya kebijakan tersebut ikut membantu kreator animasi lokal mereka untuk tumbuh sekaligus membuka lapangan kerja di negara mereka. Hal lain yang tidak bisa dihindarkan adalah munculnya nama negara Malaysia di bagian akhir credit title animasi yang dapat digunakan sebagai bagian soft power Malaysia ke dalam industri hiburan di tingkat global.

Deglobalization dan proteksi pasar animasi dalam negeri. Salah satu dampak terbesar adanya pandemi ini adalah terganggunya mata rantai pasok proses produksi barang dan jasa pada tingkat global yang menimbulkan adanya fenomena disrupsi globalisasi atau dapat disebut dengan deglobalisasi (Abdal & Ferreira, 2021; Bieber, 2020). Negara-negara yang terdampak Covid-19 fokus untuk membenahi dampak ekonominya masing-masing yang terkapar selama pandemi berlangsung dengan mengurangi impor dan memperbanyak penggunaan komponen dalam negeri. Dengan begitu akan mengurangi ketergantungan impor pada masa pandemi, membuka lapangan kerja, gerbang investasi, memperkuat industri dalam negeri, serta meningkatkan daya beli dan perdagangan nasional.

Pada industri hiburan seperti film dan animasi dengan adanya fenomena deglobalisasi ini seharusnya dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk keluar dari ketergantungan akan impor tayangan film dan animasi. Karena dengan adanya pandemi ini seharusnya kita lebih memprioritaskan produksi tayangan animasi dari dalam negeri dibandingkan produksi luar negeri. Langkah ini bisa dimulai dengan melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor (Selvi & Ramdhan, 2020) terhadap judul-judul film dan serial animasi yang diimpor dari luar negeri dan PPh Pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang pemungutan pajak penghasilan atas royalti film impor (Aditya, 2011). Fungsi utama pajak adalah sebagai budgetair dan regulerend (Putri, 2017). Dalam hal ini fungsi regulerend juga dapat berfungsi agar film animasi nasional bisa bersaing dengan film impor dengan memungut pajak penghasilan atas royalti yang didapatkan film impor saat dipasarkan di Indonesia.

Langkah kedua yang bisa dilakukan dalam usaha proteksi pasar dalam negeri adalah membuat program pembatasan akan konten-konten hiburan seperti film dan serial animasi produksi dari luar negeri yang tayang di TV free to air dan TV berbayar di Indonesia. Ini menjadi penting untuk segera direalisasikan tidak hanya pada industri film saja, namun juga pada industri animasi lokal mengingat impor tayangan animasi di Indonesia sangatlah besar (Bekraf-IKJ, 2016). Data yang memperkuat argumen ini adalah sepanjang tahun 2018 serial animasi luar negeri mendominasi penayangan serial animasi anak-anak di stasiun TV free to air dengan persentase sebesar 80,4 persen dan serial animasi buatan studio dalam negeri hanya mendapatkan porsi sebesar 19,6 persen saja (Wikayanto, 2019). Angka ini belum termasuk serial animasi luar negeri yang tayang di berbagai channel di TV berbayar seperti Disney Channel, Nickelodeon, dan Cartoon Network yang sepenuhnya berisi serial animasi dari luar negeri yang masuk tanpa adanya pemungutan pajak di setiap judul yang tayang di Indonesia. Dengan adanya deglobalisasi diharapkan dapat mendorong memperbanyak produksi animasi lokal pada kanal-kanal mainstream di Indonesia, memperketat penayangan konten-konten luar negeri, dan sekaligus di saat yang sama merupakan

kesempatan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada pada kualitas dan kuantitas produksi animasi lokal dengan internasional.

Proteksi industri hiburan dalam negeri pada sektor film atau animasi sejatinya juga pernah diterapkan oleh beberapa negara lain seperti India dan Malaysia. Kepopuleran Bollywood yang juga merupakan penanda budaya India di mata dunia tidak lahir dalam waktu yang singkat. Bollywood lahir dari penerapan konsep Swadeshi pada bidang industri hiburan demi identitas bangsa dan negara India (Fitrie, 2017). Swadeshi sendiri merupakan gerakan anti-imperialisme di segala bidang (Trivedi, 2003) dan salah satunya adalah sektor industri hiburan. Untuk mewujudkan proyek nasional itu pada tahun 1980 Dewan Nasional Film India (NFDC) melakukan tiga macam hal yaitu: membatasi dengan ketat keran impor film dari luar negeri, menekan harga tiket bioskop, memberikan pendanaan kepada sineas-sineas muda India untuk dapat mengembangkan film-film produksi lokal (Ganti, 2013). Pada tahun-tahun tersebut para sineas di India mampu mengeluarkan rata-rata 800 judul setiap tahunnya, dan disaat yang sama pemerintah India hanya membatasi impor judul film luar negeri tidak lebih dari 100 judul setiap tahunnya. Dukungan kepada industri animasi dalam negeri juga pernah dilakukan oleh Multimedia Development Corporation (MDEC) Malaysia untuk mempercepat daya saing industri animasi Malaysia di tingkat global. Langkah-langkah yang dilakukan adalah memberikan pendanaan pada sektor animasi lokal Malaysia (Creative Industry Fund) pada tahun 2010 hingga saat ini, mewajibkan stasiun televisi di Malaysia untuk menayangkan judul-judul animasi lokal Malaysia pada waktu-waktu tertentu, mengadakan berbagai macam lomba animasi, memberikan tax insentive kepada proyek animasi luar negeri yang diproduksi di Malaysia, hingga secara reguler mempertemukan kreator animasi lokal dengan pihak pembeli dari luar negeri baik itu dari distributor, investor, dan pemilik media broadcast (Barker & Yuen Beng, 2017; Furusato, 2018; Harris et al., 2012; Kamarudin & Sajilan, 2013).

Berdasarkan studi kasus di atas Pemerintah Indonesia dapat belajar bahwa dukungan dan proteksi kepada industri animasi lokal dapat berupa banyak hal. Namun pada intinya apa yang dilakukan oleh pemerintah negara India dan Malaysia adalah usaha untuk memberikan dukungan penuh kepada sektor film dan animasi lokal mereka untuk dapat tampil dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan produksi film dan animasi dari luar negeri. Fajar Nuswantoro mengatakan bahwa terdapat beberapa masalah utama yang menjadi hambatan terbesar bagi studio animasi lokal untuk dapat sejajar dengan studio animasi dari luar negeri, salah satunya adalah kurangnya kesempatan studio animasi lokal untuk mendapatkan slot tayang di TV nasional yang masih sedikit dan dimonopoli oleh para Production House sinetron besar, dan peluang yang kecil untuk dapat tayang di layar bioskop di Indonesia akibat kalah bersaing dengan film impor (Bekraf-IKJ, 2016). Masalah slot animasi lokal untuk dapat tayang di stasiun televisi nasional sudah pernah dinegosiasikan pada saat Kementerian Parekraf dipimpin oleh Marie Elka Pangestu, namun pihak televisi menolak untuk memberikan slot jam tayang tersebut dengan dalih urusan rating dan bisnis. Di sini kita bisa melihat bahwa bargaining power pemerintah saat itu sangat lemah di depan pemilik media televisi. Hal ini ditambah dengan mudahnya pihak televisi mendapatkan judul-judul animasi dari luar negeri dibandingkan jika harus membeli judul animasi buatan studio lokal Indonesia yang membuat kesempatan tayang karya animasi lokal menjadi sangat kecil (Yudoprakoso, 2019). Pada saat yang sama kesempatan film Indonesia untuk tayang di bioskop sangat dipengaruhi oleh banyaknya film luar yang diimpor oleh kartel importir film Indonesia dan tayang di jaringan eksibisi bioskop yang dominan dikuasai oleh beberapa perusahaan saja (Elsha, 2017). Kondisi ini menjadi sebuah ironi karena apresiasi terhadap karya film animasi anak bangsa justru dihambat oleh sesama anak bangsa dengan dalih urusan bisnis. Apalagi orientasi pemasaran produk animasi produksi dalam negeri masih cenderung pada pemenuhan demand di pasar domestik dibanding memenuhi kebutuhan global yang sudah penuh sesak dengan supply dari negara-negara maju di bidang animasi

seperti Jepang, Amerika, dan Korea Selatan (Satari et al., 2017).

## PENUTUP

Strategi pemulihan dan percepatan pengembangan industri animasi Indonesia pascapandemi yang direkomendasikan oleh para pelaku industri animasi Indonesia merujuk pada tiga aspek utama yaitu jasa produksi animasi, IP development, dan regulasi usaha. Strategi yang dikembangkan berlandaskan dari kebutuhan para pelaku animasi Indonesia selama pandemi, seperti bagaimana strategi agar para pelaku animasi dapat bertahan selama pandemi (during), bagaimana strategi agar para pelaku animasi dapat bangkit dari dampak pandemi (recovering), dan bagaimana memanfaatkan momen pandemi ini sebagai akselerator dalam mempercepat pertumbuhan dan daya saing animasi Indonesia pada kancah persaingan animasi global (growing). Sejatinnya ketiga hal tersebut merupakan poin-poin yang diharapkan hadir sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap industri animasi lokal sebelum pandemi ini muncul pada 2020. Rentang waktu 65 tahun merupakan waktu yang cukup panjang bagi perkembangan animasi lokal, namun sayangnya dengan dewasanya usia tersebut justru belum membuat kita sebagai pemain utama dan setingkat dengan negara-negara lain yang lebih dahulu maju industri animasinya seperti Jepang dan Amerika. Kekayaan tradisi dan budaya dan kreativitas SDM yang ada di Indonesia menjadi modal utama dalam perkembangan animasi di Indonesia. Namun hal tersebut ternyata tidaklah cukup untuk menggenjot laju pertumbuhan industri animasi Indonesia. Dengan komposisi sebagian besar pelaku industri animasi Indonesia bergantung pada pekerjaan jasa animasi dan sebagian besar pula masih berupa UMKM, maka keberpihakan pemerintah dalam mendorong industri ini masih sangat diperlukan.

Proyek Konten Nasional (PKN) diusulkan bukan hanya untuk menyediakan proyek dan lapangan kerja bagi pekerja animasi, tetapi Juga sekaligus guna mendorong terbentuknya trickle down dan konektivitas industri animasi pada kluster-kluster industri terkait dalam ekosistemnya, termasuk dalam pariwisata. Animasi dalam hal

ini diposisikan sebagai pendorong atau sarana promosi terhadap produk-produk turunan terkait dan juga turut menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait lainnya seperti produksi mainan, fesyen, hingga pariwisata.

Bantuan atau insentif pendanaan dari pemerintah untuk industri animasi Indonesia juga perlu difokuskan pada bantuan dana produksi dan bantuan untuk mengakses pasar yang lebih luas. Dengan skala usaha studio-studio animasi yang sebagian besar tergolong sekelas UMKM, maka dirasa model produksi gotong royong yang diadaptasi dari model Mix-Media Jepang lebih memungkinkan untuk diterapkan. Pembentukan komite produksi yang terdiri atas berbagai pihak yang berinvestasi sebagai sponsor dari berbagai industri terkait diharapkan akan dapat menjadi solusi terhadap pendanaan produksi animasi.

Sementara terkait dengan aspek penasarannya, diharapkan pemerintah memberikan bantuan aktif baik dalam membuka akses ke pasar dalam negeri dan luar negeri. Di saat yang sama, pemerintah juga perlu secara nyata menunjukkan keberpihakan pada industri animasi lokal dengan menyetujui keran impor animasi asing dan mendorong penayangan animasi lokal di berbagai media nasional. Pengetatan kuota impor tayangan animasi asing atau penerapan pajak yang lebih kuat terhadap tayangan animasi asing diharapkan dapat membantu animasi lokal dapat bersaing harga dengan lebih adil di pasar dalam negeri. Di sisi lain, pengetatan kuota tayangan animasi asing diharapkan dapat mendorong industri animasi lokal untuk mengambil porsi yang dominan terhadap permintaan tayangan animasi lokal.

Peran pemerintah dalam penyediaan proyek dan akses kerja, dukungan dalam menggali dana dan membentuk ekosistem produksi animasi, serta keberpihakan pada animasi lokal dan membantu memasarkan animasi lokal ke pasar yang lebih luas inilah yang akan menjadi kunci dalam mengurangi dampak buruk pandemi sekaligus menjadi upaya pengembangan industri animasi Indonesia ke depannya.

## PUSTAKA ACUAN

- Abdal, A., & Ferreira, D. M. (2021). Deglobalization, Globalization, and the Pandemic. *Current Impasses of the Capitalist World-Economy. Journal Of World-Systems Research*, 27(1). <https://doi.org/10.5195/JWSR.1>
- Aditya, D. (2011). Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Royalti Film. Universitas Airlangga.
- Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(2), 68–84. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Psikobuletin/article/view/9616/5058>
- Ahmad, H. A. (2008). A Thesis On Implementation Of Culture And Its Visual Representation In Indonesian Animation. Based On Case Study Of Japanese And Korean Animation. Woosong University.
- Badan Ekonomi Kreatif. (2017). Data Statistik dan Hasil Survei. Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif, 23. <http://www.bekraf.go.id/pustaka/page/data-statistik-dan-hasil-survei-khusus-ekonomi-kreatif>
- Barker, T., & Yuen Beng, L. (2017). Making creative industries policy: The Malaysian case. *Kajian Malaysia*, 35(2), 21–38. <https://doi.org/10.21315/km2017.35.2.2>
- Bekraf-IKJ. (2016). Grand Strategi Sub Sektor Animasi Hasil Penyusunan Grand Strategi Sub Sektor Animasi.
- Bieber, F. (2020). Global Nationalism in Times of the Covid-19 Pandemic. *Nationalities Papers*, 1–13. <https://doi.org/10.1017/nps.2020.35>
- Bima, A. P., Jofari, H. A., & ... (2020). Tantangan Indonesia Dalam Penataan Pariwisata Super Prioritas Dalam Persaingan Global. ... Pemerintahan Di Era ..., 1551–1570. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3560>
- Chen, S., Igan, D., Pierri, N., & Presbitero, A. F. (2020). Tracking the Economic Impact of Covid-19 and Mitigation Policies in Europe and the United States.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dewantari, K. M. (2021). Insentif Pajak Diperpanjang, Manfaatkan Segera! | Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif-pajak-diperpanjang-manfaatkan-segera>
- Elsha, D. D. (2017). Menengok Kelemahan Perfilman Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, 2(2), 230–250.

- Fitrie, R. A. (2017). Imerialisme Budaya Di Televisi (Analsis Wacana Kritis Pada Drama Serial Mahabharata Di Antv). Universitas Airlangga.
- Forgacs, D. (1992). Disney animation and the business of childhood. *Screen*, 33(4), 361–374. <https://doi.org/10.1093/screen/33.4.361>
- Furusato, T. (2018). South East Asia Animation Report 2018. Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd.
- Ganti, T. (2013). *Bollywood: A guidebook to popular Hindi cinema*. Routledge.
- Gunawan, S., & Yupie, K. (2017). Mitigasi risiko aset dan komponen teknologi informasi berdasarkan kerangka kerja OCTAVE dan FMEA pada Universitas Dian Nuswantoro. *Journal of Information System*, 9(2), 513–522.
- Haas, E. J., & Yorio, P. L. (2018). Using Sensemaking Theory to Improve Disaster Risk Management and and Risk Risk Communication : Communication : What Management What Can Can We We. <https://doi.org/10.5772/intechopen.75725>
- Harris, H., Aziz, K. A., & Norhashim, M. (2012). Success strategies of SMEs in the creative sector in Malaysia: A case study of Les Copaque. *International Journal of Management Practice*, 5(3), 287–299. <https://doi.org/10.1504/IJMP.2012.048077>
- Herdiana, D. (2020). Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7, 1. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p01>
- Isomura, K., Suzuki, K., & Tochimoto, K. (2015). The evolution of characters business models in Japan: Duffy, Hello Kitty, and Kumamon. *Strategic Direction*, 31(4), 34–37. <https://doi.org/10.1108/SD-03-2015-0044>
- Kamarudin, H. S., & Sajilan, K. (2013). Critical Success Factors of Technopreneurship in the Creative Industries : A Study of Animation Ventures. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 2(1), 1–37. [http://sibresearch.org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber\\_k13-002\\_1-37.pdf](http://sibresearch.org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber_k13-002_1-37.pdf)
- KEK. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. <https://kek.go.id/kawasan/Singhasari>
- Khan, H., Vasilescu, L. G., & Khan, A. (2008). Disaster management cycle-a theoretical approach. *Journal of Management and Marketing*, 6(1), 43–50.
- Kimhi, S., Marciano, H., Eshel, Y., & Adini, B. (2020). Recovery from the Covid-19 pandemic: Distress and resilience. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 50(June), 101843. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101843>
- Kurniawan, E. (2020a). Animation , New Habit Solution In Creative TV Ads Content to Survive from Endemic Covid-19. The International Conference On Arts, Language, And Culture (Icalc).
- Kurniawan, E. (2020b). Transfer Of Vehicles Si Juki ' S Intellectual Property Rightsfrom Comics To Animation. *International Review of Humanities Studies*, 5(1), 498–510.
- Levy, D. B. (2010). *Animation Development: From Pitch to Production*. Simon and Schuster.
- Li, S., & Yi, S. (2019). Exploring the Influence of IP on Cultural Creative Art Design from the Perspective of Cultural Sociology. 368(Icassee), 630–633. <https://doi.org/10.2991/icassee-19.2019.133>
- Musburger, R. B. (2018). *Animation Production: Documentation and Organization*. CRC Press.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Nielsen Global Media. (2020). The Impact of Covid-19 on Media Consumption Across North Asia. Nielsen, 1–29. <https://www.nielsen.com/apac/en/insights/report/2020/the-impact-of-Covid-19-on-media-consumption-across-north-asia/>
- Nirupama, N. (2013). Disaster risk management. In *Encyclopedia of Earth Sciences Series*. [https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4399-4\\_300](https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4399-4_300)
- Olsberg. (2020). Global Screen Production-The Impact of Film and Television Production on Economic Recovery from Covid-19 (Issue June). *Media Business Insight and Netflix*.
- Pambudi, A. S., Masteriarsa, M. F., Dwifabri, A., Wibowo, C., Amaliyah, I., & Ardana, K. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. *Majalah Media Perencanaan*, 1(1), 1–21.
- Pasek, G., & Adnyana, P. (2018). Animasi sebagai inspirasi pelestarian budaya berkelanjutan. 110–116.
- Putri, W. A. (2017). Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi. *Moneter*, 4 No 2(2), 1–7. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2445>

- Rahmi, N. U. R., Rauf, R., Ilmu, J., Internasional, H., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Hasanuddin, U. (2018). Kartun Upin Dan Ipin Sebagai Instrumen Soft Diplomacy Dalam Hubungan Malaysia - Indonesia.
- Rudawan, R. A. (2017). Model Pengembangan Intellectual Property (IP) Berbasis Transmedia Storytelling. *KOPERTIP: Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika Dan Komputer*, 01(02), 51–58. <http://jurnal.kopertipindonesia.or.id/ojs/index.php/kopertip/article/view/23/10>
- Satari, F., Larasati, T., Putri, S. S., Shintia, I., Pempasa, I., Oktaviani, Y., Ramadhan, P., & Herawan, R. (2017). Indonesia Kreatif Animasi. In Bekraf. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846>
- Shepherd, D. A., & Suddaby, R. (2017). Theory building: A review and integration. *Journal of Management*, 43(1), 59–86.
- Škare, M., Soriano, D. R., & Porada-Rochoń, M. (2021). Impact of Covid-19 on the travel and tourism industry. *Technological Forecasting and Social Change*, 163(April 2020). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120469>
- Soltani, A., Pieters, J., Young, J., & Sun, Z. (2019). Exploring city branding strategies and their impacts on local tourism success, the case study of Kumamoto Prefecture, Japan. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 23(2), 158–169. <https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1410195>
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Alfabeta.
- Sunitha, S. (2020). Covid-19 Conclusion : A Media And Entertainment Sector Perspective In India Covid-19 Conclusion : A Media And Entertainment Sector Perspective In India. *Vichar Manthan*, 8(October), 135–137.
- Suraya, I., Nurmansyah, M. I., Rachmawati, E., Al Aufa, B., & Koire, I. I. (2020). The impact of large-scale social restrictions on the incidence of Covid-19 : A case study of four provinces in Indonesia. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(2), 49–53. <https://doi.org/10.21109/KESMAS.V15I2.3990>
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of Covid-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Trivedi, L. N. (2003). Visually mapping the” nation”: Swadeshi politics in nationalist India, 1920-1930. *The Journal of Asian Studies*, 62(1), 11–41.
- Wikayanto, A. (2017). Analysis Of The Potential Development Of Technopark For Film , Game And Animation Industry In Indonesia. 1st International Conference on Art, Craft, Culture, and Design.
- Wikayanto, A. (2018). Representasi Budaya Dan Identitas Nasional Pada Animasi Indonesia. *Artesh*, December, 0–21.
- Wikayanto, A. (2019). Representasi Budaya Lokal Pada Karya Animasi Indonesia. Periode 2014-2018. Institut Teknologi Bandung.
- Wilson, D. (2020). Sinergi Program Tahun 2021. Kondisi & Rekomendasi Dari Sektor Industri Animasi (No. 1). Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (AINAKI).
- Wilson, D., Wikayanto, A., Kurniawan, B. F. Y. E., & Permana, I. S. (2020). Dampak Covid-19 Pada Industri Animasi Indonesia (Laporan Kajian Animasi). AINAKI.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yamamoto, K. (2007). Agglomeration mechanism of the animation industry in Tokyo: Focus on business-to-business transactions and the labor market. In *Geographical Review of Japan* (Vol. 80, Issue 7). <https://doi.org/10.4157/grj.80.442>
- Yudoprakoso, B. F. (2019). Analisis Daya Saing Nasional: Studi Perbandingan Industri Animasi Indonesia, Jepang, Dan Amerika Serikat. Universitas Gadjah Mada.
- Zolt, E. M. (2013). Tax Incentives and Tax Base Protection Issues. In *Protecting the Tax Base of Developing Countries* (Protecting the Tax Base of Developing Countries, Issue 3).

# WABAH PENYAKIT DARI MASA KE MASA: RESPONS MASYARAKAT DAN PERUBAHAN SOSIAL-BUDAYA

## *Epidemics and Society, from the Black Death to the Present*

Oleh Frank M. Snowden (2019), Yale University Press, London, Inggris,  
512 pages; ISBN 978-0-3001-9221-6

**Anggy Denok Sukmawati**

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
[anggydenoksukmawati@gmail.com](mailto:anggydenoksukmawati@gmail.com)

### PENGANTAR

Manusia telah hidup bersama wabah penyakit sejak dahulu kala. Beberapa wabah penyakit besar yang melanda dunia dalam skala yang besar di antaranya ialah Wabah Cacar yang telah ada sejak abad ke-18, *The Black Death* yang muncul sekitar tahun 1340an dan 1350an, serta Wabah Flu Spanyol pada tahun 1918. Ketiga wabah tersebut adalah beberapa wabah penyakit yang membawa efek sangat masif pada kehidupan masyarakat di dunia dengan angka kematian yang sangat tinggi. Selain menyebabkan kematian dalam jumlah besar, wabah tersebut juga mengubah pola kehidupan manusia di berbagai aspek, seperti pola hidup, pola pikir, serta dinamika kehidupan sehari-hari.

Telah banyak buku yang membahas wabah penyakit. Tiap buku memiliki sudut pandang tertentu, baik dari sudut pandang kesehatan (Ewald, 1994; Lacroix, 2012), antropologi (Keshavjee, 2014; Lynteris, 2020), maupun sejarah (Oldstone, 2010; Cunningham dan Grell, 2000). Buku tulisan Frank M. Snowden, yang ditinjau ini, merupakan salah satu dari banyak buku yang mengangkat topik wabah penyakit di dunia. Satu hal yang membuat buku ini unik dan berbeda dari buku-buku lain adalah buku ini tidak hanya menceritakan sejarah dari berbagai wabah penyakit yang pernah terjadi di dunia,

tetapi juga melihat pola perubahan masyarakat yang terbentuk sesudah kejadian wabah tersebut.

Buku ini terdiri dari dua puluh dua bab. Tiap bab membahas wabah penyakit yang pernah menjangkiti seluruh dunia, termasuk efek sosial, budaya, dan keilmuan dari masing-masing wabah terhadap kehidupan masyarakat dunia. Topik yang diangkat dalam buku ini sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini yang juga sedang dicekam Pandemi Covid-19. Kita bisa mengambil pelajaran dari semua wabah yang pernah terjadi sebelumnya dan—jika memungkinkan—“memprediksi” perubahan sosial-budaya apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia sesudah pandemi ini berakhir suatu saat nanti pada masa depan.

### WABAH PENYAKIT EPIDEMIS DALAM SEJARAH DUNIA

Pada bagian pembukaan buku ini, Snowden secara khusus menyebutkan bahwa dia hanya akan membahas wabah penyakit yang bersifat epidemik berdasar tiga alasan. Pertama, wabah penyakit epidemis menyebabkan rasa cemas dan menyebarkan teror dalam masyarakat. Selain itu, wabah penyakit epidemis ini juga telah tercatat berpengaruh langsung terhadap meningkatnya histeria massal, tingkat religiositas, bahkan praktik mengambinghitamkan seseorang atau sekelompok masyarakat (hlm.2). Wabah penyakit epidemis juga membawa efek buruk pada

sistem pelayanan kesehatan, sistem ekonomi, serta kehidupan manusia secara umum (hlm.2). Kedua, wabah penyakit epidemis ini berpengaruh langsung terhadap sejarah kehidupan manusia di dunia karena sampai saat ini menjadi salah satu penyebab utama kematian dan penderitaan masyarakat di seluruh penjuru dunia (hlm.3). Ketiga, wabah penyakit epidemis akan selalu ada sepanjang masa. Dari waktu ke waktu, akan terus bermunculan wabah penyakit baru yang melanda dunia dan menimbulkan gejala dalam dinamika hidup manusia (hlm.3). Ketiga alasan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Snowden dalam menyeleksi dan memilih wabah penyakit epidemis yang dibahas dalam buku ini. Beberapa wabah penyakit epidemis yang dibahas dalam buku ini adalah Penyakit Pes (Bab II-V, XVI), Kolera (Bab XIII), Cacar (Bab VI-VII), TBC (Bab XIV-XV), Malaria (Bab XVII), Polio (Bab XVIII), Tifus (Bab IX), Disentri (Bab IX), Demam Kuning (Bab VIII), HIV/AIDS (Bab XIX-XX), dan Ebola (Bab XXII). Selain itu, di bagian akhir buku ini juga dipaparkan pula wabah penyakit yang baru-baru ini melanda dunia, seperti SARS (Bab XXII).

Masing-masing wabah penyakit tersebut dijelaskan dengan sangat detail, mulai dari awal kemunculan, proses penyebaran, hingga efek dari penyebaran wabah penyakit tersebut. Meskipun Snowden secara jelas menyebutkan pada bagian pendahuluannya bahwa pendekatan yang dia pilih dalam buku ini adalah pendekatan sejarah, pembaca akan sedikit terkejut melihat detail pembahasan masing-masing wabah penyakit yang juga tidak meninggalkan kenyataan bahwa persebaran wabah penyakit pada dasarnya adalah sebuah peristiwa biologis. Oleh karena itu, Snowden tetap menyertakan deskripsi etiologi, metode penyebaran, serta pergerakan wabah penyakit tersebut di dalam tubuh manusia secara runut dan menyeluruh. Pada satu sisi, hal ini merupakan hal positif karena bisa memberikan informasi yang rinci mengenai wabah penyakit tersebut. Pada sisi lain, pembaca bisa saja menjadi bingung ketika mendapati istilah-istilah seperti *Humoral Medical Philosophy* (hlm.17), *Prophylactic Procedure* (hlm.106), *inoculation* (hlm.104), *Effluvia* (hlm.193), dan lain-lain. Snowden tentu saja memberikan penjelasan

dari istilah-istilah tersebut. Namun, pembaca harus membiasakan diri untuk membaca dan menemukan istilah-istilah sejenis itu di dalam buku ini.

Selain memaparkan wabah penyakit dari sisi biologisnya, Snowden juga memberikan latar belakang geografis dari lokasi penyebarannya. Karena wabah penyakit tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, tetapi juga tersebar di seluruh dunia, pemaparan Snowden pun mencakup kemunculan wabah penyakit di beberapa wilayah, seperti Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari buku ini. Pembahasan yang bersifat global memberikan gambaran yang luas dan sangat membantu pembaca memahami sejarah wabah penyakit, terutama wabah penyakit epidemis dari masa ke masa. Snowden juga memaparkan efek dari masing-masing wabah penyakit terhadap kehidupan manusia, yaitu berubahnya pola hidup dan pola pikir masyarakat. Kemunculan suatu pola hidup baru yang bersifat jangka panjang akibat adanya wabah penyakit merupakan poin utama argumen yang dibangun oleh Snowden dalam buku ini dengan mendeskripsikan adanya empat perubahan utama dari kehidupan manusia pasca-penyebaran wabah.

Pertama, berkembangnya strategi kesehatan publik yang baru. Strategi ini, misalnya, berupa vaksinasi, karantina, pembangunan sanatorium, dan kebijakan perahasiaan identitas penderita. Kedua, tumbuhnya “sejarah intelektual,” yaitu munculnya banyak konsep dan teori baru terkait dengan wabah penyakit yang muncul, misalnya Teori Kuman, Pengobatan Tropis, dan Paradigma Penyakit Biomedis Modern. Hal ini terkait pula dengan munculnya aktor-aktor yang membawa perubahan intelektual tersebut. Ketiga, munculnya respons publik yang bersifat spontan. Respons spontan ini biasanya berupa stigmatisasi dan mengambinghitamkan suatu kelompok, histeria massal, kerusuhan, dan meningkatnya religiositas. Respons-respons tersebut bisa dilihat lebih dalam untuk mengamati masyarakat terdampak dan konstruksi sosialnya. Konstruksi sosial di sini bisa berupa hubungan antarmanusia, prioritas moral dari para pemuka agama dan politikus, hubungan antara manusia dan alam, serta standar

hidup yang berubah pesat jika dibandingkan dengan masa sebelum adanya wabah. Keempat, munculnya wabah penyakit akibat perang. Ada beberapa contoh perang yang melahirkan wabah penyakit, misalnya kemunculan wabah Demam Kuning di Saint Domingue saat Napoleon melakukan penaklukan di sana pada tahun 1802--1803. Contoh lain adalah penaklukan Napoleon terhadap Kerajaan Rusia pada tahun 1812 yang juga membawa serta wabah penyakit disentri dan tifus. Kedua wabah penyakit inilah yang bertanggung jawab “menghabisi” keluarga Kerajaan Rusia dari dalam dan membantu memuluskan jalan Napoleon dalam menguasai daerah tersebut. Hal itu kemudian berpengaruh terhadap perubahan wajah geopolitik dunia.

Argumen yang dibangun oleh Snowden secara utuh tersebut merupakan kelebihan utama dari buku ini. Dari argumen tersebut, terdapat beberapa hal yang sangat terkait dengan keadaan dunia sekarang yang sedang dilanda Pandemi Covid-19. Ada hal-hal yang bisa kita ambil dan pelajari dari pengalaman penanganan wabah penyakit yang terjadi pada masa lalu yang dipaparkan dalam buku ini.

## PELAJARAN DARI WABAH PENYAKIT DI MASA LALU

Mengevaluasi interaksi antara wabah penyakit dan masyarakat pada masa lalu memberikan latar belakang yang diperlukan untuk menghadapi pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat ketika menghadapi SARS, flu burung, dan Ebola baru-baru ini. Apa yang telah kita pelajari sebagai umat manusia dari pengalaman hadirnya wabah penyakit mematikan yang berulang selama empat abad terakhir? Pertanyaan itu kini muncul kembali sebagai pertanyaan utama di masyarakat. Ancaman wabah penyakit ini nyata. Wabah penyakit tidak mengenal waktu dan tempat. Dia bisa muncul kapan saja dan di mana saja—tidak terbatas pada negara-negara miskin dan berkembang saja, bahkan negara maju pun bisa diserang oleh wabah penyakit. Ditambah lagi, perubahan iklim dunia yang ekstrem yang terjadi pada saat ini semakin meningkatkan pula potensi bencana di masa depan. Kemudian, apa pertahanan kita? Faktor apa yang mendorong kerentanan

manusia terhadap wabah penyakit? Seberapa siap kita menghadapi tantangan tersebut? Cara komunitas global menangani masalah-masalah ini merupakan faktor penting dalam menentukan kelangsungan hidup masyarakat kita, dan bahkan mungkin spesies kita.

Pengalaman menghadapi SARS dan Ebola—dua “gladi bersih” besar di abad ini—berfungsi sebagai pengingat serius bahwa pertahanan kesehatan publik dan biomedis kita masih banyak memiliki celah dan mudah rusak. Ciri-ciri utama modernitas, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, sarana transportasi yang cepat, persebaran kota-kota besar dengan infrastruktur perkotaan yang tidak memadai, peperangan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan sosial yang semakin meluas, semakin memperbesar risiko munculnya wabah penyakit lain pada masa mendatang. Sayangnya, tidak satu pun dari ciri-ciri utama modernitas tersebut tampak mereda dalam waktu dekat. Hal ini juga disinggung oleh Berridge, Gorsky, dan Mold (2011) dalam bukunya *Public Health in History*. Pendekatan yang mereka gunakan dalam buku ini sama seperti Snowden, yaitu pendekatan sejarah. Hanya saja, mereka fokus pada satu topik, yaitu kesehatan publik dari masa ke masa. Buku ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan oleh pembaca yang ingin lebih memahami topik kesehatan publik secara khusus.

Pembahasan wabah, selalu dimulai dengan pemeriksaan pengaruhnya terhadap tubuh manusia secara individu dan kemudian beralih ke pengaruhnya terhadap masyarakat luas. Manifestasi klinis dari setiap penyakit sangat penting dalam mengamati respons sosial masyarakat terhadap krisis medis. Snowden dalam buku ini telah melakukan hal tersebut dengan baik. Namun, pembaca bisa juga membaca referensi lain yang memiliki pendekatan sedikit berbeda dari Snowden, yaitu LeMay (2016) dalam bukunya *Global Pandemic Threats: A Reference Handbook*. Sesuai judulnya, buku ini memiliki pemaparan yang sistematis mengenai masalah pandemi global yang terjadi di dunia, kontroversi seputar pandemi itu, serta solusi yang muncul dalam mengatasi pandemi tersebut. Buku ini juga dilengkapi dengan daftar nama tokoh

dan organisasi yang berpengaruh dan terkait erat dalam proses pencarian solusi masalah pandemi. Lebih lanjut, buku ini juga berisi data-data utama seputar pandemi global yang pernah melanda dunia pada masa lalu.

Tema penting terakhir dari buku ini adalah penyakit epidemi bukanlah kejadian acak yang menimpa masyarakat secara tak terduga dan tanpa peringatan. Sebaliknya, setiap masyarakat menghasilkan kerentanan spesifiknya sendiri. Mempelajarinya berarti memahami struktur masyarakat, standar kehidupannya, dan prioritas politiknya. Penyakit epidemik, dalam pengertian itu, selalu menjadi penanda, dan tantangan sejarah medis adalah untuk menguraikan makna yang tertanam di dalamnya.

Setelah membaca buku ini, ada empat pelajaran penting yang bisa diperoleh dari wabah penyakit yang pernah muncul pada masa lalu. **Pertama**, rasa percaya diri yang berlebihan terhadap sistem kesehatan yang ada membuat manusia menjadi kurang waspada terhadap wabah penyakit yang muncul. Tentu saja, kita harus percaya pada para praktisi kesehatan dalam menangani wabah penyakit. Namun, kita juga tidak boleh lengah dan menganggap sistem kesehatan yang ada sudah sempurna. Anggota masyarakat harus bahu-membahu dalam memerangi wabah penyakit dan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman karena wabah penyakit pun akan terus berevolusi.

**Kedua**, berkaitan dengan poin pertama, masyarakat harus menyadari bahwa sistem kesehatan yang ada memiliki banyak “lubang”. Lubang-lubang ini bukan sengaja diciptakan oleh manusia, tetapi lebih berhubungan dengan terbatasnya kemampuan manusia saat ini. Sistem kesehatan kita bisa saja berhasil membasmi penyakit-penyakit tertentu pada saat ini. Namun, dengan adanya perubahan iklim global, perpindahan manusia yang sangat mudah, dan pertumbuhan jumlah manusia yang sangat cepat memberikan kesempatan bagi wabah penyakit baru untuk muncul di kemudian hari—atau bisa saja wabah penyakit lama yang kita kira sudah hilang, bisa muncul kembali suatu saat pada masa depan.

**Ketiga**, terkait dengan poin kedua, wabah penyakit bisa sangat cepat bermutasi dan hal itu mempersulit sistem kesehatan kita dalam mempelajarinya. Kesulitan itu bisa berujung pada lamanya waktu yang dibutuhkan oleh para praktisi kesehatan dalam mencari vaksin untuk melawan wabah penyakit tersebut. Oleh karena itu, langkah pencegahan sangat perlu diterapkan di dalam masyarakat. Ada sebuah pepatah yang sangat terkenal terkait hal itu, yaitu “Mencegah lebih baik daripada mengobati.” Pepatah ini terdengar sepele, tetapi hal tersebut merupakan hal yang benar untuk diterapkan dalam rangka menghadapi wabah penyakit yang terus berkembang.

**Keempat**, penanganan wabah penyakit di sebuah negara selalu berkaitan dengan dinamika politik yang ada di negara tersebut. Penanganan wabah ini bisa dijadikan sebagai alat politik yang digunakan pemegang kekuasaan untuk “mengatur” warga negaranya. Lebih lanjut, penanganan wabah penyakit ini biasanya juga berkaitan erat dengan “pengukuhan” eksistensi dari para elite politik maupun tokoh-tokoh keagamaan.

## PANDANGAN SNOWDEN TENTANG WABAH PENYAKIT COVID-19

Pada bulan April 2020, Roge Karma, wartawan situs berita Vox, melakukan wawancara melalui telepon dengan Frank Snowden dan menanyakan pendapatnya mengenai wabah penyakit Covid-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Snowden menyatakan dalam bukunya ini bahwa wabah penyakit bukanlah kejadian acak yang menimpa masyarakat. Setiap komunitas dalam masyarakat menciptakan kerentanannya masing-masing terhadap serangan wabah penyakit. Dalam wawancara ini, Snowden menjelaskan lebih lanjut dari pernyataannya tersebut. Menurutnya, ada satu alasan utama mengapa masyarakat modern saat ini sudah tidak mudah terjangkit penyakit Kolera seperti di waktu tahun 1800-an dahulu. Alasannya adalah adanya revolusi di bidang sanitasi. Saat ini kita sudah memiliki sistem pembuangan limbah yang bagus, sumber air minum yang bersih, serta produk-produk sanitasi yang beragam. Namun, keadaan ini bukan berarti kita kebal terhadap wabah penyakit lain.

Terkait dengan hal itu, Snowden mengatakan bahwa saat ini kita hidup di dunia modern yang berbeda dari dunia pada masa lalu—dunia globalisasi. Perbedaan ini menciptakan kerentanan yang berbeda pula terhadap wabah penyakit. Globalisasi berkaitan erat dengan laju pertumbuhan jumlah manusia yang tinggi. Dengan populasi dunia mencapai 7,7 miliar orang (UN, 2019), populasi dunia pun menjadi sangat padat. Besarnya jumlah populasi manusia di dunia tersebut berakibat pula terhadap perubahan pola hubungan antara manusia dengan lingkungan. Manusia saat ini sudah terlalu banyak mengeksploitasi lingkungan dan menghancurkan sebagian besar habitat alami hewan. Hal tersebut tidak terjadi pada masa lalu. Akibatnya, muncullah wabah penyakit jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Beberapa contoh wabah penyakit baru yang muncul akibat perubahan pola hubungan manusia dengan lingkungan dan juga hewan misalnya Flu Burung yang menyebar melalui unggas liar, Ebola dan MERS yang menyebar melalui kelelawar, serta wabah penyakit yang menjangkiti dunia saat ini, Covid-19, menyebar melalui pasar basah di Kota Wuhan di China. Kemudian, wabah penyakit tersebut saat ini dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui kemudahan manusia dalam melakukan mobilisasi menggunakan berbagai mode transportasi. Suatu virus akan dengan mudah berpindah tempat dari sebuah negara di Asia ke Eropa karena dibawa oleh orang yang bepergian menggunakan pesawat terbang.

Terkait dengan hal itu, Snowden secara tegas menyatakan bukan globalisasi yang menyebabkan tersebarnya Covid-19 dari sebuah kota di China ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi memang terkait erat dengan penyebaran Covid-19 ini, tetapi bukanlah penyebabnya. Di dunia global saat ini, batas antarnegara menjadi sangat kabur dan seluruh wilayah di dunia merupakan suatu rangkaian yang saling terhubung. Namun, banyak pemimpin dunia yang meniadakan keterhubungan tersebut dan tetap memegang teguh batas-batas wilayah negara. Hal itu terlihat dari munculnya pemimpin dunia yang menuduh negara lain menjadi penyebab muncul dan tersebarnya Covid-19 ini tanpa mau melakukan kerja sama

internasional dalam mencari solusi dari wabah penyakit ini. Pemimpin negara seperti itulah yang menyebabkan penyebaran Covid-19 menjadi semakin tidak terkontrol. Padahal, Covid-19 tidak mengenal batas negara dan menyalahkan salah satu negara tidak akan menghasilkan solusi dalam penanganan wabah penyakit ini.

Snowden juga berharap masyarakat modern saat ini tidak akan terjebak pada hal-hal negatif yang sama yang terjadi di kala munculnya wabah penyakit pada masa lalu. Hal-hal negatif itu antara lain perpecahan, xenofobia, menyalahkan dan menyerang pihak lain, dan sejenisnya. Wabah penyakit ini memang diakui akan menyebabkan munculnya rasa cemas yang besar. Rasa cemas tersebut pada akhirnya menyebabkan munculnya berbagai respons yang tidak biasa di kalangan masyarakat. Alangkah baiknya, masyarakat menyikapi wabah penyakit ini bukan dengan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan, melainkan dengan menggunakan akal pikiran yang sehat untuk bersama-sama menemukan jalan keluar. Dalam perjalanan menemukan jalan keluar dari wabah penyakit ini tentu banyak masalah dan rintangan yang dihadapi. Masyarakat harus kuat menghadapi semua rintangan tersebut. Karena, pada akhirnya, ketika semua anggota masyarakat bisa menemukan jalan keluar dari wabah penyakit ini, akan tercipta masyarakat yang lebih baik dari sekarang.

Lebih lanjut, Snowden memberi contoh sikap positif masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit yang berujung pada perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu Revolusi Sanitasi yang terjadi pada abad ke-19 di Eropa, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Wabah Kolera yang menyerang Eropa kala itu merenggut banyak nyawa manusia. Namun, para dokter kemudian memikirkan solusi dengan tidak hanya melihat gejala penyakit yang menjangkiti masyarakat, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal orang-orang yang terjangkit penyakit tersebut. Observasi tersebut kemudian menghasilkan simpulan bahwa penyakit Kolera muncul karena lingkungan tempat tinggal masyarakat sangat kumuh, tidak teratur, dan terlalu sumpek. Berdasar simpulan itu kemudian diputuskan bahwa perlu adanya gerakan sosial

untuk memperbaiki kondisi tersebut, selain juga terus dilakukan usaha-usaha dalam mencari obat untuk penyakit Kolera. Gerakan sosial inilah yang kemudian memunculkan kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih agar terhindar dari berbagai jenis penyakit.

Pada bagian akhir wawancara, Snowden memberikan pendapatnya mengenai apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat modern pada saat ini dalam menghadapi wabah Covid-19. Hal yang diperlukan pada saat ini adalah pemikiran kolektif dari semua elemen masyarakat untuk mencari jalan keluar terbaik dari wabah ini. Pemikiran kolektif tersebut harus didasari pada pola hubungan kita dengan lingkungan tempat tinggal kita dan kita harus memikirkan ulang mitos yang selama ini kita percayai, yaitu manusia harus terus berkembang biak dan berkembang secara ekonomi. Mitos itulah yang merupakan awal dari ketidakseimbangan pola hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Kita harus memikirkan ulang hal itu sebelum semuanya terlambat dan hal yang tersisa dari bumi ini adalah ruang sempit bagi kita berpijak dan asap kotor yang kita hirup.

### CATATAN AKHIR

Snowden dalam buku *Epidemics and Society* ini memberikan deskripsi lengkap mengenai berbagai wabah penyakit yang pernah terjadi di dunia pada masa lalu. Deskripsi ini tidak hanya mengenai asal-usul kemunculan dan perkembangan wabah penyakitnya, tetapi juga mencakup efek sosial-budaya dari masing-masing wabah penyakit tersebut pada kehidupan manusia. Hal ini bisa kita jadikan acuan dalam menghadapi wabah Covid-19 yang sedang melanda dunia saat ini.

Penjelasan tambahan yang berasal dari hasil wawancara Snowden terkait Covid-19 yang saya masukkan di sini juga memberikan wawasan penting bagi pembaca. Buku ini terbit pada saat yang tepat ketika dunia sedang dilanda wabah penyakit dan menjadi salah satu referensi yang juga penting untuk dibaca oleh masyarakat. Selain itu, ada beberapa buku yang mengangkat topik serupa dengan buku ini dan dapat menambah

wawasan pembaca tentang pandemi, yaitu *The Pandemic Century—A History of Global Contagion from the Spanish Flu to Covid-19* karya Honigsbaum (2020), *Deadliest Enemy: Our War Against Killer Germs* karya Osterholm (2017), dan *Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond* karya Shah (2016).

### PUSTAKA ACUAN

- Berridge, V., Gorsky, M., & Mold, A. (2011). *Public Health in History*. Berkshire: Open University Press.
- Cunningham, A., & Grell, O. P. (2000). *The Four Horsemen of The Apocalypse*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ewald, P. W. (1994). *Evolution of Infectious Disease*. Oxford: Oxford University Press.
- Honigsbaum, M. (2020). *The Pandemic Century: A History of Global Contagion from The Spanish Flu to Covid-19*. Cambridge: Penguin.
- Keshavjee, S. (2014). *Blind Spot, How Neoliberalism Infiltrated Global Health*. Oakland: University of California Press.
- Lacroix, V. (2012). *All About Pandemics, Epidemic of Infectious Disease*. Delhi: University Publication.
- LeMay, M. C. (2016). *Global Pandemic Threats, A Reference Handbook*. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC.
- Lynteris, C. (2020). *Human Extinction and The Pandemic Imaginary*. London and New York: Routledge.
- Oldstone, M. B. A. (2010). *Viruses, Plagues, and History, Past, Present, and Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Osterholm, M. T. (2017). *Deadliest Enemy: Our War Against Killer Germs*. New York: Little, Brown and Company.
- Shah, S. (2016). *Pandemic: Tracking Contagions, from Cholera to Ebola and Beyond*. London: Sarah Crichton Books/Farrar, Straus & Giroux.
- Snowden, F. M. (2019). *Epidemics and Society, from the Black Death to the Present*. London: Yale University Press.
- United Nation. (2019). *World Population Prospects 2019 Highlights*. New York: Department of Economic and Social Affairs Population Division, United Nation.